



WALIKOTA DUMAI
PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2014

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2005-2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KOTA DUMAI,

- Menimbang : a. bahwa Kota Dumai memerlukan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun guna mewujudkan cita-cita dan tujuan yang telah disepakati bersama sehingga penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat di daerah dapat berjalan efisien, efektif dan berkelanjutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025, dinyatakan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025.
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
9. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
10. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
11. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
22. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2008 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 15 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Dumai (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2011 Nomor 3 Seri D);
23. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Dumai Tahun 2009 Nomor 6 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA DUMAI

dan

WALIKOTA KOTA DUMAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2005-2025.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Dumai.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota adalah Walikota Kota Dumai.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Dumai.
5. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah adalah Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah Kota Dumai.

6. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJP Nasional adalah dokumen perencanaan pembangunan Nasional yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005-2025.
7. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah Provinsi adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah Provinsi Riau yang memuat visi, misi dan arah pembangunan untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005-2025.
8. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJP Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun, terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025 yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Riau.
9. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Dumai yang selanjutnya disingkat RPJM Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Kota Dumai yang memuat penjabaran dari visi, misi dan program Walikota untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, dengan berpedoman pada RPJP Daerah.
10. Rencana Kerja Pembangunan Daerah yang selanjutnya disebut RKPD, adalah dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
11. Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra SKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan bagi Satuan Kerja Perangkat Daerah.
12. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.
13. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi.
14. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan.
15. Arah kebijakan adalah pedoman dan gambaran dari pelaksanaan hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan bidang, urusan pemerintahan daerah yang dapat terukur.
16. Sasaran adalah target atau hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
17. Indikator pencapaian adalah alat ukur berupa statistik yang dapat menunjukkan perbandingan, kecenderungan atau perkembangan.

BAB II PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Program Pembangunan Daerah Tahun 2005-2025 dilaksanakan sesuai dengan arahan RPJP Daerah Kota Dumai Tahun 2005-2025.
- (2) Rincian dari Program Pembangunan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam arah kebijakan pembangunan daerah dan tertuang pada Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 3

- (1) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah merupakan dokumen perencanaan pembangunan Daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 20 (dua puluh) tahun ke depan terhitung sejak tahun 2005-2025 dalam bentuk visi, misi dan arah pembangunan.
- (2) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan RPJM Daerah yang memuat Visi, Misi dan Program Walikota.
- (3) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dituangkan dalam tahapan dan skala prioritas, yaitu RPJM Daerah Tahap I Tahun 2005-2010, RPJM Daerah Tahap II Tahun 2011-2015, RPJM Daerah Tahap III Tahun 2016-2020, dan RPJM Daerah Tahap IV Tahun 2021-2025.
- (4) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) selanjutnya dijabarkan dalam RKPD.
- (5) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) digunakan sebagai pedoman untuk menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Pasal 4

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah ini mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2005-2025.

BAB III SISTEMATIKA PENYUSUNAN RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH TAHUN 2005-2025

Pasal 5

Sistematika Pembangunan Jangka Panjang Daerah disusun dengan sistematika sebagai berikut :

- a. BAB I : Pendahuluan;
- b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Kota Dumai;
- c. BAB III : Analisis Isu-Isu Strategis;
- d. BAB IV : Visi dan Misi Kota Dumai;
- e. BAB V : Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; dan
- f. BAB VI : Kaidah Pelaksanaan

Pasal 6

Sistematika sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 dijabarkan lebih lanjut dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan daerah ini.

BAB IV PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 7

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJP Daerah.

- (2) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam rencana pembangunan yang dilakukan melalui kegiatan pemantauan dan pengawasan.
- (3) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya dan memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Dumai.

Ditetapkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2014

WALIKOTA DUMAI,

dto

KHAIRUL ANWAR

Diundangkan di Dumai
pada tanggal 1 September 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA DUMAI,

dto

SAID MUSTAFA

LEMBARAN DAERAH KOTA DUMAI TAHUN 2014 NOMOR 5 SERI E

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA DUMAI
NOMOR 13 TAHUN 2014
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG DAERAH KOTA DUMAI
TAHUN 2005-2025

I. UMUM.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Daerah Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan berjangka waktu 20 (dua puluh) tahun, yang merumuskan visi, misi dan arah pembangunan daerah yang mencerminkan tujuan (cita-cita) pembangunan yang hendak dicapai oleh Kota Dumai dan strategi untuk mencapainya. RPJP Daerah Kota Dumai disusun dengan mengacu kepada RPJP Nasional dan Provinsi Riau.

Dalam pelaksanaannya, RPJP 2005-2025 dibagi menjadi empat tahapan pembangunan, tiap tahapannya dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah. Pentahapan rencana pembangunan daerah disusun dalam masing-masing periode RPJM Daerah sesuai dengan visi, misi dan program Bupati yang dipilih langsung oleh rakyat. RPJM Daerah memuat strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Walikota serta kerangka ekonomi yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh. RPJM Daerah dijabarkan ke dalam rencana tahunan berupa Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang memuat prioritas pembangunan daerah, rancangan kerangka ekonomi makro, serta program Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).

Sesuai dengan penjelasan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang RPJP Nasional Tahun 2005-2025, maka jangka waktu RPJP Daerah mengikuti jangka waktu RPJP Nasional, yaitu Tahun 2005-2025. Namun, periodisasi RPJM Daerah tidak dapat mengikuti periodisasi RPJM Nasional. Hal tersebut karena pemilihan Kepala Daerah (Walikota) tidak dilaksanakan secara bersamaan, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah.

Secara garis besar, Peraturan Daerah tentang RPJP Daerah Kota Dumai 2005-2025 terdiri dari 5 Bab dan 8 Pasal.

II. PASAL DEMI PASAL.

Pasal 1
Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4

RPJP Daerah mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Provinsi Riau agar tercipta keterkaitan antara setiap rencana pembangunan di tingkat daerah berdasarkan kewenangan otonomi yang dimiliki dalam lingkup *platform* pembangunan nasional.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Pengendalian dan evaluasi dilaksanakan oleh masing-masing pimpinan dinas/lembaga Pemerintah Daerah terhadap pengimplementasian arah pembangunan yang ditetapkan dalam RPJP Daerah Tahun 2005-2025. Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah mengumpulkan dan menganalisis hasil pemantauan dan evaluasi dari masing-masing pimpinan dinas/lembaga tersebut. Berdasarkan hasil evaluasi RPJP Daerah, Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah menyusun RPJP Daerah periode berikutnya.

Pasal 8

Cukup jelas.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT karena atas berkat dan hidayah-Nya, sehingga penyusunan dokumen Rencana Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 dapat diselesaikan sesuai ketentuan perundang-undangan.

RPJPD Kota Dumai Tahun 2005-2025 memuat visi, misi dan arah pembangunan daerah Kota Dumai untuk jangka waktu 20 (dua puluh) tahun yang akan menjadi pedoman dalam penyusunan rencana pembangunan 5 (lima) tahunan. Penyusunan RPJPD dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan acuan bagi seluruh stakeholder (pemerintah, dunia usaha dan masyarakat) agar pembangunan daerah Kota Dumai dapat terarah, berkesinambungan serta memiliki arah dan tahapan yang jelas. Sehingga harapan visi daerah menjadi "Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau" di tahun 2025 dapat diwujudkan.

Terima kasih yang tak terhingga diucapkan kepada semua pihak yang telah terlibat dalam merumuskan dokumen RPJPD, akhir kata saya berharap agar seluruh stakeholder dapat meningkatkan partisipasinya dalam pembangunan sesuai dengan perannya masing-masing.

WALIKOTA DUMAI,

H. KHAIRUL ANWAR

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	ix
BAB 1	
PENDAHULUAN	I-1
1.1 Latar Belakang	I-1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	I-2
1.3 Hubungan Antar Dokumen RPJPD dengan Dokumen Rencana Pembangunan Daerah Lainnya	I-6
1.4 Sistematika Penulisan	I-8
1.5 Maksud dan Tujuan	I-8
1.5.1 Maksud	I-8
1.5.2 Tujuan	I-9
BAB 2	
GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA DUMAI	II-1
2.1 ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI	II-1
2.1.1 ASPEK GEOGRAFI	II-1
A. Luas dan Letak Wilayah	II-1
B. Kondisi Topografi	II-3
C. Kondisi Klimatologi	II-4
D. Kondisi Geologi	II-5
E. Kondisi Hidrologi	II-5
F. Pemanfaatan Lahan	II-6
G. Wilayah Rawan Bencana	II-12
2.1.2 ASPEK DEMOGRAFI	II-15
A. Perkembangan Jumlah Penduduk	II-15
B. Kepadatan dan Sebaran Penduduk	II-16
C. Struktur Penduduk	II-18
D. Kondisi IPM Kota Dumai	II-19
2.2 ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-21
2.2.1 FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI	II-21
A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-21
2.2.2 FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT	II-27
A. Pendidikan	II-27
B. Kesehatan	II-32
2.3 ASPEK PELAYANAN UMUM	II-38
2.3.1 FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB	II-38
A. Pendidikan	II-38
B. Kesehatan	II-48
C. Pekerjaan Umum	II-61
D. Perumahan	II-68
E. Penataan Ruang	II-71
F. Perhubungan	II-72
G. Lingkungan Hidup	II-78
H. Kependudukan dan Catatan Sipil.....	II-81

	I.	Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	II-84
	J.	Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera	II-85
	K.	Ketenagakerjaan	II-87
	L.	Koperasi Usaha Kecil dan Menengah.....	II-89
	M.	Penanaman modal	II-91
	N.	Kebudayaan	II-93
	O.	Kepemudaan dan Olahraga	II-94
	P.	Kesatuan Bangsa dan Politik dalam Negeri	II-95
	Q.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-95
	R.	Ketahanan Pangan	II-98
	S.	Statistik	II-98
	T.	Kearsipan	II-99
	U.	Komunikasi dan Informatika	II-99
	V.	Perpustakaan	II-100
2.3.2		FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN	II-103
	A.	Pertanian	II-103
	B.	Kehutanan	II-105
	C.	Energi dan Sumber Daya Mineral	II-106
	D.	Pariwisata	II-106
	E.	Kelautan dan Perikanan	II-107
	F.	Perdagangan	II-109
	G.	Perindustrian	II-110
2.4		ASPEK DAYA SAING DAERAH	II-110
2.4.1		FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH	II-110
	A.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-110
2.4.2		FOKUS FASILITAS WILAYAH/INFRASTRUKTUR	II-111
	A.	Perhubungan	II-111
	B.	Penataan Ruang.....	II-113
	C.	Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian	II-113
	D.	Lingkungan Hidup.....	II-114
	E.	Komunikasi dan Informatika	II-115
2.4.3		FOKUS IKLIM BERINVESTASI.....	II-117
	A.	Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian.....	II-117
2.4.4		SUMBER DAYA MANUSIA.....	II-119
	A.	Ketenagakerjaan	II-119
BAB 3			
		ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS.....	III-1
3.1		IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN.....	III-1
	3.1.1	Sumber Daya Alam, Lingkungan, Dan Bencana.....	III-1
	3.1.2	Sumber Daya Manusia (SDM).....	III-3
	3.1.3	Perekonomian	III-4
	3.1.4	Infrastruktur	III-5
3.2		ISU STRATEGIS.....	III-9
3.3		SKENARIO PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG KOTA DUMAI.....	III-28
	3.3.1	Pengantar.....	III-28
	3.3.2	Dasar Pemikiran Teknis – Substantif	III-28

3.3.3	Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kota Dumai	III-29
3.3.4	Posisi Strategis (yang Dinamis) Kota Dumai dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang.....	III-33
BAB 4		
	VISI MISI KOTA DUMAI	IV-1
4.1	VISI KOTA DUMAI	IV-1
4.2	MISI KOTA DUMAI.....	IV-3
BAB 5		
	SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.....	V-1
5.1	KONSEP MAKRO PEMBANGUNAN KOTA TERSINERGI.....	V-1
5.2	SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNANJANGKA PANJANG.....	V-3
5.3	TAHAPAN DAN PRIORITASPEMBANGUNAN JANGKA PANJANG.....	V-10
BAB 6		
	KAIDAH PELAKSANAAN.....	VI-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.1.1	Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai	II-3
Tabel 2.1.1.2	Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2000-2011	II-4
Tabel 2.1.1.3	Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2000-2011	II-4
Tabel 2.1.1.4	Sungai yang Terdapat di Kota Dumai	II-6
Tabel 2.1.1.5	Banyaknya Kejadian Kabut di Kota Dumai	II-12
Tabel 2.1.1.6	Banyaknya Kejadian Asap di Kota Dumai	II-13
Tabel 2.1.2.1	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2000-2011	II-15
Tabel 2.1.2.2	Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai Tahun 2007-2011 dirinci per Kecamatan	II-16
Tabel 2.1.2.3	Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011	II-17
Tabel 2.1.2.4	Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2011	II-18
Tabel 2.1.2.5	Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2004-2011	II-20
Tabel 2.1.2.6	Kondisi IPM Kota Dumai dan Kabupaten Sekitarnya di Provinsi Riau Tahun 2004 – 2011	II-20
Tabel 2.2.1.1	PDRB Kota Dumai Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan	II-21
Tabel 2.2.1.2	PDRB Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan	II-21
Tabel 2.2.1.3	Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan	II-22
Tabel 2.2.1.4	Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan	II-23
Tabel 2.2.1.5	Pendapatan per Kapita Kota Dumai tahun 2000-2010	II-25
Tabel 2.2.1.6	Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2005-2010	II-26
Tabel 2.2.1.7	Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tahun 2011	II-27
Tabel 2.2.2.1	Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-25
Tabel 2.2.2.2	Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-28
Tabel 2.2.2.3	Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi Yang Ditamatkan Di Kota Dumai Tahun 2007-2010	II-28
Tabel 2.2.2.4	Angka Partisipasi Murni di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-30
Tabel 2.2.2.5	Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-31
Tabel 2.2.2.6	Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-32
Tabel 2.2.2.7	Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-33
Tabel 2.2.2.8	Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-35
Tabel 2.2.2.9	Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai Tahun 2005-2012	II-36
Tabel 2.3.1.1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-38
Tabel 2.3.1.2	Rasio Guru/Murid SD/MI di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-39
Tabel 2.3.1.3	Rasio Guru/Murid SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-40
Tabel 2.3.1.4	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-41
Tabel 2.3.1.5	Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-41
Tabel 2.3.1.6	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-42
Tabel 2.3.1.7	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Dumai Tahun 2008-2012..	II-43
Tabel 2.3.1.8	Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-44
Tabel 2.3.1.9	Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-45
Tabel 2.3.1.10	Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012..	II-46

Tabel 2.3.1.11	Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-46
Tabel 2.3.1.12	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-47
Tabel 2.3.1.13	Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000-2012	II-49
Tabel 2.3.1.14	Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2006-2012	II-50
Tabel 2.3.1.15	Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2006-2011	II-51
Tabel 2.3.1.16	Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-52
Tabel 2.3.1.17	Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2006-2010	II-52
Tabel 2.3.1.18	Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-54
Tabel 2.3.1.19	Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2005-2012	II-55
Tabel 2.3.1.20	Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2006-2011	II-56
Tabel 2.3.1.21	Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012	II-58
Tabel 2.3.1.22	Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2000-2012	II-58
Tabel 2.3.1.23	Sebaran Puskemas Pembantu di Kota Dumai	II-60
Tabel 2.3.1.24	Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2000-2012	II-60
Tabel 2.3.1.25	Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2005 – 2011	II-62
Tabel 2.3.1.26	Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-63
Tabel 2.3.1.27	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-64
Tabel 2.3.1.28	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2005 – 2011	II-65
Tabel 2.3.1.29	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2005 – 2012	II-66
Tabel 2.3.1.30	Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kota Dumai Tahun 2012 – 2015	II-67
Tabel 2.3.1.31	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-68
Tabel 2.3.1.32	Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-69
Tabel 2.3.1.33	Jumlah Bangunan Rumah Tempat Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2011 – 2012	II-71
Tabel 2.3.1.34	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai Tahun 2002 – 2015	II-71
Tabel 2.3.1.35	Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-72
Tabel 2.3.1.36	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2001 – 2012	II-74
Tabel 2.3.1.37	Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis Tahun 2007 – 2011	II-75
Tabel 2.3.1.38	Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2001 – 2011	II-76
Tabel 2.3.1.39	Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-77
Tabel 2.3.1.40	Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-77
Tabel 2.3.1.41	Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai (Realisasi dan Target) Tahun 2000 – 2025	II-78
Tabel 2.3.1.42	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-79
Tabel 2.3.1.43	Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2009 – 2012	II-81
Tabel 2.3.1.44	Rasio Bayi Berakte Lahir Tahun 2008-2012	II-82
Tabel 2.3.1.45	Kepemilikan KTP Tahun 2009-2012	II-83
Tabel 2.3.1.46	Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2005-2012	II-83
Tabel 2.3.1.47	Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2005-2012	II-83
Tabel 2.3.1.48	Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2010-2011	II-84

Tabel 2.3.1.49	Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2011	II-85
Tabel 2.3.1.50	Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai tahun 2010-2011	II-85
Tabel 2.3.1.51	Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai tahun 2010-2011	II-86
Tabel 2.3.1.52	Angka Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-87
Tabel 2.3.1.53	Pencari Kerja yang Ditempatkan Di Kota Dumai Tahun 2007- 2012	II-87
Tabel 2.3.1.54	Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Dumai Tahun 2007- 2012	II-88
Tabel 2.3.1.55	Keselamatan dan Perlindungan Di Kota Dumai Tahun 2007- 2012	II-88
Tabel 2.3.1.56	Perselisihan Buruh dan Pengusaha Di Kota Dumai Tahun 2007- 2012	II-89
Tabel 2.3.1.57	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007-2012	II-89
Tabel 2.3.1.58	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007-2012	II-90
Tabel 2.3.1.59	Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai	II-91
Tabel 2.3.1.60	Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai	II-92
Tabel 2.3.1.61	Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Dumai	II-92
Tabel 2.3.1.62	Persentase Nilai Realisasi PMDN Kota Dumai	II-92
Tabel 2.3.1.63	Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2006-2012	II-93
Tabel 2.3.1.64	Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-94
Tabel 2.3.1.65	Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-94
Tabel 2.3.1.66	Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai Tahun 2010-2012...	II-95
Tabel 2.3.1.67	Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai Tahun 2010-2012	II-95
Tabel 2.3.1.68	Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2007 – 2012	II-96
Tabel 2.3.1.69	Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-96
Tabel 2.3.1.70	Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-97
Tabel 2.3.1.71	Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai	II-97
Tabel 2.3.1.72	Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) Kota Dumai	II-97
Tabel 2.3.1.73	Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai	II-98
Tabel 2.3.1.74	Ketersediaan pangan utama Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-98
Tabel 2.3.1.75	Publikasi Buku Statistik Kota Dumai Tahun 2007 – 2012	II-98
Tabel 2.3.1.76	Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk Di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-98
Tabel 2.3.1.77	Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai Tahun 2007 – 2012	II-100
Tabel 2.3.1.78	Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2009 – 2012	II-100
Tabel 2.3.1.79	Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2012	II-101
Tabel 2.3.1.80	Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun, Tahun 2008 – 2011	II-101
Tabel 2.3.1.81	Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 – 2012	II-102
Tabel 2.3.2.1	Persentase Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kota Dumai Tahun 2007 – 2012	II-103
Tabel 2.3.2.2	Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB	II-104
Tabel 2.3.2.3	Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) dalam PDRB Sektor Pertanian	II-104
Tabel 2.3.2.4	Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) dalam PDRB Sektor Pertanian	II-104
Tabel 2.3.2.5	Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-105
Tabel 2.3.2.6	Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-105
Tabel 2.3.2.7	Pertumbuhan Sektor Penggalian dalam PDRB	II-106
Tabel 2.3.2.8	Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai	II-106
Tabel 2.3.2.9	Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-107
Tabel 2.3.2.10	Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-108
Tabel 2.3.2.11	Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB Kota Dumai Tahun 2007-2010	II-109
Tabel 2.3.2.12	Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai	II-109

Tabel 2.3.2.13	Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB di Kota Dumai	II-110
Tabel 2.3.2.14	Pertumbuhan Industri Terhadap PDRB di Kota Dumai	II-110
Tabel 2.4.1.1	Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai Tahun 2009	II-111
Tabel 2.4.2.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2005 – 2011	II-111
Tabel 2.4.2.2	Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2000-2011	II-112
Tabel 2.4.2.3	Banyaknya Hotel di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-114
Tabel 2.4.2.4	Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-114
Tabel 2.4.2.5	Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-116
Tabel 2.4.3.1	Angka Kriminalitas di Kota Dumai	II-117
Tabel 2.4.3.2	Lama Proses Perijinan di Kota Dumai	II-117
Tabel 2.4.4.1	Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-120
Tabel 2.4.4.2	Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2007-2010	II-120
Tabel 3.1.	Standar Baku Penyediaan Sarana Perekonomian	III-5
Tabel 3.2.	Prediksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Dumai Tahun 2012–2025..	III-5
Tabel 3.3.	Standar Baku Penyediaan Sarana Pendidikan	III-6
Tabel 3.4	Prediksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Pendidikan di Kota Dumai Tahun 2012 – 2025	III-7
Tabel 3.5	Standar Baku Penyediaan Sarana Kesehatan	III-7
Tabel 3.6	Prediksi Kebutuhan Sarana Kesehatan di Kota Dumai Tahun 2012 – 2025	III-8
Tabel 3.7	Standar Baku Penyediaan Sarana Rekreasi dan Olah Raga	III-9
Tabel 3.8	Prediksi Kebutuhan Rekreasi dan Olah Raga di Kota Dumai 2012 – 2025	III-9
Tabel 3.9	Identifikasi Isu-Isu Strategis	III-10
Tabel 3.10	Sungai yang Mengalir di Wilayah Kota Dumai	III-19
Tabel 3.11	Kebutuhan Air Domestik Kota Dumai Tahun 2011 – 2025	III-20
Tabel 3.12	Kebutuhan Air Non Domestik Kota Dumai Tahun 2011 – 2025	III-20
Tabel 3.13	Kebocoran Penggunaan Air Kota Dumai Tahun 2011 – 2025	III-20
Tabel 3.14	Kebutuhan Air Total Kota Dumai Tahun 2011 – 2025	III-21
Tabel 3.15	Inventarisasi Kondisi Jalan Kota Dumai 2012	III-25
Tabel 4.1	Perumusan Visi	IV-2
Tabel 5.1	Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 -2025	V-4
Tabel 5.2	Tahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025 ...	V-11
Tabel 5.2	Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025 ...	V-22

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Keterkaitan antara Dokumen Perencanaan Pusat dan Daerah	I-7
Gambar 1.2	Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional	I-7
Gambar 2.1.1.1	Peta Administrasi Kota Dumai	II-2
Gambar 2.1.1.2	Peta Rawan Bencana Kota Dumai	II-14
Gambar 2.1.2.1	Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Dumai per Tahun Selama Periode 2000 – 2011	II-16
Gambar 2.1.2.2	Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-17
Gambar 2.1.2.3	Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Dumai Tahun 2011	II-18
Gambar 2.1.2.4	Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2011	II-19
Gambar 2.1.2.5	Grafik Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Indonesia	II-20
Gambar 2.2.1.1	Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2001-2010	II-23
Gambar 2.2.1.2	Perkembangan Tingkat Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Tahun 2000-2010	II-25
Gambar 2.2.1.3	Perkembangan Tingkat Pendapatan Per Kapita Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2007-2010 (dalam juta rupiah)	II-25
Gambar 2.2.1.4	Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2005-2010	II-26
Gambar 2.2.1.5	Tingkat Kemiskinan Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2011	II-27
Gambar 2.2.2.1	Grafik Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-28
Gambar 2.2.2.2	Grafik Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-29
Gambar 2.2.2.3	Grafik Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-31
Gambar 2.2.2.4	Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-32
Gambar 2.2.2.5	Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita di Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-34
Gambar 2.2.2.6	Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-35
Gambar 2.2.2.7	Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-37
Gambar 2.3.1.1	Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-39
Gambar 2.3.1.2	Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-40
Gambar 2.3.1.3	Grafik Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK di Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-41
Gambar 2.3.1.4	Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2007-2011	II-42
Gambar 2.3.1.5	Grafik Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-42
Gambar 2.3.1.6	Grafik Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-43
Gambar 2.3.1.7	Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-44
Gambar 2.3.1.8	Grafik Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-45
Gambar 2.3.1.9	Grafik Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-46
Gambar 2.3.1.10	Grafik Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke MA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-47
Gambar 2.3.1.11	Grafik Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-48
Gambar 2.3.1.12	Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2002-2012	II-49

Gambar 2.3.1.13	Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2006-2011	II-50
Gambar 2.3.1.14	Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2006-2011	II-51
Gambar 2.3.1.15	Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2006-2010	II-53
Gambar 2.3.1.16	Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA di Kota Dumai Tahun 2005-2012	II-55
Gambar 2.3.1.17	Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai Tahun 2006-2011	II-57
Gambar 2.3.1.18	Grafik Cakupan Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2000-2012	II-59
Gambar 2.3.1.19	Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai Tahun 2000-2012	II-61
Gambar 2.3.1.20	Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2005 – 2012	II-62
Gambar 2.3.1.21	Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-63
Gambar 2.3.1.22	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-64
Gambar 2.3.1.23	Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kota Dumai Tahun 2005 – 2011	II-66
Gambar 2.3.1.24	Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai Tahun 2005 – 2012	II-67
Gambar 2.3.1.25	Grafik Realisasi dan Target Indikator Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kota Dumai Tahun 2012 – 2015	II-68
Gambar 2.3.1.26	Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-69
Gambar 2.3.1.27	Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011 ...	II-70
Gambar 2.3.1.28	Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai Tahun 2002 – 2015	II-72
Gambar 2.3.1.29	Arus Penumpang Umum yang Keluar Kota Dumai melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Tahun 2000 – 2011	II-73
Gambar 2.3.1.30	Arus Penumpang Umum yang Masuk Kota Dumai melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Tahun 2000 – 2011	II-73
Gambar 2.3.1.31	Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2001 – 2012	II-74
Gambar 2.3.1.32	Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai Tahun 2001 – 2011	II-76
Gambar 2.3.1.33	Grafik Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai (Realisasi dan Target) Tahun 2000 – 2025	II-79
Gambar 2.3.1.34	Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013	II-80
Gambar 2.3.1.35	Grafik Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk Tahun 2009-2012	II-81
Gambar 2.3.1.36	Grafik Bayi Berakte Lahir Tahun 2008-2012	II-82
Gambar 2.3.1.37	Grafik Kepemilikan KTP Tahun 2009-2012	II-83
Gambar 2.3.1.38	Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Dumai Tahun 2010 – 2011	II-84
Gambar 2.3.1.39	Grafik Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai tahun 2010-2011	II-86
Gambar 2.3.1.40	Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai tahun 2010-2011.	II-87
Gambar 2.3.1.41	Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007-2012	II-90
Gambar 2.3.1.42	Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007-2012	II-91
Gambar 2.3.1.43	Persentase Nilai Realisasi PMDN Kota Dumai Tahun 2008-2012	II-93
Gambar 2.3.1.44	Grafik Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai Tahun 2006-2012	II-93
Gambar 2.3.1.45	Grafik Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk Di Kota Dumai Tahun 2007 – 2012	II-99
Gambar 2.3.1.46	Grafik Jumlah Perpustakaan Kota Dumai Tahun 2009 – 2012	II-100
Gambar 2.3.1.47	Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk Tahun 2009 – 2012 ...	II-101
Gambar 2.3.1.48	Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun, Tahun 2008 – 2011	II-102
Gambar 2.3.1.49	Grafik Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah Tahun 2008 – 2012	II-102

Gambar 2.3.2.1	Persentase Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Tahun 2007-2012	II-103
Gambar 2.3.2.2	Grafik Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-105
Gambar 2.3.2.3	Grafik Persentase Kerusakan Kawasan Hutan Kota Dumai Tahun 2007-2012	II-106
Gambar 2.3.2.4	Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai	II-107
Gambar 2.3.2.5	Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai	II-108
Gambar 2.3.2.6	Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Dumai	II-109
Gambar 2.4.2.1	Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai Tahun 2005 – 2011	II-112
Gambar 2.4.2.2	Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-115
Gambar 2.4.2.3	Grafik Indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011	II-116
Gambar 2.4.4.1	Grafik Rasio Ketergantungan	II-121
Gambar 3.1	Rencana Pembangunan Jembatan Dumai – Melaka	III-13
Gambar 3.2	Rencana Pembangunan Jembatan Koridor I (Kota Dumai – Pulau Rupa)	III-13
Gambar 3.3	Rencana Pembangunan Jembatan Spektakuler Dumai – Malaka	III-14
Gambar 3.4	Koridor Ekonomi Sumatera dalam MP3EI	III-16
Gambar 3.5	Koridor Utama Dalam MP3EI	III-17
Gambar 3.6	Pelabuhan Dalam Jalur Pelayaran Kontainer Dunia	III-17
Gambar 3.7	Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai	III-21
Gambar 3.8	Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025	III-31
Gambar 3.9	Posisi Strategis Wilayah Kota Dumai dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang	III-35
Gambar 3.10	Posisi Strategis Wilayah Kota Dumai dalam Kerangka Pengembangan Jangka Panjang	III-37

bab 1 PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Pasal 150 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa pemerintah daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) sebagai acuan kebijakan pembangunan daerah dalam kurun waktu 20 (dua puluh) tahun. RPJPD merupakan suatu dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang daerah, sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) untuk setiap kurun waktu 5 (lima) tahun. RPJPD tersebut bersifat makro yang memuat visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang daerah, dimana proses penyusunannya dilakukan secara partisipatif dengan melibatkan seluruh unsur pelaku pembangunan.

Sejalan dengan amanat undang-undang tersebut di atas, proses dan mekanisme perencanaan pembangunan baik di tingkat pusat maupun daerah secara khusus diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang bertujuan untuk mengintegrasikan perencanaan pembangunan dalam satu sistem perencanaan yang utuh dan terpadu, mulai dari pemerintah pusat sampai dengan pemerintah daerah. Undang-undang tersebut juga mengamanatkan kepada pemerintah untuk menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) yang berisi kebijakan dengan kurun waktu 20 tahun; dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) sebagai rencana pembangunan untuk kurun waktu lima tahun serta Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai rencana pembangunan tahunan baik untuk Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah. Dalam rangka pengintegrasian perencanaan pembangunan daerah dalam sistem perencanaan pembangunan nasional, maka proses penyusunan RPJPD mengacu pada RPJP Nasional, RPJPD Provinsi dan memperhatikan seluruh aspirasi pemangku kepentingan pembangunan melalui penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

Mencermati perkembangan yang terjadi saat ini, serta masih banyaknya permasalahan yang dihadapi Kota Dumai, maka diperlukan upaya-upaya terencana, strategis, dan berkesinambungan yang dituangkan ke dalam suatu dokumen perencanaan pembangunan daerah yang berdimensi jangka panjang dan berorientasi pada perwujudan kesejahteraan masyarakat. Pengertian Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai adalah dokumen perencanaan pembangunan Kota Dumai yang merupakan jabaran dari tujuan dibentuknya Pemerintahan Kota Dumai dalam bentuk visi, misi, dan arah pembangunan daerah untuk masa 20 (dua puluh) tahun yang mencakup kurun waktu mulai tahun 2005 sampai tahun 2025. Selama beberapa tahun terakhir, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan Kota Dumai belum mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang

daerah. Suhubungan dengan kebutuhan perencanaan pembangunan jangka panjang daerah tersebut maka pada saat ini sangat diperlukan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai untuk menjadi salah satu dasar acuan pelaksanaan pembangunan Kota Dumai.

Dalam penyusunan dokumen RPJPD menjadi hal yang penting untuk diperhatikan adalah hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan pada tahun-tahun sebelumnya untuk mengantisipasi permasalahan yang akan datang serta dinamika perkembangan lingkungan strategis dalam kurun waktu mulai tahun 2005 hingga tahun 2025. Selanjutnya dokumen RPJPD Kota Dumai harus dijabarkan lebih detil setiap lima tahun ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Dumai pada setiap tahunnya.

Penyusunan RPJPD dilakukan melalui beberapa tahapan serta perumusannya berpedoman pada prinsip-prinsip perencanaan pembangunan daerah, diantaranya: dilakukan peemerintah bersama para pemangku kepentingan berdasarkan peran dan kewenangan masing-masing, mengintegrasikan rencana tata ruang dengan rencana pembangunan daerah serta dilaksanakan berdasarkan kondisi dan potensi yang dimiliki masing-masing daerah, sesuai dinamika perkembangan daerah dan nasional. Tahapan penyusunan RPJPD Kota Dumai diawali dengan persiapan penyusunan, rancangan awal, pelaksanaan musrenbang, perumusan rancangan akhir serta penetapan perda.

1.2. DASAR HUKUM PENYUSUNAN

Penyusunan RPJPD Kota Dumai berlandaskan pada peraturan perundang-undangan berikut:

1. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2013);
2. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 1967 tentang Penanaman Modal Asing (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2818);
3. Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya AlamHayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
4. Undang–Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisataaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
5. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3469);

6. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kota Madya Daerah Tingkat II Dumai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3829);
7. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);
8. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 243, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4045);
9. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4152);
10. Perpu Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4374);
11. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
12. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
13. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
14. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
15. Undang-Undang No 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

17. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
18. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batu Bara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
19. Undang–Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
20. Undang–Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052); dan
21. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan danPengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3445);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu-Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
25. PeraturanPemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban serta Bentuk Tata Cara Peran Serta Masyarakat Dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1998 tentang Kawasan Suaka Alam dan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3776);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran/Kerusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);

28. Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2000 tentang Tingkat Ketelitian dalam Penataan Wilayah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3934);
30. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2001 tentang Penyelenggaraan Dekonsentrasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4095);
31. Peraturan Pemerintah Nomor 77 Tahun 2001 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4156);
32. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
33. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
34. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
35. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
36. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
37. Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2008 tentang RTRW Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
38. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);

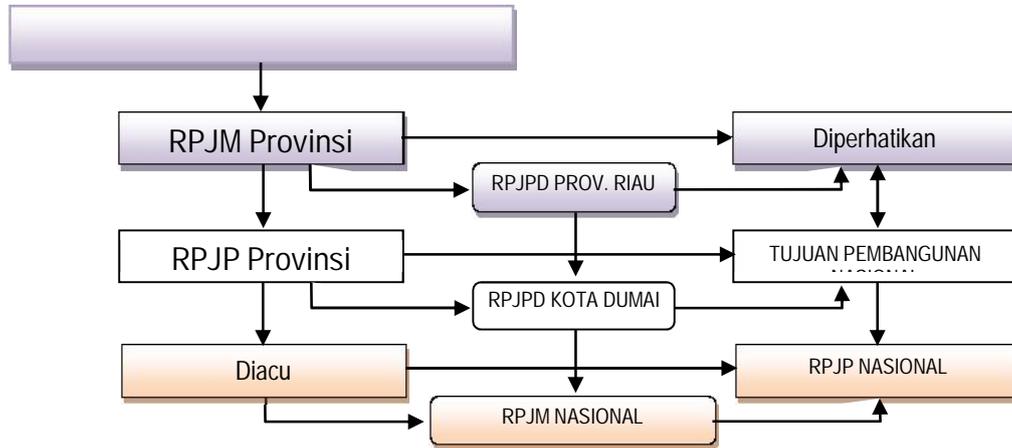
39. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2005 tentang Jalan Tol (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5019);
40. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5070);
41. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310); dan
42. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 517);
43. Peraturan daerah Nomor 10 Tahun 1994 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Riau (Lembaran Daerah Provinsi Tingkat I Riau Tahun 1994 Nomor 7);
44. Peraturan Daerah Provinsi Riau Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi Riau Tahun 2005-2025;
45. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor.... Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai Tahun 2014-2034

1.3. HUBUNGAN RPJPD KOTA DUMAI DENGAN DOKUMEN PERENCANAAN LAINNYA

RPJPD Kota Dumai Tahun 2006-2025 merupakan dokumen perencanaan yang menggambarkan tentang perspektif kebijakan pembangunan yang akan dilakukan selama 20 tahun dan akan saling melengkapi dengan dokumen perencanaan lainnya, terutama dalam hal ini adalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai sebagai salah satu dokumen perencanaan yang sangat bermanfaat untuk mengoptimalkan pemanfaatan ruang wilayah bagi upaya perwujudan kemajuan, peningkatan kesejahteraan dan kemakmuran daerah. Disamping itu, RPJPD juga tidak bisa dipisahkan dari dokumen perencanaan yang memiliki sifat dan karakteristik sama namun dalam perspektif kebijakan yang lebih luas lagi, dalam hal ini adalah RPJP Nasional, RPJP Provinsi Riau, dan RPJM Kota Dumai yang disusun setiap 5 tahun sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang.

Sesuai dengan Undang-undang tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, penyusunan RPJPD harus mengacu pada RPJPN dan RPJPD Provinsi serta memperhatikan RPJPD

penyusunan RPJPD ini maka Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai yang disusun harus selaras dengan dokumen rencana pembangunan jangka panjang ini. Penyelarasan tersebut didasarkan pada visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang sebagai wujud pengembangan kewilayahan. Berikut ini diagram alur yang memperhatikan kedudukan RTRW Kota Dumai dengan sistem perencanaan pembangunan nasional.



Gambar 1.2.
Kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai dalam Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

Penyusunan dokumen RPJPD Kota Dumai selain menyelaraskan dengan rencana tata ruang wilayah juga memperhatikan RPJP Nasional, RPJP Provinsi Riau, untuk menyelaraskan pembangunan pusat dan daerah sehingga mencapai tujuan pembangunan nasional.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan RPJPD Kota Dumai ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010, terdiri dari:

- BAB I Pendahuluan; berisi latar belakang, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJPD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penulisan, serta maksud dan tujuan penyusunan RPJPD
- BAB II Gambaran Umum Kondisi Kota Dumai; menggambarkan kondisi umum daerah mencakup aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum, dan aspek daya saing daerah.
- BAB III Analisis Isu-isu Strategis; menyajikan isu-isu daerah yang meliputi permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis pembangunan Kota Dumai.
- BAB IV Visi dan Misi Kota Dumai; berisi pernyataan visi dan misi pembangunan daerah jangka panjang.
- BAB V Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang; berisi sasaran pokok pembangunan daerah jangka panjang, arah kebijakan dan tahapan prioritas pembangunan lima tahunan.

BAB VI Kaidah Pelaksanaan; berisi prinsip-prinsip kaidah pelaksanaan, mekanisme pelaksanaan, pemantauan, pengendalian, dan evaluasi hasil RPJPD.

1.5. MAKSUD DAN TUJUAN

1.5.1. Maksud

RPJPD Kota Dumai Tahun 2005 – 2025, selanjutnya disebut RPJPD, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025, ditetapkan dengan maksud memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi seluruh komponen pembangunan (pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha) di dalam mewujudkan visi, misi, dan arah pembangunan yang disepakati bersama sehingga seluruh upaya yang dilakukan oleh pelaku pembangunan bersifat sinergis, koordinatif, dan saling melengkapi satu dengan lainnya di dalam satu pola sikap dan pola tindak.

Kegiatan penyusunan dokumen Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dilaksanakan guna menyediakan dokumen Rancangan Akhir Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005-2025 yang berpedoman pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tatacara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.

1.5.2. Tujuan

Tujuan Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Dumai adalah:

- a. Pedoman penyusunan visi, misi dan arah pembangunan jangka panjang Kota Dumai yang selanjutnya dijabarkan kedalam RPJMD;
- b. Menjamin terwujudnya integritas, sinkronisasi dan sinergi baik antar daerah, antar ruang, antar waktu, antar fungsi pemerintah daerah maupun antara pemerintah;
- c. Mendukung koordinasi antar pemangku kepentingan dalam pendapaian visi dan misi daerah serta nasional;
- d. Mewujudkan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan; dan
- e. Mewujudkan tercapainya penggunaan sumberdaya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan (sustainable).

bab 2

GAMBARAN UMUM KONDISI KOTA

2.1. ASPEK GEOGRAFI DAN DEMOGRAFI

2.1.1. Aspek Geografi

A. Luas dan Letak Wilayah

Kota Dumai termasuk salah satu kota yang ada di Provinsi Riau dan dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tanggal 20 April 1999 tentang Pembentukan Kabupaten/Kota Baru di Provinsi Riau sebagai pengejawantahan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah. Pada awal terbentuknya Kota Dumai meliputi 3 (tiga) Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur.

Dalam perkembangannya, Kota Dumai berkembang menjadi 5 (lima) Kecamatan sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 18 Tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Selanjutnya pada tahun 2009, Kota Dumai kembali mengalami pemekaran menjadi 7 (tujuh) Kecamatan, melalui Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2009 tentang pembentukan Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Selatan.

Kota Dumai dengan luas wilayah 1.727,38 Km², terletak pada posisi antara 01°26'50" – 02°15'40" Lintang Utara dan 101°0'38" - 101°43'33" Bujur Timur. Kota Dumai mempunyai luas wilayah daratan seluas ±204.674 ha dan wilayah perairan seluas 71.393 ha. Secara administratif berbatasan dengan :

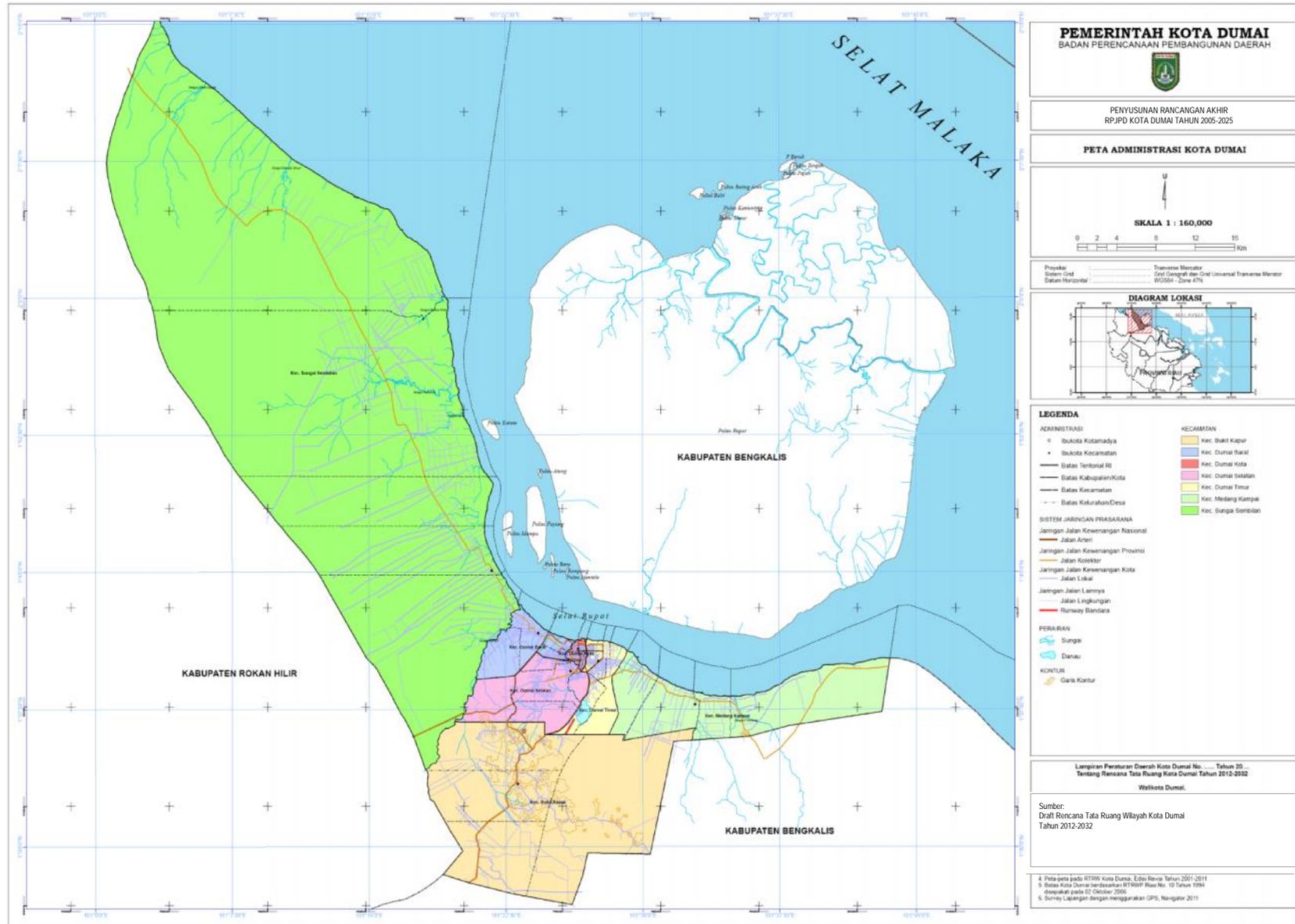
Sebelah Utara : Selat Rupa, Pulau Rupa, dan Selat Malaka

Sebelah Timur : Kecamatan Bukit Batu, Kabupaten Bengkalis

Sebelah Selatan : Kecamatan Mandau dan Kecamatan Bukit Batu Kabupaten Bengkalis

Sebelah Barat : Kecamatan Tanah Putih dan Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir

Berdasarkan letak geografisnya tersebut, Kota Dumai berada di pesisir pantai bagian timur Pulau Sumatera. Pantai Kota Dumai terlindung oleh Pulau Rupa, sehingga sangat strategis untuk berkembang menjadi kota pelabuhan dan kota perdagangan. Berikut ini peta administrasi wilayah Kota Dumai.



Gambar 2.1.1.1 Peta Administrasi Kota Dumai

Sumber: Draft RTRW Kota Dumai 2012-2032

Seiring perkembangan Kota Dumai, saat ini terdapat 33 (tiga puluh tiga) Kelurahan yang tersebar di 7 (tujuh) Kecamatan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.1.1.1
Pembagian Wilayah Administrasi di Kota Dumai

Wilayah Administrasi			Wilayah administrasi		
No	Kecamatan	Kelurahan	No	Kecamatan	Kelurahan
1	Bukit Kapur	Bagan Besar	5	Dumai Timur	Bukit Batrem
		Kayu Kapur			Buluh Kasap
		Bukit Nenas			Jaya Mukti
		Gurun Panjang			Tanjung Palas
		Kampung Baru			Teluk Binjai
2	Dumai Barat	Bagan Keladi	6	Dumai Selatan	Bukit Datuk
		Pangkalan Sesai			Bukit Timah
		Purnama			Bumi Ayu
		Simpang Tetap Darul Ichsan			Mekar Sari
3	Dumai Kota	Bintan			Ratu Sima
		Dumai Kota	7	Sungai Sembilan	Bangsai Aceh
		Laksamana			Basilam Baru
		Rimba Sekampung			Batu Teritip
		Sukajadi			Lubuk Gaung
4	Medang Kampai	Guntung			Tanjung Penyembal
		Mundam			
		Pelintung			
		Teluk Makmur			

Sumber: Laporan Akhir Draft RTRW Kota Dumai Tahun 2012-2032

B. Kondisi Topografi

Secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0-0,5 m dan ketinggian rata-rata berkisar 1,3 – 6,3 meter di atas permukaan laut. Kota Dumai termasuk ke dalam kategori daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0 – < 3 %, di mana sebelah utara Kota Dumai umumnya merupakan dataran yang landai dan ke selatan semakin bergelombang. Kota Dumai berada di tepi pantai selatan Selat Rupa dengan kondisi topografi yang relatif datar, khususnya di Kecamatan Dumai Barat dan Timur, sedangkan kecamatan lainnya yaitu Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan, kondisi topografinya sedikit bergelombang. Jika dilihat dari ketinggiannya, daerah yang datar dengan kemiringan lereng 0-2% terdapat sekitar 41.032 Ha (64,90%); daerah yang landai sampai berombak memiliki kemiringan lereng 2-15% seluas 15.642 Ha (24,71%), daerah bergelombang dengan kemiringan lereng berkisar antara 15-40% seluas 364 Ha (0,58%) dan daerah berbukit memiliki kemiringan lereng >40% sekitar 6.200 Ha (9,81%) yang terletak di bagian Selatan Kota Dumai yaitu Kelurahan Bukit Timah dan Bukit Datuk di Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bukit Batrem di Kecamatan Dumai Timur, Kelurahan Bukit Nenas, Bukit Kayu Kapur di Kecamatan Bukit Kapur. Dari kondisi topografinya, diperkirakan Kota Dumai dapat digunakan untuk pembangunan kota namun perkembangannya masih dibatasi oleh kendala-kendala pemanfaatan lahan. Selain untuk kawasan pembangunan kota, Kota Dumai juga berpotensi untuk dikembangkan menjadi kegiatan pertanian.

C. Kondisi Klimatologi

Kota Dumai sangat dipengaruhi oleh sifat iklim laut yaitu iklim tropis basah dengan curah hujan tahunan berkisar antara 1828 - 2473 mm per tahun dan rata-rata curah hujan bulanan 254,8 mm per bulan, panjang hari hujan rata-rata 280 hh/tahun. Rata-rata periode musim hujan terjadi pada bulan September – Mei, sedangkan curah hujan minimum terjadi pada bulan Juni-Agustus. Berikut ini adalah perkembangan banyaknya hari dan curah hujan di Kota Dumai selama periode tahun 2000 sampai 2011.

Tabel 2.1.1.2
Banyaknya Hari Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2000-2011

Bulan	Hari Hujan (hari)											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	6	5	4	11	7	6	17	11	10	tad	15	19
Februari	11	4	2	8	5	6	tad	11	6	tad	12	6
Maret	17	7	10	8	19	13	tad	11	16	tad	12	15
April	10	13	24	15	17	13	18	21	17	10	13	16
Mei	7	9	11	8	11	15	tad	15	12	3	17	5
Juni	9	10	10	7	6	9	tad	14	15	11	13	9
Juli	12	14	6	11	14	14	12	18	9	9	17	9
Agustus	8	10	15	14	17	9	15	19	10	13	13	8
September	14	18	17	13	115	14	17	13	12	12	tad	15
Oktober	16	18	17	14	18	24	10	19	15	13	tad	22
Nopember	21	22	14	21	21	26	22	18	15	15	tad	26
Desember	12	13	12	12	12	24	22	19	9	13	tad	14
	143	143	142	142	262	173	133	189	146	99	112	164

Sumber: Kota Dumai dalam Angka tahun 2000-2011

Tabel 2.1.1.3
Banyaknya Curah Hujan di Kota Dumai Selama Tahun 2000-2011

Bulan	Curah Hujan (mm)											
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari	101,2	84,4	24,4	332,7	143,4	143,4	231,3	155,9	214,4	tad	144,0	182,3
Februari	80,5	51,0	12,2	51,9	86,9	86,9	tad	151,3	68,1	tad	58,0	29,3
Maret	148,1	102,1	83,2	234,4	210,3	210,3	tad	238,5	389,1	tad	329,0	45,0
April	102,5	309,2	178,4	130,9	152,5	152,5	373,5	260,7	293,4	147,0	207,0	403,4
Mei	92,8	215,1	169,7	89,1	217,2	217,2	tad	278,6	254,5	53,0	330,0	23,3
Juni	61,4	102,3	144,4	106,3	162,2	162,2	tad	211,0	196,6	116,0	331,0	77,4
Juli	131,5	123,1	80,3	206,6	73,3	73,3	121,4	253,9	230,1	116,0	425,0	162,1
Agustus	166,4	165,3	300,8	200,8	239,4	239,4	228,9	307,9	172,8	148,0	188,0	167,1
September	251,0	270,0	391,4	271,2	358,1	358,1	308,0	253,9	273,4	279,0	tad	356,3
Oktober	171,4	494,2	266,0	319,8	301,9	301,9	120,1	185,5	196,0	244,0	tad	260,8
Nopember	275,4	258,7	315,6	471,2	195,5	195,5	187,5	216,1	224,6	217,0	tad	311,3
Desember	260,6	190,2	137,5	200,0	49,2	49,2	266,6	151,5	78,6	195,0	tad	230,8
	1.842,8	2.365,6	2.103,9	2.614,9	2.189,9	2.189,9	1.837,3	2.664,8	2.591,6	1.515,0	2.012,0	2.249,1

Sumber: Kota Dumai dalam Angka tahun 2000-2011

Berdasarkan klasifikasi tipe curah hujan menurut Schmidt dan Ferguson (1951) yang didasarkan atas keadaan banyaknya bulan basah (>100 mm/bulan) dan bulan kering (< 60 mm/bulan), tipe curah hujan di wilayah Dumai digolongkan kedalam tipe curah B (basah), yaitu memiliki 8 bulan basah dan 2 bulan kering. Kota Dumai mempunyai iklim tropis dengan kelembaban udara rata-rata 84,74 %, rata-rata suhu adalah 28°C (suhu maksimum 34°C dan suhu minimum 21,5°C), rata-rata bulanan penyinaran matahari 44,4 %. Terdapat dua musim yaitu musim kemarau antara bulan Maret s/d Agustus dan musim hujan bulan September s/d Februari dengan suhu udara rata-rata 24° – 33°C (Sumber: Draft RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034).

D. Kondisi Geologi

Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara dan sebagian dataran tinggi sebelah selatan. Umumnya struktur tanah terdiri dari tanah Podsolik merah kuning dari batuan endapan dan Alluvial serta tanah Organosol dan Gley humus dalam bentuk rawa-rawa atau tanah basah. Secara geologi pada medan dataran disusun oleh batuan sedimen berumur muda (Kuartar) berupa alluvium (Qp) dengan bahan penyusun lempung, pasir, kerikil, sisa tumbuhan (gambut), dan rawa gambut, sedangkan pada daerah perbukitannya disusun oleh batuan sedimen berumur tua (Tersier) dengan bahan penyusun batu lumpur kelabu berkarbon terbioturbasikan, batu pasir halus, umumnya kehalusan rendah sampai sangat rendah.

Kemampuan lahan di Wilayah Kota Dumai secara umum sangat baik. Terdapat dua kelompok atau golongan tanah, yaitu Typic Tropaquepts atau Fluvisol Gleik dan Hydric Trophemis atau Humic Histosol. Pembentukan kedua jenis tanah ini tidak lepas dari adanya bentukan lapisan tanah gambut, yang secara historis menjadi lapisan tanah dominan di seluruh wilayah Kota Dumai ini. Dilihat secara topografi, Kota Dumai berada pada lahan bergambut dengan kedalaman 0 – 0,5 m dan ketinggian rata-ratanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut. Kota Dumai terletak di lahan bergambut dengan kedalaman 0 - 3 m, dengan ketinggian rata-rata adalah 2 meter di atas permukaan laut. Hal ini mengindikasikan bahwa dalam pengaliran air buangan kota agak sulit, dan pada tempat-tempat tertentu sering terjadi banjir terutama pada air laut sedang pasang.

Mengingat bahwa tanah gambut di wilayah kota Dumai ini rata-rata memiliki kedalaman: 0,5m, yang berarti tidak terlalu dalam, dan merujuk bahwa pada lapisan di bawah gambut ini adalah tanah dasar yang memiliki daya dukung yang cukup baik, maka dengan memanfaatkan perkembangan teknologi/geoteknik yang sudah maju, kendala struktur tanah di kota Dumai ini tidaklah menjadi permasalahan penting dalam upaya membangun infrastruktur perkotaan. Persoalan penting yang harus menjadi dasar pertimbangan dalam upaya mengembangkan berbagai infrastruktur perkotaan, khususnya di bagian wilayah kota Dumai Lama (Dumai Barat dan Dumai Timur) ini adalah elevasi wilayahnya yang rata-rata hanya berkisar 2 meter di atas permukaan laut. Terkait dengan pembangunan sistem drainase kota dan karakteristik pasang surut laut yang sangat berpengaruh terhadap muka air sungai, maka diperlukan berbagai upaya, khususnya dengan dukungan teknologi dan manajemen sumber daya kawasan yang memadai. Untuk pengembangan kota, karakteristik kondisi lahan yang demikian berkemampuan rendah untuk mendukung pembangunan infrastruktur perkotaan yang berdimensi dan berskala besar. Hal ini berarti bahwa untuk membangun infrastruktur dimaksud, akan memerlukan teknologi yang lebih maju dan biaya yang lebih besar, namun dengan kemajuan teknologi infrastruktur yang telah berkembang pesat saat ini, maka kendala kemampuan lahan tersebut bukan lagi menjadi kendala penting.

E. Kondisi Hidrologi

Wilayah Kota Dumai dialiri oleh Sungai Dumai yang membentang dari timur ke barat yang merupakan saluran drainase utama di Kota Dumai. Hidrologi air tanah di Kota Dumai sebagian besar bersifat

kurang baik untuk air minum. Kondisi air tanah di Kota Dumai yang berasal dari air tanah dangkal (sumur gali dan sumur pompa) dengan kedalaman rata-rata 1-2 meter, maupun air tanah dalam (sumur bor), pada umumnya kurang baik. Sebagian lagi, tepatnya di wilayah yang tinggi seperti di Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Batrem, Bukit Timah dan Kecamatan Bukit Kapur memiliki permeabilitas dan porositas yang tinggi yang menjadi sumber air tanah dangkal di Kota Dumai.

Di Kota Dumai ini terdapat 15 sungai besar dan kecil dengan total panjang keseluruhannya 221 Km yang semuanya bermuara ke Selat Rupa dan Selat Malaka sebagai jalur lalu lintas perdagangan. Sungai-sungai di daerah Dumai umumnya merupakan sungai abadi (perennial stream) yang airnya dapat mengalir sepanjang tahun. Dari 15 sungai tersebut hanya sepanjang 114 Km yang dapat dilayari oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Sungai Bulu Hala, Sungai Senepis, Sungai Mesjid merupakan tiga sungai yang terpanjang. Berikut ini sungai yang melalui wilayah Kota Dumai.

Tabel 2.1.1.4
Sungai yang Terdapat di Kota Dumai

No	Nama Sungai	Panjang (Km)	Dapat Dilayari (Km)
1.	Sungai Pelintung	8,5	5
2.	Sungai Kepala Beruang	5	2
3.	Sungai Selinsing	4	2
4.	Sungai Tanjung Leban	3	1
5.	Sungai Merambung	7	3
6.	Sungai Kemeh	10	4
7.	Sungai Mesjid	29	19
8.	Sungai Nerbit	12	5
9.	Sungai Mampu	13	3
10.	Sungai Teras	10	4
11.	Sungai Buluala	40	26
12.	Sungai Geniut	12	7
13.	Sungai Santaulu	22	9
14.	Sungai Senepis	35	20
15.	Sungai Teluk Dalam	10	4

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2011

F. Pemanfaatan Lahan

Pemanfaatan lahan di Kota Dumai seperti yang tertuang dalam Draft Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Kawasan Lindung

Kawasan lindung adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan, meliputi:

- a) Kawasan sempadan pantai yang ditetapkan di sepanjang pantai utara dan selatan Kota Dumai. Kota Dumai memiliki garis pantai sepanjang 215,65 km (seluas 2.156,5 ha), namun saat ini tidak seluruh garis pantainya memiliki pemanfaatan lahan sebagaimana diatur dalam peraturan mengenai batas kawasan sempadan pantai. Hal ini dikarenakan pantai di Kota Dumai selain untuk pengembangan

kawasan perikanan, juga digunakan untuk kepentingan perkotaan seperti pelabuhan, pergudangan, perdagangan dan jasa, serta kawasan industri.

Kawasan pengembangan perikanan terdapat di bagian utara wilayah Kota Dumai, yaitu di Desa Basilam Baru yang terletak di sepanjang 25 Km di sepanjang garis pantai, sedangkan kawasan industri yang terdapat di pantai Lubuk Gaung dan Pelintung dengan panjang pantai yang dipergunakan mencapai 15 km. Kawasan pelabuhan, Perumahan dan pengembangan lainnya terdapat di pantai di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur dengan panjang garis pantai mencapai 40 km.

- b) Kawasan sempadan sungai, merupakan kawasan sepanjang kiri dan kanan sungai, termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer yang mempunyai manfaat penting mempertahankan kelestarian fungsi sungai. Sebaran sungai di Kota Dumai meliputi Kecamatan Sungai Sembilan (Sungai Bunian, Anak Sungai Sepi, Sungai Sepi, Sungai Prapat, Sungai Parit, Sungai Bakau Tua, Sungai Tiram, Sungai Teluk Dalam, Sungai Bancin, Sungai Saliyo, Sungai Tengah Kecil, Sungai Tengah Besar, Sungai Tawar Besar, Sungai Tawar Kecil, Sungai Teritip, Sungai Senepis Besar, Sungai Senepis Kecil, Sungai Tiang Jung, Sungai Sentau Hulu, Sungai Geniot, Sungai Buluhala, Sungai Teras, Sungai Sembilan, Sungai Mampu, Sungai Nerbit, Sungai Tambuan, Alur Sungai Batu Teritip, serta Alur Sungai Basilam); Dumai Barat (Sungai Masjid, Sungai Dumai, Alur Sungai Bangsal Aceh Satu, Alur Sungai Bangsal Aceh Dua, Alur Sungai Bangsal Aceh Tiga, Alur Sungai Bangsal Aceh Empat, Alur Sungai Bangsal Aceh Lima, serta Alur Sungai Pematang Hibul); Dumai Timur (Sungai Dumai, Alur Sungai Simpang Cempedak, Alur Sungai Batang Melawan, Alur Sungai Parit Sadak, Alur Sungai Pasar Batu Bintang, Alur Sungai Parit Purnama, Alur Sungai Parit Kelakap Tujuh, Alur Sungai Pangkalan Sesai Satu, Alur Sungai Parit Penghulu, Alur Sungai Parit Buluh Kasap, Alur Sungai Parit Tanjung Palas, Alur Sungai Parit Panam 2, Alur Sungai Parit Panam 1, Alur Sungai Parit Bungkok Satu, Alur Sungai Parit Bungkok Dua, Alur Sungai Mundam Satu, Alur Sungai Mundam Dua, Alur Sungai Bungkok Satu, serta Alur Sungai Pulai Bungkok Dua); juga terdapat di Kecamatan Medang Kampai (Sungai Kembeli Besar, Sungai Pelintung, Sungai Kepalabiruang, dan Sungai Selingsing).
- c) Kawasan pantai berhutan bakau di Kota Dumai terdapat di Tembawan, Kelurahan Batu Teritip dengan luas lahan 164 Ha, Hutan bakau yang berada di Teluk Makmur di Kecamatan Medang Kampai dengan luas lahan 39,5 Ha dekat dengan sungai Kembeli Besar dan Alur Sungai Pulau Bungkok Dua. Sedangkan Hutan Bakau yang terdapat di kawasan muara Sungai Masjid, Kelurahan Purnama, Kecamatan Dumai Barat dan Kelurahan Bangsal Aceh di Kecamatan Sungai Sembilan dengan luas lahan 227,5 Ha.
- d) Kawasan danau atau waduk, yaitu Danau Putri Tujuh yang merupakan danau alamiah, terletak di kelurahan Bukit Batrem Kecamatan Dumai Timur dengan luas 30,61 Ha dan berada di Kawasan Pengembangan Bandara. Selain danau di Kota Dumai juga terdapat rawa di Kelurahan Bukit Batrem

dan Tanjung Palas dengan luas 59,93 Ha. Kawasan sekitar danau khususnya Danau Putri Tujuh di Kota Dumai telah dijadikan tempat wisata.

- e) Kawasan resapan air di Kota Dumai meliputi seluruh sungai yang memiliki sempadan sungai dan saat sekarang Kota Dumai memiliki sempadan sungai seluas 24,3 Km².
- f) Kawasan sekitar mata air adalah kawasan di sekeliling mata air yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi mata air. Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus, namun terdapat pada setiap alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.
- g) Ruang Terbuka Hijau (RTH), yang dikembangkan di Kota Dumai disesuaikan dengan kawasan-kawasan peruntukan ruang kota yakni kawasan permukiman (kepadatan tinggi, sedang, rendah) baik di kawasan Kota Dumai lama maupun kawasan pengembangan baru; kawasan industri baik di kawasan industri Pelintung, kawasan industri Lubuk Gaung, maupun kawasan industri Bukit Kapur; kawasan perkantoran baik di kawasan perkantoran lama maupun kawasan perkantoran baru di Kelurahan Bukit Kayu Kapur; kawasan pendidikan yang tersebar di seluruh wilayah Kota Dumai; kawasan perdagangan yang tersebar di wilayah pusat Kota Dumai lama; kawasan jalur jalan, sungai, dan jalur pengaman utilitas atau instalasi; kemudian pada tanah yang bentang alamnya bervariasi menurut keadaan lereng dan ketinggian di atas permukaan laut serta kedudukannya terhadap jalur sungai, jalur jalan, dan jalur pengaman utilitas; serta pada tanah di wilayah perkotaan yang dikuasai badan hukum atau perorangan yang tidak dimanfaatkan dan atau ditelantarkan.

Selanjutnya, berdasarkan letaknya Ruang Terbuka Hijau (RTH) di Kota Dumai terdiri dari:

- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Wilayah, yaitu kawasan suaka margasatwa di kecamatan Sungai Sembilan dan Hutan Wisata di Kecamatan Bukit Kapur. Jika dibandingkan luas ruang terbuka hijau wilayah Kota Dumai dengan luas Kota Dumai, maka ruang terbuka hijau di Kota Dumai telah memenuhi syarat yaitu sebesar 30% (tiga puluh persen).
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) Perkotaan yaitu ruang terbuka hijau yang terdapat di kawasan perkotaan yang berupa area tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam. Ruang Terbuka Hijau (RTH) perkotaan yang terdapat di kota Dumai berupa lapangan bola dan lapangan golf.
- Ruang Terbuka Hijau (RTH) lingkungan Perumahan yaitu di setiap lingkungan-lingkungan Perumahan, baik berupa pekarangan rumah tinggal, halaman perkantoran, dan taman atap bangunan. Ruang terbuka hijau di Kota Dumai tersebar di beberapa Kecamatan yaitu Kecamatan Bukit Kapur dengan luas 3.555,64 Ha, Kecamatan Dumai barat dengan luas 581,16 Ha dan Kecamatan Dumai timur dengan luas lahan 27,76 Ha.

- h) Kawasan hutan kota yang ditetapkan sebagai hutan wisata Kota Dumai tersebar di Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Selatan, dan Kecamatan Bukit Kapur seluas kurang lebih 47.125.000 (empat puluh tujuh juta seratus dua puluh lima ribu) meter persegi.

2. Kawasan Budidaya

Kawasan budidaya adalah kawasan yang ditetapkan dengan fungsi utama dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan. Kawasan budidaya di Kota Dumai meliputi:

- a) Kawasan peruntukan perumahan perkotaan dikembangkan di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Timur (sebagai perumahan perkotaan berkepadatan tinggi), Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan (sebagai perumahan perkotaan berkepadatan sedang), serta Kecamatan Medan Kampai dan Bukit Kapur (sebagai perumahan perkotaan berkepadatan rendah). Sedangkan untuk perumahan pertanian terdapat di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Selatan (sebagai perumahan pertanian berkepadatan tinggi), Kecamatan Bukit Kapur (sebagai perumahan pertanian kepadatan sedang), dan Kecamatan Sungai Sembilan (sebagai perumahan pertanian kepadatan rendah).

- b) Kawasan perdagangan dan jasa, terdiri dari kawasan perdagangan dan jasa skala regional, kawasan perdagangan dan jasa skala kota, dan kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan. Kawasan perdagangan dan jasa skala regional yang dikembangkan di kawasan pelabuhan (Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Timur); kawasan peruntukan perdagangan regional dan terminal agribisnis di Kecamatan Dumai Barat; kawasan peruntukan perdagangan regional di Kecamatan Medang Kampai; serta kawasan perdagangan dan pergudangan di Kecamatan Dumai Selatan.

Selanjutnya, kawasan perdagangan dan jasa skala kota dikembangkan di koridor jalan utama kota, yakni Kecamatan Dumai Kota, Dumai Barat, Dumai Timur, Dumai Selatan, dan Bukit Kapur. Kawasan perdagangan dan jasa skala kecamatan dikembangkan di Kecamatan Dumai Barat (Pasar Kelakap), Kecamatan Dumai Timur (Pasar Jaya Mukti), Kecamatan Medang Kampai (Pasar Mundam), Kecamatan Bukit Kapur (Pasar Jumat Bukit Kapur, Pasar Bukit Kapur), dan Kecamatan Sungai Sembilan (Pasar Pemko Dumai).

- c) Kawasan Pusat Pemerintahan, terdiri dari Kawasan Perkantoran Tingkat Kota (Kompleks perkantoran lama dan Kompleks Perkantoran Walikota serta Kompleks Perkantoran DPRD yang berlokasi di Jalan Perwira, Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dengan luas lahan 100.000 m²) dan Kawasan Pusat Pemerintahan Kecamatan (Kecamatan Dumai Kota, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, Dumai Selatan, Bukit Kapur, Sungai Sembilan)
- d) Kawasan Pariwisata di Kota Dumai meliputi kawasan pariwisata alam, budaya, dan buatan, dimana kawasan pariwisata alam di Kota Dumai meliputi penangkaran harimau Hutan Senepis di Kecamatan Sungai Sembilan, Kuala Sungai Dumai di Kecamatan Dumai Barat, Pantai Teluk Makmur di

Kecamatan Medang Kampai, Pantai Purnama di Kecamatan Dumai Barat, Hutan Wisata Sungai Dumai di Kecamatan Dumai Selatan dan Dumai Timur, serta Pesona Bukit Seludung di Kecamatan Medang Kampai.

Kawasan pariwisata budaya meliputi Kompleks Pemakaman Pawang Lion, Kompleks Pemakaman Datuk Delau, Kompleks Batu Telapak Harimau Sakti, Wisata Religi Kompleks Rumah Suluk di Kecamatan Medang Kampai; Kompleks Perigi Tuk Kurus, Kompleks Keramat Cengal Sakti; Kompleks Pemakaman Tuk Kedondong, Kompleks Pemakaman Tuan Syech Umar, dan Wisata Religi Kompleks Rumah Suluk di Kecamatan Medang Kampai; Wisata Religi Kompleks Rumah Suluk di Kecamatan Bukit Kapur dan Kecamatan Dumai Selatan. Sedangkan untuk pariwisata buatan di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Dumai Timur yakni Danau Wisata Bunga Tujuh.

- e) Kawasan Industri yang ada di Kota Dumai meliputi kawasan industri dan pergudangan; kawasan cadangan industri; serta kawasan industri skala usaha mikro, kecil, dan menengah. Kelapa sawit sebagai komoditas utama pada kawasan industri dan pergudangan dikembangkan di Kecamatan Sungai Sembilan dan Medang Kampai. Kawasan cadangan industri dikembangkan di Kecamatan Medang Kampai.

Selanjutnya, kawasan industri skala usaha mikro, kecil, dan menengah di Kota Dumai meliputi sentra industri batu bata di Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat; industri tahu dikembangkan di Kecamatan Dumai Timur; dan sentra-sentra industri yang tersebar di tiap kecamatan yang terdapat di lingkup wilayah Kota Dumai.

- f) Kawasan peruntukan ruang terbuka non hijau di Kota Dumai dikembangkan di Taman Bukit Gelanggang (Kecamatan Dumai Timur), yang meliputi alun-alun kota, pelataran parkir, serta arena bermain (play ground).
- g) Kawasan peruntukan sektor informal yang meliputi kawasan yang tidak terintegrasi dengan perdagangan dan jasa formal yang dikembangkan di Kecamatan Dumai Kota (pusat kuliner malam di Jalan Ombak), Kecamatan Dumai Timur (pusat kuliner di Jalan Janur Kuning), serta pasar Ramadhan yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Dumai selama bulan Ramadhan.
- h) Kawasan peruntukan pertahanan dan keamanan di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Dumai Kota (Kodim dan Koramil), Kecamatan Dumai Timur (Lanal dan Polres), Kecamatan Bukit Kapur (Den Rudal, Kompi Senapan, YONIF-132/ Bima Sakti), serta Koramil dan Polsek yang tersebar di setiap kecamatan di Kota Dumai. Selain itu juga dikembangkan kawasan pertahanan dan keamanan di Kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur, dan Sungai Sembilan.
- i) Kawasan peruntukan lainnya meliputi kawasan hutan produksi, kawasan pertanian, peruntukan pelabuhan, peruntukan pengembangan bandara, kawasan perikanan, kawasan pengembangan Dumai Baru, kawasan industri pengolahan migas, dan kawasan transmigrasi. Kawasan hutan produksi terletak di Kecamatan Sungai Sembilan dan Bukit Kapur.

Pengembangan kawasan pertanian di Kota Dumai meliputi kawasan pertanian tanaman pangan, pertanian hortikultura, perkebunan, serta kawasan cadangan pertanian dan perkebunan. Kawasan pertanian tanaman pangan terdiri dari kawasan pusat pelayanan pertanian terpadu di Kecamatan Medang Kampai; kawasan peruntukan lahan basah di Kecamatan Sungai Sembilan, Dumai Barat, dan Dumai Selatan yang diprioritaskan sebagai Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Kawasan hortikultura terdapat di Kecamatan Medang Kampai, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, dan Dumai Selatan. Sedangkan untuk kawasan perkebunan terletak di Kecamatan Sungai Sembilan, Bukit Kapur, Medang Kampai, Dumai Timur, Dumai Barat, dan Dumai Selatan. Kawasan Peruntukan perkebunan rakyat terletak di Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan peruntukan pertanian yang selanjutnya adalah kawasan peruntukan cadangan pertanian dan perkebunan di Kecamatan Medang Kampai.

Kawasan peruntukan pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai Kota dan Dumai Timur, untuk pengembangan pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Medang Kampai, sedangkan untuk pengembangan pelabuhan terpadu terletak di Kecamatan Dumai Barat. Bagi peruntukan pengembangan bandara di Kota Dumai yakni pengembangan Bandara Pinang Kampai yang terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Bukit Kapur.

Kawasan peruntukan perikanan di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Sungai Sembilan. Kawasan lainnya yakni peruntukan pengembangan Dumai Baru di Kecamatan Bukit Kapur dan Dumai Selatan. Kawasan peruntukan industri pengolahan migas di Kota Dumai terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Dumai Selatan. Kawasan selanjutnya adalah kawasan transmigrasi terletak di Kecamatan Sungai Sembilan.

- j) Kawasan Migas dan Non Migas, yaitu: a. Kawasan operasional PT. Pertamina UP II Dumai dan rencana kawasan Pelabuhan terpadu yang terletak di antara Kelurahan Jayamukti dan Bukit Palas Kecamatan Dumai Timur dengan luas 247,09 Ha; b. Kawasan operasional PT. Chevron Pasific Indonesia yang terletak di Kelurahan Bumi Ayu Kecamatan Dumai Timur dengan Luas 459.72 Ha.
- k) Kawasan Pelabuhan di Kota Dumai meliputi pelabuhan laut yang dikelola oleh Pemerintah yaitu oleh PT. Pelabuhan Indonesia Regional I (mengoperasikan kegiatan pelabuhan untuk penumpang, dan juga bongkar muat barang untuk kepentingan Kota Dumai dan juga untuk kepentingan kota-kota di sekitar Kota Dumai); pelabuhan khusus yang dimiliki oleh PT. Pertamina maupun yang dimiliki PT. Chevron Pacific Indonesia sebagai pelabuhan khusus bongkar muat bahan bakar minyak dan gas bumi untuk kepentingan ekspor. Selain itu Kota Dumai telah memiliki Pelabuhan Khusus untuk bongkar muat Crude Palm Oil (CPO) yang dibangun oleh PT. Bukit Kapur Reksa (BKR), serta pelabuhan untuk bongkar muat pupuk, khususnya pupuk NPK yang diproduksi oleh PT. Sentana Adidaya Pratama, dimana Pelabuhan yang berada di Pelintung tersebut khusus untuk kegiatan bongkar muat dan pemasaran daerah maupun ke luar negeri.

G. Wilayah Rawan Bencana

Bencana alam adalah konsekuensi dari kombinasi aktivitas alami (suatu peristiwa fisik, seperti letusan gunung, gempa bumi, tanah longsor) dan aktivitas manusia. Karena ketidakberdayaan manusia, akibat kurang baiknya manajemen keadaan darurat, sehingga menyebabkan kerugian dalam bidang keuangan dan struktural, bahkan sampai kematian. Kerugian yang dihasilkan tergantung pada kemampuan untuk mencegah atau menghindari bencana dan daya tahan mereka. Pemahaman ini berhubungan dengan pernyataan: "bencana muncul bila ancaman bahaya bertemu dengan ketidakberdayaan". Dengan demikian, aktivitas alam yang berbahaya tidak akan menjadi bencana alam di daerah tanpa ketidakberdayaan manusia, misalnya gempa bumi di wilayah tak berpenghuni. Konsekuensinya, pemakaian istilah "alam" juga ditentang karena peristiwa tersebut bukan hanya bahaya atau malapetaka tanpa keterlibatan manusia. Namun demikian pada daerah yang memiliki tingkat bahaya tinggi serta memiliki kerentanan/kerawanan yang juga tinggi tidak akan memberi dampak yang hebat/luas jika manusia yang berada disana memiliki ketahanan terhadap bencana (disaster resilience). Konsep ketahanan bencana merupakan valuasi kemampuan sistem dan infrastruktur-infrastruktur untuk mendeteksi, mencegah dan menangani tantangan-tantangan serius yang hadir. Dengan demikian meskipun daerah tersebut rawan bencana dengan jumlah penduduk yang besar jika diimbangi dengan ketahanan terhadap bencana yang cukup.

Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan. Selain itu terdapat juga potensi angin puting beliung yang disebabkan tingginya potensi Edi Sirkulasi dimana dorongan kecepatan angin mencapai lebih dari 30 km/jam. Edi Sirkulasi yang menyebabkan kecepatan angin ini dikarenakan faktor masa transisi dari musim kemarau ke musim penghujan. Jika dilihat dari banyaknya kejadian bencana berupa kabut, maka pada tahun 2002 terdapat 58 kejadian bencana kabut, sedangkan untuk bencana asap paling banyak terjadi pada tahun 2009. Berikut ini banyaknya kejadian kabut dan asap di Kota Dumai yang disebabkan oleh kebakaran hutan dan lahan.

Tabel 2.1.1.5
Banyaknya Kejadian Kabut di Kota Dumai

Bulan	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari									5			
Februari	10		26						7		1	1
Maret	15		32									
April	5				1			1	5	2		
Mei								2	2	2	1	1
Juni		9								5		
Juli		16		14			2	3		1		
Agustus				9					2			
September				4						2		
Oktober									2	2		
Nopember					2			3	2	1		
Desember												
Jumlah Kejadian	30	25	58	27	3	0	2	9	25	15	2	2

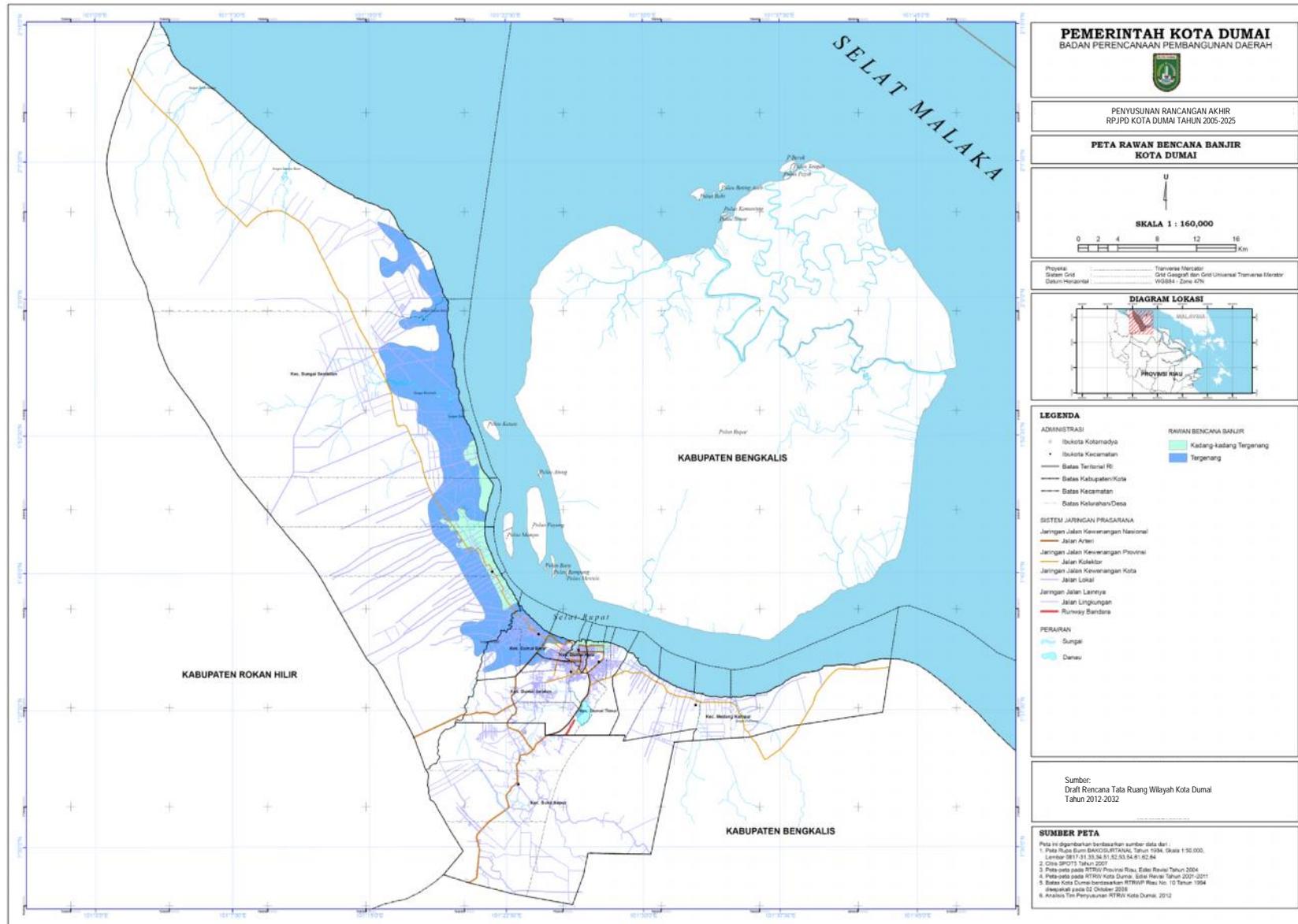
Sumber : Kota Dumai dalam Angka Tahun 2000-2011

Tabel 2.1.1.6
Banyaknya Kejadian Asap di Kota Dumai

Bulan	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Januari						8			
Februari		10			9	7		1	1
Maret								5	5
April	13			10			4		
Mei	22					4	4		
Juni		8					14		
Juli					3	2	19		
Agustus	4	12		9	4	11	14		
September		10		1		2	3		
Oktober				15			2		
Nopember									
Desember									
Jumlah Kejadian	39	40	0	35	16	34	60	6	6

Sumber : Kota Dumai dalam Angka Tahun 2000-2011

Selain bencana kabut dan asap, masalah banjir hingga saat ini masih menjadi persoalan terutama di kawasan pinggiran Kota Dumai. Ketika hujan dan pasang laut naik, kondisi pinggiran kota dan sebagian jalan di tengah kota memprihatinkan. Jika dilihat dari peta rawan bencana banjir, maka kecamatan yang memiliki rawan bencana banjir adalah Kecamatan Sungai Sembilan dan Dumai Barat. Hal itu disebabkan hampir sebagian besar daratan di Dumai merupakan lahan gambut, sehingga setiap hujan dan pasang, air selalu tertahan cukup lama. Berikut ini wilayah rawan bencana banjir yang terjadi di Kota Dumai.



Gambar 2.1.1.2 Peta Rawan Bencana Kota Dumai
Sumber: Draft RTRW Kota Dumai 2012-2032

2.1.2. ASPEK DEMOGRAFI

A. Perkembangan Jumlah Penduduk

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumberdaya manusia (SDM) yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumberdaya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumberdaya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Jumlah penduduk yang besar dapat memberikan keuntungan ekonomis yakni biaya tenaga kerja yang relatif murah dan terjaminnya persediaan tenaga kerja. Sementara itu sebagai penerima manfaat pembangunan, berarti semua upaya yang dilakukan oleh pembangunan sasarannya adalah peningkatan kesejahteraan dan kualitas penduduk. Jumlah penduduk yang besar akan menjadi beban pembangunan jika tidak disertai oleh peningkatan derajat kualitas penduduk yang memadai.

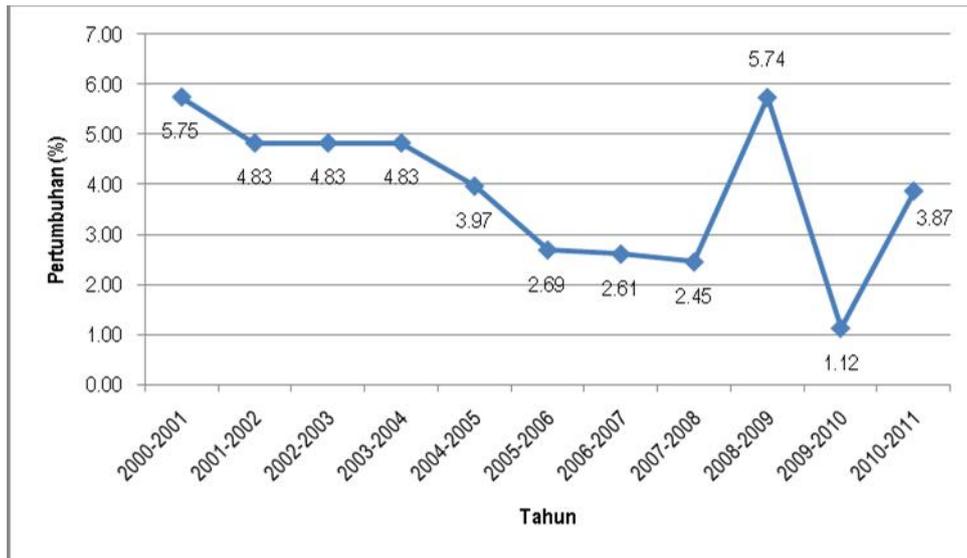
Pertumbuhan penduduk adalah perubahan jumlah penduduk di suatu wilayah tertentu pada waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Indikator tingkat pertumbuhan penduduk sangat berguna untuk memprediksi jumlah penduduk sehingga akan diketahui pula kebutuhan dasar penduduk. Jumlah penduduk di Kota Dumai secara umum mengalami penambahan setiap tahunnya. Peningkatan jumlah penduduk ini dapat dilihat dari laju pertumbuhan penduduk setiap tahunnya.

Laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai menunjukkan peningkatan selama tahun 2000 sampai dengan 2011 yaitu 3,87%. Dalam kurun waktu tersebut yang terbagi dalam beberapa periode laju pertumbuhan penduduk mengalami fluktuasi. Pada tahun 2002 sampai dengan tahun 2004 laju pertumbuhan penduduknya cenderung stagnan, dan selama periode 2005-2008 mengalami penurunan sampai 2,45%. Laju pertumbuhan tertinggi terjadi pada periode 2000-2001 yaitu 5,75% per tahun, sedangkan laju pertumbuhan terendah terjadi pada tahun 2009-2010 (1,12%). Selain kematian penduduk, kegiatan transmigrasi dan banyaknya minat menjadi tenaga kerja ke luar daerah maupun luar negeri menjadi salah satu indikator berkurangnya jumlah penduduk di beberapa kecamatan. Berikut ini tabel dan grafik yang menunjukkan pertumbuhan penduduk di Kota Dumai selama tahun 2000-2011.

Tabel 2.1.2.1
Laju PertumbuhanPenduduk Kota Dumai
Tahun 2000-2011

Tahun	Laki-laki	Perempuan	Jumlah	Pertumbuhan (%)
2000	89.952	83.236	173.188	
2001	93.871	89.274	183.144	5,75
2002	99.514	92.476	191.990	4,83
2003	106.696	94.567	201.263	4,83
2004	111.851	99.133	210.984	4,83
2005	112.924	106.427	219.351	3,97
2006	112.958	112.291	225.249	2,69
2007	115.902	115.219	231.121	2,61
2008	118.738	118.040	236.778	2,45
2009	129.992	120.375	250.367	5,74
2010	130.910	122.268	253.178	1,12
2011	136.313	126.663	262.976	3,87

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2007-2011



Gambar 2.1.2.1
 Grafik Laju Pertumbuhan Penduduk di Kota Dumai per Tahun Selama Periode 2000-2011
 Sumber: Kota Dumai dalam Angka 2007-2011, Hasil Analisis 2013

Jumlah penduduk paling banyak terdapat di Kecamatan Dumai Barat dan jumlah penduduk paling sedikit terdapat di Kecamatan Medang Kampai. Jika dilihat dari laju pertumbuhan penduduk di masing-masing kecamatan, selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2011, laju pertumbuhan penduduk tertinggi terjadi di Kecamatan Medang Kampai mencapai 15,33% dan untuk Kecamatan Sungai Sembilan sebesar 11,76%. Pertumbuhan penduduk yang paling rendah terjadi di Kecamatan Dumai Timur yaitu 1,09%. Berikut ini laju pertumbuhan penduduk Kota Dumai selama tahun 2007 sampai dengan 2011

Tabel 2.1.2.2
 Laju Pertumbuhan Penduduk Kota Dumai
 Tahun 2007-2011 dirinci per Kecamatan

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)					Pertumbuhan (%)
		2007	2008	2009	2010	2011	
1.	Bukit Kapur	32.385	33.178	36.928	37.953	39.424	5,04
2.	Medang Kampai	5.982	6.128	9.894	10.188	10.583	15,33
3.	Sungai Sembilan	18.286	18.734	26.644	27.465	28.529	11,76
4.	Dumai Barat	87.320	89.457	89.088	89.968	93.447	1,71
5.	Dumai Timur	87.148	89.281	87.813	87.604	90.993	1,09
	Kota Dumai	231.121	236.778	250.367	253.178	262.976	3,28

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2007-2011, Hasil Analisis 2013

B. Kepadatan dan Sebaran Penduduk

Kependudukan merupakan salah satu elemen dasar yang berkaitan dengan wilayah. Perkiraan mengenai kependudukan menurut berbagai karakteristik jumlah dan komposisi penduduk pada suatu wilayah merupakan input dari pembangunan yang sangat penting bagi rencana-rencana seperti permintaan akan barang atau jasa pelayanan serta kebutuhan akan lahan di masa yang akan datang. Secara empiris, penduduk akan banyak dijumpai pada daerah-daerah yang memiliki aktivitas ekonomi yang tinggi,

tersedianya sarana dan prasarana sosial, transportasi yang memadai, serta kondisi sosial ekonomi yang lebih baik.

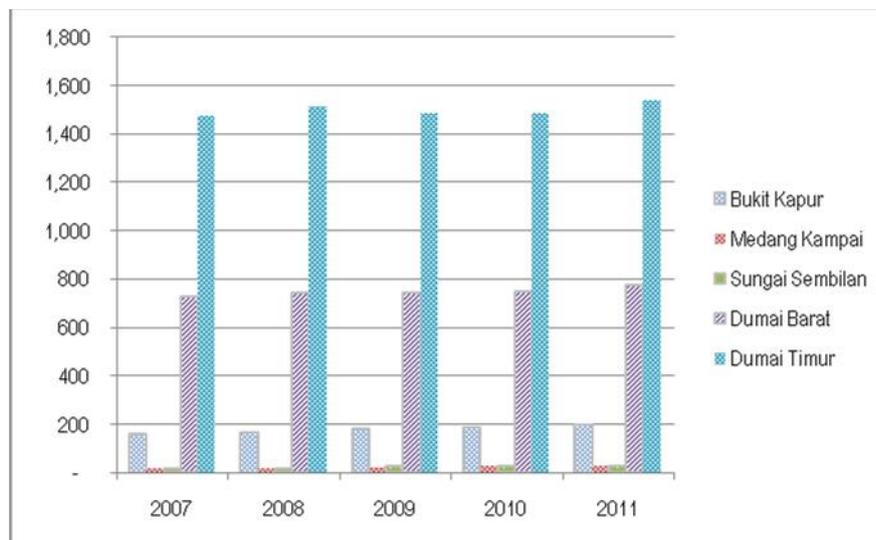
Kepadatan dan sebaran penduduk yang tinggi di Kecamatan Dumai Timur disebabkan oleh besarnya jumlah penduduk dan luas wilayahnya didominasi oleh guna lahan terbangun sehingga terjadi pemusatan pemukiman dan kegiatan perkotaan lainnya di kecamatan ini, disamping Kecamatan Dumai Barat. Kegiatan perdagangan, jasa dan pelabuhan laut Dumai (pelabuhan ekspor dan penumpang yang cukup ramai) yang terfokus pada dua wilayah Kecamatan yaitu Dumai Barat dan Dumai Timur, memberikan andil yang cukup besar terhadap konsentrasi penduduk Kota Dumai.

Sampai dengan tahun 2011, jumlah penduduk di Kota Dumai mencapai 262.976 jiwa, dengan jumlah penduduk paling banyak ada di Kecamatan Dumai Barat. Jika dilihat dari tingkat kepadatan penduduknya, maka kepadatan penduduk paling tinggi ada di Kecamatan Timur yaitu 1.542 jiwa/km², sedangkan kecamatan dengan tingkat kepadatan penduduk paling rendah ada di Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan. Kedua kecamatan tersebut merupakan pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur pada tahun 2001. Berikut ini adalah tabel dan grafik yang menunjukkan tingkat kepadatan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.1.2.3
Kepadatan Penduduk Kota Dumai Tahun 2011

No	Kecamatan	Luas Wilayah (km ²)	Kepadatan Penduduk (jiwa/km ²)				
			2007	2008	2009	2010	2011
1	Bukit Kapur	200,00	162	166	185	190	197
2	Medang Kampai	373,00	16	16	27	27	28
3	Sungai Sembilan	975,38	19	19	27	28	29
4	Dumai Barat	120,00	728	745	742	750	779
5	Dumai Timur	59,00	1.477	1.513	1.488	1.485	1.542
	Kota Dumai	1.727,38	134	137	145	147	152

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2011, BPS



Gambar 2.1.2.2
Tingkat Kepadatan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2007-2011
Sumber: Kota Dumai dalam Angka 2007-2011, Hasil Analisis 2013

C. Struktur Penduduk

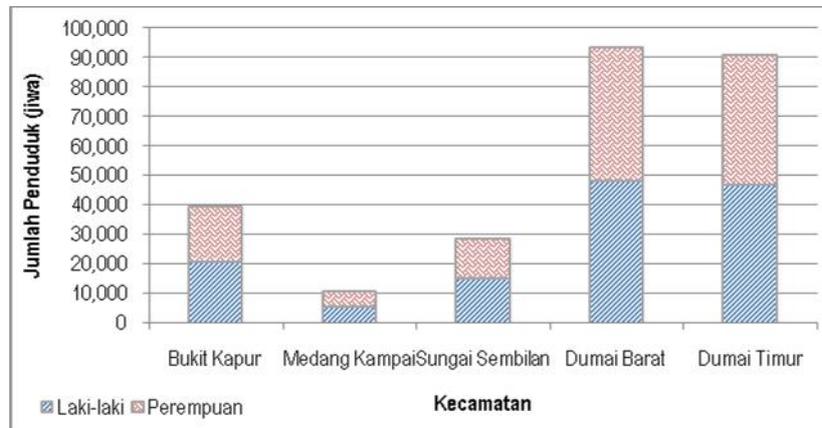
1. Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin

Perbandingan antara jumlah penduduk laki-laki dengan penduduk perempuan (sex ratio) di Kota Dumai pada tahun 2011 sebesar 108, artinya setiap 100 penduduk perempuan di Kota Dumai terdapat 108 penduduk laki-laki. Seluruh Kecamatan di Kota Dumai memiliki sex ratio > 100, artinya seluruh kecamatan di Kota Dumai jumlah penduduk laki-laknya lebih banyak daripada perempuan. Kecamatan Medang Kampai merupakan kecamatan yang memiliki sex ratio terbesar (114), sedangkan sex ratio terkecil terdapat di Kecamatan Dumai Barat dan Dumai Timur yaitu 106 yang berarti setiap 100 perempuan terdapat 106 penduduk laki-laki.

Tabel 2.1.2.4
Rasio Jenis Kelamin Penduduk Kota Dumai Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (jiwa)		Rasio Jenis Kelamin
		Laki-laki	Perempuan	
1	Bukit Kapur	20.728	18.696	111
2	Medang Kampai	5.631	4.952	114
3	Sungai Sembilan	15.034	13.495	111
4	Dumai Barat	48.042	45.405	106
5	Dumai Timur	46.878	44.115	106
	Kota Dumai	136.313	126.663	108

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2011, Hasil analisis 2013



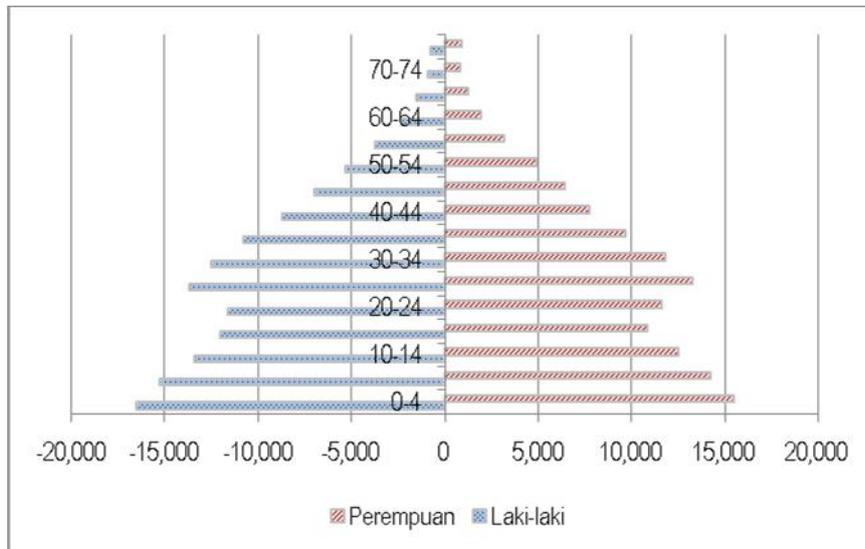
Gambar 2.1.2.3
Grafik Perbandingan Jumlah Penduduk Laki-laki dan Perempuan di Kota Dumai Tahun 2011

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2011; Hasil analisis 2013

2. Komposisi Penduduk Menurut Kelompok Umur

Komposisi penduduk menurut umur dapat menggambarkan distribusi penduduk sesuai kelompok umur. Komposisi penduduk menurut kelompok umur seperti yang terlihat pada gambar 2.1.2.4 di bawah ini yang menunjukkan bahwa Kota Dumai dikategorikan sebagai penduduk muda. Hal tersebut dikarenakan oleh presentase penduduk muda terhadap total penduduk masih cukup besar. Penduduk usia produktif yang banyak merupakan potensi sumberdaya manusia suatu wilayah. Jika dilihat secara demografis, struktur penduduk Kota Dumai memiliki potensi untuk pengembangan wilayah. Pada tahun 2011 sebanyak 64,40%

penduduk termasuk dalam kategori penduduk usia produktif (usia 15-65 tahun), sedangkan 35,60% sisanya merupakan penduduk usia tidak produktif. Hal ini berarti angka beban tanggungan penduduk Kota Dumai sebesar 55,28 artinya tiap 100 orang penduduk produktif harus menanggung 55 orang penduduk tidak produktif. Semakin besar proporsi penduduk usia tidak produktif, maka semakin besar beban yang ditanggung oleh penduduk usia produktif.



Gambar 2.1.2.4
 Piramida Penduduk Kota Dumai Tahun 2011
 Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2011; Hasil analisis 2013

Komposisi penduduk menurut kelompok umur memperlihatkan bahwa penduduk usia produktif lebih banyak menanggung anak-anak yang belum aktif secara ekonomi. Apabila dicermati lebih lanjut, 12,19% penduduk Kota Dumai merupakan balita dan 21,09% merupakan penduduk usia 5-14 tahun. Kondisi ini menuntut perhatian Pemerintah Kota dalam penanganan penduduk balita dan usia 5-16 tahun terutama dari segi kesehatan dan asupan gizi serta pelayanan pendidikan dasar.

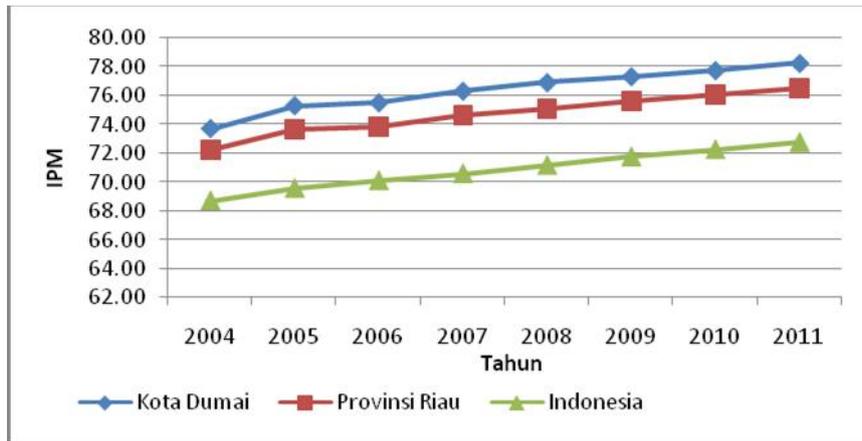
D. Kondisi IPM Kota Dumai

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan ukuran capaian pembangunan manusia berbasis sejumlah komponen dasar kualitas hidup. IPM menggambarkan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan hidup waktu lahir), indikator pendidikan (indeks angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (ditunjukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/ indeks daya beli penduduk). Dilihat dari capaian IPM Kota Dumai, menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Sampai dengan tahun 2011 IPM Kota Dumai mencapai 78,25 (tabel 2.1.2.5). Apabila dibandingkan dengan IPM skala Provinsi Riau dan Nasional, capaian IPM Kota Dumai telah melebihi IPM Provinsi Riau dan skala nasional. Hal ini menunjukkan bahwa kualitas hidup masyarakat Kota Dumai lebih baik dari aspek kesehatan, pendidikan maupun kondisi ekonominya. Perkembangan IPM Kota Dumai tersebut menunjukkan peningkatan selama kurun waktu tahun 2004 sampai 2011 (gambar 2.1.2.5).

Tabel 2.1.2.5
Perbandingan Kondisi IPM Kota Dumai dengan Skala Provinsi dan Nasional Tahun 2004-2011

Cakupan Wilayah	Tahun							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kota Dumai	73,70	75,30	75,50	76,31	76,91	77,33	77,75	78,25
Provinsi Riau	72,20	73,63	73,81	74,63	75,09	75,60	76,07	76,53
Indonesia	68,70	69,57	70,10	70,59	71,17	71,76	72,27	72,77

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Gambar 2.1.2.5
Grafik Perbandingan IPM Kota Dumai, Provinsi Riau, dan Indonesia
Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Angka IPM yang cukup tinggi tidak sepenuhnya merefleksikan tingkat kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan penduduk dapat dicapai jika pemerataan hasil pembangunan telah terealisasi. Kondisi IPM Kota Dumai jika dibandingkan dengan kabupaten/kota sekitarnya, masih berada dibawah IPM Kota Pekanbaru, namun jika dibandingkan dengan Kabupaten di Provinsi Riau, maka IPM Kota Dumai adalah nomor dua setelah Kota Pekanbaru.

Tabel 2.1.2.6
Kondisi IPM Kota Dumai dan Kabupaten Sekitarnya di Provinsi Riau Tahun 2004-2011

Provinsi / Kabupaten	IPM							
	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Kuantan Sengingi	70,6	71,6	71,9	72,47	72,95	73,38	73,7	74,15
Indragiri Hulu	68,9	70,9	72	72,96	73,43	73,89	74,18	74,54
Indragiri Hilir	71,4	72,7	73,4	73,87	74,41	74,95	75,24	75,71
Pelalawan	68,7	69,2	70	71,43	72,07	72,69	73,18	73,59
Siak	72,6	73,5	74,6	75,15	75,64	76,05	76,46	76,92
Kampar	69,8	71,7	72	72,98	73,64	74,14	74,43	75,18
Rokan Hulu	69,5	70,1	71	71,43	71,84	72,29	72,66	73,1
Bengkalis	71,9	72,9	73,1	73,36	74,12	74,64	75,11	75,53
Rokan Hilir	67,6	68,6	70,9	71,06	71,51	71,98	72,43	72,83
Kota Pekanbaru	75,6	75,9	76,2	76,98	77,54	77,86	78,27	78,72
Kota Dumai	73,7	75,3	75,5	76,31	76,91	77,33	77,75	78,25

Sumber: Pembangunan Manusia Berbasis Gender Tahun 2005-2012, Kerjasama BPS dengan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

2.2. ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

2.2.1. FOKUS KESEJAHTERAAN DAN PEMERATAAN EKONOMI

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Perkembangan PDRB

Kondisi ekonomi daerah dapat dilihat melalui perkembangan PDRB. Selama tahun 2000-2010, PDRB Kota Dumai terus mengalami kenaikan. Pada tahun 2010, PDRB Kota Dumai dengan migas ADHK adalah sebesar 3,7 triliun rupiah, sedangkan PDRB tanpa migas ADHK adalah sebesar 2,08 triliun rupiah (tabel 2.2.1.1 dan tabel 2.2.1.2). Peningkatan PDRB ini menunjukkan adanya kegiatan ekonomi masyarakat yang terus berkembang di Kota Dumai.

Tabel 2.2.1.1
PDRB Kota Dumai Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			Kontribusi Sektoral (%)			
	2000	2005	2010	2000	2005	2010	Pergeseran
1. PERTANIAN	96.700,67	120.273,44	146.403,98	3,45	4,07	3,94	0,49
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5.183,20	7.720,87	12.132,90	0,19	0,26	0,33	0,14
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.896.076,92	1.657.374,65	1.734.350,86	67,74	56,03	46,67	-21,07
a. Industri Migas	1.850.807,07	1.588.403,43	1.629.355,28	66,13	53,69	43,85	-22,28
b. Industri Tanpa Migas	45.269,85	68.971,22	104.995,58	1,62	2,33	2,83	1,21
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH.	9.358,24	11.315,07	13.365,77	0,33	0,38	0,36	0,03
5. BANGUNAN	171.575,39	240.574,06	362.499,67	6,13	8,13	9,76	3,63
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	251.962,46	370.500,87	610.088,17	9,00	12,52	16,42	7,42
a. Perdagangan Besar & Eceran	245.212,41	360.949,81	597.359,79	8,76	12,20	16,08	7,31
b. Hotel	5.166,64	6.956,18	9.093,56	0,18	0,24	0,24	0,06
c. Restoran	1.583,41	2.594,88	3.634,82	0,06	0,09	0,10	0,04
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	198.721,99	299.379,34	447.914,74	7,10	10,12	12,05	4,95
a. Pengangkutan	192.104,22	286.865,68	418.659,39	6,86	9,70	11,27	4,40
1. Angkuta Jalan Raya	32.528,56	51.296,56	78.787,06	1,16	1,73	2,12	0,96
2. Angkuta Laut	147.665,54	214.670,88	308.208,75	5,28	7,26	8,29	3,02
3. Angkutan Udara	848,62	1.849,46	3.061,81	0,03	0,06	0,08	0,05
4. Jasa Penunjang Angkutan	11.061,50	19.048,78	28.601,77	0,40	0,64	0,77	0,37
b. Komunikasi	6.617,77	12.513,66	29.255,35	0,24	0,42	0,79	0,55
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	18.903,96	30.776,14	43.953,97	0,68	1,04	1,18	0,51
9. JASA-JASA	150.468,09	220.305,85	345.221,14	5,38	7,45	9,29	3,91
a. Pemerintahan Umum	118.944,36	173.374,71	279.409,22	4,25	5,86	7,52	3,27
b. S w a s t a	31.523,73	46.931,14	65.811,92	1,13	1,59	1,77	0,64
PDRB dengan migas	2.798.950,92	2.958.220,29	3.715.931,20	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Pendapatan Regional Dumai Menurut Lapangan Usaha 2000-2010, BPS

Tabel 2.2.1.2
PDRB Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			Kontribusi Sektoral (%)			
	2000	2005	2010	2000	2005	2010	Pergeseran
1. PERTANIAN	96.700,67	120.273,44	146.403,98	10,20	8,78	7,02	-3,18
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5.183,20	7.720,87	12.132,90	0,55	0,56	0,58	0,03
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	45.269,85	68.971,22	104.995,58	4,77	5,04	5,03	0,26
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH.	9.358,24	11.315,07	13.365,77	0,99	0,83	0,64	-0,35
5. BANGUNAN	171.575,39	240.574,06	362.499,67	18,10	17,56	17,37	-0,72
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	251.962,46	370.500,87	610.088,17	26,57	27,05	29,24	2,66
a. Perdagangan Besar & Eceran	245.212,41	360.949,81	597.359,79	25,86	26,35	28,63	2,77
b. Hotel	5.166,64	6.956,18	9.093,56	0,54	0,51	0,44	-0,11
c. Restoran	1.583,41	2.594,88	3.634,82	0,17	0,19	0,17	0,01

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)			Kontribusi Sektoral (%)			
	2000	2005	2010	2000	2005	2010	Pergeseran
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	198.721,99	299.379,34	447.914,74	20,96	21,86	21,47	0,51
a. Pengangkutan	192.104,22	286.865,68	418.659,39	20,26	20,94	20,06	-0,20
1. Angkuta Jalan Raya	32.528,56	51.296,56	78.787,06	3,43	3,74	3,78	0,35
2. Angkuta Laut	147.665,54	214.670,88	308.208,75	15,57	15,67	14,77	-0,80
3. Angkuta Udara	848,62	1.849,46	3.061,81	0,09	0,14	0,15	0,06
4. Jasa Penunjang Angkutan	11.061,50	19.048,78	28.601,77	1,17	1,39	1,37	0,20
b. Komunikasi	6.617,77	12.513,66	29.255,35	0,70	0,91	1,40	0,70
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	18.903,96	30.776,14	43.953,97	1,99	2,25	2,11	0,11
9. JASA-JASA	150.468,09	220.305,85	345.221,14	15,87	16,08	16,54	0,68
a. Pemerintahan Umum	118.944,36	173.374,71	279.409,22	12,54	12,66	13,39	0,85
b. S w a s t a	31.523,73	46.931,14	65.811,92	3,32	3,43	3,15	-0,17
PDRB tanpa migas	948.143,85	1.369.816,86	2.086.575,92	100,00	100,00	100,00	0,00

Sumber: Pendapatan Regional Dumai Menurut Lapangan Usaha 2000-2010, BPS

Sektor ekonomi yang dominan di Kota Dumai adalah kegiatan pengolahan hasil pertambangan. Pada PDRB dengan migas, kontribusi sektor ini mencapai 43,8%, yaitu sektor perdagangan dan sektor angkutan terutama angkutan laut. Sektor industri pengolahan migas maju karena adanya ketersediaan sumberdaya migas dan juga ditopang oleh perusahaan-perusahaan migas berkelas.

Pada PDRB tanpa migas, sektor yang dominan adalah sektor perdagangan, sektor pengangkutan, sektor bangunan, dan sektor jasa. Majunya sektor sekunder dan tersier ini mencerminkan karakteristik wilayah kota. Kota Dumai sebagai kota pelabuhan memiliki sarana penunjang kegiatan perdagangan dan pengangkutan yang memadai. Kegiatan perdagangan di Kota Dumai juga mencakup perdagangan luar negeri dengan kegiatan ekspor impor melalui pelabuhan. Sektor bangunan juga menjadi tumpuan karena kota ini masih dalam tahap membangun fasilitas umum maupun privat. Selain itu, Kota Dumai juga melayani kepentingan masyarakat melalui pelayanan jasa pemerintahan.

2. Pertumbuhan PDRB

Besaran PDRB Kota Dumai terus meningkat dari tahun ke tahun. PDRB dengan migas tercatat tumbuh rata-rata sebesar 2,87% per tahun, sedangkan rata-rata pertumbuhan PDRB tanpa migas adalah sebesar 8,21% per tahun (lihat tabel 2.2.1.3 dan 2.2.1.4). Adanya perbedaan yang relatif besar ini disebabkan karena pertumbuhan subsektor industri pengolahan migas adalah negatif. Artinya nilai tambah subsektor ini menurun sehingga mengakibatkan nilai PDRB migas Kota Dumai hanya mengalami peningkatan relatif kecil.

Tabel 2.2.1.3
Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Dengan Migas Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan		Kontribusi thd Peningkatan PDRB
	2000	2010	%/tahun	Rp	
1. PERTANIAN	96.700,67	146.403,98	4,23	49.703,31	5,42
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5.183,20	12.132,90	8,88	6.949,70	0,76
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	1.896.076,92	1.734.350,86	-0,89	-161.726,06	-17,64
a. Industri Migas	1.850.807,07	1.629.355,28	-1,27	-221.451,79	-24,15
b. Industri Tanpa Migas	45.269,85	104.995,58	8,78	59.725,73	6,51
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH.	9.358,24	13.365,77	3,63	4.007,53	0,44
5. BANGUNAN	171.575,39	362.499,67	7,77	190.924,28	20,82
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	251.962,46	610.088,17	9,25	358.125,71	39,05

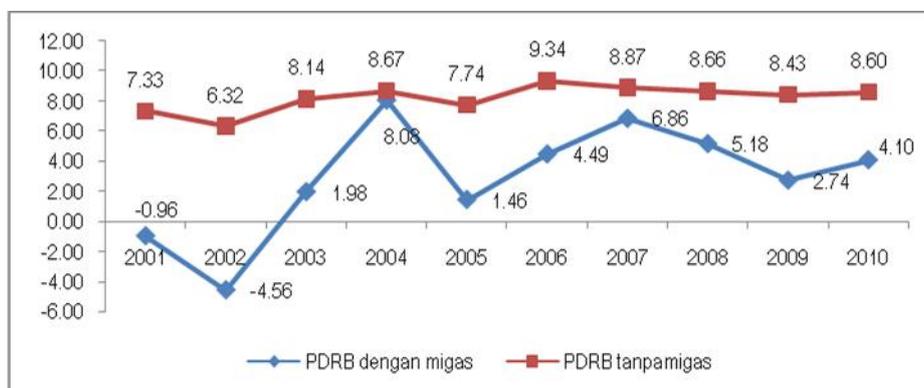
Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan		Kontribusi thd Peningkatan PDRB
	2000	2010	%/tahun	Rp	
a. Perdagangan Besar & Eceran	245.212,41	597.359,79	9,31	352.147,38	38,40
b. Hotel	5.166,64	9.093,56	5,82	3.926,92	0,43
c. Restoran	1.583,41	3.634,82	8,66	2.051,41	0,22
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	198.721,99	447.914,74	8,47	249.192,75	27,18
a. Pengangkutan	192.104,22	418.659,39	8,10	226.555,17	24,71
1. Angkuta Jalan Raya	32.528,56	78.787,06	9,25	46.258,50	5,04
2. Angkuta Laut	147.665,54	308.208,75	7,64	160.543,21	17,51
3. Angkutan Udara	848,62	3.061,81	13,69	2.213,19	0,24
4. Jasa Penunjang Angkutan	11.061,50	28.601,77	9,97	17.540,27	1,91
b. Komunikasi	6.617,77	29.255,35	16,02	22.637,58	2,47
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	18.903,96	43.953,97	8,80	25.050,01	2,73
9. JASA-JASA	150.468,09	345.221,14	8,66	194.753,05	21,24
a. Pemerintahan Umum	118.944,36	279.409,22	8,92	160.464,86	17,50
b. S w a s t a	31.523,73	65.811,92	7,64	34.288,19	3,74
PDRB dengan migas	2.798.950,92	3.715.931,20	2,87	916.980,28	100,00

Sumber: Pendapatan Regional Dumai Menurut Lapangan Usaha 2000-2010, BPS

Tabel 2.2.1.4
Pertumbuhan PDRB Kota Dumai Tanpa Migas Atas Dasar Harga Konstan

Lapangan Usaha	PDRB (Juta Rupiah)		Pertumbuhan		Kontribusi thd Peningkatan PDRB
	2000	2010	%/tahun	Rp	
1. PERTANIAN	96.700,67	146.403,98	4,23	49.703,31	4,37
2. PERTAMBANGAN & PENGGALIAN	5.183,20	12.132,90	8,88	6.949,70	0,61
3. INDUSTRI PENGOLAHAN	45.269,85	104.995,58	8,78	59.725,73	5,25
4. LISTRIK DAN AIR BERSIH.	9.358,24	13.365,77	3,63	4.007,53	0,35
5. BANGUNAN	171.575,39	362.499,67	7,77	190.924,28	16,77
6. PERDAGANGAN, HOTEL DAN RESTORAN	251.962,46	610.088,17	9,25	358.125,71	31,46
a. Perdagangan Besar & Eceran	245.212,41	597.359,79	9,31	352.147,38	30,93
b. Hotel	5.166,64	9.093,56	5,82	3.926,92	0,34
c. Restoran	1.583,41	3.634,82	8,66	2.051,41	0,18
7. PENGANGKUTAN DAN KOMUNIKASI	198.721,99	447.914,74	8,47	249.192,75	21,89
a. Pengangkutan	192.104,22	418.659,39	8,10	226.555,17	19,90
1. Angkuta Jalan Raya	32.528,56	78.787,06	9,25	46.258,50	4,06
2. Angkuta Laut	147.665,54	308.208,75	7,64	160.543,21	14,10
3. Angkutan Udara	848,62	3.061,81	13,69	2.213,19	0,19
4. Jasa Penunjang Angkutan	11.061,50	28.601,77	9,97	17.540,27	1,54
b. Komunikasi	6.617,77	29.255,35	16,02	22.637,58	1,99
8. KEUANGAN, PERSEWAAN DAN JASA PERUSAHAAN	18.903,96	43.953,97	8,80	25.050,01	2,20
9. JASA-JASA	150.468,09	345.221,14	8,66	194.753,05	17,11
a. Pemerintahan Umum	118.944,36	279.409,22	8,92	160.464,86	14,10
b. S w a s t a	31.523,73	65.811,92	7,64	34.288,19	3,01
PDRB tanpa migas	948.143,85	2.086.575,92	8,21	1.138.432,07	100,00

Sumber: Pendapatan Regional Dumai Menurut Lapangan Usaha 2000-2010, BPS



Gambar 2.2.1.1
Grafik Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Dumai Tahun 2001-2010

Laju pertumbuhan berdasarkan PDRB Migas sebesar 2,87% per tahun akan meningkatkan PDRB Migas sebesar Rp 916.980,28 juta. Sementara itu dengan mengabaikan nilai tambah sektor migas, laju pertumbuhan ekonomi mencapai 8,21% per tahun yang menaikkan PDRB sebesar Rp 1.138.432,07 juta. Sektor-sektor utama yang memberikan kontribusi terhadap peningkatan PDRB adalah sektor perdagangan (31,46%) dan sektor pengangkutan (21,89%). Majunya sektor perdagangan di Kota Dumai didukung oleh kelancaran transportasi terutama transportasi laut dengan keberadaan pelabuhan internasional.

3. Pendapatan per Kapita

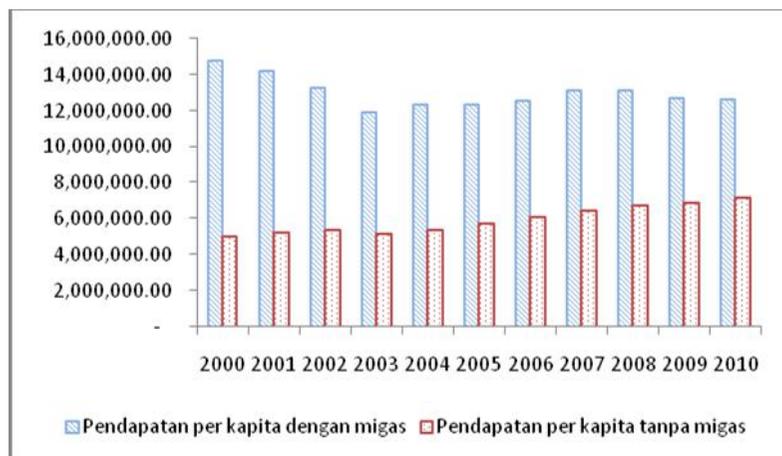
Pengembangan ekonomi regional tidak hanya ditujukan untuk peningkatan kemajuan ekonomi tetapi juga untuk peningkatan kemakmuran penduduknya. Selama kurun waktu 2000-2010 peningkatan kemajuan ekonomi Kota Dumai telah meningkatkan pendapatan penduduknya. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pendapatan per kapita. Dengan laju pertumbuhan 3,66% per tahun, tingkat pendapatan regional (tanpa Migas) meningkat dari Rp 5.004.925,92,- tahun 2000 menjadi Rp 7.166.586,33,- tahun 2010 (Tabel 2.2.1.5).

Berdasarkan data tahun 2000-2010, terdapat perbedaan yang cukup besar antara pendapatan per kapita migas dan non migas, meskipun dengan kecenderungan yang menurun. Besaran pendapatan per kapita non migas relatif hanya setengah dari pendapatan per kapita migas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pengolahan migas memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non migas. Namun demikian kegiatan sektor migas bukan merupakan lapangan pekerjaan utama penduduk Kota Dumai sehingga tingginya pendapatan regional tidak dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Pencapaian tingkat pendapatan per kapita ini merupakan pendapatan rata-rata artinya tidak semua penduduk mempunyai pendapatan yang sama tergantung pada distribusi pendapatan. Masalah distribusi pendapatan akan diuraikan pada bahasan kemiskinan.

Tabel 2.2.1.5
Pendapatan per Kapita Kota Dumai tahun 2000-2010

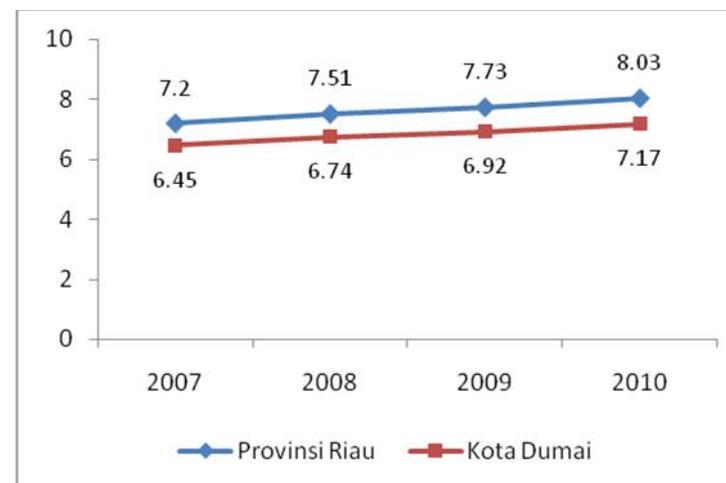
Uraian	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Pendapatan per kapita dengan migas	14.774.701,08	14.222.435,74	13.242.834,32	11.903.223,05	12.349.292,28	12.329.120,86	12.545.959,66	13.125.698,27	13.107.461,57	12.697.305,39	12.653.771,31
Pertumbuhan		-3,74	-6,89	-10,12	3,75	-0,16	1,76	4,62	-0,14	-3,13	-0,34
Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)	-1,54										
Pendapatan per kapita tanpa migas	5.004.925,92	5.221.335,75	5.416.052,96	5.162.454,14	5.385.110,70	5.709.053,39	6.070.776,65	6.453.464,80	6.738.798,81	6.919.094,00	7.166.586,33
Pertumbuhan		4,32	3,73	-4,68	4,31	6,02	6,34	6,30	4,42	2,68	3,58
Rata-rata Pertumbuhan (%/tahun)	3,66										
Perbedaan Pendapatan per Kapita Migas dan Dengan Migas	9.769.775,16	9.001.099,99	7.826.781,36	6.740.768,92	6.964.181,57	6.620.067,47	6.475.183,01	6.672.233,47	6.368.662,76	5.778.211,39	5.487.184,98

Sumber: Pendapatan Regional Dumai Menurut Lapangan Usaha 2000-2010, BPS, diolah



Gambar 2.2.1.2

Perkembangan Tingkat Pendapatan Per Kapita Kota Dumai Tahun 2000-2010



Gambar 2.2.1.3

Perkembangan Tingkat Pendapatan Per Kapita Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2007-2010 (dalam juta rupiah)

Terdapat perbedaan yang cukup besar antara pendapatan regional per kapita migas dan non migas, meskipun dengan kecenderungan yang menurun selama 2007-2010. Pendapatan per kapita non migas hanya setengah dari pendapatan migas. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan pertambangan minyak dan gas memberikan pendapatan yang lebih tinggi dibandingkan dengan sektor non migas. Namun demikian kegiatan sektor migas bukan merupakan lapangan pekerjaan utama penduduk Kota Dumai sehingga tingginya pendapatan regional tidak dinikmati oleh sebagian besar penduduk. Kondisi pendapatan regional per kapita yang mendekati kondisi riil tingkat pendapatan penduduk Kota Dumai.

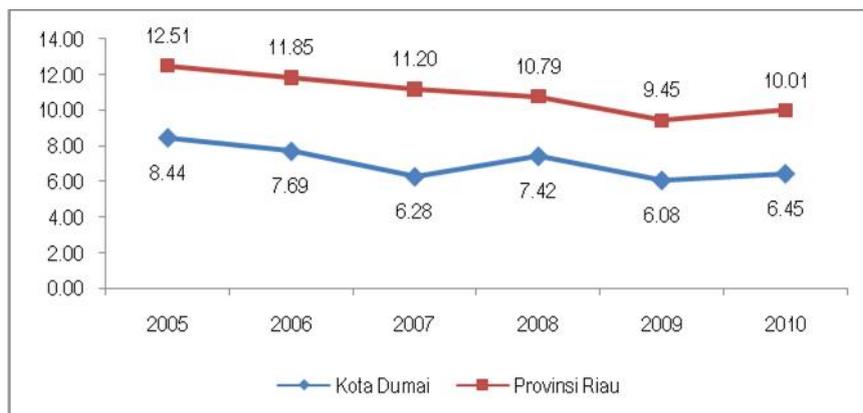
4. Kemiskinan

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang diukur dari peningkatan PDRB per kapita belum tentu dinikmati oleh semua penduduk di Kota Dumai. Hal ini ditandai dengan masih adanya masalah kemiskinan. Tingkat kemiskinan mencerminkan adanya penduduk yang belum mampu memenuhi kebutuhan hidup minimal. Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup minimal. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010 yaitu 6,45%. Angka kemiskinan ini masih berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 287.975/kapita/bulan maka terdapat sekitar 16 ribu orang yang hidup dengan pendapatan di bawah angka tersebut. Berikut ini data penduduk miskin di Kota Dumai.

Tabel 2.2.1.6
Penduduk Miskin di Kota Dumai Tahun 2005-2010

Uraian	2005	2006	2007	2008	2009	2010
Jumlah penduduk miskin (000)	19,60	17,70	14,60	18,40	15,70	16,50
Persentase penduduk miskin	8,44	7,69	6,28	7,42	6,08	6,45
Garis kemiskinan (Rp/kapita/bln)	187.902	208.809	223.133	256.806	261.859	287.975

Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2005/2006-2010, BPS Jakarta



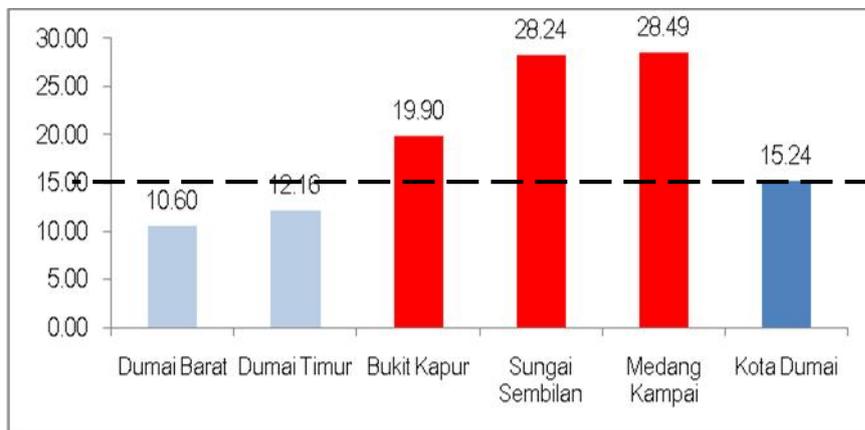
Gambar 2.2.1.4
Persentase Tingkat Kemiskinan Kota Dumai dan Provinsi Riau Tahun 2005-2010
Sumber: Data dan Informasi Kemiskinan Kabupaten/Kota 2005/2006-2010, BPS Jakarta

Berdasarkan data rumahtangga sasaran program PPLS tahun 2011 yang diolah, maka pada tahun 2011, tingkat kemiskinan antar kecamatan menunjukkan perbedaan yang relatif besar antara tingkat kemiskinan tertinggi dan terendah. Tingkat kemiskinan terendah hanya sebesar 10,60%, yaitu di Kecamatan Dumai Barat, sedangkan tingkat kemiskinan tertinggi mencapai 28,49%, yaitu di Kecamatan Medang Kampai (lihat tabel 2.2.1.7 dan gambar 2.2.1.5). Berdasarkan data terlihat bahwa ada 2 kecamatan yang tingkat kemiskinannya lebih rendah daripada tingkat kemiskinan kota (15,24%), yaitu Kecamatan Dumai Barat dan Kecamatan Dumai Timur. Sementara itu, wilayah dengan tingkat kemiskinan lebih dari 15,24% adalah Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Sungai Sembilan, dan Kecamatan Medang Kampai.

Tabel 2.2.1.7
Jumlah Rumah Tangga Sasaran Tahun 2011

No	Kecamatan	Jumlah RT Miskin	Jumlah RT	Persentase RT Miskin
1	Dumai Timur	2.747	22.593	12,16
2	Dumai Barat	2.448	23.091	10,60
3	Sungai Sembilan	2.009	7.115	28,24
4	Medang Kampai	792	2.780	28,49
5	Bukit Kapur	2.019	10.147	19,90
	Kota Dumai	10.015	65.726	15,24

Sumber: Bappeda Kota Dumai 2013; Kota Dumai dalam Angka 2011; diolah



Gambar 2.2.1.5
Tingkat Kemiskinan Menurut Kecamatan di Kota Dumai Tahun 2011
Sumber: Hasil Analisis, 2013

2.2.2. FOKUS KESEJAHTERAAN MASYARAKAT

A. Pendidikan

1. Angka Melek Huruf

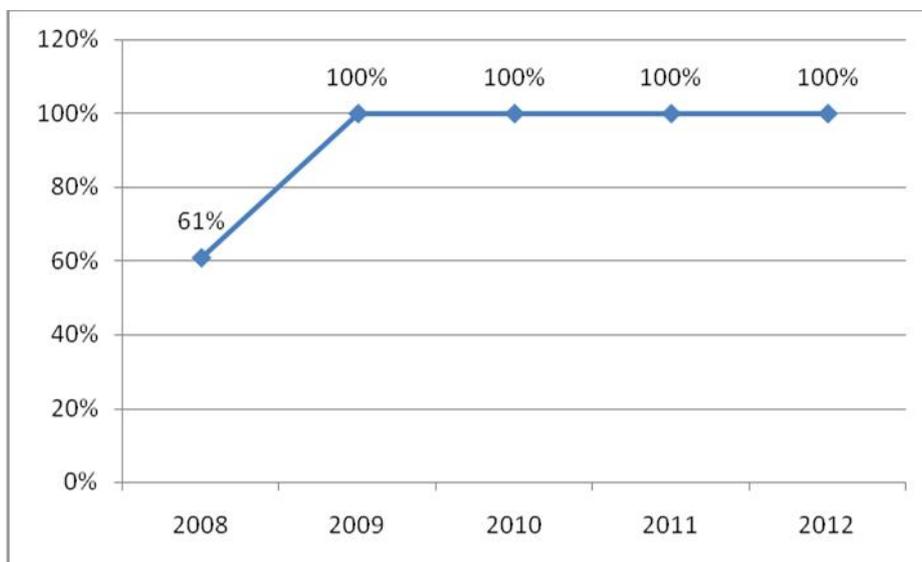
Angka melek huruf menunjukkan jumlah penduduk yang berusia lebih dari 14 tahun yang dapat membaca dan menulis. Angka ini mencerminkan tingkat kemampuan membaca dan menulis, yang tentu saja berkorelasi dengan tingkat pendidikan masyarakat. Berdasarkan data dari Dinas Pendidikan Kota Dumai, angka melek huruf dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan tren yang sangat baik. Pada tahun 2008

angka melek huruf sebesar 61%, dan pada tahun-tahun berikutnya, selalu stabil pada nilai 100% hingga tahun 2012. Angka melek huruf yang terus sebesar 100% menunjukkan keberhasilan program pendidikan yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai, dengan tujuan untuk mencerdaskan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu wujud tanggung jawab yang dilakukan oleh pemerintah Kota Dumai.

Tabel 2.2.2.1
Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2008-2012

No.	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Melek Huruf	61%	100%	100%	100%	100%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.2.2.1
Grafik Angka Melek Huruf Kota Dumai Tahun 2008-2012

2. Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

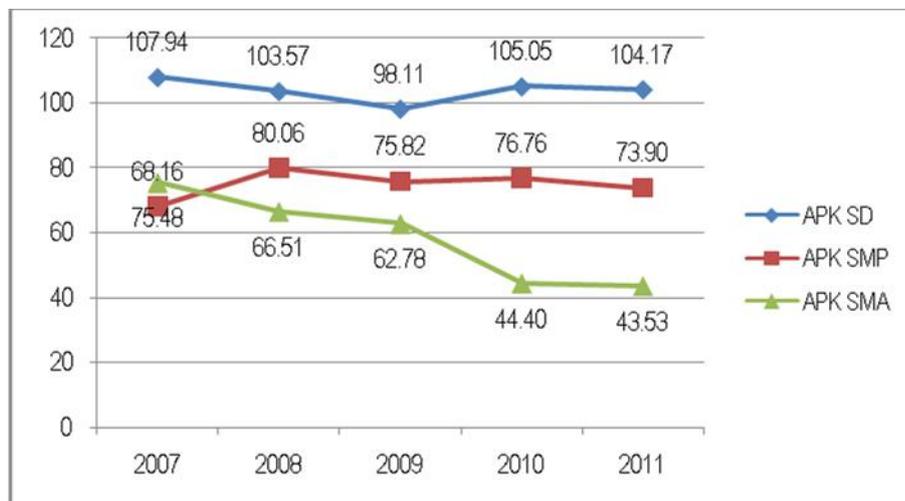
Menurut Badan Pusat Statistik, angka partisipasi kasar menunjukkan perbandingan antara rasio jumlah siswa, berapapun usianya, yang sedang sekolah di tingkat pendidikan tertentu terhadap jumlah penduduk kelompok usia yang berkaitan dengan jenjang pendidikan tertentu. Masih menurut BPS kegunaan APK adalah menunjukkan tingkat partisipasi penduduk secara umum di suatu tingkat pendidikan. APK merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan.

Tabel 2.2.2.2
Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kota Dumai Tahun 2007-2011

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
APK SD	107,94	103,57	98,11	105,05	104,17
APK SMP	68,16	80,06	75,82	76,76	73,90
APK SMA	75,48	66,51	62,78	44,40	43,53

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

Angka partisipasi kasar di Kota Dumai dari tahun 2008 hingga tahun 2011 pada jenjang SD menunjukkan tren perkembangan yang sedikit menurun. Pada tahun 2008 nilai APK sebesar 107,94%, dan pada tahun 2011 turun menjadi 104,17%. Sedangkan pada jenjang SMP, nilai APK dari tahun 2008 hingga tahun 2011 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, namun mengalami peningkatan dari tahun 2008 yang sebesar 68,16%, naik menjadi 73,9% pada tahun 2011. Pada jenjang SMA sederajat, nilai APK malah mengalami tren yang menurun. Pada tahun 2008 nilai APK adalah sebesar 75,48%, namun pada tahun 2011 turun menjadi hanya 43,53%. Tren penurunan APK pada jenjang SMP dan SMA yang terjadi dalam rentang tahun tersebut, seharusnya menjadi peringatan bagi Pemerintah Kota Dumai, bahwa mulai muncul kecenderungan penurunan minat masyarakat untuk melanjutkan sekolah yang dilatar belakangi oleh banyak faktor.



Gambar 2.2.2.2
 Grafk Angka Partisipasi Kasar SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2007-2011

3. Angka Pendidikan Yang Ditamatkan

Angka pendidikan yang ditamatkan menunjukkan jenjang pendidikan tertinggi yang telah ditamatkan oleh masyarakat. Semakin banyak masyarakat yang mampu menyelesaikan pendidikan secara maksimal di suatu wilayah menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat untuk mendapatkan pelayanan pendidikan sangat baik. Selain faktor keinginan, faktor kemampuan secara ekonomi masyarakat juga dapat menjadi faktor pendorong. Kemudahan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan juga dapat menjadi pendorong tingkat partisipasi masyarakat. Dengan fasilitas pendidikan yang memadai dan tersebar serta pilihan yang beragam, merupakan salah satu pilihan alternatif bagi masyarakat.

Persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan oleh mayoritas masyarakat yang berada di Kota Dumai adalah jenjang SD/MI sebesar 21,12% pada tahun 2007, kemudian untuk tingkat SMA dengan nilai 19,01%. Sedangkan jenjang pendidikan tertinggi yang memiliki persentase paling kecil adalah tingkat

akademi atau D III dengan nilai 1,15%. Selama 4 tahun, mulai dari tahun 2007 hingga tahun 2010, perkembangan jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan ini cukup baik. Pada tahun 2010 mayoritas masyarakat sudah mampu menamatkan pendidikan pada tingkat SMA sederajat, dengan nilai 22,09%. Berikut ini jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan di Kota Dumai selama tahun 2007 sampai 2010.

Tabel 2.2.2.3
Persentase Jenjang Pendidikan Tertinggi yang Ditamatkan
Di Kota Dumai Tahun 2007-2010

NO	Indikator	2007	2008	2009	2010
1	Tdk/ Belum Pernah Sekolah	4,85	4,26	4,70	4,93
2	Tidak/Belum tamat SD	19,46	18,42	18,87	17,11
3	SD/MI/Sederajat	21,12	19,99	20,48	20,86
4	SLPT/MTs	17,16	16,24	16,63	16,75
5	SMA	19,01	18	18,43	22,09
6	SMK	4,68	4,43	4,54	2,98
7	D I/II	1,6	1,51	1,55	0,84
8	AKADEMI/D III	1,15	1,09	1,11	1,79
9	S1/Sarjana	1,82	1,72	1,76	2,9
10	S2/S3/Pasca Sarjana				0,12

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

Besarnya persentase jenjang pendidikan tertinggi yang ditamatkan menunjukkan ada perbaikan dari dalam diri masyarakat mengenai pentingnya pendidikan, sebagai jembatan untuk meraih masa depan yang lebih baik. Hal ini juga dapat dipengaruhi oleh kemungkinan meningkatnya pendapatan masyarakat, sehingga mampu menyekolahkan anak-anak mereka. Kemungkinan adanya intervensi dari pemerintah daerah, antara lain dengan program pendidikan gratis juga mampu mendorong hal ini.

Namun yang patut menjadi perhatian dari pemerintah kota Dumai adalah masih adanya masyarakat yang tidak mengenyam pendidikan dasar, juga masih banyak masyarakat yang belum lulus jenjang pendidikan SD. Tren perkembangan dari tahun 2007 hingga 2010, menunjukkan angka yang relatif stagnan, meskipun ada penurunan namun cukup kecil. Pada tahun 2007 persentase masyarakat yang tidak bersekolah adalah 4,85%, sedangkan pada tahun 2010 angka tersebut malah meningkat menjadi 4,93%. Kemudian untuk persentase masyarakat yang tidak lulus sekolah SD, tren perkembangan dari tahun 2007 hingga 2010 sudah mengalami penurunan, meskipun dengan nilai yang relatif kecil. Pada tahun 2007 adalah sebesar 19,46%, dan pada tahun 2010 adalah 17,11%. Pemerintah Dumai nampaknya harus lebih memperhatikan masyarakat-masyarakat yang belum mengenyam pendidikan atau mengenyam pendidikan namun dengan kemampuan yang terbatas, terutama masyarakat yang berada di daerah perkebunan yang memiliki kesulitan dalam mendapatkan pelayanan pendidikan.

4. Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka partisipasi murni menunjukkan besarnya partisipasi masyarakat yang berada pada jenjang sekolah tertentu, yang bersekolah. Angka partisipasi murni adalah salah satu tolak ukur yang dijadikan

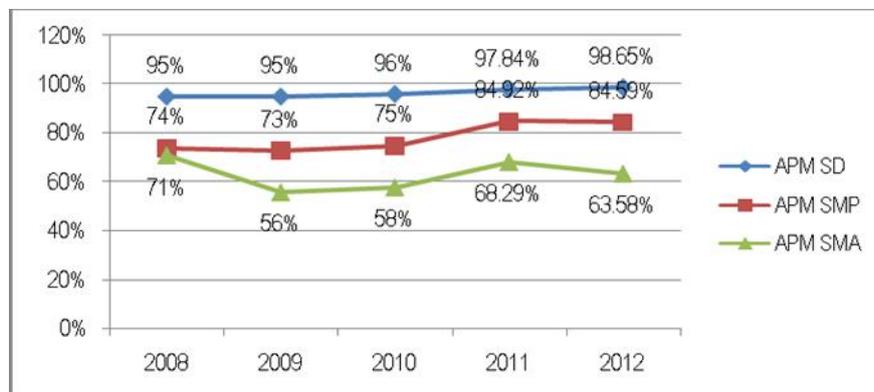
pegangan oleh pemerintah untuk menilai keberhasilan suatu daerah dalam merangsang minat masyarakat untuk bersekolah. Semakin besar nilai APM suatu daerah pada jenjang pendidikan tertentu dapat menjadi indikator keberhasilan program pendidikan suatu daerah.

Tabel 2.2.2.4
Angka Partisipasi Murni
di Kota Dumai Tahun 2007-2011

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	APM SD	95%	95%	96%	97,84%	98,65%
2	APM SMP	74%	73%	75%	84,92%	84,59%
3	APM SMA	71%	56%	58%	68,29%	63,58%

Sumber : Dinas Pendidikan

Berdasarkan tren perkembangan angka partisipasi murni dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan tren yang meningkat, kecuali untuk jenjang pendidikan SMA. Pada tahun 2008, nilai APM untuk SD adalah sebesar 95%, selama 5 tahun hingga tahun 2012 angka tersebut menunjukkan perkembangan yang selalu meningkat, hingga pada tahun 2012 naik menjadi 98,65%. Sedangkan untuk APM jenjang SMP, dari tahun 2008 hingga tahun 2012, cenderung mengalami perkembangan yang fluktuatif, namun lebih cenderung meningkat. Pada tahun 2008, nilai APM adalah 74%, dan pada tahun 2012 naik menjadi 84,59%. Sedangkan untuk jenjang SMA sederajat, tren perkembangan nilai APM cenderung menurun. Nilai APM pada tahun 2008 adalah sebesar, 71% turun menjadi 63,58% pada tahun 2012. Turunnya nilai APM pada kedua jenjang tersebut, terutama untuk jenjang SMA sederajat, kemungkinan dipengaruhi oleh faktor ekonomi, fasilitas pendidikan yang kemungkinan hanya ada di kota Dumai, dan sangat sedikit jumlahnya untuk di luar Kota Dumai, sehingga membuat orang tua kesulitan untuk menyekolahkan anak-anak mereka. Turunnya APM ini pasti dipengaruhi oleh menurunnya angka melanjutkan dari SD ke SMP dan dari SMP ke SMA. Menurunnya angka melanjutkan sekolah tentunya akan menurunkan nilai APM. Kondisi ini harus dicermati oleh pemerintah Dumai dan Dinas pendidikan, bahwa minat masyarakat untuk bersekolah semakin menurun, jumlah siswa yang bersekolah juga semakin menurun.



Gambar 2.2.2.3
Grafk Angka Partisipasi Murni SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
Kota Dumai Tahun 2008-2012

B. Kesehatan

1. Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran

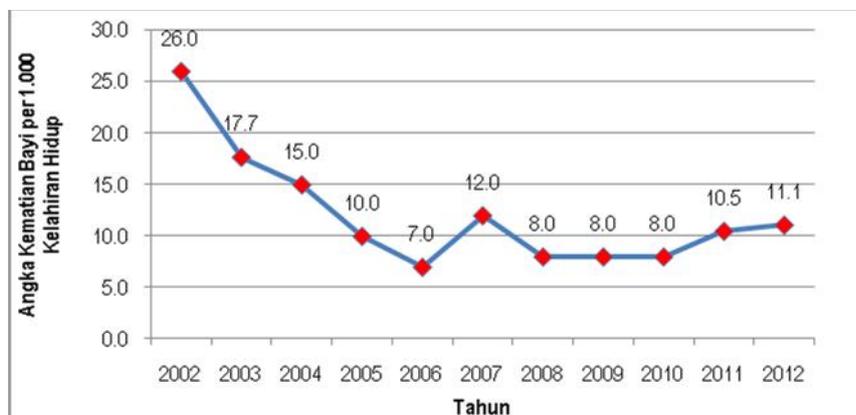
Kematian prenatal merupakan kematian bayi dengan umur kehamilan lebih dari 22 minggu yang lahir dalam keadaan meninggal dalam masa tujuh hari setelah persalinan. Angka kematian bayi mencerminkan kualitas dan kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal. Pada tahun 2012 jumlah kasus kematian bayi yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 79 kasus dari 7.121 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian bayi di Kota Dumai sebesar 11,1 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 dimana angka kematian bayi sebesar 10,5 per 1000 kelahiran hidup, terlihat angka kematian bayi pada tahun 2012 mengalami peningkatan. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2012 yakni ≤ 23 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian bayi di Kota Dumai masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Hal ini menggambarkan kualitas maupun kuantitas pelayanan kesehatan terhadap perinatal di Kota Dumai masih baik.

Jika dilihat dari perkembangan angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup selama kurun waktu 2002 sampai dengan 2012 menunjukkan kondisi yang semakin baik. Pada tahun 2002, angka kematian bayi di Kota Dumai mencapai 26 per 1.000 kelahiran hidup dan terus mengalami penurunan sampai dengan tahun 2006. Pada tahun 2007 angka kematian bayi kembali meningkat menjadi 12 per 1.000 kelahiran hidup dan menurun sampai dengan tahun 2010 menjadi 8 per 1.000 kelahiran hidup. Kondisi tahun 2012 menunjukkan angka kematian bayi sebesar 11,1 per 1.000 kelahiran hidup. Berikut adalah kondisi angka kematian bayi di Kota Dumai yang ditunjukkan dalam tabel dan gambar di bawah ini.

Tabel 2.2.2.5
 Angka Kematian Bayi per 1000 Kelahiran Hidup
 di Kota Dumai Tahun 2002-2012

Indikator	Tahun										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angka kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup	26	17,7	15	10	7	12	8	8	8	10,5	11,1

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2013



Gambar 2.2.2.4
 Grafik Perkembangan Angka Kematian Bayi
 di Kota Dumai Tahun 2002-2012

Grafik di atas menunjukkan bahwa tren angka kematian bayi selama tahun 2002 hingga tahun 2012 menunjukkan tren perkembangan yang semakin menurun, meskipun antara tahun 2006 sampai 2007 mengalami peningkatan. Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua.

2. Angka Kematian Balita

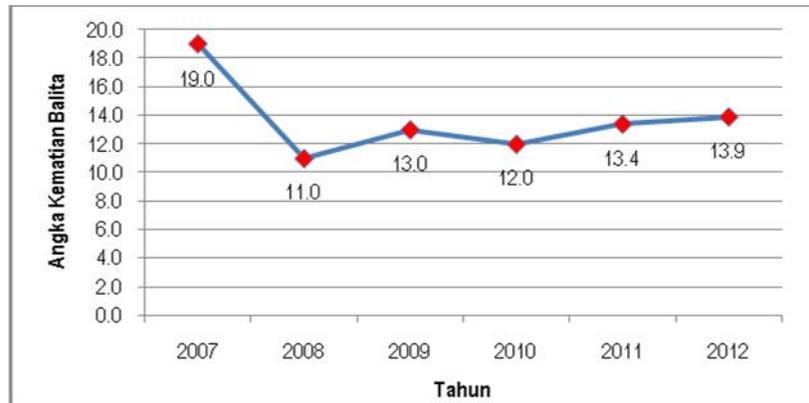
Angka Kematian Balita (AKABA) adalah jumlah kematian anak umur kurang dari 5 tahun per 1.000 penduduk. Angka kematian balita menggambarkan tingkat permasalahan kesehatan anak dan faktor-faktor lain yang berpengaruh terhadap kesehatan anak balita seperti gizi, sanitasi dan penyakit infeksi. Pada tahun 2012 jumlah kasus kematian balita yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 99 kasus, sehingga angka kematian balita tahun 2012 di Kota Dumai sebesar 13,90 per 1.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 dimana angka kematian bayi sebesar 13,36 per 1000 kelahiran hidup, terlihat adanya peningkatan angka kematian balita. Namun bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2012 yakni ≤ 32 per 1.000 kelahiran hidup, maka pencapaian angka kematian balita ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik).

Tabel 2.2.2.6
Angka Kematian Balita
di Kota Dumai Tahun 2002-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Kematian Balita	19	11	13	12	13,4	13,9

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2013

Banyak faktor yang dapat menyebabkan kenaikan angka kematian bayi antara lain faktor ekonomi, terlambat pertolongan, pengetahuan orang tua masih relatif kurang. Faktor ekonomi orang tua yang rendah seringkali membuat ibu tidak mendapatkan asupan gizi yang cukup saat mengandung, sehingga bayi mengalami Berat Badan Lahir Rendah (BBLR) saat lahir. Pengetahuan dan kesadaran orang tua yang masih rendah, antara lain mengenai pentingnya asupan gizi yang cukup saat kehamilan, pemeriksaan kehamilan secara rutin ke dokter dan lain-lain juga menjadi salah satu penyebab resiko kematian bayi waktu lahir. Penyebab kematian bayi juga dapat dikarenakan adanya kelainan bawaan, asfiksia (sesak napas pada saat lahir) dan juga kehamilan dengan resiko tinggi akibat usia ibu yang terlalu muda atau terlalu tua. Grafik berikut ini menunjukkan perkembangan angka kematian bayi selama tahun 2007 sampai 2012 di Kota Dumai.



Gambar 2.2.2.5
 Grafik Perkembangan Angka Kematian Balita
 di Kota Dumai Tahun 2007-2012
 Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2013 dan olah data 2013

3. Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup

Angka kematian ibu (AKI) adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan maupun penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan, per 100.000 kelahiran hidup. AKI diperhitungkan pula pada jangka waktu 6 minggu hingga setahun setelah melahirkan. Indikator ini secara langsung digunakan untuk memantau kematian terkait dengan kehamilan.

AKI dipengaruhi oleh beberapa faktor termasuk status kesehatan secara umum, pendidikan ibu dan pelayanan selama kehamilan dan melahirkan. Hal tersebut disebabkan antara lain kurangnya pemahaman ibu hamil tentang resiko yang terkait dengan kehamilan seperti 4 Terlalu (Terlalu Muda, Terlalu Tua, Terlalu Sering dan dan jarak Terlalu Dekat) dan juga 3 Terlambat (Terlambat mengambil keputusan di tingkat keluarga, terlambat merujuk, dan terlambat mendapat pelayanan di fasilitas rujukan). Penyebab langsung kematian ibu antara lain: eklamsi, pendarahan, partus macet, infeksi, abortus dan lain-lain. Penyebab tidak langsung antara lain: penyakit infeksi seperti malaria, thypoid serta penyakit kronis seperti penyakit jantung, penyakit gula dan penyakit lainnya.

Angka kematian ibu melahirkan berguna untuk menggambarkan tingkat kesadaran perilaku hidup sehat, status gizi dan kondisi ibu, kondisi kesehatan lingkungan, tingkat pelayanan kesehatan terutama untuk ibu hamil, waktu melahirkan dan masa nifas. Pada tahun 2012 jumlah kasus kematian ibu melahirkan yang ditemukan di Kota Dumai sebanyak 6 kasus dari 7.121 kelahiran hidup. Dengan demikian angka kematian ibu melahirkan tahun 2012 di Kota Dumai sebesar 84,26 per 100.000 kelahiran hidup. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011, di mana angka kematian ibu melahirkan sebesar 172,41 per 100.000 kelahiran hidup, maka terlihat ada penurunan angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2012. Bila dibandingkan dengan target indikator Kota Dumai tahun 2012 yakni 185 per 100.000 kelahiran hidup, maka pencapaian

angka kematian ibu melahirkan ini masih di bawah target (yang berarti tingkat pencapaiannya baik). Namun demikian dibutuhkan kerja keras untuk bisa mencapai target indikator Angka Kematian Ibu Kota Dumai pada tahun 2015 yakni sebesar 102 per 100.000 kelahiran hidup.

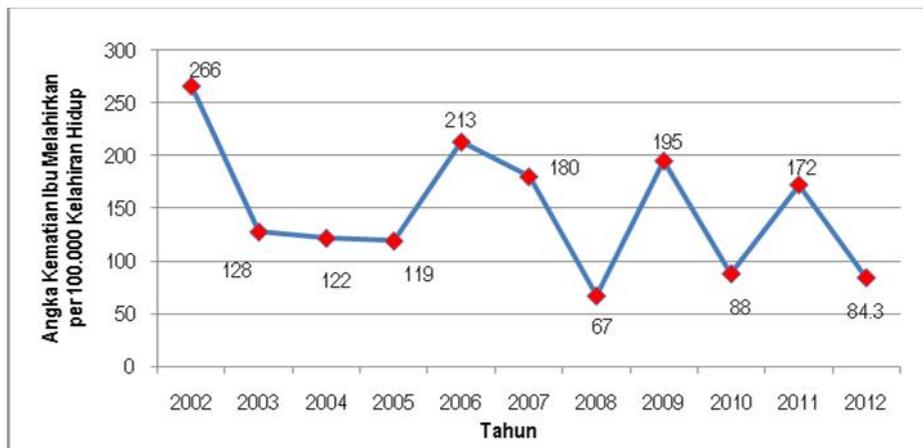
Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Berdasarkan data dari Dinas Kesehatan Kota Dumai, angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup selama tahun 2002 sampai dengan 2012 mengalami fluktuasi. Berikut ini perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kota Dumai:

Tabel 2.2.2.7
 Angka Kematian Ibu Melahirkan per 100.000 Kelahiran Hidup
 Kota Dumai Tahun 2002-2012

Indikator	Tahun										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angka kematian ibu melahirkan per 100.000 kelahiran hidup	266	128	122	119	213	180	67	195	88	172	84,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Angka kematian ibu melahirkan pada tahun 2002 sebanyak 266 per 100.000 kelahiran hidup. Pada tahun 2003 sampai dengan 2005 terjadi penurunan, dan kembali meningkat pada tahun 2007 menjadi 213 per 100.000 kelahiran hidup. Antara tahun 2008 sampai dengan 2012 terjadi fluktuasi angka kematian ibu melahirkan di Kota Dumai. Berikut ini grafik perkembangan angka kematian ibu melahirkan di Kota Dumai selama periode 2002 sampai dengan 2012.



Gambar 2.2.2.6
 Grafik Perkembangan Angka Kematian Ibu Melahirkan
 di Kota Dumai Tahun 2002-2012

Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2013 dan olah data 2013

Dari data angka kematian bayi dan ibu, dapat dilihat bahwa terjadi peningkatan pada kedua indikator tersebut. Hal ini juga terjadi karena data angka kematian bayi dan ibu melahirkan di Kota Dumai sulit untuk dipantau. Misal, kasus bayi yang sakit atau ibu yang melakukan persalinan di luar Kota Dumai karena tidak

ada fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai kemudian pindah ke Kota Dumai dan menggunakan fasilitas layanan kesehatan di Kota Dumai. Kriteria pencatatan data kematian ibu dan bayi di beberapa unit pelayanan kesehatan kadang berbeda-beda, seperti KTP ibu yang merupakan penduduk luar Kota Dumai atau KTP orang tua bayi yang masih Kota Dumai walaupun sudah lama pindah ke luar Kota Dumai ikut tercatat dalam registrasi.

Adapun upaya yang telah dilakukan pemerintah Kota Dumai untuk menurunkan angka kematian ibu antara lain :

1. Program P4K (Program Perencanaan Persalinan dan Pencegahan Komplikasi); yaitu program yang dilakukan bagi perempuan setelah ketika menikah mendapat pengantar dari KUA untuk konseling dan tindakan pembinaan;
2. Peningkatan peberdayaan masyarakat melalui kader pendamping ibu hamil;
3. Pelaksanaan gerakan sayang ibu dalam kelurahan siaga;
4. Pembinaan suami siaga;
5. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil;
6. Penyiapan Puskesmas PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Dasar) dan RS PONEK (Penanganan Obstetri Neonatal Emergency Komprehensif).

4. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup, semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah.

Pada tahun 2012 angka harapan hidup waktu lahir (umur harapan hidup) di Kota Dumai sebesar 71,33 tahun. Bila dibandingkan dengan pencapaian tahun 2011 yakni sebesar 71,33 tahun, terlihat angka harapan hidup waktu lahir pada tahun 2012 cenderung statis. Meningkatnya angka harapan hidup waktu lahir secara tidak langsung memberikan gambaran tentang adanya kemungkinan peningkatan kualitas hidup dan kesehatan dalam masyarakat sehingga dapat menurunkan angka kematian.

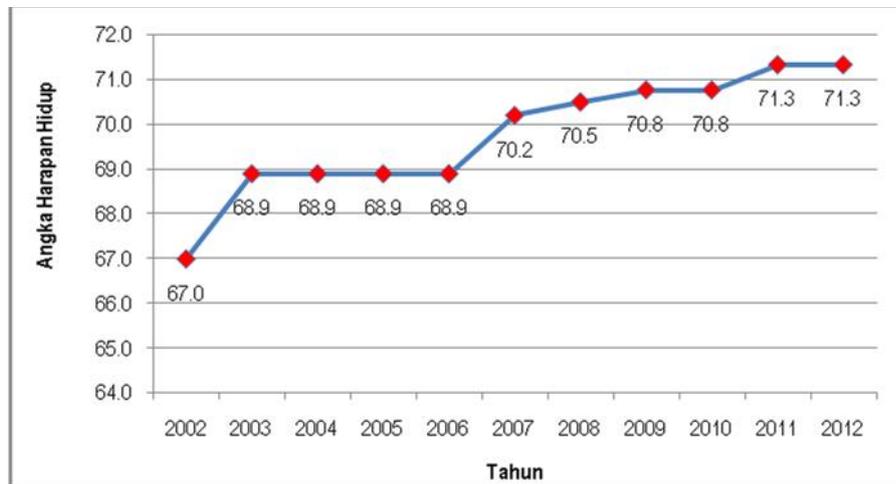
Tabel 2.2.2.8
Angka Usia Harapan Hidup di Kota Dumai
Tahun 2002-2012

Indikator	Tahun										
	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angka Harapan Hidup Waktu Lahir	67,0	68,9	68,9	68,9	68,9	70,2	70,5	70,8	70,8	71,3	71,3

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Dari grafik di bawah ini dapat dilihat bahwa angka usia harapan hidup untuk Kota Dumai dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2012 mengalami kenaikan dari semula 67,0 menjadi 71,3 tahun. Keadaan ini

terkait dengan pola hidup sehat masyarakat serta tersedianya fasilitas kesehatan yang memadai dan mudah untuk dicapai, serta kesadaran yang tinggi untuk memanfaatkan fasilitas tersebut.



Gambar 2.2.2.7
Grafik Perkembangan Angka Harapan Hidup
di Kota Dumai Tahun 2002-2012
Sumber: Dinas Kesehatan Kota Dumai, 2013 dan olah data 2013

Keberhasilan program kesehatan dan program sosial ekonomi antara lain dapat dilihat dari peningkatan usia harapan hidup penduduk di suatu wilayah. Jika pembangunan sosial ekonomi semakin baik maka kecenderungan Angka Harapan Hidup akan semakin tinggi, dan sebaliknya jika Angka Harapan Hidup lebih rendah mengisyaratkan terjadinya degradasi pada beberapa sektor pembangunan sosial ekonomi suatu wilayah. Angka Harapan Hidup yang rendah di suatu wilayah harus diikuti dengan program pembangunan kesehatan dan program sosial lainnya, termasuk kesehatan lingkungan, kecukupan gizi dan program pemberantasan kemiskinan.

5. Presentase Balita Gizi Buruk

Status gizi sangat erat kaitannya dengan permasalahan kesehatan secara umum, karena disamping merupakan faktor predisposisi yang dapat memperparah penyakit infeksi secara langsung dan juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan individual. Bahkan status gizi janin yang masih berada dalam kandungan dan bayi yang sedang menyusui sangat dipengaruhi oleh status gizi ibu hamil dan ibu menyusui. Pengukuran gizi pada balita difokuskan pada tingkat kecukupan gizinya yang diukur melalui berat badan terhadap umur atau berat badan terhadap tinggi badan yang dilakukan di posyandu. Melalui pemantauan pertumbuhan balita yang dilakukan secara terus menerus setiap bulannya di posyandu terutama pada balita BGM (Bawah Garis Merah) oleh petugas kesehatan, pengadaan PMT (Pemberian Makanan Tambahan), pemberian vitamin balita dan penyuluhan gizi kepada masyarakat khususnya ibu-ibu yang memiliki balita, maka kejadian gizi buruk pada balita dapat diantisipasi.

Status gizi balita ini sangat dipengaruhi oleh gizi ibu pada saat hamil, berat badan lahir dan asupan makanan serta pola makan selama masa balita. Presentase balita gizi buruk di Kota Dumai pada tahun 2005 sebanyak 0,3% kemudian menurun sampai dengan tahun 2012 tidak ditemukan kasus balita dengan gizi buruk di Kota Dumai, sehingga persentase balita dengan gizi buruk di Kota Dumai adalah 0%.

Tabel 2.2.2.9
 Persentase Balita Gizi Buruk di Kota Dumai
 Tahun 2005-2012

Indikator	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase balita gizi buruk	0,3	0	0	0	0	0	0	0

Sumber : Dinas Kesehatan Kota Dumai

Faktor-faktor yang menyebabkan gizi buruk pada balita antara lain, kualitas kehamilan yang buruk karena kekurangan asupan gizi, kehamilan resiko tinggi (karena usia ibu hamil yang terlalu muda atau terlalu tua) dan Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR). Balita yang mengalami gizi buruk tidak hanya terjadi di keluarga yang tidak mampu secara ekonomi, akan tetapi juga dapat terjadi di keluarga yang tergolong mampu. Hal tersebut disebabkan oleh pola makan anak yang kurang sehat, antara lain kurangnya perhatian orang tua karena terlalu sibuk. Gizi buruk pada balita juga bisa disebabkan karena adanya penyakit penyerta seperti jantung. Selain itu kesadaran masyarakat untuk imunisasi juga masih kurang sehingga anak lebih rentan terhadap penyakit yang dapat mengakibatkan berat badannya rendah.

2.3. ASPEK PELAYANAN UMUM

2.3.1. FOKUS LAYANAN URUSAN WAJIB

A. Pendidikan

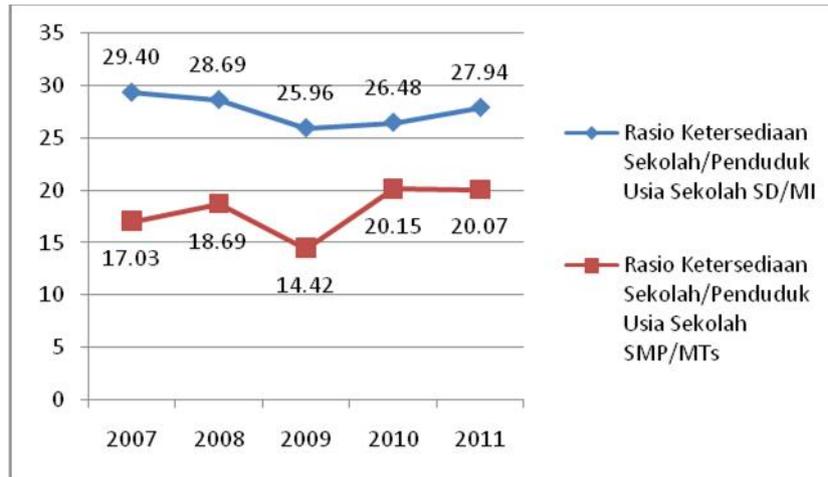
1. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dumai dalam angka, dari tahun 2007 hingga 2011, rasio ketersediaan sekolah dibanding dengan penduduk usia sekolah mengalami perkembangan yang menurun. Pada tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI menunjukkan angka 29,4. Angka ini menunjukkan ada sekitar 29 sekolah SD untuk 10.000 penduduk. Pada tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SD/MI adalah 27,94 hal ini berarti terdapat sekitar 27 sekolah SD untuk setiap 10.000 penduduk. Untuk jenjang SMP rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMP/MTS antara tahun 2007 hingga tahun 2011 justru menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2007 menunjukkan nilai 17,03 dan pada tahun 2011 naik menjadi 20,07.

Tabel 2.3.1.1
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2007-2011

No	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI	29,40	28,69	25,96	26,48	27,94
2	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMP/MTs	17,03	18,69	14,42	20,15	20,07

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah



Gambar 2.3.1.1
Grafk Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SD/MI dan SMP/MTs di Kota Dumai Tahun 2007-2011

2. Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data dari Dumai dalam angka, antara tahun 2007 hingga tahun 2011, rasio murid/guru untuk tingkat SD yang ada di Kota Dumai mengalami tren penurunan. Pada tahun 2007 rasio murid/guru adalah 18,55, dan pada tahun 2011 menunjukkan penurunan menjadi 15,82. Hal ini berarti terjadi penurunan jumlah peserta didik yang ada di Kota Dumai. Implikasi dari penurunan ini adalah guru dan murid menjadi lebih fokus dalam kegiatan belajar mengajar.

Tabel 2.3.1.2
Rasio Guru/Murid SD/MI di Kota Dumai Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid/Guru
1	2007	1791	32671	18,55
2	2008	1969	32128	16,32
3	2009	1969	32128	16,32
4	2010	2131	33715	15,82
5	2011	2125	34679	16,32

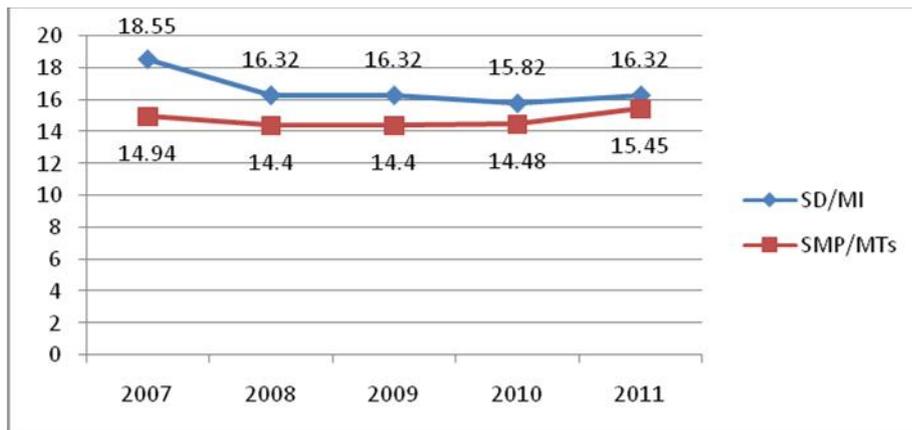
Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

Untuk jenjang SMP dan MTs, rasio murid guru dalam rentang antara tahun 2007 hingga tahun 2011 tren perkembangan relatif stabil, meskipun sedikit mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 rasio murid/guru untuk jenjang SMP/MTs adalah sebesar 14,94, angka ini sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2011 menjadi 15,45. Hal ini terjadi karena meningkatnya jumlah siswa yang tidak sebanding oleh semakin bertambahnya jumlah guru, meskipun beban mengajar guru dalam suatu ruang kelas kemungkinan menjadi lebih berat.

Tabel 2.3.1.3
Rasio Guru/Murid SMP/MTs di Kota Dumai
Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid/Guru
1	2007	643	9606	14,94
2	2008	803	11565	14,4
3	2009	803	11565	14,4
4	2010	763	11050	14,48
5	2011	715	11045	15,45

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah



Gambar 2.3.1.2
Grafik Rasio Guru/Murid SD/MI dan SMP/MTs
Kota Dumai Tahun 2007-2011

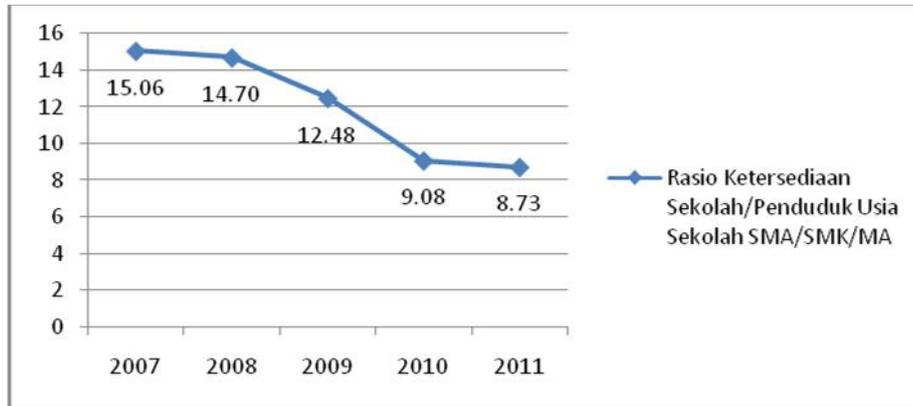
3. Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA

Rasio ketersediaan sekolah terhadap penduduk usia sekolah, merupakan perbandingan antara jumlah sekolah dan penduduk dalam usia sekolah. Dengan demikian, nilai ini juga mencerminkan jumlah sekolah yang ada setiap 10.000 penduduk. Berdasarkan data dari Dumai Dalam Angka, dari tahun 2007 hingga tahun 2011 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA menunjukkan tren penurunan. Pada tahun 2007 rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA adalah sebesar 15,06, dan pada tahun 2011 turun menjadi 8,73. Menurunnya rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah SMA/SMK/MA dapat terjadi karena meningkatnya jumlah murid, sedangkan jumlah sekolah relatif terbatas.

Tabel 2.3.1.4
Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA
di Kota Dumai Tahun 2007-2011

No	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
1	Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/SMK/MA	15,06	14,70	12,48	9,08	8,73

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah



Gambar 2.3.1.3
Grafk Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah SMA/MA/SMK
di Kota Dumai Tahun 2007-2011

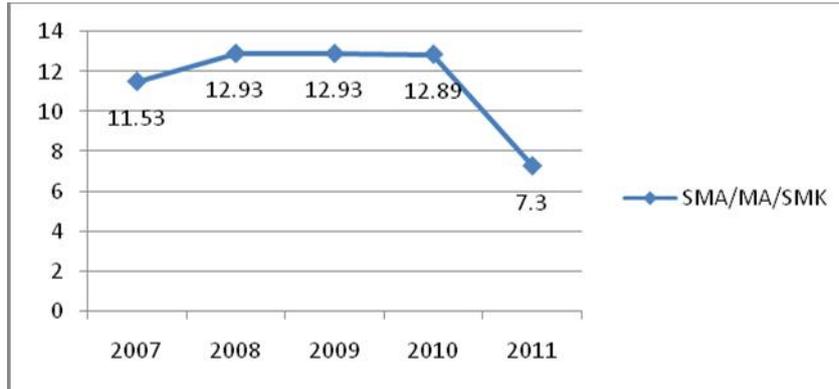
4. Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA

Angka rasio guru/murid, merupakan perbandingan antara jumlah guru dengan jumlah siswa pada jenjang pendidikan tertentu. Nilai ini mencerminkan berapa jumlah siswa yang harus diajar oleh seorang guru. Idealnya memang dalam satu kelas dan terdapat seorang guru, jumlah siswa yang berada di ruangan tersebut tidak boleh terlalu besar, karena akan menyulitkan siswa maupun guru tersebut. Berdasarkan data dari Dumai Dalam Angka, dari tahun 2007 hingga tahun 2011 rasio murid/guru untuk jenjang SMA/SMK/MA mengalami penurunan. Pada tahun 2007 rasio murid/guru sebesar 11,53, dan pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 7,3. Menurunnya rasio murid/guru ini terjadi karena kenaikan jumlah murid yang lebih besar bila dibandingkan dengan kenaikan jumlah guru. Dengan perkataan lain proporsi kenaikan jumlah murid tidak sebanding dengan kenaikan jumlah guru pada tahun 2011. Namun hal ini juga bisa berdampak positif dengan semakin fokusnya guru dalam mengajar karena jumlah murid yang diajar juga relatif sedikit.

Tabel 2.3.1.5
Rasio Guru/Murid SMA/SMK/MA di Kota Dumai
Tahun 2007-2011

No	Tahun	Jumlah Guru	Jumlah Murid	Rasio Murid/Guru
1	2007	870	10027	11,53
2	2008	700	9051	12,93
3	2009	700	9051	12,93
4	2010	455	5866	12,89
5	2011	820	5983	7,3

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah



Gambar 2.3.1.4
Grafik Rasio Guru/Murid SMA/MA/SMK Kota Dumai
Tahun 2007-2011

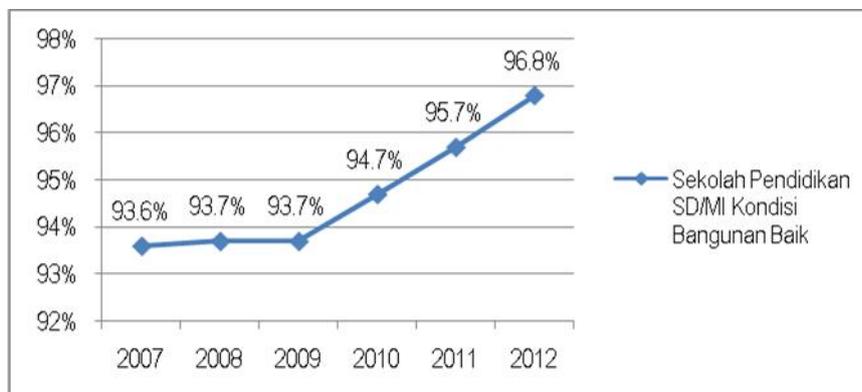
5. Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik

Ketersediaan fasilitas pendidikan yang layak akan membantu dalam proses belajar mengajar. Proses belajar mengajar yang baik akan berdampak pada hasil pembelajaran yang baik. Dengan kondisi bangunan yang baik maka tentu saja akan membuat aktifitas belajar siswa menjadi tidak terganggu dan berjalan dengan baik. Kondisi bangunan sekolah SD yang baik antara tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami perkembangan yang baik, yang artinya semakin banyak bangunan sekolah dalam kondisi baik, dan semakin sedikit kondisi bangunan yang jelek. Pada tahun 2007 persentase bangunan SD yang baik sebesar 93,6%, dan pada tahun 2012 persentasenya naik menjadi 96,8%.

Tabel 2.3.1.6
Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Dumai Tahun 2008-2012

No.	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik	93,6%	93,7%	93,7%	94,7%	95,7%	96,8%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.5
Grafik Sekolah Pendidikan SD/MI Kondisi Bangunan Baik
Kota Dumai Tahun 2007-2012

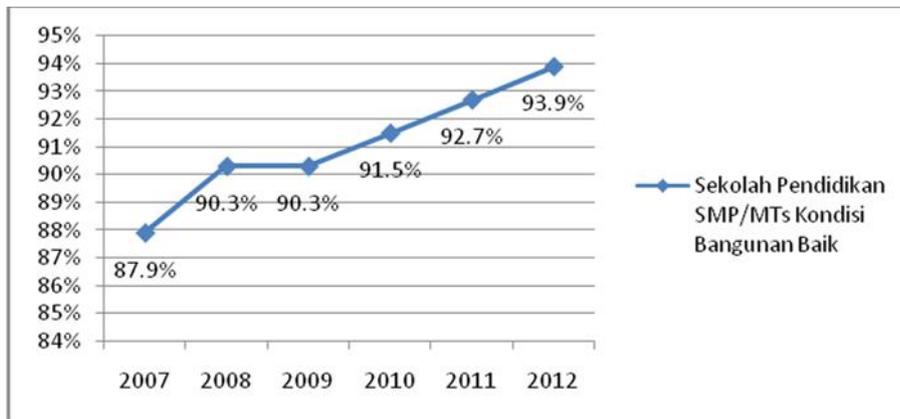
6. Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik

Persentase bangunan SMP/MTs dalam kondisi baik yang ada di Kota Dumai antara tahun 2007 hingga tahun 2012 menunjukkan tren perkembangan yang semakin baik, artinya jumlah bangunan SMP yang baik dalam rentang tahun tersebut semakin banyak. Pada tahun 2007 persentase bangunan sekolah untuk jenjang SMP/MTs dalam kondisi baik sebesar 87,9% dan pada tahun 2012 persentasenya meningkat menjadi 93,9%. Dengan kondisi demikian diharapkan bahwa hasil belajar para siswa akan semakin baik dan tingkat pendidikan masyarakat akan semakin tinggi.

Tabel 2.3.1.7
 Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

No.	Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1.	Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik	87,9%	90,3%	90,3%	91,5%	92,7%	93,9%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.6
 Grafik Sekolah Pendidikan SMP/MTs Kondisi Bangunan Baik
 Kota Dumai Tahun 2007-2012

7. Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)

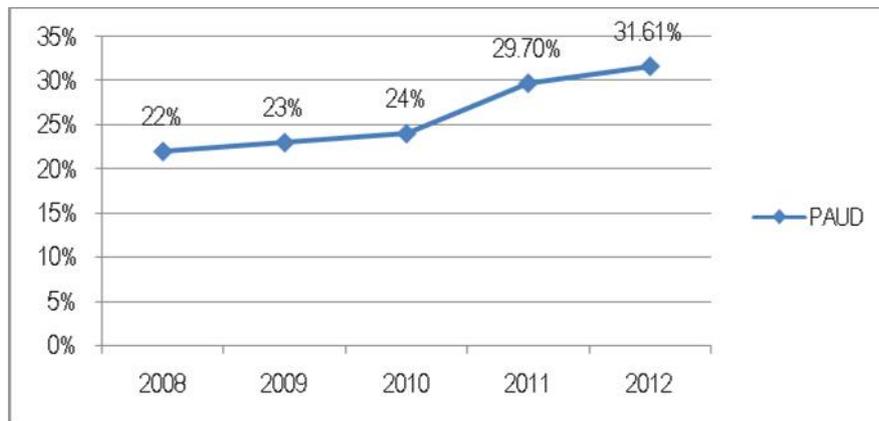
Nilai PAUD ini mencerminkan rasio pendidikan bagi anak-anak. Semakin tinggi nilai, maka berarti semakin banyak pula jumlah siswa pada rentang usia PAUD yang bersekolah, baik di PAUD maupun TK, dengan jenjang usia antara 4 sampai 6 tahun. Berdasarkan data dari Dumai Dalam Angka, tren perkembangan persentase anak yang bersekolah di PAUD dan sederajat justru mengalami penurunan. Pada tahun 2007, jumlah siswa TK dan sederajat berjumlah 3.487 siswa, namun pada tahun 2011 mengalami penurunan menjadi 3.008 siswa. Dengan semakin bertambahnya jumlah penduduk pada usia 4 sampai 6 tahun, dan semakin menurunnya jumlah siswa tersebut, maka rasio penduduk yang bersekolah di PAUD juga akan turun. Pada tahun 2007 rasio PAUD adalah 21,8% dan terus turun hingga pada tahun 2011 menjadi 16,5%. Kondisi ini tentu menjadi perhatian tersendiri bagi jajaran pemerintah Kota Dumai dan Dinas Pendidikan, bahwa mulai muncul kesadaran masyarakat untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada

jenjang yang paling dasar. Pemerintah daerah harus mencari akar masalah dari menurunnya minat orang tua untuk menyekolahkan anak-anak mereka pada level pendidikan yang paling bawah, dan dicari strategi yang tepat untuk menyelesaikannya.

Tabel 2.3.1.8
Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Dumai Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1.	PAUD	22%	23%	24%	29,7%	31,61%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.7
Grafik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
Kota Dumai Tahun 2008-2012

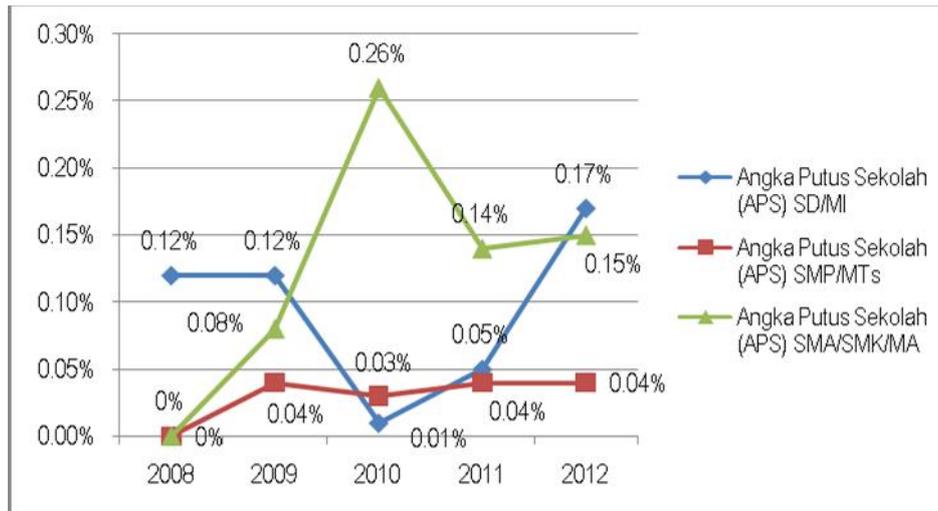
8. Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka putus sekolah menunjukkan jumlah siswa yang putus sekolah. Dengan data ini dapat dilihat jumlah siswa yang putus sekolah, selain itu yang paling utama adalah mencari penyebab mengapa angka putus sekolah naik dan turun. Dalam kurun waktu antara tahun 2008 hingga tahun 2012, tren perkembangan angka putus sekolah di Kota Dumai untuk semua jenjang menunjukkan adanya pertambahan, artinya persentase siswa yang putus sekolah semakin besar. Pada jenjang sekolah dasar (SD), angka putus sekolah pada tahun 2008 adalah sebesar 0,12%, namun pada tahun 2012 angka putus sekolah justru naik menjadi 0,17%. Pada jenjang SMP juga demikian, pada tahun 2008 angka putus sekolah adalah sebesar 0%, namun pada tahun 2012 angka putus sekolah mengalami kenaikan menjadi 0,04%. Sedangkan pada jenjang SMA, angka putus sekolah yang awalnya 0% pada tahun 2008 naik menjadi 0,15% pada tahun 2012. Kecenderungan naiknya angka putus sekolah dalam beberapa tahun untuk semua jenjang pendidikan di Kota Dumai menunjukkan bahwa ada permasalahan yang cukup serius mengenai minat masyarakat untuk mendapatkan pendidikan, atau kemampuan masyarakat secara ekonomi untuk mendapatkan fasilitas pelayanan pendidikan menurun.

Tabel 2.3.1.9
 Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Putus Sekolah (APS) SD/MI	0,12%	0,12%	0,01%	0,05%	0,17%
2	Angka Putus Sekolah (APS) SMP/MTs	0%	0,04%	0,03%	0,04%	0,04%
3	Angka Putus Sekolah (APS) SMA/SMK/MA	0%	0,08%	0,26%	0,14%	0,15%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.8
 Grafik Angka Putus Sekolah SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

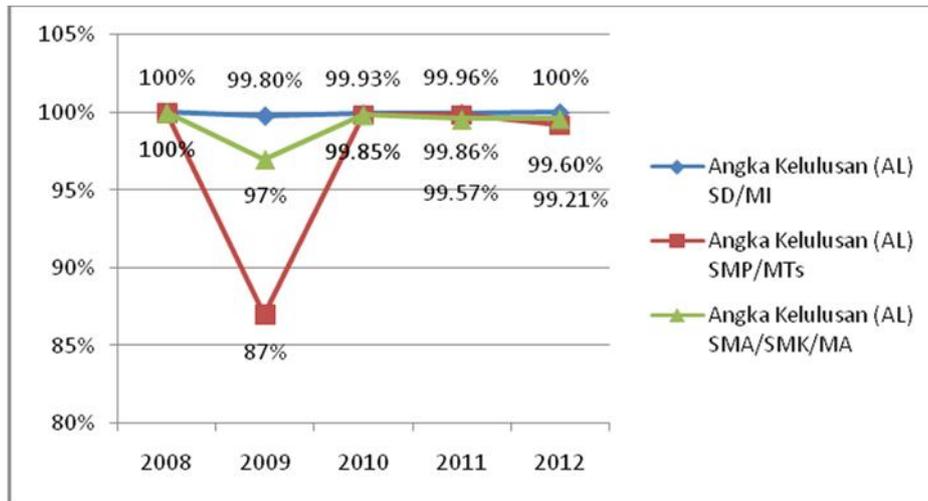
9. Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK

Angka kelulusan yang tinggi menunjukkan prestasi dari sebuah institusi pendidikan, bila angka kelulusan tinggi maka proses pembelajaran di sekolah tersebut berjalan dengan baik, dan apabila angka kelulusan rendah, maka banyak orang yang akan menjustifikasi bahwa pembelajaran yang dilakukan pada satu institusi pendidikan tidak berlangsung dengan baik. Dalam rentang tahun 2008 hingga tahun 2012, angka kelulusan untuk jenjang sekolah dasar di Kota Dumai sedikit mengalami perkembangan yang menurun, meskipun pada tahun 2008 dan 2012 nilainya sama-sama 100%. Penurunan terjadi pada tahun 2009 menjadi 99,8%, namun pada tahun 2010 dan 2011 sudah meningkat kembali. Untuk jenjang SMP, juga mengalami penurunan meskipun hanya terjadi pada tahun 2009 saja. pada tahun 2008, angka kelulusan adalah sebesar 100%, kemudian turun menjadi 87%. Pada tahun 2009, namun pada tahun 2010 dan 2011 naik lagi menjadi 99,85% dan 99,86%, namun pada tahun 2012 turun lagi menjadi 99,21%. Untuk jenjang SMA, terjadi penurunan angka kelulusan pada tahun 2008 yang semula 100%, turun menjadi 99,6% pada tahun 2012. Fenomena angka kelulusan yang menurun ini bisa terjadi karena dampak perubahan aturan kelulusan yang diterapkan oleh Kementerian Pendidikan Nasional yang setiap tahun selalu berubah, namun hendaknya fenomena ini disikapi dengan serius oleh pemerintah Kota Dumai, melalui Dinas Pendidikan, agar angka kelulusan naik kembali.

Tabel 2.3.1.10
 Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Kelulusan (AL) SD/MI	100%	99,8%	99,93%	99,96%	100%
2	Angka Kelulusan (AL) SMP/MTs	100%	87%	99,85%	99,86%	99,21%
3	Angka Kelulusan (AL) SMA/SMK/MA	100%	97%	99,85%	99,57%	99,60%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.9
 Grafik Angka Kelulusan SD/MI, SMP/MTs dan SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

10. Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs dan SMP/MTs ke SMA/MA/SMK

Angka melanjutkan siswa dari SD/MI ke SMP/MTs dalam rentang waktu 2008 hingga 2012 di Kota Dumai menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Angka melanjutkan tertinggi ada pada tahun 2010 dengan nilai 121%. Pada tahun 2008 angka melanjutkan adalah sebesar 85%, sedangkan pada tahun 2012 naik menjadi 99,98%. Sedangkan angka melanjutkan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK tren perkembangan dari tahun 2008 sampai tahun 2012 juga menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif, yang mana pada tahun 2010 angka melanjutkan memiliki nilai yang paling besar yaitu 108%. Pada tahun 2008 angka melanjutkan adalah 65% dan sampai tahun 2012 naik menjadi 100,89%.

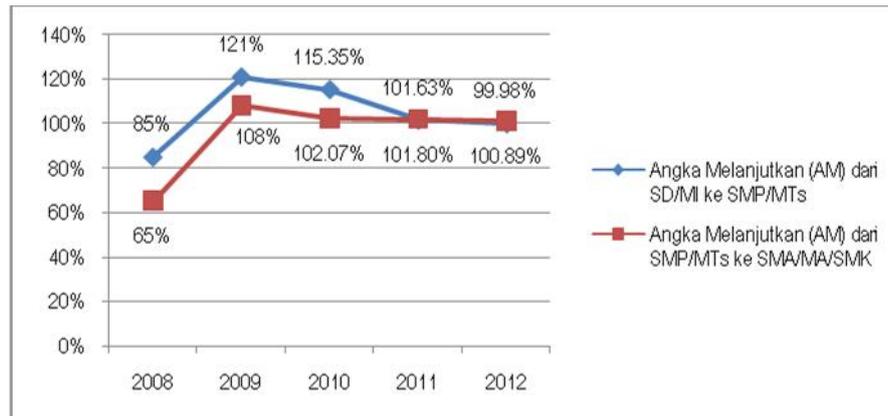
Tabel 2.3.1.11
 Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK
 Kota Dumai Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Angka Melanjutkan (AM) dari SD/MI ke SMP/MTs	85%	121%	115,35%	101,63%	99,98%
2	Angka Melanjutkan (AM) dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK	65%	108%	102,07%	101,80%	100,89%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai

Angka melanjutkan ini menunjukkan minat masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi semakin besar. Meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat dan kesadaran masyarakat yang

tinggi terhadap pendidikan menjadi salah satu faktor penyebabnya. Dengan mulai meningkatnya tingkat ekonomi masyarakat, dan juga pendapatan masyarakat, maka masyarakat memiliki kemampuan secara ekonomi untuk mendapatkan pendidikan yang layak, dan tidak segan mengeluarkan uang yang cukup besar untuk mendapatkan fasilitas pendidikan yang terbaik. Selain faktor ekonomi, kesadaran akan pentingnya pendidikan juga mulai dirasakan oleh masyarakat. Masyarakat berharap dengan pendidikan yang diperoleh oleh anak-anak mereka, maka kehidupan anak-anak mereka pada masa yang akan datang diharapkan akan dapat menjadi lebih baik.



Gambar 2.3.1.10
Grafik Angka Melanjutkan dari SD/MI ke SMP/MTs dan dari SMP/MTs ke SMA/MA/SMK Kota Dumai Tahun 2008-2012

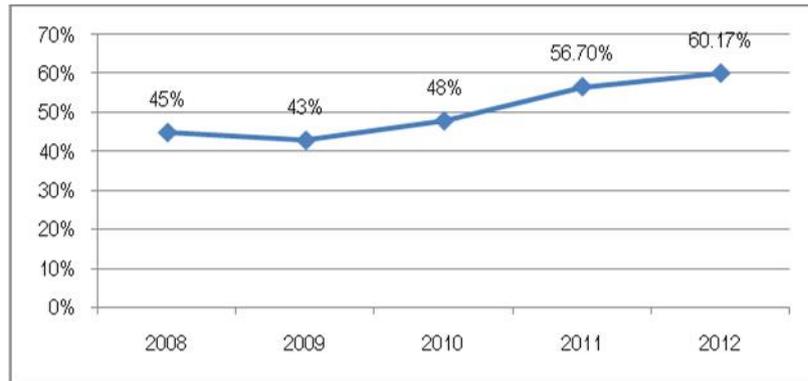
11. Guru Yang Memenuhi Kualifikasi S1/D-IV

Jumlah guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV dalam rentang waktu 2008 hingga tahun 2012 di Kota Dumai menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2008 persentase guru yang telah memenuhi kualifikasi S1/D-IV sebesar 45%, dan pada tahun 2012 naik menjadi 60,17%.

Tabel 2.3.1.12
Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV Di Kota Dumai Tahun 2008-2012

No	Indikator	2008	2009	2010	2011	2012
1	Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV	45%	43%	48%	56,7%	60,17%

Sumber : Dinas Pendidikan Kota Dumai



Gambar 2.3.1.11
 Grafik Guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV
 Di Kota Dumai Tahun 2008-2012

Meningkatnya guru yang memenuhi kualifikasi S1/D-IV berarti pengetahuan, pemahaman dan informasi yang diperoleh semakin terbuka luas, sehingga diharapkan dapat menjadi salah satu pendorong untuk meningkatkan kualitas mengajar dan mendidik para guru. Peningkatan kualitas mengajar dan mendidik para guru diharapkan akan meningkatkan kualitas anak didik atau murid, serta mempersiapkan murid untuk semakin membuka wawasan pengetahuan yang lebih luas di era globalisasi ini.

B. Kesehatan

1. Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk

Rumah sakit merupakan salah satu sarana kesehatan yang berfungsi menyelenggarakan pelayanan kesehatan rujukan, asuhan keperawatan secara berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien. Semakin banyak rumah sakit yang tersedia, akan semakin mudah bagi masyarakat dalam mengakses layanan kesehatan.

Pada tahun 2012 jumlah rumah sakit yang ada di Kota Dumai sebanyak 3 rumah sakit yang terdiri dari 1 rumah sakit milik pemerintah Kota Dumai tipe C yakni RSUD Kota Dumai, 1 rumah sakit milik BUMN tipe D yakni RS Pertamina (Rumah Sakit Pelabuhan sejak tahun 2007 sudah tidak operasional lagi dan berubah status menjadi Balai Pengobatan) dan 1 rumah sakit milik TNI/POLRI yakni RS Bhayangkara yang mulai operasional sejak tahun 2007. Rumah Sakit di Kota Dumai terdapat di Kecamatan Dumai Barat sebanyak 1 buah dan di Dumai Timur 2 buah. Jika dilihat dari jumlah rumah sakit di Kota Dumai, selama kurun waktu 2001 sampai dengan 2012, jumlah fasilitas kesehatan tersebut masih tetap sama. Berikut ini jumlah rumah sakit di Kota Dumai selama tahun 2000 sampai 2012.

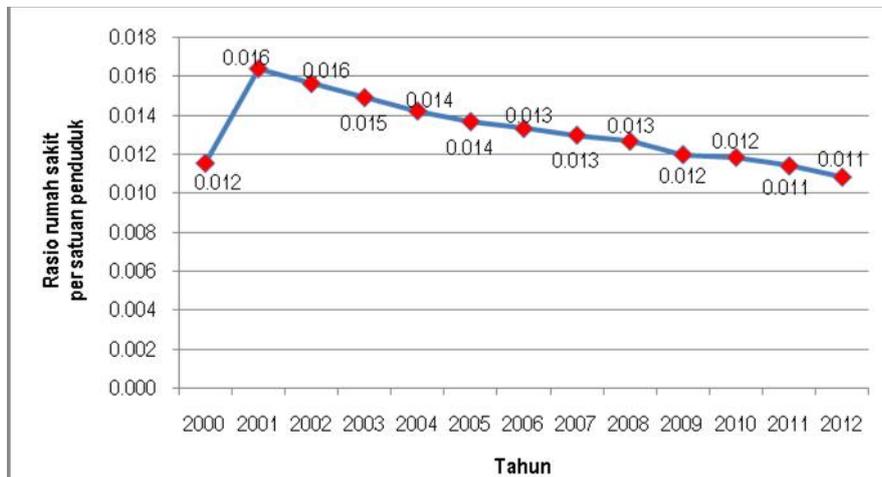
Tabel 2.3.1.13
Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2000-2012

Indikator	Tahun						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Rumah Sakit	2	3	3	3	3	3	3
Jumlah penduduk	173.188	183.114	191.990	201.263	210.984	219.351	225.249
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,012	0,016	0,016	0,015	0,014	0,014	0,013

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Rumah Sakit	3	3	3	3	3	3
Jumlah penduduk	231.121	236.778	250.367	253.178	262.976	276.895
Rasio Rumah Sakit per satuan penduduk	0,013	0,013	0,012	0,012	0,011	0,011

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; olah data 2013

Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai tahun 2012 mencapai 0,011. Hal ini berarti bahwa untuk 1.000 jumlah penduduk pada Kota Dumai tahun 2012 dilayani oleh rumah sakit sebanyak 0,01. Cakupan pelayanan rumah sakit terhadap jumlah penduduk Kota Dumai pada tahun 2012 tidak jauh berbeda dari tahun-tahun sebelumnya. Rasio Rumah Sakit per 1000 penduduk mengalami kecenderungan penurunan dari 0,016 pada tahun 2001 menjadi 0,011 pada tahun 2012. Penurunan tersebut kemungkinan juga dipengaruhi oleh adanya penambahan jumlah penduduk, namun fasilitas yang tersedia masih tetap sama.



Gambar 2.3.1.12
Grafik Rasio Rumah Sakit per Satuan Penduduk
di Kota Dumai Tahun 2002-2012

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; olah data 2013

2. Rasio Dokter per Satuan Penduduk

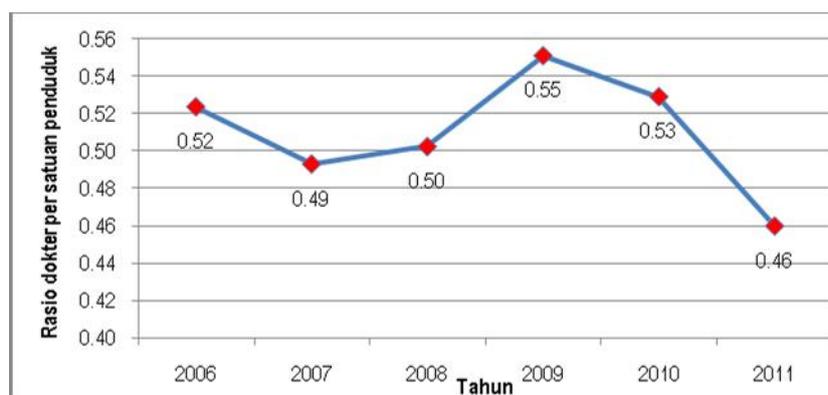
Keberhasilan pelayanan kesehatan di Kota Dumai tidak terlepas dari peran tenaga medis dokter baik dokter spesialis, dokter umum maupun dokter gigi. Jumlah dokter di Kota Dumai selama periode tahun 2006 sampai 2012 mengalami fluktuasi, dari 118 dokter menjadi 121 dokter pada tahun 2012. Pada tahun 2009 jumlah dokter mencapai 138 dokter dan tahun 2010 menurun jumlahnya menjadi 134 dokter. Berikut ini perkembangan jumlah dokter di Kota Dumai tahun 2006 sampai 2011.

Tabel 2.3.1.14
Rasio Dokter per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2006-2012

Indikator	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah Dokter	118	114	119	138	134	121
Jumlah penduduk	225.249	231.121	236.778	250.367	253.178	262.976
Rasio dokter per satuan penduduk	0,52	0,49	0,50	0,55	0,53	0,46

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; Kota Dumai dalam Angka tahun 2000-2011; olah data 2013

Rasio dokter per satuan penduduk pada tahun 2006 adalah sebesar 0,52, yang artinya bahwa terdapat kira-kira 1 orang dokter untuk setiap 1000 orang penduduk. Jumlah dokter di Kota Dumai yang mengalami fluktuasi ini juga disebabkan antara lain karena terdapat perbedaan pendataan di masing-masing unit pelayanan kesehatan. Hal ini dimungkinkan karena tidak adanya kriteria pendataan dokter praktek di rumah maupun di pusat pelayanan kesehatan, baik meliputi nama maupun alamatnya, sehingga dapat terjadi perhitungan ganda pada saat pendataan. Selain itu adanya pembatasan jumlah praktek tiap dokter menjadi maksimal tiga tempat menyebabkan data jumlah dokter mengalami penurunan. Akan tetapi rasio itu kemudian meningkat kembali menjadi 2,99 pada tahun 2010 dan 3,08 pada tahun 2011. Berikut ini grafik rasio dokter per satuan penduduk di Kota Dumai selama periode tahun 2006 sampai 2011.



Gambar 2.3.1.13
Grafik Rasio Dokter per Satuan Penduduk
di Kota Dumai Tahun 2006-2011

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; Kota Dumai dalam Angka tahun 2000-2011; olah data 2013

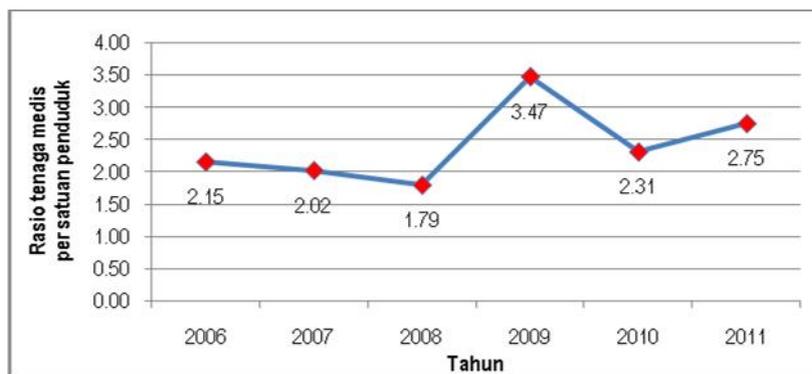
3. Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk

Tenaga medis di Kota Dumai meliputi dokter umum, dokter gigi, dokter spesialis, perawat dan bidan. Hasil pendataan rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk di Kota Dumai tahun 2006 sampai dengan 2011, menunjukkan peningkatan dari 2,15 menjadi 2,75. Pada tahun 2009, rasio tenaga medis per 1000 orang penduduk adalah sebesar 3,47, kemudian mengalami penurunan pada tahun 2010 menjadi 2,31. Berikut ini tabel dan grafik yang menunjukkan perkembangan rasio tenaga medis di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.15
Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2006-2011

Indikator	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah tenaga medis	485	467	425	869	584	722
Jumlah penduduk	225.249	231.121	236.778	250.367	253.178	262.976
Rasio tenaga medis per satuan penduduk	2,15	2,02	1,79	3,47	2,31	2,75

Sumber: Kota Dumai dalam Angka tahun 2006-2011; olah data 2013



Gambar 2.3.1.14
Grafik Rasio Tenaga Medis per Satuan Penduduk
di Kota Dumai Tahun 2006-2011

4. Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani

Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani adalah ibu dengan komplikasi kebidanan di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang mendapat penanganan definitif sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih pada tingkat pelayanan dasar dan rujukan (Polindes, Puskesmas, Puskesmas PONED, Rumah Bersalin, RSIA/RSB, RSU, RSU PONEK).

Ibu hamil dengan komplikasi yang ditangani adalah Ibu hamil dengan komplikasi di satu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu yang ditangani sesuai dengan standar oleh tenaga kesehatan terlatih di Puskesmas perawatan dan rumah sakit pemerintah/swasta dengan fasilitas PONED dan PONEK (pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi dasar dan pelayanan obstetrik dan neonatal emergensi komprehensif).

Tabel 2.3.1.16
Cakupan Komplikasi Kebidanan yang Ditangani di Kota Dumai
Tahun 2008-2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011, Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai 2012

Dari tabel di atas menunjukkan bahwa kasus komplikasi kebidanan yang terjadi di Kota Dumai pada tahun 2008 hingga 2012 telah tertangani seluruhnya (100%). Berdasarkan Standar Pelayanan Minimal (SPM) Peraturan Menteri Kesehatan No 741/Menkes/Per/VII/2008, cakupan komplikasi kebidanan yang ditangani di Kota Dumai sudah melebihi dari target nasional (80%).

5. Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan

Kesehatan balita tidak hanya dipengaruhi oleh kesehatan ibu namun dipengaruhi pula oleh faktor yang lain, diantaranya adalah proses kelahiran/persalinan. Data penolong kelahiran merupakan salah satu indikator kesehatan terutama yang berhubungan dengan tingkat kesehatan ibu dan anak maupun pelayanan kesehatan secara umum. Persalinan yang ditolong oleh tenaga medis seperti dokter atau bidan dianggap lebih baik daripada yang ditolong dukun atau lainnya karena dapat menggambarkan tingkat kemajuan pelayanan kesehatan, terutama pada saat kelahiran.

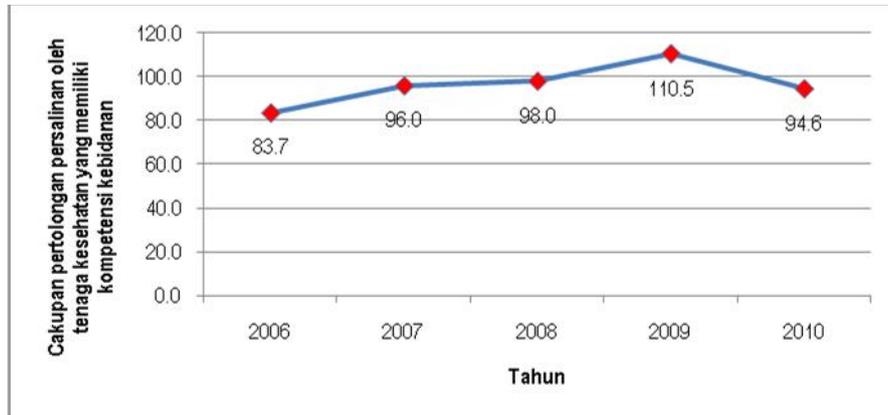
Proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih atau cakupan pertolongan persalinan oleh bidan atau tenaga kesehatan adalah perbandingan antara persalinan yang ditolong oleh tenaga kesehatan terlatih, seperti dokter, bidan, perawat, dan tenaga medis lainnya dengan jumlah persalinan seluruhnya, dinyatakan dalam persentase. Mengukur kematian ibu secara akurat adalah sulit, kecuali tersedia data registrasi yang sempurna tentang kematian dan penyebab kematian. Oleh karena itu sebagai proksi indikator digunakan proporsi pertolongan kelahiran oleh tenaga kesehatan terlatih. Dari data cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan, selama tahun 2006 sampai 2009 terjadi peningkatan, namun pada tahun 2010 kembali menurun menjadi 94,6%. Berikut ini perkembangan cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.17
Cakupan Pertolongan Persalinan Oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan
di Kota Dumai Tahun 2006-2010

Indikator	Tahun				
	2006	2007	2008	2009	2010
Cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan	83,7	96,0	98,0	110,5	94,6

Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011

Grafik di bawah ini menunjukkan bahwa cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai mengalami kecenderungan naik dari tahun 2006 sampai 2009. Pada tahun 2006 angka cakupan tersebut sebesar 83,7%, dan pada tahun 2009 naik menjadi 110,5%. Tahun 2010 cakupan pertolongan persalinan tersebut menurun menjadi 94,6%.



Gambar 2.3.1.15
 Grafik Cakupan Pertolongan Persalinan oleh Tenaga Kesehatan yang Memiliki Kompetensi Kebidanan di Kota Dumai Tahun 2006-2010
 Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011; olah data 2013

Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 90%, maka cakupan pertolongan persalinan oleh tenaga kesehatan yang memiliki kompetensi kebidanan di Kota Dumai pada tahun 2007 sampai 2010 telah melebihi target nasional. Hal ini menunjukkan bahwa semakin banyaknya penduduk yang memilih tenaga kesehatan sebagai penolong kelahiran utama karena semakin meningkatnya kemampuan penduduk untuk mengakses fasilitas kesehatan.

6. Cakupan Desa/Kelurahan Universal Child Immunization (UCI)

Universal Child Immunization (UCI) adalah tercapainya imunisasi dasar secara lengkap pada bayi (0-11 bulan), ibu hamil, wanita usia subur dan anak sekolah tingkat dasar. Imunisasi dasar lengkap pada bayi meliputi: 1 dosis BCG, 3 dosis DPT, 4 dosis polio, 4 dosis hepatitis B, 1 dosis campak. Pada ibu hamil dan wanita usia subur meliputi 2 dosis TT. Untuk anak sekolah tingkat dasar meliputi 1 dosis DT, 1 dosis campak dan 2 dosis TT.

Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI) di Kota Dumai pada tahun 2006, 2011 dan 2011 belum mencapai 100 persen. Pada tahun 2007 sampai dengan 2009, cakupan kelurahan UCI telah mencapai 100%, namun pada tahun 2010 sampai 2011 mengalami penurunan. Jika dilihat dari perkembangan capaian kelurahan UCI, menunjukkan bahwa masyarakat Kota Dumai belum seluruhnya mendapatkan pelayanan imunisasi baik melalui Posyandu, Puskesmas maupun Rumah Sakit. Berikut ini tabel cakupan desa/kelurahan UCI di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.18
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)
di Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cakupan Desa/kelurahan Universal Child Immunization (UCI)	71,88	100	100	100	87,5	78,79

Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011, Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai 2012

Kementerian Kesehatan menargetkan pada tahun 2014 seluruh desa/kelurahan mencapai 100% UCI (Universal Child Immunization) atau 90% dari seluruh bayi di desa/kelurahan tersebut memperoleh imunisasi dasar lengkap yang terdiri dari BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak. Imunisasi memberikan kontribusi besar dalam meningkatkan Human Development Index terkait dengan angka umur harapan hidup karena dapat menghindari kematian yang tidak diinginkan. Keberhasilan upaya imunisasi akan dapat meningkatkan kualitas anak bangsa sebagai penerus perjuangan dimasa mendatang.

Kementerian Kesehatan menetapkan imunisasi sebagai upaya nyata pemerintah untuk mencapai Millennium Development Goals (MDGs), khususnya untuk menurunkan angka kematian anak. Indikator keberhasilan pelaksanaan imunisasi diukur dengan pencapaian UCI desa/kelurahan, yaitu minimal 80% bayi didesa/kelurahan telah mendapatkan imunisasi dasar lengkap. Imunisasi dasar sangat penting diberikan sewaktu bayi (usia 0 – 11 bulan) untuk memberikan kekebalan dari penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). Tanpa imunisasi anak-anak mudah terserang berbagai penyakit, kecacatan dan kematian. GAIN UCI akan dilaksanakan secara bertahap mulai tahun 2010-2014, dengan sasaran seluruh bayi usia 0-11 bulan mendapatkan imunisasi dasar lengkap yaitu BCG, Hepatitis B, DPT-HB, Polio dan campak.

Imunisasi BCG (Bacillus Calmette-Guerin) sebanyak 1 (satu) kali dilakukan untuk mencegah penyakit tuberkulosis. Imunisasi BCG diberikan segera setelah bayi lahir di tempat pelayanan kesehatan atau mulai 1 (satu) bulan di Posyandu. Imunisasi hepatitis-B sebanyak 1 (satu) kali untuk mencegah penyakit Hepatitis B yang ditularkan dari ibu ke bayi saat persalinan dan dapat menyebabkan pengerutan hati (sirosis) dan kanker hati. Imunisasi Hepatitis B ini diberikan segera setelah lahir di sarana pelayanan kesehatan. Imunisasi DPT-HB sebanyak 3 (tiga) kali untuk memberi kekebalan pada penyakit difteri, pertusis (batuk rejan), tetanus dan Hepatitis B. Imunisasi ini pertama kali diberikan pada usia bayi 2 (dua) bulan. Kemudian imunisasi berikutnya selisihnya 4 minggu. Pada saat ini pemberian imunisasi DPT dan Hepatitis B dalam program imunisasi dilakukan bersamaan dengan menggunakan vaksin DPT-HB. Imunisasi polio untuk memberikan kekebalan dari penyakit polio dan diberikan sebanyak 4 (empat) kali dengan jeda waktu (jarak) 4 minggu. Imunisasi campak untuk mencegah penyakit campak, diberikan pada bayi umur 9 bulan.

7. Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA

Jumlah penderita penyakit TBC yang meningkat justru merupakan nilai positif karena menunjukkan bahwa sistem surveilans di tingkat masyarakat telah optimal dengan adanya peningkatan kesadaran

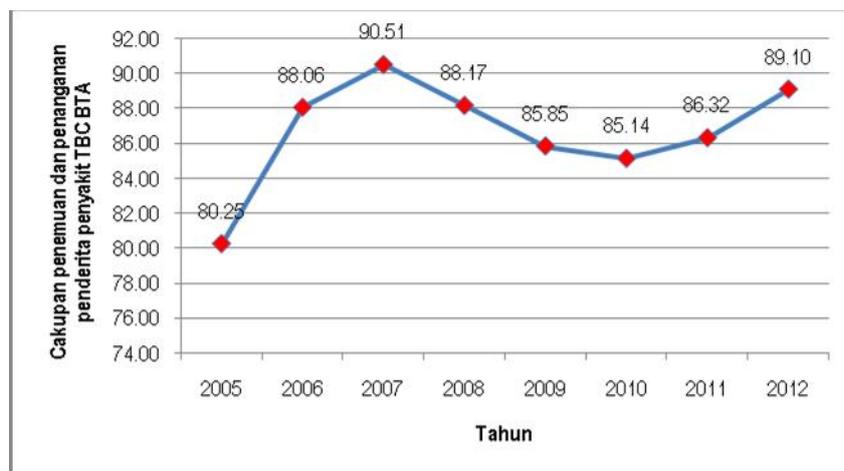
masyarakat tentang penyakit TBC untuk memeriksakan secara dini apabila terjadi gejala-gejala yang mengarah pada penyakit TBC.

Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA mengalami kecenderungan penurunan dari 90,51% pada tahun 2007, kemudian mengalami penurunan pada tahun-tahun berikutnya hingga menjadi 89,10% pada tahun 2012. Jika dibandingkan dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dalam Permenkes No 741/Menkes/VII/2008, yang menargetkan cakupan sebesar 100% pada tahun 2010, maka cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA di Kota Dumai belum mencapai target nasional. Berikut ini cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA yang disajikan dalam tabel dan grafik.

Tabel 2.3.1.19
Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kota Dumai Tahun 2005-2012

Indikator	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Cakupan penemuan dan penanganan penderita penyakit TBC BTA	80,25	88,06	90,51	88,17	85,85	85,14	86,32	89,10

Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011, Renstra Dinas Kesehatan Kota Dumai 2012



Gambar 2.3.1.16
Grafik Cakupan Penemuan dan Penanganan Penderita Penyakit TBC BTA
di Kota Dumai Tahun 2005-2012

Apabila ditemukan kasus TBC positif maka penderita akan segera diberi obat sejak dini dengan harapan dapat mencegah penularan dan sekaligus memutus mata rantai penularan penyakit tersebut. Penanganan kasus TBC ini perlu ada dukungan dari semua pihak, terutama anggota keluarga. Karena penderita harus meminum obat selama 6 bulan berturut turut tanpa putus sehingga akan timbul faktor kebosanan dan kejenuhan. Untuk itu keluarga harus memberi dukungan penuh karena sakit TBC dapat disembuhkan, dengan catatan harus dengan rutin dan disiplin meminum obatnya.

8. Cakupan Kunjungan Bayi

Setiap bayi memperoleh pelayanan kesehatan minimal 4 kali dalam setahun, yaitu satu kali pada umur 29 hari-3 bulan, 1 kali pada umur 3-6 bulan, 1 kali pada umur 6-9 bulan, dan 1 kali pada umur 9-11 bulan. Pelayanan kesehatan yang diberikan meliputi pemberian imunisasi dasar (BCG, DPT/HB1-3, Polio 1-4, dan Campak), stimulasi deteksi intervensi dini tumbuh kembang (SDIDTK), manajemen program KIA dalam melindungi bayi sehingga kesehatannya terjamin melalui penyediaan pelayanan kesehatan. Pada tahun 2011 cakupan kunjungan bayi sebesar 90,65% (6.309 bayi) dari 6.960 perkiraan jumlah bayi. Bila dibandingkan dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 741/Menkes/PER/VII/2008 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan di Kabupaten/Kota yakni sebesar 90%, maka angka tersebut telah melebihi target. Namun jika dibandingkan dengan target MDG's sampai dengan tahun 2015 sebesar 100% maka cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai masih belum mencapai target. Berikut ini cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai Tahun 2006 sampai dengan 2011.

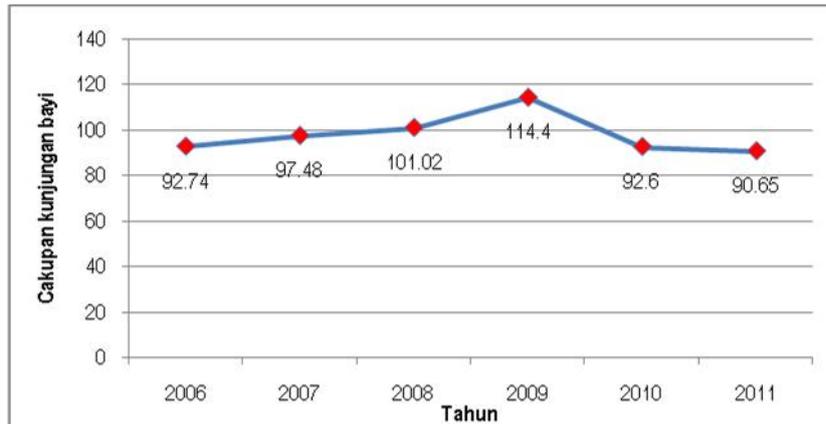
Data cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai mengalami kecenderungan penurunan dari 114,4% pada tahun 2009, menjadi 90,65% pada tahun 2011. Penurunan kemungkinan juga dapat disebabkan karena ada perbedaan kriteria jumlah kunjungan bayi dan kunjungan ke layanan kesehatan lain yang tidak dilaporkan. Dari data yang ada menunjukkan adanya penurunan persentase cakupan kunjungan bayi karena ada kemungkinan pendataan yang dilakukan hanya mengambil data jumlah bayi yang melakukan imunisasi saja. Berdasarkan target nasional untuk cakupan kunjungan bayi yaitu 90% pada tahun 2010, maka hasil kunjungan bayi di Kota Dumai telah mencapai target nasional pada tahun tersebut. Berikut ini cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai yang disajikan dalam tabel dan grafik.

Tabel 2.3.1.20
Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
Tahun 2006-2011

Indikator	Tahun					
	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Cakupan kunjungan bayi	92,74	97,48	101,02	114,4	92,6	90,65

Sumber : Profil Kesehatan Kota Dumai Tahun 2008-2011

Pada tahun 2006 cakupan kunjungan bayi meningkat sampai dengan tahun 2009 dari 92,74% menjadi 114,4%. Kemudian pada tahun 2010 sampai dengan 2011 mengalami penurunan menjadi 90,65%. Perkembangan cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai dari tahun 2006 sampai dengan 2011 mengalami penurunan seperti terlihat pada grafik berikut ini.



Gambar 2.3.1.17
 Grafik Cakupan Kunjungan Bayi di Kota Dumai
 Tahun 2006-2011

Cakupan kunjungan bayi di Kota Dumai diukur dari jumlah kedatangan ke pelayanan kesehatan baik milik pemerintah maupun swasta dengan syarat:

- a. Sampai dengan umur 1 tahun (12 bulan kurang 1 hari) sudah mendapat vitamin A sebanyak 1 kali.
- b. Penimbangan berat badan dilakukan minimal sebanyak 8 kali dalam 1 tahun.
- c. Melakukan pemeriksaan SDIDTK, yaitu pemantauan pertumbuhan perkembangan bayi (tercatat di dalam buku Kesehatan Ibu dan Anak/KIA).

9. Cakupan Puskesmas

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

Jumlah puskesmas di Kota Dumai pada awalnya ada sebanyak 3 (tiga) buah. Pada tahun 2012 jumlah puskesmas bertambah menjadi 9 puskesmas, yang terdiri dari 6 puskesmas non rawat inap, 1 puskesmas non rawat inap dengan UGD, dan 2 puskesmas rawat inap. Puskesmas non rawat inap terdiri dari Puskesmas Dumai Timur, Puskesmas Dumai Barat, Puskesmas Bumi Ayu, Puskesmas Bukit Timah, Puskesmas Jaya Mukti dan Puskesmas Purnama. Puskesmas non rawat inap dengan UGD adalah Puskesmas Medang Kampai, sedangkan puskesmas rawat inap terdiri dari Puskesmas Bukit Kapur dan Puskesmas Sungai Sembilan. Berikut ini sebaran puskesmas di Kota Dumai yang tersebar di di seluruh kecamatan.

Tabel 2.3.1.21
Sebaran Puskesmas di Kota Dumai Tahun 2012

Kecamatan	Nama Puskesmas	Non Rawat Inap	Rawat Inap	Jumlah Tempat Tidur
Dumai Timur	1. Jaya Mukti			
Dumai Barat	2. Dumai Barat			
	3. Purnama			
Bukit Kapur	4. Bukit Kapur			11
Sungai Sembilan	5. Sungai Sembilan			10
Medang Kampai	6. Medang Kampai	*		8
Dumai Kota	7. Dumai Kota			
Dumai Selatan	8. Bumi Ayu			
	9. Bukit Timah			

Keterangan: * : Non Rawat Inap dengan UGD

Sumber: Revisi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2013

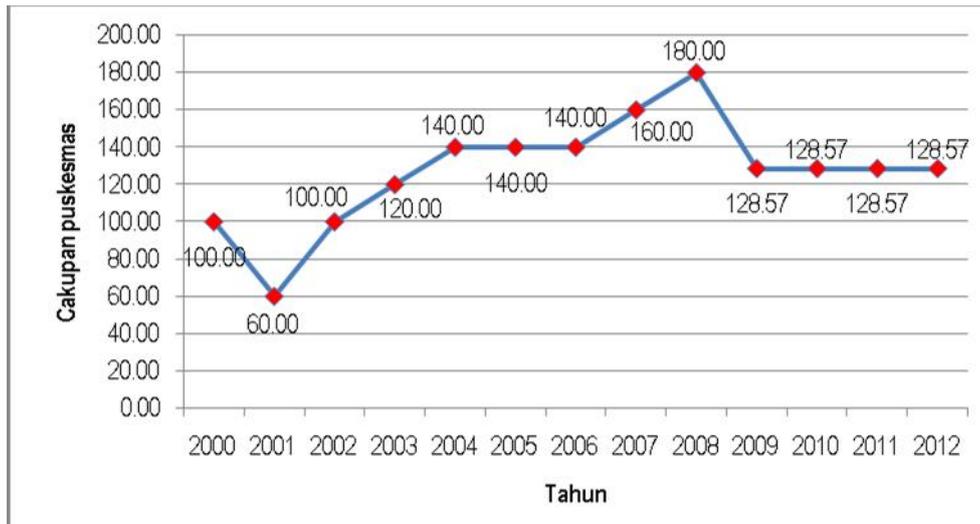
Berdasarkan data dari Kota Dumai dalam angka, jumlah puskesmas dalam rentang waktu 2000 hingga 2012 mengalami sedikit kenaikan, dari 3 puskesmas pada tahun 2000 menjadi hanya 9 puskesmas pada tahun 2012. Jumlah kecamatan yang ada di Kota Dumai dari tahun 2000 hingga tahun 2012 mengalami penambahan atau pemekaran dari yang semula 3 kecamatan menjadi 7 kecamatan pada tahun 2009. Oleh karena hal tersebut, cakupan puskesmas juga mengalami perkembangan, dari 100% pada tahun 2000 menjadi 128,57 pada tahun 2012. Berikut ini cakupan puskesmas di Kota Dumai selama periode tahun 2000 sampai 2012.

Tabel 2.3.1.22
Cakupan Puskesmas di Kota Dumai
Tahun 2000-2012

Indikator	Tahun						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah puskesmas	3	3	5	6	7	7	7
Jumlah seluruh kecamatan	3	5	5	5	5	5	5
Rasio puskesmas	100,00	60,00	100,00	120,00	140,00	140,00	140,00

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah puskesmas	8	9	9	9	9	9
Jumlah seluruh kecamatan	5	5	7	7	7	7
Rasio puskesmas	160,00	180,00	128,57	128,57	128,57	128,57

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; olah data 2013



Gambar 2.3.1.18
 Grafik Cakupan Puskesmas
 di Kota Dumai Tahun 2000-2012

Puskesmas sebagai unit pelayanan kesehatan tingkat pertama dan terdepan dalam sistem pelayanan kesehatan, harus melakukan upaya kesehatan wajib (basic six) dan beberapa upaya kesehatan pilihan yang disesuaikan dengan kondisi, kebutuhan, tuntutan, kemampuan, inovasi serta kebijakan pemerintah daerah setempat. Puskesmas mempunyai fungsi antara lain:

- a. Pusat pembangunan berwawasan kesehatan
- b. Pusat pemberdayaan masyarakat
- c. Pusat pelayanan kesehatan masyarakat primer
- d. Pusat pelayanan kesehatan perorangan primer

10. Cakupan Pembantu Puskesmas

Jumlah Puskesmas Pembantu di Kota Dumai sampai dengan tahun 2012 sebanyak 11 unit yang tersebar di beberapa kelurahan. Cakupan pelayanan puskesmas pembantu tersebut sama sebesar 24,44 pada tahun 2007 hingga 2012. Keberadaan pembantu puskesmas ini selain mendekatkan jangkauan masyarakat terhadap pelayanan kesehatan, juga membantu pelayanan dari puskesmas utama, karena tidak di seluruh kecamatan terdapat puskesmas pembantu.

Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada awal berdirinya Kota Dumai, jumlah puskesmas pembantu yang ada sebanyak 10 (sepuluh) buah. Pada tahun 2012, jumlah puskesmas pembantu di Kota Dumai ada 13 (tiga belas) buah yang tersebar di 5 (lima) kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Dumai Kota, Bukit Kapur, Sungai Sembilan, dan Medang Kampai. Berikut ini sebaran puskesmas pembantu di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.23
Sebaran Puskesmas Pembantu di Kota Dumai

No	Kecamatan	Nama Puskesmas Pembantu
1.	Dumai Barat	1. Parit Pisang Mas
2.	Dumai Kota	2. Rimba Sekampung
3.	Bukit Kapur	3. Gurun Panjang
		4. Kayu Kapur
		5. Simpang Murini
4.	Sungai Sembilan	6. Suka Damai
		7. Basilam Baru
		8. Simpang Pulai
		9. Kampung Sejati
		10. Sungai Sembilan/Transmigrasi
		11. Sungai Teras
		12. Bulu Hala
5.	Medang Kampai	13. Pelintung

Sumber: Revisi Rencana Kerja Dinas Kesehatan Kota Dumai Tahun 2013

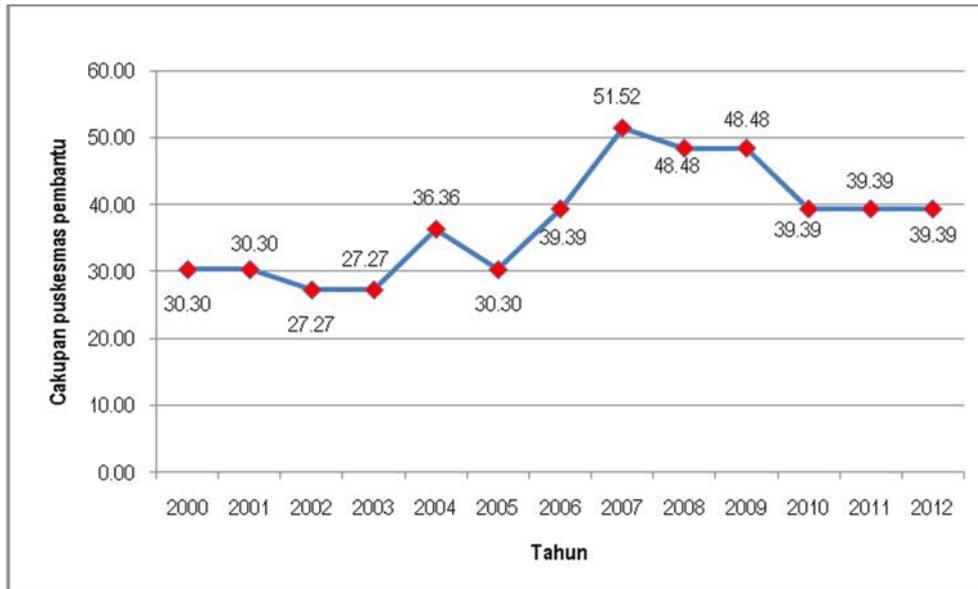
Puskesmas pembantu berfungsi meluaskan jangkauan pelayanan puskesmas dan mendekatkan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada awal berdirinya Kota Dumai jumlah puskesmas pembantu yang ada sebanyak 10 (sepuluh) buah. Jumlah ini menurun pada tahun 2002 sampai 2003, kemudian meningkat sampai menjadi 17 puskesmas pembantu pada tahun 2007. Jumlah puskesmas pembantu pada tahun 2010 sampai 2013 menurun menjadi 13 buah. Hal tersebut dikarenakan beralihnya fungsi 3 puskesmas pembantu menjadi poskeskel yakni Puskesmas Pembantu Mekarsari menjadi Poskeskel Mekarsari, Puskesmas Pembantu Simpang Siak menjadi Poskeskel Kampung Baru, dan Puskesmas Pembantu Selinsing menjadi Poskeskel Guntung. Dari tahun ke tahun perkembangan jumlah puskesmas pembantu yang ada berfluktuasi dan cenderung turun seperti terlihat pada tabel dan grafik berikut ini:

Tabel 2.3.1.24
Cakupan Puskesmas Pembantu di Kota Dumai
Tahun 2000-2012

Indikator	Tahun						
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah puskesmas pembantu	10	10	9	9	12	10	13
Jumlah seluruh kelurahan	33	33	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	30,30	30,30	27,27	27,27	36,36	30,30	39,39

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah puskesmas pembantu	17	16	16	13	13	13
Jumlah seluruh kelurahan	33	33	33	33	33	33
Rasio puskesmas pembantu	51,52	48,48	48,48	39,39	39,39	39,39

Sumber: Profil Kesehatan Kota Dumai, 2008-2011; olah data 2013



Gambar 2.3.1.19
 Grafik Cakupan Puskesmas Pembantu
 di Kota Dumai Tahun 2000-2012

C. Pekerjaan Umum

Terdapat 18 indikator dalam urusan pekerjaan umum, yakni indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio jaringan irigasi, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, persentase rumah tinggal bersanitasi, rasio tempat pemakaman umum per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk, rasio rumah layak huni, rasio permukiman layak huni, panjang jalan dilalui roda empat, jalan penghubung dari ibukota kecamatan ke kawasan permukiman penduduk (minimal dilalui roda empat), panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam), panjang jalan yang memiliki trotoar dan drainase/ saluran pembuangan air (minimal 1,5 meter), sempadan jalan yang dipakai pedagang kaki lima atau bangunan rumah liar, sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat, pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota, luas irigasi kabupaten dalam kondisi baik, serta indikator lingkungan permukiman.

Dalam Laporan Antara Penyusunan Rancangan Akhir RPJPD Kota Dumai 2005 – 2025 ini hanya akan dibahas tujuh indikator, hal ini dikarenakan keterbatasan data yang dimiliki untuk proses penulisan laporan ini. Ketujuh indikator yang dibahas dalam urusan pekerjaan umum diantaranya yakni proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik, rasio tempat ibadah per satuan penduduk, rasio tempat pembuangan sampah (TPS), panjang jalan dilalui roda empat, indikator panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (> 40 Km/Jam), sempadan sungai yang dipakai bangunan liar, serta indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota. Berikut adalah pembahasan ketujuh indikator secara rinci.

1. Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik (Realisasi)

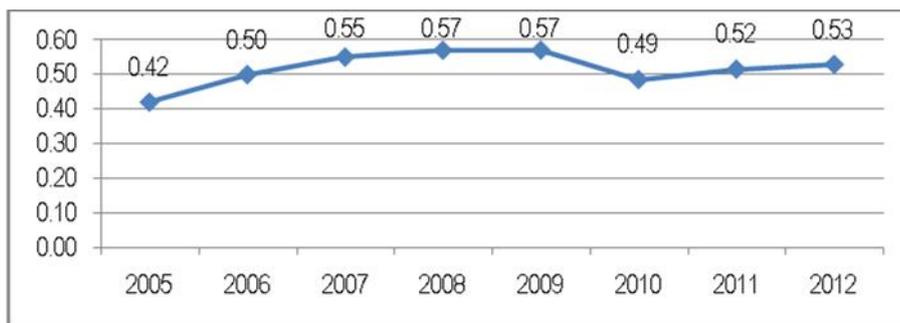
Sesuai dengan Permendagri 54/2010, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik didapatkan dari formula panjang jalan kondisi baik (km) dibagi dengan panjang jalan seluruhnya (km). Perhitungan proporsi panjang jaringan jalan mengindikasikan kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Tabel 2.3.1.25
 Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
 Tahun 2005 – 2011

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang jalan kondisi baik (m)	459269,27	584380,27	699936,07	751170,37	824609,36	790534,12	795607,12	955530,96
Panjang jalan seluruhnya (m)	1091215,51	1168274,31	1270928,61	1316513,81	1444546,01	1626191,21	1542271,21	1803778,91
Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik	0,42	0,50	0,55	0,57	0,57	0,49	0,52	0,53

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2013

Melihat tren yang terjadi di Kota Dumai, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2012, yakni 0,42 pada tahun 2005 meningkat menjadi 0,53 pada tahun 2012. Berikut adalah grafik yang menunjukkan hasil dari indikator proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai.



Gambar 2.3.1.20
 Grafik Proporsi Panjang Jaringan Jalan Dalam Kondisi Baik
 di Kota Dumai Tahun 2005 – 2012

Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik diukur untuk menunjukkan gambaran mengenai tingkat pelayanan suatu jalan dalam melayani pergerakan lalu lintas. Melihat dari tabel diatas, proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik di Kota Dumai masih jauh berada dibawah angka 0,65 yang notabene merupakan angka ketetapan yang tertulis dalam Permendagri 54/2010. Angka yang ditunjukkan oleh Kota Dumai pada rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2012 mengindikasikan bahwa kinerja jaringan jalan dibawah kewenangan kota tidak atau belum mendekati kemacetan.

2. Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk (Realisasi)

Formula yang digunakan untuk penghitungan rasio tempat ibadah persatuan penduduk adalah dengan membagi antara indikator jumlah tempat ibadah dengan jumlah penduduk dan kemudian dikalikan dengan bilangan 1000. Dibawah ini adalah tabel yang menyajikan rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.26
Rasio Tempat Ibadah Per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,53	0,14	1,49	1,31	1,55	
Masjid	0,67	0,06	0,65	0,63	0,81	
Mushola	0,53	0,05	0,54	0,42	0,46	
Gereja Kristen	0,29	0,03	0,27	0,25	0,24	
Gereja Katolik	0,04	0,00	0,03	0,00	0,02	
Pura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Vihara	0,00	0,00	0,01	0,00	0,02	
Konghucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

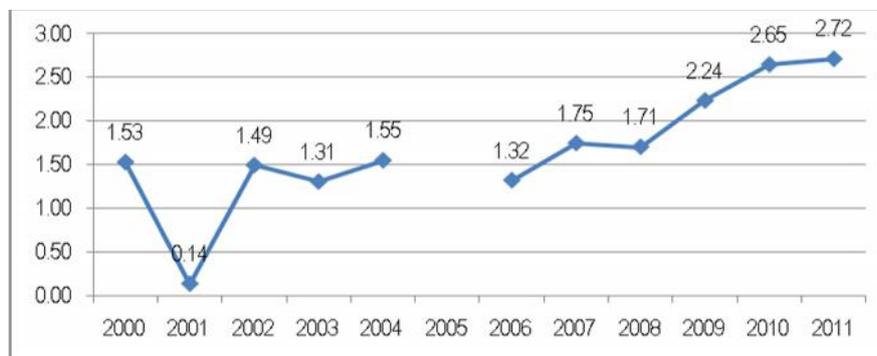
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk	1,32	1,75	1,71	2,24	2,65	2,72
Masjid	0,63	1,06	1,03	1,37	1,61	1,61
Mushola	0,45	0,44	0,43	0,63	0,81	0,83
Gereja Kristen	0,22	0,22	0,21	0,20	0,21	0,20
Gereja Katolik	0,01	0,02	0,02	0,02	0,02	0,02
Pura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Vihara	0,01	0,01	0,01	0,02	0,00	0,03
Konghucu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,04

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat seperti yang ditunjukkan dalam grafik 2.3.1.21. Salah satu penyebabnya diduga adanya perubahan jumlah tempat ibadah dari tahun ke tahunnya, namun fluktuasi rasio tempat ibadah tersebut tidak selalu sebanding dengan jumlah tempat ibadah karena ada faktor lain yang berpengaruh, yaitu jumlah penduduk Kota Dumai yang selalu meningkat setiap tahunnya.



Gambar 2.3.1.21
Rasio Tempat Ibadah per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Hingga tahun 2011 rasio tempat ibadah per satuan penduduk di Kota Dumai masih sangat kecil, yakni 2,72. Hal ini berarti dari setiap 1000 penduduk Kota Dumai, hanya 2 orang saja yang dapat mengakses tempat ibadah tersebut. Namun, sebenarnya ada ukuran lain yang harus diperhatikan, yaitu luas tempat ibadah karena biasanya satu tempat ibadah dapat menampung banyak jemaat. Selain itu, tempat ibadah juga dapat dipakai berkali-kali dalam satu hari sehingga memungkinkan para jemaat untuk bergantian dalam menggunakannya.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk (Realisasi)

Rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.27
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2013

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	16,92	16,92	16,92	17,28	17,28	21,60	21,60

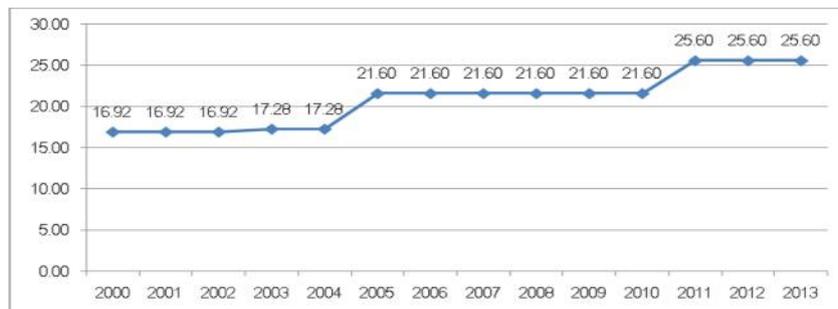
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	21,60	21,60	21,60	21,60	25,60	25,60	25,60

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2013

Dalam rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2013 hasil yang dihasilkan dalam indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 16,92 di tahun 2000 meningkat menjadi 25,60 di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dari SKPD khususnya Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai juga meningkat.



Gambar 2.3.1.22
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2013

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Tata Kota.

4. Panjang Jalan Dilalui Roda Empat (Realisasi)

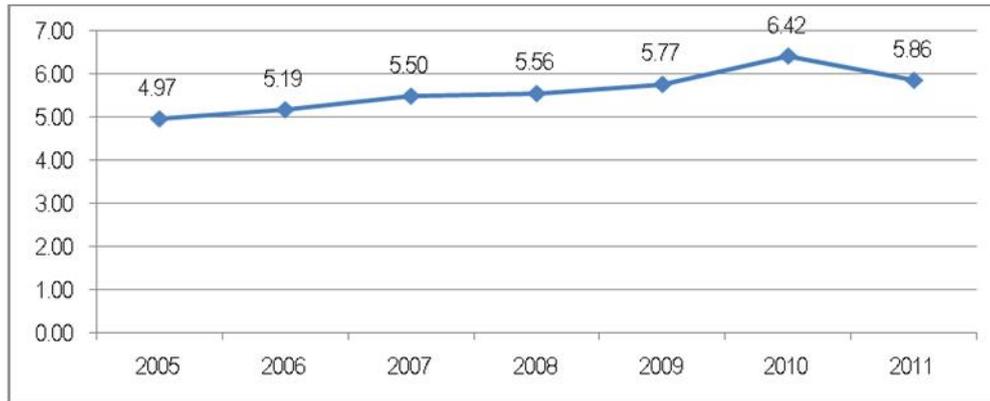
Indikator panjang jalan dilalui roda empat didapatkan dari hasil pembagian antara jumlah panjang jalan (km) dengan jumlah penduduk. Berikut adalah tabel yang menampilkan hitungan indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.28
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2011

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Panjang jalan seluruhnya	1091215,51	1168274,31	1270928,61	1316513,81	1444546,01	1626191,21	1542271,21
Jumlah Penduduk	219351	225249	231121	236778	250367	253178	262976
Panjang jalan dilalui roda 4	4,97	5,19	5,50	5,56	5,77	6,42	5,86

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2013

Dari tabel diatas dapat diketahui bahwa hasil yang dihasilkan oleh indikator panjang jalan dilalui roda empat memiliki kecenderungan meningkat pada tahun 2005 hingga tahun 2010, yakni 4,97 di tahun 2005 dan 6,42 di tahun 2010. Namun, terjadi penurunan pada tahun 2011, yakni menjadi 5,86. Tidak didapatkan informasi lebih lanjut mengenai indikator ini. apabila digambarkan dengan grafik maka indikator panjang jalan dilalui roda empat di Kota Dumai akan tergambar seperti dibawah ini.



Gambar 2.3.1.23
Panjang Jalan Dilalui Roda Empat di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2011

5. Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik (>40Km/Jam)

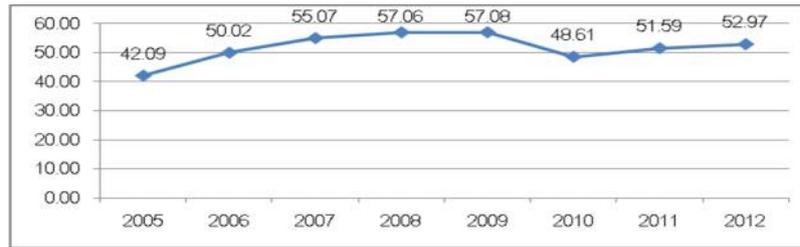
Formula yang digunakan dalam perhitungan indikator panjang jalan kota dalam kondisi baik (> 40 km/jam) adalah dengan membagi indikator panjang jalan kondisi baik dengan panjang seluruh jalan kota dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel yang menyajikan data mengenai indikator panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.29
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2012

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Panjang jalan kabupaten dalam kondisi baik (m)	459269,27	584380,27	699936,07	751170,37	824609,36	790534,12	795607,12	955530,96
Panjang seluruh jalan kabupaten di daerah tersebut (m)	1091215,51	1168274,31	1270928,61	1316513,81	1444546,01	1626191,21	1542271,21	1803778,91
Panjang Jalan Kabupaten Dalam Kondisi Baik (> 40 KM/Jam)	42,09	50,02	55,07	57,06	57,08	48,61	51,59	52,97

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2013

Hasil yang ditunjukkan oleh indikator panjang jalan kota dalam kondisi baik di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2005 hingga tahun 2012. Angka yang ditunjukkan oleh tahun 2005 adalah sebesar 42,09 meningkat menjadi 52,97 pada tahun 2012. Angka yang menunjukkan angka dibawah 60% mengindikasikan bahwa masih banyak ruas jalan yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kualitasnya. Hal ini bertujuan demi meingkatkan kenyamanan dan keamanan berkendara masyarakat Kota Dumai.



Gambar 2.3.1.24
Panjang Jalan Kota Dalam Kondisi Baik di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2012

6. Sempadan Sungai Yang Dipakai Bangunan Liar (Realisasi)

Formula yang dipergunakan untuk menghitung sempadan sungai yang dipakai bangunan rumah liar adalah panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar dibagi dengan panjang seluruh sempadan sungai kota dikali dengan bilangan 100. Data yang didapatkan hanya data tahun 2012. Panjang sempadan sungai yang dipakai bangunan liar adalah sepanjang 17 kilometer, sedangkan panjang seluruh sempadan sungai di Kota Dumai adalah sepanjang 246 kilometer, sehingga hasil dari perhitungan indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar pada tahun 2012 adalah sebesar 6,91. Tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai indikator sempadan sungai yang dipakai bangunan liar ini dari SKPD terkait, dalam hal ini adalah Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai.

7. Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (Realisasi dan Target)

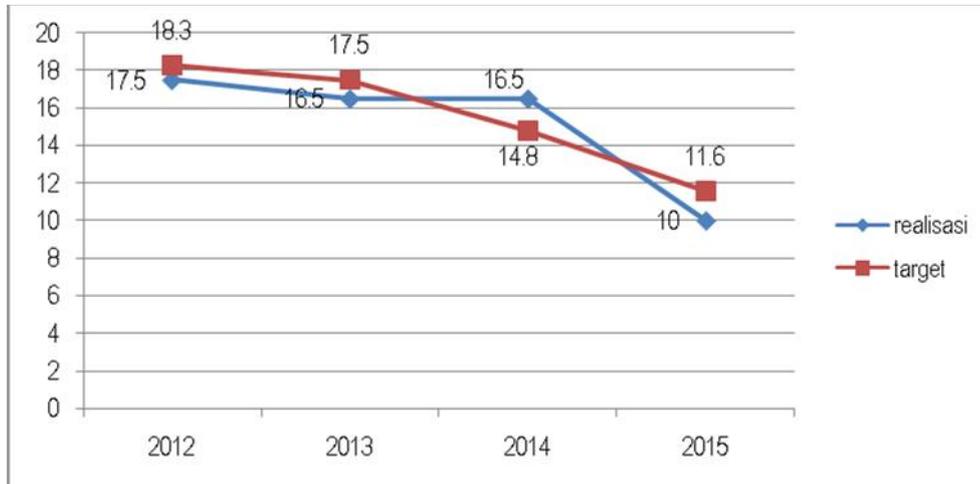
Pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota didapatkan dari hasil perhitungan formula jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor dibagi dengan jumlah seluruh wilayah rawan longsor dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel data realisasi dan target pada indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor lingkup kewenangan kota.

Tabel 2.3.1.30
Pembangunan Turap Di Wilayah Jalan Penghubung
dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kota Dumai
Tahun 2012 – 2015

Indikator	2012		2013		2014		2015	
	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target
Jumlah lokasi pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor		11						
Jumlah seluruh wilayah rawan longsor		60						
Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor Lingkup Kewenangan Kota (%)	17,5	18,3	16,5	17,5	16,5	14,8	10	11,6

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2013

Melihat angka yang ditunjukkan oleh tabel diatas, baik angka realisasi maupun target keduanya memiliki kecenderungan menurun seperti yang ditunjukkan pada gambar 2.3.1.25. Namun tidak didapatkan informasi lebih mendalam dari Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai mengenai indikator pembangunan turap di wilayah jalan penghubung dan aliran sungai rawan longsor di Kota Dumai ini.



Gambar 2.3.1.25
 Grafik Realisasi dan Target Indikator Pembangunan Turap di Wilayah Jalan Penghubung dan Aliran Sungai Rawan Longsor di Kota Dumai Tahun 2012 – 2015

D. Perumahan

1. Rumah Tangga Pengguna Air Bersih

Formula yang dipergunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih adalah dengan membagi jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai tahun 2000 – 2011.

Tabel 2.3.1.31
 Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	519	643	803	997	994	
Jumlah rumah tangga	39621	39758	41212	45418	45182	48800
Rumah tangga pengguna air bersih	1,31	1,62	1,95	2,20	2,20	

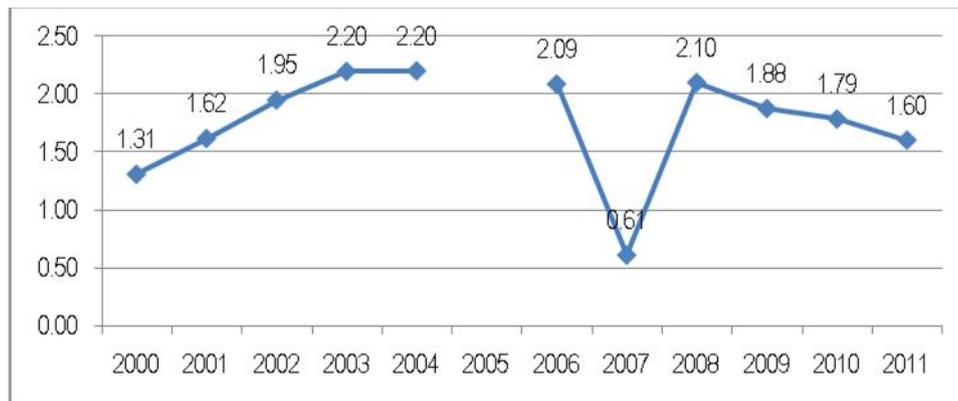
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1037	319	1061	1053	1054	1054
Jumlah rumah tangga	49707	51944	50514	56127	59029	65726
Rumah tangga pengguna air bersih	2,09	0,61	2,10	1,88	1,79	1,60

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Hasil yang didapatkan dari perhitungan formula pada indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai adalah dengan menggunakan jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga), dan didapatkan hasilnya menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2011, yakni 1,31 pada tahun 2000 dan 1,60 pada tahun 2011.



Gambar 2.3.1.26
Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Berdasarkan yang tertulis dalam Potensi Investasi Daerah Kota Dumai tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kota Dumai, tertulis bahwa sumber air bersih di Kota Dumai bersumber dari berbagai sumber, diantaranya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pertamina, PT Pelindo, dan sumur-sumur galian milik masyarakat. Dalam Potensi Investasi Daerah tersebut juga disebutkan bahwa volume air bersih yang disediakan oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kota Dumai secara keseluruhan, sehingga hal tersebut menuntut masyarakat untuk membuat sumur-sumur galian di lingkungan tinggalnya.

2. Rumah Tangga Pengguna Listrik

Indikator rumah tangga pengguna listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel rumah tangga pengguna listrik di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.32
Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	8273	24925	27108	29262	30955	
Jumlah rumah tangga	39621	39758	41212	45418	45182	48800
Rumah tangga pengguna listrik	20,88	62,69	65,78	64,43	68,51	

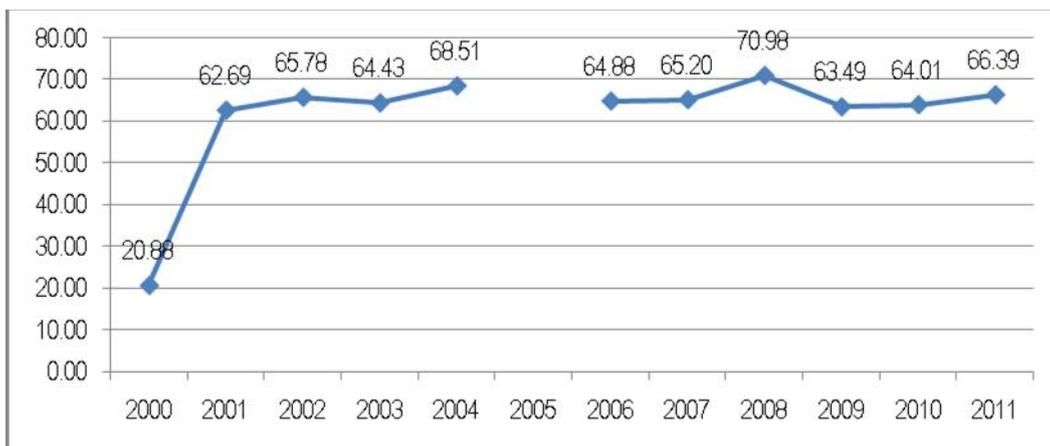
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	32251	33868	35857	35635	37787	43634
Jumlah rumah tangga	49707	51944	50514	56127	59029	65726
Rumah tangga pengguna listrik	64,88	65,20	70,98	63,49	64,01	66,39

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini seiring dengan pernyataan yang tertuang dalam Potensi Investasi Daerah Kota Dumai yang menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kebutuhan energi listrik di Kota Dumai untuk konsumsi sebesar 163.046.535 kWh dan memiliki beban puncak sebesar 6.954 kw, serta memiliki daya terpasang sebesar 78.770 KVA. Dengan melihat data yang telah tertulis sebelumnya maka terlihat bahwa seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Namun apabila melihat tabel 2.3.1.32 data rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 menunjukkan angka 66,39 sehingga belum seluruh wilayah Kota Dumai teraliri aliran listrik.



Gambar 2.3.1.27
 Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Listrik di Kota Dumai
 Tahun 2000 – 2011

3. Jumlah Bangunan Rumah Tempat Menurut Kecamatan di Kota Dumai

Jumlah bangunan rumah dapat dipergunakan untuk menghitung beberapa indikator sekaligus, sebagai contoh untuk perhitungan persentase rumah tinggal bersanitasi pada urusan pekerjaan umum, indikator rumah layak huni pada urusan perumahan, serta indikator rasio bangunan ber-IMB per satuan bangunan pada urusan penataan ruang. Berikut adalah tabel jumlah bangunan rumah di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.33
Jumlah Bangunan Rumah Tempat Menurut Kecamatan di Kota Dumai
Tahun 2011 – 2012

Kecamatan	Tahun	
	2011	2012
Bukit Kapur	8357	8905
Medang Kampai	2074	2197
Sungai Sembilan	5843	6576
Dumai Barat	19512	8007
Dumai Timur	19066	12945
Dumai Kota	0	10160
Dumai Selatan	0	10239
JUMLAH	54852	59029

Sumber : LPPD Kota Dumai Tahun 2011 – 2012

Melihat dari tabel diatas, jumlah bangunan rumah di Kota Dumai tahun 2011 – 2012 mengalami kenaikan, namun belum dapat dikatakan memiliki kecenderungan meningkat karena hanya diketahui data dua tahun saja. Jumlah bangunan yang ditampilkan juga tidak menyebutkan mengenai kualitas bangunan, apakah layak huni atau tidak, sehingga indikator mengenai perumahan dan permukiman belum dapat dihitung.

Menurut amatan lapangan yang telah dilakukan sebelumnya, masih banyak rumah warga khususnya yang terletak di pinggiran kota terbuat dari kayu dan berbentuk panggung. Alasan pembuatan rumah dari bahan kayu terkait dengan status ekonomi masyarakat, yakni masyarakat dengan kondisi perekonomian lemah.

E. Penataan Ruang

1. Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB

Rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB didapatkan dari perhitungan luas ruang terbuka hijau dibagi dengan luas wilayah ber HPL/HGB. Data mengenai rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/HGB yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai ini merupakan data jadi, sehingga tidak diketahui mengenai data per sub indikatornya. Berikut adalah data realisasi rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB Kota Dumai tahun 2002 – 2015.

Tabel 2.3.1.34
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB di Kota Dumai
Tahun 2002 - 2015

Indikator	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25	3,25

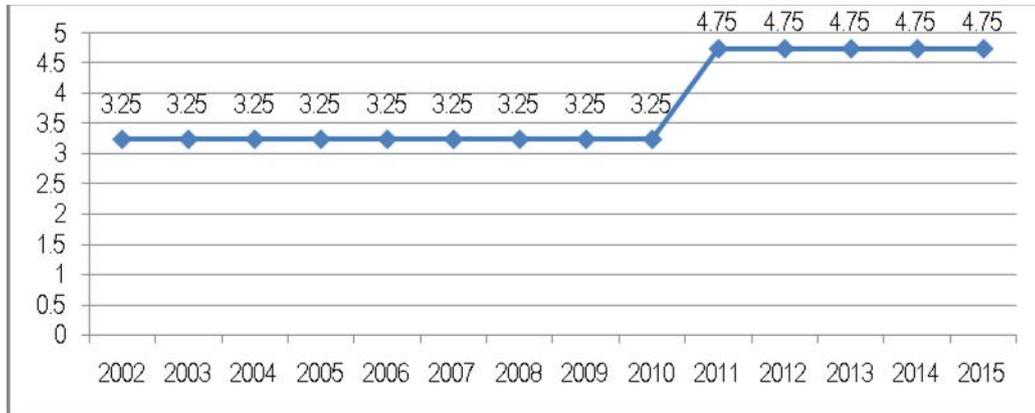
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/HGB	3,25	3,25	4,75	4,75	4,75	4,75	4,75

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai, 2013

Dari data yang ditunjukkan oleh tabel diatas menunjukkan bahwa rasio ruang terbuka hijau per satuan luas wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 3,25 pada tahun 2002 meningkat menjadi 4,75 di tahun 2015, seperti yang tergambar dalam grafik dibawah ini.



Gambar 2.3.1.28
Rasio Ruang Terbuka Hijau per Satuan Luas Wilayah ber HPL/ HGB di Kota Dumai Tahun 2002 - 2015

F. Perhubungan

Pada pokok bahasan mengenai perhubungan akan dibahas secara terinci indikator-indikator seperti jumlah arus penumpang umum, jumlah uji KIR angkutan umum, jumlah pelabuhan laut/ udara/ terminal bis, kepemilikan KIR angkutan umum, lama pengujian kelayakan angkutan umum (KIR), biaya pengujian kelayakan angkutan umum, serta pemasangan rambu-rambu. Berikut akan dijelaskan secara detail mengenai indikator-indikator tersebut.

1. Jumlah Arus Penumpang Umum

Jumlah arus penumpang umum yang dimaksudkan dalam lampiran Permendagri 54/2010 adalah jumlah arus penumpang angkutan umum baik yang melalui pelabuhan, bandar udara, maupun terminal yang masuk/keluar daerah selama satu tahun. Berikut adalah tabel yang menyajikan data jumlah arus penumpang umum di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.35
Jumlah Arus Penumpang Angkutan Umum Melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Baik Penumpang Masuk (Datang) Maupun Keluar (Berangkat) di Kota Dumai Tahun 2000 – 2011

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2000	2001	2002	2003	2004	2005
TERMINAL	BERANGKAT	NA	NA	NA	235616	233518	566172
	DATANG	NA	NA	NA	220752	308812	462960
PELABUHAN	BERANGKAT	421180	NA	451315	444130	391350	NA
	DATANG	431181	NA	561214	428264	407530	NA
BANDARA	BERANGKAT	23302	23548	21910	25309	39941	26422
	DATANG	21232	21891	21038	23616	29230	26629
	TRANSIT	9068	8381	6402	10215	39765	16828

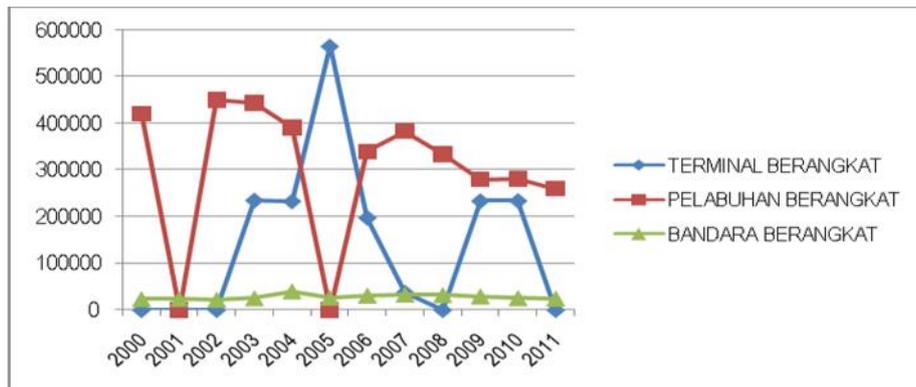
Bersambung

Lanjutan

Jenis Angkutan	Jenis Keberangkatan	2006	2007	2008	2009	2010	2011
TERMINAL	BERANGKAT	198161	37669	137907	234239	234639	NA
	DATANG	204216	136254	126695	224292	230503	NA
PELABUHAN	BERANGKAT	340195	383492	334597	280165	281666	260860
	DATANG	322599	382572	361038	286677	278897	260879
BANDARA	BERANGKAT	30684	33103	32079	29456	25643	24533
	DATANG	30007	31097	31468	27725	25256	24800
	TRANSIT	14967	11498	16026	8486	10869	9442

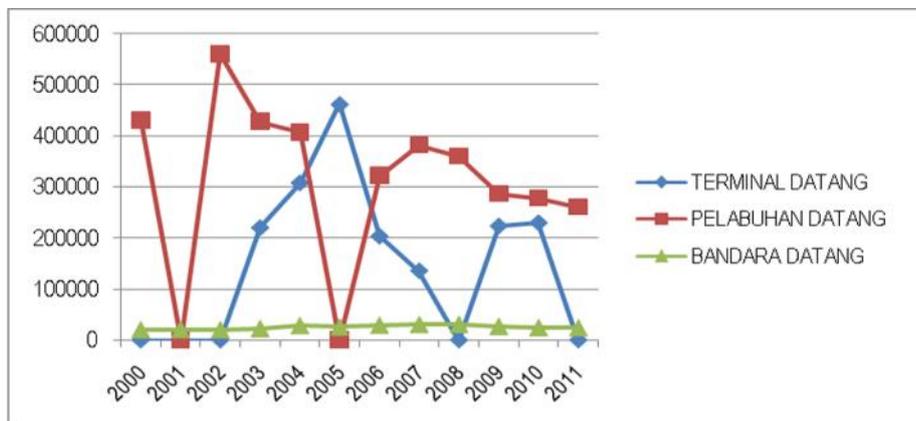
Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah arus penumpang angkutan umum baik melalui terminal, pelabuhan, maupun bandara di Kota Dumai dalam rentang waktu 2000 hingga tahun 2011 mengalami fluktuasi. Namun apabila dilihat secara lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut (palabuhan) masih mendominasi diantara angkutan lainnya di Kota Dumai. Terlihat sejak tahun data (2000 – 2011) jumlah penumpang angkutan yang melalui pelabuhan (kapal) lebih besar apabila dibandingkan dengan penumpang melalui terminal (bis) dan bandar udara (pesawat), seperti yang tergambar pada grafik dibawah ini.



Gambar 2.3.1.29

Arus Penumpang Umum yang Keluar Kota Dumai melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Tahun 2000 – 2011



Gambar 2.3.1.30

Arus Penumpang Umum yang Masuk Kota Dumai melalui Terminal, Pelabuhan, dan Bandara Tahun 2000 – 2011

2. Jumlah Uji KIR Angkutan Umum

Jumlah Uji KIR angkutan umum yang dimaksud di sini merupakan pengujian setiap angkutan umum yang diimpor, baik yang dibuat dan/atau dirakit di dalam negeri yang akan dioperasikan di jalan agar memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan. Data jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.3.1.36
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2001 – 2012

Indikator	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1000		1304	1307	1368	1031

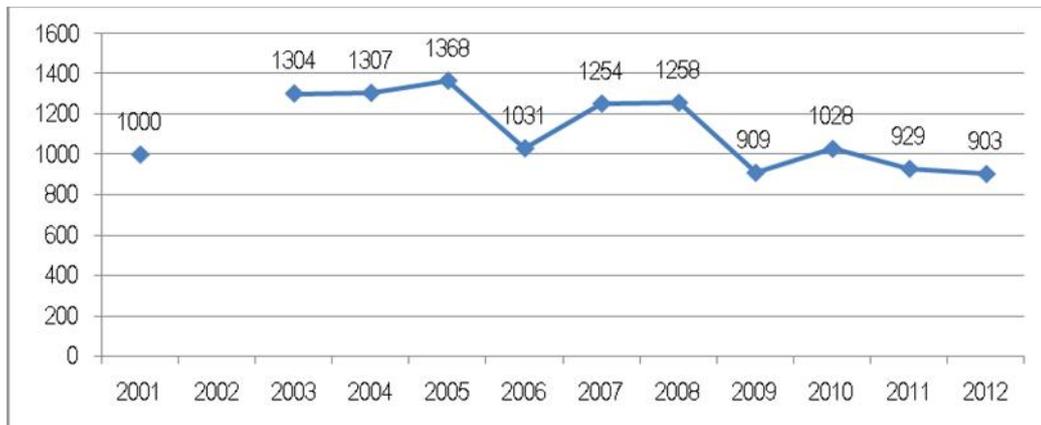
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum	1254	1258	909	1028	929	903

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2013

Jumlah wajib uji KIR angkutan umum di Kota Yogyakarta dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2012 menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan menurun, seperti yang tergambar pada grafik 2.3.1.31. Namun tidak ada penjelasan lebih lanjut mengenai fluktuasi jumlah uji KIR angkutan umum di Kota Dumai ini, apakah karena pengujian KIR tidak terikat batasan administrasi sehingga kendaraan dari luar kota dapat melakukan pengujian KIR di Kota Dumai, atau terdapat alasan yang lainnya.



Gambar 2.3.1.31
Jumlah Uji KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2001 – 2012

3. Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis

Adanya pelabuhan laut, udara, dan terminal bis dapat dikatakan menjadi salah satu sarana perhubungan yang memegang peranan penting dalam perkembangan suatu daerah. Kota Dumai memiliki pelabuhan yang merupakan salah satu “pintu masuk” bagi Indonesia. Hal ini dikarenakan 80% kegiatan

ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan ini. Saat ini Dumai sudah memiliki pelabuhan khusus untuk bongkar muat crude palm oil (CPO) yang dibangun, dimiliki dan dioperasikan oleh PT. Bukit Kapur Reksa dalam (PT. PKR). dan juga terdapat pelabuhan khusus untuk bongkar muat pupuk, dalam hal ini khususnya adalah pupuk NPK yang diproduksi dan dipasarkan oleh PT. Sentana, di mana pelabuhan tersebut yang berada di Pelintung yang berada di kawasan industri Pelintung adalah khusus untuk bongkar muat pupuk dan pemasaran pupuk keluar daerah maupun keluar negeri.

Selain itu, terdapat beberapa pelabuhan rakyat yang dibangun dan dikelola oleh masyarakat Kota Dumai. Pelabuhan rakyat ini terdapat di bantaran sungai-sungai Kota Dumai. Di wilayah Kota Dumai terdapat 15 buah sungai yang dapat dialiri oleh kapal pompong, sampan dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai.

Tabel 2.3.1.37
Jumlah Pelabuhan Laut/ Udara/ Terminal Bis
Tahun 2007 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Pelabuhan Penumpang	1	1	1	1	1	1	1
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1

Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Pelabuhan Penumpang	1	1	1	1	1	1	1
Pelabuhan Ro-Ro	1	1	1	1	1	1	1
Bandara	1	1	1	1	1	1	1
Terminal Penumpang	1	1	1	1	1	1	1

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2013

Dari tabel diatas diketahui bahwa terdapat masing-masing satu buah pelabuhan penumpang yakni Pelindo, satu buah pelabuhan Ro-ro, satu buah bandara yakni Pinang Kampai, serta satu buah terminal penumpang yakni yang terdapat di jalan Kelakap Tujuh. Disamping dari keempat tersebut masih terdapat beberapa pelabuhan dan terminal di Kota Dumai, diantaranya tiga buah pelabuhan yang dikelola oleh swasta (perusahaan) yakni Pelabuhan Caltex/Chevron yang khusus untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, Pelabuhan Pertamina yang juga dipergunakan untuk mengangkut minyak mentah dan BBM, serta Pelabuhan Kawasan Industri Dumai yang mengangkut minyak nabati dan pupuk NPK. Kota Dumai memiliki Terminal angkutan Penumpang dan Terminal angkutan barang yang telah beroperasi di Kota Dumai. Untuk Terminal Penumpang, telah beroperasi Terminal Tipe A (untuk melayani pergerakan Bus antar kota antar provinsi - AKAP) yang terdapat di Kelakap Tujuh Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan Kecamatan Dumai Barat, dan juga Terminal barang yang terdapat di Kecamatan Dumai Barat yang merupakan bagian dari sistem Terminal Agroindustri (sumber: Draf Laporan Akhir RTRW Kota Dumai Tahun 2014-2034).

4. Kepemilikan KIR Angkutan Umum

Kepemilikan KIR angkutan umum didapatkan dari hasil perhitungan jumlah angkutan umum yang tidak memiliki KIR dibagi dengan jumlah angkutan umum dikali dengan bilangan 100. Berikut adalah data indikator kepemilikan KIR angkutan umum.

Tabel 2.3.1.38
Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2001 – 2011

Indikator	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	79		137	105	78	86

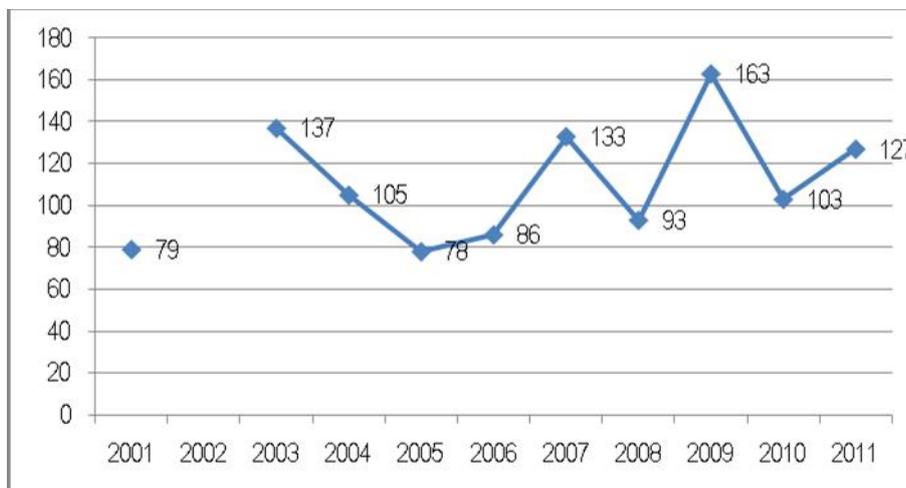
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011
Kepemilikan KIR Angkutan Umum	133	93	163	103	127

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2013

Hasil yang ditunjukkan oleh tabel kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai menunjukkan hasil yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat dalam kurun waktu tahun 2001 hingga tahun 2011. Berikut adalah grafik yang menggambarkan nilai kepemilikan KIR angkutan umum di Kota Dumai.



Gambar 2.3.1.32
Grafik Kepemilikan KIR Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2001 - 2011

5. Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Lama pengujian kelayakan angkutan umum di Kota Dumai sejak tahun 2000 hingga tahun 2013 adalah 20 menit, berikut apabila ditunjukkan dengan tabel.

Tabel 2.3.1.39
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2013

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	20 menit						

Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Lama Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	20 menit						

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2013

6. Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum

Besarnya biaya pengujian yang ditetapkan dari tahun 2000 hingga tahun 2005 adalah sebesar Rp 21.000,- . Pada tahun 2006 mengalami kenaikan menjadi Rp 26.500,- dan biaya tersebut masih dipergunakan hingga saat ini (tahun 2013), berikut apabila ditunjukkan dengan tabel.

Tabel 2.3.1.40
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2013

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	21000	21000	21000	21000	21000	21000	26500

Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Biaya Pengujian Kelayakan Angkutan Umum	26500	26500	26500	26500	26500	26500	26500

Sumber : Dinas Perhubungan Kota Dumai, 2013

7. Pemasangan Rambu-rambu

Formula yang digunakan untuk perhitungan indikator pemasangan rambu-rambu adalah jumlah pemasangan rambu-rambu dibagi dengan jumlah rambu-rambu yang seharusnya tersedia dikalikan dengan bilangan 100. Pemasangan rambu-rambu di berbagai titik strategis dan beberapa ruas jalan, serta lingkungan permukiman penduduk sangat penting dilakukan untuk memberikan petunjuk dan mempermudah pengguna jalan dalam mencari tempat tujuan. Selain itu, rambu-rambu tersebut juga berfungsi untuk memberikan peringatan bagi pengguna jalan agar lebih waspada terhadap sesuatu yang berbahaya di ruas jalan.

Data yang bersumber dari Dinas Perhubungan Kota Dumai tidak menyebutkan sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan pada formula pemasangan rambu-rambu. Data yang didapatkan hanyalah data mengenai jumlah pemasangan rambu-rambu pada tahun n, dimana pada tahun 2011 terpasang rambu

lalu lintas tiang tunggal sebanyak 50 unit, dan rambu cantilever type F sebanyak 106 unit. Pada tahun 2012, Dinas Perhubungan Kota Dumai melakukan pemasangan daun rambu pada tiang rambu cantilever sebanyak 106 unit, rambu tiang tunggal di area perkantoran sebanyak 100 unit, serta pemasangan rambu tiang tunggal di jalan umum sebanyak 150 unit. Pada tahun 2013, dipasang rambu tiang tunggal sebanyak 135 unit, RPPJ sebanyak 34 unit, serta RPPJ portal bentang sebanyak 2 unit.

G. Lingkungan Hidup

1. Persentase Penanganan Sampah

Formula yang dipergunakan untuk menghitung persentase penanganan sampah adalah merupakan hasil bagi antara volume tempat sampah yang ditangani dengan volume produksi sampah dikalikan dengan bilangan 100. Tidak dijelaskan secara terperinci yang tertulis dalam Permendagri 54/2010 mengenai definisi volume sampah yang ditangani, apakah memiliki pengertian volume sampah yang dibuang ke TPA atau volume sampah yang diolah. Data yang tertulis dalam tabel dibawah ini merupakan data jadi mengenai persentase penanganan sampah yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.41
 Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai (Realisasi dan Target)
 Tahun 2000 – 2025

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008
Persentase penanganan sampah	133	135	137	139	140	143	146	148	148

Bersambung

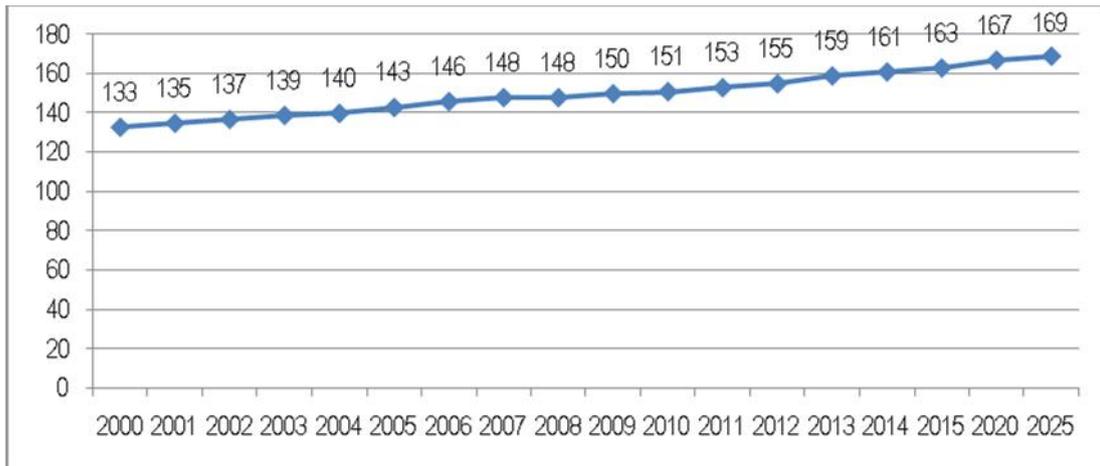
Lanjutan

Indikator	2009	2010	2011	2012	2013	2014*)	2015*)	2020*)	2025*)
Persentase penanganan sampah	150	151	153	155	159	161	163	167	169

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai, 2013

Keterangan :
 *) : Target

Melihat tren perkembangan dari indikator persentase penanganan sampah di Kota Dumai menunjukkan hasil dengan kecenderungan semakin meningkat dari kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2025, yakni 133 di tahun 2000 meningkat menjadi 169 di tahun 2025 (target), seperti yang tergambar dalam grafik berikut ini.



Gambar 2.3.1.33
 Grafik Persentase Penanganan Sampah di Kota Dumai (Realisasi dan Target)
 Tahun 2000 – 2025

2. Persentase Luas Permukiman yang Tertata

Formula yang digunakan untuk menghitung persentase luas permukiman yang tertata adalah dengan membagikan luas area permukiman tertata dengan luas area permukiman keseluruhan dikalikan dengan bilangan 100. Data yang didapatkan dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai hanya data jadi tahun 2013, yakni sebesar 27,69.

3. Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk

Tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk telah dibahas pada salah satu indikator dalam pokok bahasan pekerjaan umum. Terdapat kesamaan diantara keduanya, yakni didapatkan dari formula jumlah daya tampung TPS yang dibagi dengan jumlah penduduk dikalikan bilangan 1000. Data mengenai rasio tempat pembuangan sampah sudah merupakan data jadi yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai. Berikut adalah data mengenai indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.42
 Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai
 Tahun 2000 – 2013

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	16,92	16,92	16,92	17,28	17,28	21,60	21,60

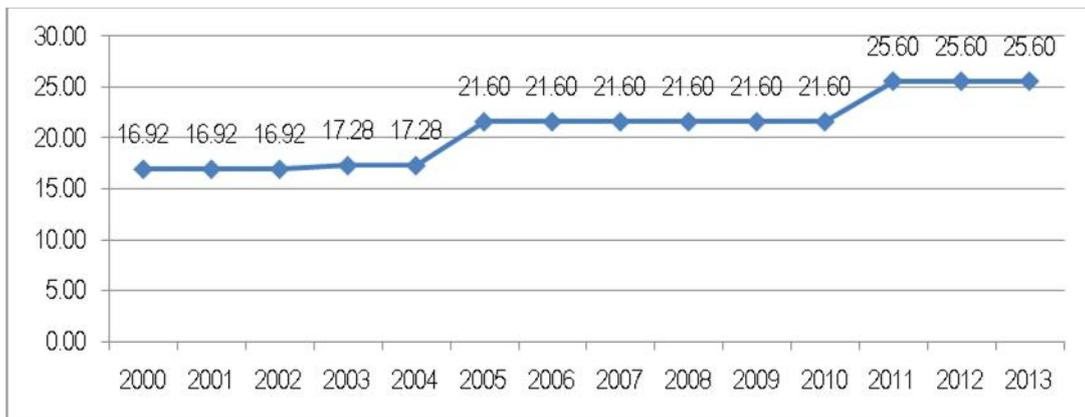
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk	21,60	21,60	21,60	21,60	25,60	25,60	25,60

Sumber : Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai Tahun 2013

Dalam rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2013 hasil yang dihasilkan dalam indikator rasio tempat pembuangan sampah (TPS) per satuan penduduk di Kota Dumai memiliki kecenderungan meningkat, yakni 16,92 di tahun 2000 meningkat menjadi 25,60 di tahun 2013. Hal ini mengindikasikan bahwa kinerja dari SKPD khususnya Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai juga meningkat.



Gambar 2.3.1.34
Rasio Tempat Pembuangan Sampah (TPS) per Satuan Penduduk di Kota Dumai Tahun 2000 – 2013

Sistem pengangkutan sampah yang dilakukan oleh Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai sebagaimana yang tertulis dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) urusan pengelolaan sampah, pengangkutan sampah dibagi menjadi tiga bagian sesuai dengan sumber penghasil sampahnya. Pertama, sampah yang dihasilkan oleh rumah tangga/ ruko. Sampah yang dihasilkan sebagian dikumpulkan oleh petugas sampah yang ditunjuk langsung oleh ketua RT, dan sebagian lainnya langsung diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota.

Kedua, sampah yang terdapat di pasar. Pengumpulan sampah pasar dilakukan oleh pengelola pasar yang kemudian dikumpulkan di tempat pembuangan sementara (TPS) yang telah disediakan, lalu kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Tata Kota untuk dibawa menuju tempat pembuangan akhir (TPA). Ketiga, sampah yang dihasilkan oleh perusahaan. Sampah perusahaan atau pabrik sebagian dikelola langsung oleh perusahaan dimaksud untuk diangkut langsung ke TPA, sedangkan sebagian perusahaan lainnya langsung dilayani oleh petugas kebersihan dari Dinas Tata Kota.

Sistem pengelolaan persampahan akan dikembangkan melalui penerapan prinsip pengurangan (reduce), penggunaan kembali (reuse), dan daur-ulangan (recycle), meliputi pengembangan Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) dan sarana serta operasional kebersihan kota. Dalam dokumen rencana tata ruang wilayah Kota Dumai Tahun 2014-2034, TPA akan dikembangkan melalui pengelolaan penimbunan (sanitary landfill) dengan daya tampung sampah sebesar 1.205 m3 per hari, dan akan ditempatkan pada beberapa

lokasi, yaitu di Kecamatan Dumai Selatan (10 ha), Kecamatan Bukit Kapur (2 ha di jalan sirih dan 2 ha di jalan KUD).

H. Kependudukan dan Catatan Sipil

Permasalahan yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah masih adanya sebagian masyarakat yang belum menyadari arti pentingnya kepemilikan identitas kependudukan maupun akta Pencatatan Sipil serta masih adanya sebagian masyarakat yang belum melaksanakan kewajibannya untuk segera melaporkan setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialaminya. Administrasi kependudukan merupakan rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penerbitan dokumen dan data kependudukan melalui pendaftaran penduduk, pencatatan sipil, pengelolaan informasi administrasi kependudukan serta pendayagunaan yang hasilnya untuk pelayanan publik dan pembangunan sektor lain.

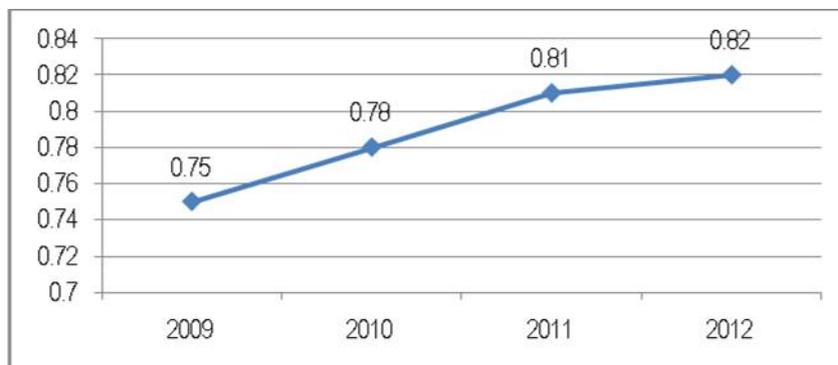
1. Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk

Masalah yang dihadapi dalam urusan kependudukan dan catatan sipil adalah masih belum optimalnya kesadaran masyarakat melengkapi dirinya dengan identitas kependudukan maupun akte kelahiran. Rasio penduduk ber-KTP per satuan pendidikan dari tahun 2009 hingga tahun 2012 selalu meningkat, pada tahun 2009 rasio penduduk ber-KTP di Kota Dumai sebesar 0,75%. Rasio penduduk ber-KTP pada tahun 2012 meningkat menjadi 0,82%.

Tabel 2.3.1.43
Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Tahun 2009-2012

Indikator	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Rasio penduduk ber-KTP	0,75	0,78	0,81	0,82

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.35
Grafik Rasio Penduduk ber-KTP per Satuan Penduduk
Tahun 2009-2012

2. Rasio Bayi Berakte Lahir

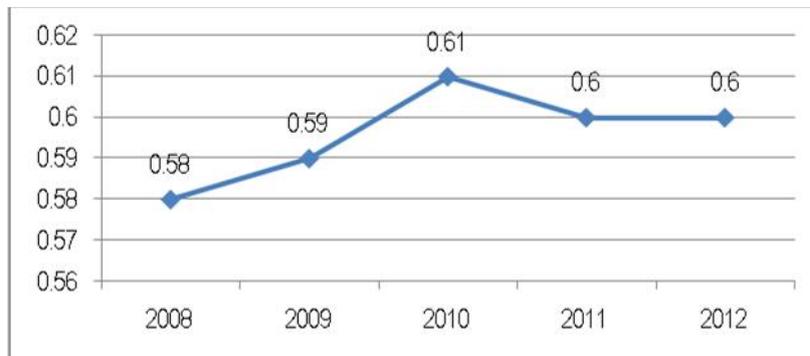
Rasio bayi berakte kelahiran adalah perbandingan jumlah bayi lahir dalam 1 tahun yang berakte kelahiran terhadap jumlah bayi lahir pada tahun yang sama. Berdasarkan data jumlah penduduk yang memiliki Kartu Keluarga (KK) dan penduduk yang telah menikah, maka dapat diketahui rasio bayi yang berakte lahir. Jumlah ini tidak mencerminkan bahwa bayi tersebut memiliki akta kelahiran, karena tidak semua penduduk segera mencatatkan kelahiran bayinya di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Di Kota Dumai, rasio bayi berakte lahir dari tahun 2008 hingga tahun 2012 menunjukkan peningkatan, artinya kesadaran masyarakat terutama orangtua untuk mendaftarkan anaknya di Kantor Catatan Sipil. Hal ini mungkin terjadi karena dampak dari beberapa kebijakan yang mewajibkan anak untuk memiliki akte kelahiran, misalnya untuk mendaftar sekolah. Pada tahun 2008 rasio anak berakte lahir berjumlah 0,58. Dan pada tahun 2012 angka ini naik menjadi 0,60.

Tabel 2.3.1.44
Rasio Bayi Berakte Lahir Tahun 2008-2012

Indikator	Tahun				
	2008	2009	2010	2011	2012
Rasio Bayi Berakte Lahir	0,58	0,59	0,61	0,6	0,6

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.36
Grafik Bayi Berakte Lahir Tahun 2008-2012

3. Kepemilikan KTP

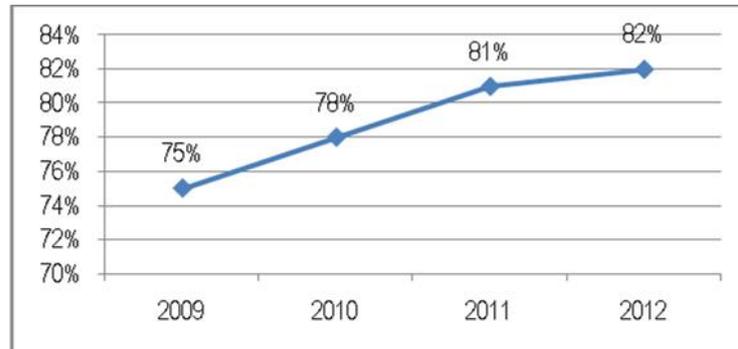
Kartu Tanda Penduduk (KTP) adalah identitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang diterbitkan oleh Instansi Pelaksana yang berlaku di seluruh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kepemilikan KTP adalah perbandingan jumlah penduduk yang memiliki KTP terhadap jumlah penduduk wajib KTP (berusia 17 tahun ke atas dan atau pernah/sudah menikah)

Dari data yang tercatat oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, dari tahun 2009 hingga tahun 2012 persentase penduduk yang telah memiliki KTP semakin meningkat. Pada tahun 2009 rasio penduduk yang ber KTP sebesar 75%, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 82%.

Tabel 2.3.1.45
Kepemilikan KTP Tahun 2009-2012

Indikator	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Kepemilikan KTP	75%	78%	81%	82%

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.37
Grafik Kepemilikan KTP Tahun 2009-2012

4. Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi

Data mengenai ketersediaan database kependudukan skala provinsi berdasarkan informasi dari instansi terkait yaitu Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Dumai sudah ada mulai tahun 2007. Database kependudukan di Kota Dumai dilakukan secara rutin melalui program SIAK (Sistem Informasi Administrasi Kependudukan). Melalui program tersebut, database kependudukan di Kota Dumai dapat dilihat secara berkala dan dapat diakses oleh siapa pun yang berkepentingan dengan data tersebut. Selain itu dengan adanya program yang dijalankan secara online tapi terpadu, maka koordinasi dengan Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil di tingkat provinsi dapat mudah dilaksanakan.

Tabel 2.3.1.46
Ketersediaan Database Kependudukan Skala Provinsi Tahun 2005-2012

Indikator	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ketersediaan atabase kependudukan skala provinsi	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2013

5. Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK

Penerapan KTP Nasional berbasis NIK telah dilakukan oleh Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kota Dumai sejak tahun 2005.

Tabel 2.3.1.47
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK Tahun 2005-2012

Indikator	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Penerapan KTP Nasional Berbasis NIK	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Dumai, 2013

I. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

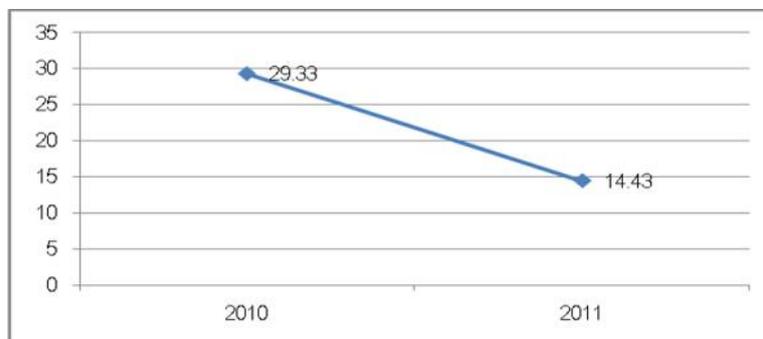
1. Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah

Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintah adalah proporsi perempuan yang bekerja pada lembaga pemerintah terhadap jumlah seluruh pekerja perempuan. Berdasarkan data dari Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2010 jumlah pekerja perempuan di lembaga pemerintah berjumlah 166 perempuan, dan total jumlah pekerja perempuan berjumlah 566 perempuan, dengan demikian persentase pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah adalah sebesar 29,33%. Dan pada tahun 2011 jumlah pekerja perempuan yang bekerja di lembaga pemerintah tetap sebesar 166 perempuan, namun total jumlah pekerja perempuan naik menjadi 1150 pekerja, dengan demikian rasionya juga turun mejadi hanya 14,43%

Tabel 2.3.1.48
 Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Tahun 2010-2011

Indikator	Tahun	
	2010	2011
Pekerja Perempuan di Lembaga Pemerintah	166	166
Jumlah Pekerja Perempuan (Pekerja di Sektor Formal&Informal)	566	1.150
Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah	29,33	14,43

Sumber : Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.38
 Grafik Persentase Partisipasi Perempuan di Lembaga Pemerintah Kota Dumai Tahun 2010-2011

2. Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan

Partisipasi angkatan kerja perempuan adalah proporsi jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan terhadap jumlah angkatan kerja perempuan. Partisipasi angkatan kerja perempuan ini menggambarkan jumlah penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi terhadap total penduduk perempuan usia kerja.

PAK perempuan dihitung dengan membandingkan antara jumlah angkatan kerja perempuan dengan penduduk perempuan usia kerja. Semakin besar PAK perempuan, maka semakin banyak penduduk perempuan yang secara aktif melakukan kegiatan ekonomi.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, pada tahun 2010 dan 2011 terjadi penurunan jumlah partisipasi angkatan kerja perempuan dari yang semula 566 pada tahun 2010 menjadi hanya 113 pada tahun 2011. Jumlah angkatan kerja perempuan juga mengalami penurunan, dari yang semula 3297 pada tahun 2010 menjadi hanya 2429 pada tahun 2011. Dengan demikian maka angka partisipasi perempuan juga mengalami penurunan, dari 17,17% pada tahun 2010 menjadi hanya 4,65 pada tahun 2011.

Tabel 2.3.1.49
Partisipasi Angkatan Kerja Perempuan Kota Dumai Tahun 2010-2011

Indikator	2010	2011
Partisipasi angkatan kerja perempuan	17,17	4,65

Sumber : Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2013

J. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera

1. Cakupan Peserta KB Aktif

Dalam rangka menekan laju pertumbuhan penduduk, salah satu cara yang digunakan adalah melalui program KB. Keluarga Berencana dan Keluarga Sejahtera dicanangkan untuk mengetahui tingkat Partisipasi Pasangan Usia Subur (PUS) terhadap KB. Besarnya angka partisipasi KB (akseptor) menunjukkan adanya pengendalian jumlah penduduk.

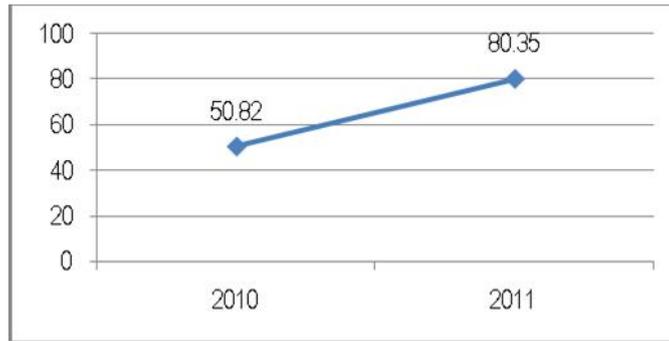
Peserta KB aktif adalah Pasangan Usia Subur (PUS) yang pada saat ini masih menggunakan salah satu cara atau alat kontrasepsi. Cakupan peserta KB aktif adalah proporsi jumlah peserta program KB aktif terhadap jumlah pasangan usia subur.

Berdasarkan data dari Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, dari tahun 2010 hingga tahun 2011 jumlah peserta program KB aktif mengalami peningkatan yang cukup besar. Pada tahun jumlah peserta KB aktif adalah sebesar 12438 peserta, kemudian pada tahun 2011 meningkat menjadi 33123 peserta. Jumlah pasangan usia subur juga mengalami peningkatan, dari 24447 pasangan menjadi 41334 pasangan. Dengan demikian cakupan peserta KB aktif juga meningkat, dari 50,82 pada tahun 2010 menjadi 80,13 pada tahun 2011.

Tabel 2.3.1.50
Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai tahun 2010-2011

Indikator	Tahun	
	2010	2011
Jumlah peserta program KB aktif	12.438	33.213
Jumlah Pasangan Usia Subur	24.474	41.334
Cakupan peserta KB aktif	50,82	80,35

Sumber : Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.39
Grafik Cakupan Peserta KB Aktif Kota Dumai tahun 2010-2011

2. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Keluarga Pra Sejahtera adalah keluarga yang belum dapat memenuhi salah satu atau lebih dari lima kebutuhan dasarnya (basic needs) sebagai keluarga Sejahtera I, seperti kebutuhan akan pelajaran agama, pangan, papan, sandang dan kesehatan. Adapun untuk keluarga sejahtera I memiliki kriteria sebagai berikut:

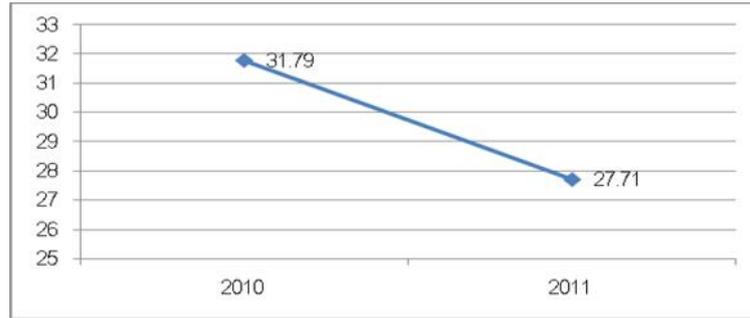
- a. Pada umumnya anggota keluarga makan dua kali sehari atau lebih
- b. Anggota keluarga memiliki pakaian yang berbeda untuk dirumah, bekerja/sekolah dan bepergian
- c. Rumah yang ditempati keluarga mempunyai atap, lantai dan dinding yang baik
- d. Bila ada anggota keluarga yang sakit dibawa ke sarana kesehatan
- e. Bila pasangan usia subur ingin ber KB pergi ke sarana pelayanan kontrasepsi
- f. Semua anak umur 7 - 15 tahun dalam keluarga bersekolah

Jumlah keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 yang ada di Kota Dumai dari tahun 2010 dan 2011 mengalami sedikit penurunan, dari 16.151 keluarga pada tahun 2010 menjadi 15.256 pada tahun 2011. Dengan kombinasi meningkatnya jumlah keluarga, dari 50.865 keluarga pada tahun 2010 menjadi 55.051 keluarga pada tahun 2011, maka rasio keluarga pra sejahtera dan sejahtera 1 juga ikut mengalami penurunan. Pada tahun 2010 rasionya adalah sebesar 31,75%, maka pada tahun 2011 turun menjadi 27,71%.

Tabel 2.3.1.51
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai tahun 2010-2011

Indikator	Tahun	
	2010	2011
Jumlah Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	16.151	15.256
Jumlah Keluarga	50.805	55.051
Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I	31,79	27,71

Sumber : Kantor Badan Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.40
 Grafik Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I Kota Dumai tahun 2010-2011

K. Ketenagakerjaan

1. Angka Partisipasi Angkatan Kerja

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi pembangunan. Keterlibatan penduduk dalam kegiatan ekonomi diukur dengan porsi penduduk yang masuk ke dalam pasar kerja (bekerja atau mencari pekerjaan) disebut sebagai Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK). TPAK merupakan rasio antara angkatan kerja dan tenaga kerja. Komposisi dan jumlah tenaga kerja akan mengalami perubahan seiring dengan perubahan penduduk. TPAK Kota Dumai tahun 2012 adalah 65 persen. Angka tersebut memiliki arti bahwa terdapat 65 orang angkatan kerja setiap 100 orang tenaga kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1.52
 Angka Partisipasi Angkatan Kerja Di Kota Dumai
 Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007*	2008*	2009*	2010**	2011**	2012**
Angka Partisipasi Angkatan Kerja	61,32	65,45	63,13	64%	64%	65%

Sumber: *Profil Potensi Daerah Kota Dumai Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
 **Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

2. Pencari Kerja yang Ditempatkan

Pencari kerja yang ditempatkan adalah perbandingan jumlah pencari kerja yang ditempatkan terhadap jumlah pencari kerja yang mendaftar. Persentase pencari kerja yang ditempatkan tertinggi pada tahun 2007 dengan persentase sebesar 21,48% tetapi semakin menurun dari tahun ke tahun hingga mencapai 7% pada tahun 2012. Hal ini dimungkinkan karena beberapa tahun terakhir tidak terdapat rekrutmen PNS sehingga jumlah pencari kerja yang mendaftar relatif lebih sedikit.

Tabel 2.3.1.53
 Pencari Kerja yang Ditempatkan Di Kota Dumai
 Tahun 2007- 2012

Indikator	Tahun					
	2007*	2008*	2009*	2010**	2011**	2012**
Pencari kerja yang ditempatkan	21,48%	9,28%	1,61%	5%	6%	7%

Sumber * Badan Pusat Statistik Kota Dumai, Diolah
 ** Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

3. Tingkat Pengangguran Terbuka

Pengangguran mencerminkan terbatasnya kesempatan kerja yang tersedia dibandingkan dengan potensi tenaga kerja yang tersedia. Pengangguran adalah orang yang masuk dalam angkatan kerja (15 sampai 64 tahun) yang sedang mencari pekerjaan dan belum mendapatkannya. Tingkat pengangguran terbuka (TPT) yang dihitung dari jumlah orang yang tidak bekerja dibandingkan dengan angkatan kerja.

Selama tahun 2007-2012, tingkat pengangguran terbuka di Kota Dumai menunjukkan perkembangan yang fluktuatif. Tingkat pengangguran tertinggi terjadi pada tahun 2007 sebesar 18,54%, dan semakin menurun hingga tahun 2009 tetapi pada tahun 2010-2012 persentase tingkat pengangguran kembali naik hingga 15 %. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1.54
Tingkat Pengangguran Terbuka Di Kota Dumai
Tahun 2007- 2012

Indikator	Tahun					
	2007*	2008*	2009*	2010**	2011**	2012**
Tingkat Pengangguran Terbuka	18,54%	14,9%	13,45%	15%	15%	15%

Sumber *Profil Potensi Daerah Kota Dumai Oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal
**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

4. Keselamatan dan Perlindungan

Salah satu upaya untuk meningkatkan produktivitas kerja adalah dengan memberikan perlindungan pada pekerja selama dia bekerja. Maksud dari pemberian perlindungan ini adalah agar pekerja merasa aman dan nyaman dalam bekerja dan merupakan hak yang wajib dipenuhi oleh perusahaan. Keselamatan dan kesehatan kerja (K3) merupakan instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, lingkungan, dan masyarakat sekitar dari bahaya akibat kecelakaan kerja. Kota Dumai memiliki persentase yang rendah mengenai keselamatan dan perlindungan yaitu sebesar 9-15 %. Dari data tahun 2010-2012, persentase keselamatan dan perlindungan Kota Dumai mengalami kenaikan dengan persentase 2-4%. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.3.1.55
Keselamatan dan Perlindungan Di Kota Dumai
Tahun 2007- 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Keselamatan dan Perlindungan				9%	11%	15%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

5. Perselisihan Buruh dan Pengusaha Terhadap Kebijakan Pemerintah Daerah

Perselisihan buruh dan pengusaha yang biasa terjadi adalah masalah upah minimum. Penentuan besaran upah yang dapat memuaskan kedua pihak sangat sulit dilakukan sehingga dibutuhkan kearifan dari keduanya. Di Kota Dumai hampir setiap perselisihan dapat diselesaikan dan tidak menimbulkan dampak

berkepanjangan sehingga semua masalah 100% dapat diselesaikan. Data selengkapnya mengenai angka perselisihan buruh dan pengusaha dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1.56
Perselisihan Buruh dan Pengusaha Di Kota Dumai
Tahun 2007- 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Penyelesaian perselisihan buruh dan pengusaha	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Dumai

L. Koperasi Usaha Kecil dan Menengah

1. Koperasi Aktif

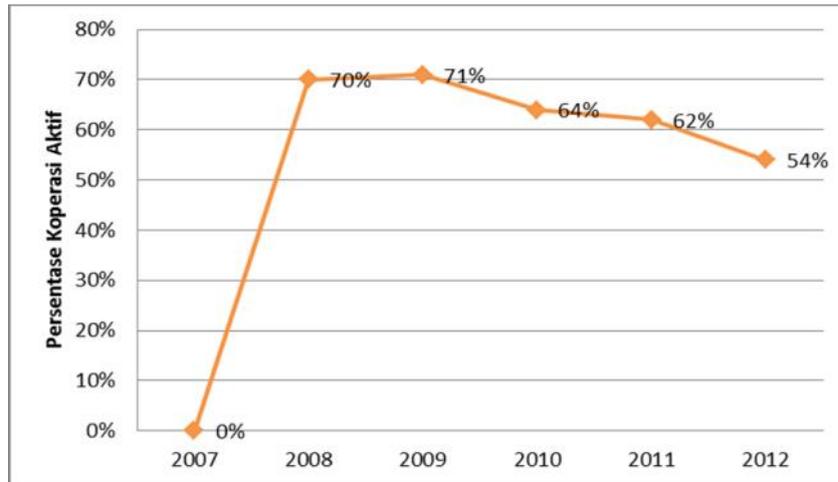
Pertumbuhan usaha kecil menengah dan koperasi memiliki potensi yang sangat besar dalam meningkatkan kehidupan masyarakat. Fungsi dari koperasi adalah sebagai sarana pendukung perekonomian dan usaha mikro, kecil dan menengah. Usaha kecil mikro menengah atau informal sebagai bentuk perekonomian rakyat yang mampu bertahan ketika usaha formal tidak mampu memenuhi lapangan pekerjaan. Pertumbuhan koperasi aktif di Kota Dumai dari tahun 2007 -2012 tiap tahunnya mengalami penurunan.

Tabel 2.3.1.57
Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Koperasi Aktif	-	70	71	64	62	54

Sumber : SKPD Pelaksana Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat, 2013

Dari target persentase koperasi aktif Kota Dumai sebesar 75 % setiap tahunnya, Kota Dumai hanya memiliki koperasi aktif dengan persentase tertinggi sebesar 70% pada tahun 2008 tetapi mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Persentase koperasi aktif Kota Dumai dari tahun 2007-2012 mengalami penurunan yang besar hingga 16%.



Gambar 2.3.1.41
 Persentase Koperasi Aktif Tahun 2007-2012

2. Usaha Mikro dan Kecil

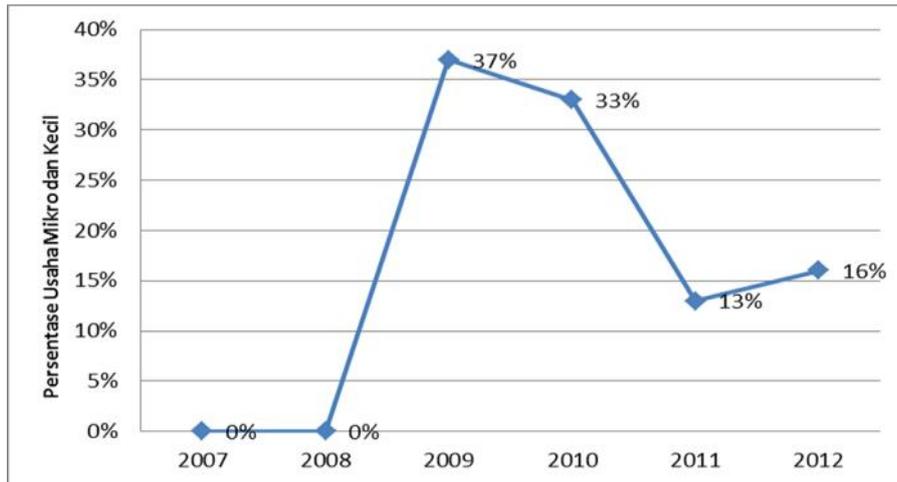
Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) berperan memberikan kontribusi perekonomian masyarakat menengah ke bawah. UMKM merupakan kelompok usaha yang memiliki jumlah paling besar, selain itu kelompok UMKM tahan terhadap tekanan krisis ekonomi. Kota Dumai memiliki Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang kecil dari tahun ke tahun. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) banyak bergerak di bidang industri kecil, perdagangan kecil dan kerajinan.

Tabel 2.3.1.58
 Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Usaha Mikro dan Kecil	-	-	37	33	13	16

Sumber : SKPD Pelaksana Dinas Koperasi, UKM, dan Pemberdayaan Masyarakat, 2013

Dari target persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai sebesar 20 % setiap tahunnya, Kota Dumai berhasil memenuhi target Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) pada tahun 2008 dan 2009 sedangkan pada tahun 2011 dan 2012 mengalami penurunan drastis hingga 20%. Persentase Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Kota Dumai dari tahun 2007-2012 mengalami penurunan dari tahun ke tahun.



Gambar 2.3.1.42
Persentase Usaha Mikro dan Kecil Tahun 2007-2012

M. Penanaman Modal

1. Jumlah Investor Berskala Nasional PMDN dan PMA

Investasi mempunyai peranan penting dalam proses pembangunan karena menentukan dinamika pembangunan yang dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat. Jika proses investasi berlangsung baik, maka perekonomian akan tumbuh dengan baik selama proses investasi tersebut menghasilkan output yang efisien. Pada dasarnya kegiatan investasi dapat dilakukan oleh masyarakat, pemerintah dan swasta. Penanaman modal di Kota Dumai dikembangkan untuk memberikan kemudahan bagi para investor didalam menanamkan usahanya di Kota Dumai. Penanaman modal dalam negeri (PMDN) adalah penggunaan modal dalam negeri bagi usaha-usaha yang mendorong pembangunan ekonomi pada umumnya. Penanaman modal asing (PMA) merupakan penanaman modal asing secara langsung yang dilakukan menurut atau berdasarkan ketentuan perundang - undang di Indonesia, dalam arti bahwa pemilik modal secara langsung menanggung resiko dari penanaman modal tersebut. Kota Dumai memiliki perusahaan/investor dengan jumlah yang cukup sedikit. Dari tahun 2007-2012, jumlah investor PMDN dan PMA menunjukkan perkembangan yang fluktuatif dengan jumlah investor tertinggi pada tahun 2008 dan terendah pada tahun 2009. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1.59
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Perusahaan PMDN dan PMA di Kota Dumai	9	16	3	11	5	9

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai

2. Jumlah Nilai Investasi Berskala Nasional PMDN/PMA

Jumlah nilai investasi PMA/PMDN berskala nasional di Kota Dumai mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun ke tahun. Nilai investasi terendah terjadi pada tahun 2010 yaitu sebesar Rp.

59.760.440.244,00 dan investasi tertinggi terjadi pada tahun 2012 yaitu sebesar Rp. 5.988.869.600.000,00. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1.60
 Nilai Investasi PMDN dan PMA di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Nilai Investasi PMDN dan PMA		3.304.186.627.962	1.275.958.129.093	59.760.440.244	930.765.243.136	5.988.869.600.000

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai

3. Rasio Daya Serap Tenaga Kerja

Rasio daya serap tenaga kerja adalah perbandingan antara jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan PMA/PMDN dengan jumlah seluruh PMA/PMDN. Rasio daya serap tenaga kerja di Kota Dumai mengalami perkembangan fluktuatif dengan perkembangan naik-turun. Jumlah perusahaan tidak menentukan jumlah tenaga kerja yang tinggi juga di Kota Dumai, karena ada beberapa perusahaan besar yang menyerap tenaga kerja yang besar tetapi ada perusahaan yang hanya menyerap tenaga kerja yang sedikit. Perusahaan PMDN dan PMA ini juga melibatkan tenaga kerja asing, selain banyak tenaga kerja Indonesia. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1.61
 Rasio Daya Serap Tenaga Kerja Perusahaan PMDN dan PMA Kota Dumai

Uraian	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah tenaga kerja bekerja pada perusahaan	667	1.224	278	144	312	355
Jumlah seluruh PMA/PMDN	9	16	3	11	5	9
Rasio daya serap tenaga kerja	74,1	76,5	92,7	13,1	62,4	39,4

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai

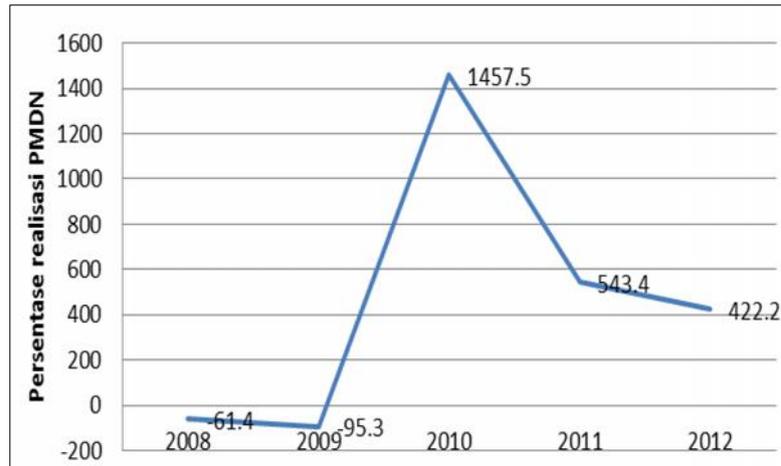
4. Kenaikan/Penurunan Nilai Realisasi PMDN

Realisasi nilai investasi PMA dan PMDN mengalami perubahan setiap tahunnya. Pertumbuhan realisasi investasi PMDN dan PMA tertinggi terjadi pada tahun 2010 meningkat hingga mencapai 1457,5 %. Pada tahun 2007-2008, Kota Dumai mengalami penurunan nilai investasi PMA dan PMDN hingga -95,3%, tetapi pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan yang sangat signifikan. Peningkatan nilai investasi yang tinggi menyiratkan bahwa kondisi wilayah Kota Dumai memberikan lingkungan yang kondusif bagi kegiatan investasi.

Tabel 2.3.1.62
 Persentase Nilai Realisasi PMDN Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Nilai Realisasi PMDN	-	-61.4	-95.3	1457.5	543.4	422.2

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Dumai



Gambar 2.3.1.43
Persentase Nilai Realisasi PMDN Kota Dumai Tahun 2008-2012

N. Kebudayaan

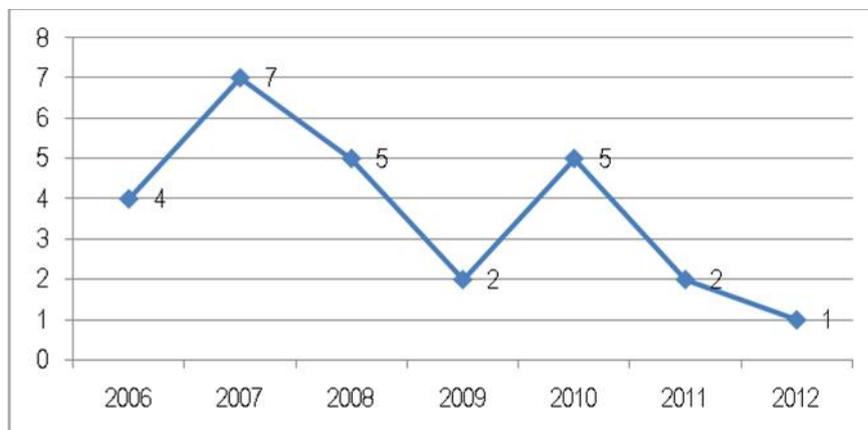
1. Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya

Jumlah penyelenggaraan festival seni dan budaya yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2006 hingga tahun 2012 menunjukkan angka yang menurun atau semakin sedikit. Pada tahun 2006 jumlah festival seni dan budaya berjumlah 4 kegiatan, sempat naik pada tahun 2007 menjadi 7 kegiatan, namun terus turun hingga pada tahun 2012 hanya tinggal 1 kegiatan saja.

Tabel 2.3.1.63
Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai
Tahun 2006-2012

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Penyelenggaraan festival seni dan budaya	4	7	5	2	5	2	1

Sumber : Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Dumai 2013



Gambar 2.3.1.44
Grafik Penyelenggaraan Festival Seni Dan Budaya Kota Dumai
Tahun 2006-2012

O. Kepemudaan dan Olahraga

1. Jumlah Organisasi Pemuda

Pemberdayaan pemuda bertujuan membangkitkan potensi dan peran aktif dibutuhkan pengakuan positif dari masyarakat akan meningkatkan kedewasaan, harga diri, menghindarkan mereka dari masa krisis identitas dan perasaan tak berguna serta memacu perkembangan pola pikir yang positif (pengembangan jiwa kepemimpinan, penguasaan keterampilan, dan kerjasama dalam aksi-aksi sosial merupakan kematangan mental). Pemuda didorong untuk melakukan hal yang bermakna dalam pelayanan masyarakat, pencegahan dan penyalahgunaan obat dan terlarang dan perilaku beresiko di samping peningkatan hubungan sosial yang positif dan partisipasif dan keterlibatan dalam komunitas di bidang sosio- ekonomi dan politik.

Tabel 2.3.1.64
Jumlah Organisasi Pemuda Kota Dumai
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah organisasi pemuda	10	10	10	10	10	7	10

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, 2013

2. Jumlah Organisasi Olahraga

Jumlah organisasi olahraga di Kota Dumai pada tahun 2012 berjumlah 21 organisasi, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

3. Jumlah Kegiatan Kepemudaan

Jumlah kegiatan kepemudaan pada tahun 2011 dan tahun 2012 berjumlah 1 kegiatan kepemudaan, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

4. Jumlah Kegiatan Olahraga

Jumlah kegiatan olahraga pada tahun 2006 sampai dengan 2012 berjumlah 10 kegiatan. Kegiatan olahraga ini meliputi jenis kegiatan olahraga yang biasa dilakukan seperti sepakbola, voli, basket, tenis lapangan, dan sebagainya.

Tabel 2.3.1.65
Jumlah Kegiatan Olahraga Kota Dumai
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun						
	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah kegiatan olahraga	10	10	10	10	10	10	10

Sumber : Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai, 2013

5. Lapangan Olahraga

Jumlah lapangan olahraga pada tahun 2011 dan 2012 berjumlah 37 lapangan olahraga, data ini didapatkan dari Dinas Kebudayaan, Pariwisata Pemuda dan Olahraga Kota Dumai.

P. Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri

1. Kegiatan Pembinaan Terhadap LSM, Ormas dan OKP

Jumlah kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP dari rentang waktu tahun 2010 hingga tahun 2012 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif. Namun apabila dibandingkan dari tahun 2010 dan 2012 mengalami penurunan, dari 58 kegiatan pada tahun 2010 menjadi 55 kegiatan pada tahun 2012.

Tabel 2.3.1.66
Kegiatan Pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP Kota Dumai
Tahun 2010-2012

Indikator	2010	2011	2012
Kegiatan pembinaan terhadap LSM, Ormas dan OKP	58	114	55

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Kota Dumai, 2013

2. Kegiatan Pembinaan Politik Daerah

Kegiatan pembinaan politik daerah di Kota Dumai dari rentang tahun 2010 hingga 2012 berjumlah 1 (satu) kegiatan.

Tabel 2.3.1.67
Kegiatan Pembinaan Politik Daerah Kota Dumai
Tahun 2010-2012

Indikator	2010	2011	2012
Kegiatan pembinaan politik daerah	1	1	1

Sumber : Kantor Kesatuan Bangsa Kota Dumai 2013

Q. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Rasio jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk

Rasio jumlah polisi pamong praja merupakan perbandingan antara jumlah polisi pamong praja dengan jumlah penduduk. Jumlah penduduk pada variabel rasio jumlah polisi pamong praja menggunakan data dari Badan Pusat Statistik. Rasio jumlah polisi pamong praja dihitung untuk mencari berapa jumlah petugas per 10.000 penduduk, dengan demikian kita akan mengetahui berapa besar pekerjaan yang dilakukan oleh polisi pamong praja, bila melihat jumlah sumber daya manusia yang terbatas dan jumlah penduduk yang cukup besar.

Tabel 2.3.1.68
Rasio Jumlah Polisi Pamong Praja per 10.000 Penduduk Kota Dumai
Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Polisi Pamong Praja	117	114	156	139	102	98
Jumlah penduduk per 10.000*	23,11	23,68	25,04	25,32	26,30	
Rasio jumlah pamong praja	5,06	4,81	6,23	5,49	3,88	

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013
Jumlah Penduduk Versi BPS, Hasil Olahan

Rasio jumlah polisi pamong praja di Kota Dumai cukup memenuhi jumlah penduduk di Kota Dumai. Dari tahun ke tahun rasio jumlah pamong praja mengalami kondisi naik dan turun, hal tersebut karena jumlah pamong praja yang semakin menurun sedangkan jumlah penduduk yang semakin naik terus menerus sehingga terjadi ketidakseimbangan rasio jumlah pamong praja di Kota Dumai.

2. Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk

Persentase jumlah linmas per 10.000 penduduk merupakan perbandingan antara jumlah Linmas dengan jumlah penduduk per 10.000. Jumlah penduduk yang digunakan sebagai pembanding pada indikator ini adalah jumlah penduduk berdasarkan data dari BPS Kota Dumai.

Tabel 2.3.1.69
Persentase Linmas per Jumlah 10.000 Penduduk
Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Linmas			1630	1630		
Jumlah penduduk per 10.000*	23,11	23,68	25,04	25,32	26,30	
Persentase linmas			39,59	40,03		

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013
Jumlah Penduduk Versi BPS, Hasil Olahan

Dari data di Kota Dumai, tidak tersedia data yang lengkap mengenai jumlah linmas di Kota Dumai hanya terdapat pada tahun 2010 yaitu sebesar 1.630 linmas sehingga memiliki persentase linmas Kota Dumai pada tahun 2009 sebesar 39,59 % dan meningkat pada tahun 2010 menjadi 40,03 %.

3. Persentase Peningkatan Pos Siskamling per Jumlah Desa/Kelurahan

Persentase peningkatan pos siskamling merupakan perbandingan antara jumlah siskamling dengan jumlah desa/kelurahan. Persentase pos siskamling dihitung untuk mendapatkan jumlah siskamling yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan. Pos siskamling yang ada di tiap-tiap desa/kelurahan merupakan salah satu cara yang dilakukan oleh masyarakat dalam upaya untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan. Berikut adalah tabel yang berisikan informasi mengenai persentase peningkatan pos siskamling per jumlah desa/kelurahan.

Tabel 2.3.1.70
 Persentase Peningkatan Pos Siskamling Per Jumlah Desa/Kelurahan
 Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Siskamling					162	258
Jumlah desa/kelurahan					33	33
Persentase peningkatan pos siskamling					4,91	7,82

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013

Dari data di Kota Dumai, tidak tersedia data yang lengkap mengenai jumlah siskamling di Kota Dumai hanya terdapat data pada tahun 2011-2012. Persentase peningkatan pos siskamling di Kota Dumai terus mengalami peningkatan hingga 7,82 % pada tahun 2012.

4. Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP

Dari data di Kota Dumai, tidak tersedia data yang lengkap mengenai cakupan patroli petugas Satpol PP di Kota Dumai hanya terdapat data pada tahun 2010-2012. Cakupan patrol petugas Satpol PP Kota Dumai dari tahun ke tahun selalu sama yaitu 2 kali patrol setiap waktunya.

Tabel 2.3.1.71
 Persentase Cakupan Patroli Petugas Satpol PP Kota Dumai

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Cakupan patroli petugas Satpol PP				2 Kali	2 Kali	2 Kali

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013

5. Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan) di Kota

Data tingkat penyelesaian pelanggaran K3 di Kota Dumai baru dimulai pada tahun 2010, dengan nilai tingkat penyelesaian adalah 91,5 % tetapi tingkat penyelesaian pelanggaran K3 semakin meningkat hingga 100% pada tahun 2011-2012. Aturan mengenai K3 di Kota Dumai tidak tersedia dengan lengkap sehingga tidak ada data-data pada tahun sebelumnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.1.72
 Tingkat Penyelesaian Pelanggaran K3 (Ketertiban, Ketentraman, Keindahan)
 Kota Dumai

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tingkat penyelesaian pelanggaran K3 (ketertiban, ketentraman, keindahan)				91,5%	100%	100%

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013

6. Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)

Dari data di Kota Dumai, tidak tersedia data yang lengkap mengenai petugas perlindungan masyarakat di Kota Dumai hanya terdapat data pada tahun 2010-2011. Tidak ada perubahan jumlah petugas

perlindungan masyarakat di Kota Dumai yaitu sejumlah 1630 petugas. Petugas Linmas yang secara langsung berinteraksi dengan masyarakat memang seharusnya memiliki anggota yang lebih banyak. Karena interaksi dengan masyarakat, maka anggota Linmas bertugas untuk membantu tugas polisi untuk menjaga ketertiban dan keamanan lingkungan.

Tabel 2.3.1.73
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas) Kota Dumai

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Petugas Perlindungan Masyarakat (Linmas)			1630	1630		

Sumber : Kantor Satuan Polisi Pamong Praja Kota Dumai, 2013

R. Ketahanan Pangan

1. Ketersediaan Pangan Utama

Ketersediaan pangan utama dihitung berdasarkan rata-rata jumlah ketersediaan pangan utama per tahun (Kg) dibagi dengan jumlah penduduk. Ketersediaan pangan utama ini perlu menjadi perhatian karena pangan merupakan kebutuhan pokok yang harus dipenuhi setiap orang. Kota Dumai memiliki ketersediaan pangan utama yang memadai pada tahun 2007, 2010-2012 sedangkan tahun 2008-2009 tidak tersedia data mengenai ketersediaan pangan utama .

Tabel 2.3.1.74
Ketersediaan pangan utama Kota Dumai
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Ketersediaan Pangan Utama	26,68			23,04	36,78	22,79

Sumber :Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai

S. Statistik

Indikator pada aspek statistik Kota Dumai yang terdiri dari tersedianya buku “Kota Dalam Angka” dan buku “PDRB Kota” telah terpenuhi, yakni dalam rentang waktu 2007 hingga 2011 tersedia keduanya. Buku “Kota dalam Angka” dan “PDRB Kota” tahun 2012 sedang dalam proses penyusunan dan disiapkan untuk publikasi.

Tabel 2.3.1.75
Publikasi Buku Statistik Kota Dumai
Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
1. Buku “Kota Dalam Angka”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum dipublikasikan
2. Buku “PDRB Kota”	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Belum dipublikasikan

Sumber: BPS Kota Dumai 2013

T. Kearsipan

Kegiatan pengelolaan arsip secara baku yang dilakukan oleh SKPD yang ada di Kota Dumai, berdasarkan data dari kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik pada tahun 2012 adalah 56% dari seluruh SKPD yang ada di Kota Dumai. Sedangkan kegiatan peningkatan SDM pengelola kearsipan yang ada di Kota Dumai berjumlah 1 kegiatan pada tahun 2011 dan 2012.

U. Komunikasi dan Informatika

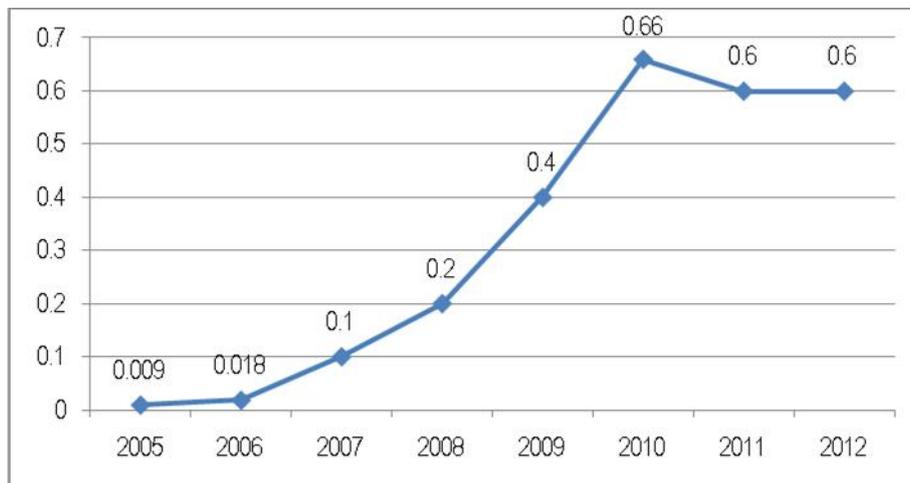
1. Persentase Wartel/Warnet Terhadap Penduduk

Persentase wartel atau warnet terhadap jumlah penduduk yang ada di Kota Dumai antara rentang waktu 2005 hingga tahun 2012 menunjukkan kenaikan. Semula pada tahun 2005 rasio wartel/warnet terhadap jumlah penduduk adalah 0,009, naik menjadi 0,6 pada tahun 2012. Dengan demikian terjadi penambahan jumlah fasilitas telekomunikasi secara masif.

Tabel 2.3.1.76
Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk
Di Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun							
	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Wartel/Warnet terhadap penduduk	0,009	0,018	0,1	0,2	0,4	0,66	0,6	0,6

Sumber : Kantor Perpustakaan, Arsip dan Data Elektronik Kota Dumai 2013



Gambar 2.3.1.45
Grafik Jumlah Wartel/ Warnet dan Jumlah Penduduk Di Kota Dumai
Tahun 2007-2012

2. Website Milik Pemerintah Daerah

Website milik Pemerintah Kota Dumai ada sejak tahun 2002, dan berisikan informasi tentang fasilitas kota, pemerintahan, pelayanan, dan informasi-informasi aktual yang selalu di-update hampir setiap hari. Dapat dikatakan situs resmi milik Pemerintah Kota Dumai ini selalu menyajikan informasi terbaru dan

masyarakat dapat dengan mudah mengakses segala informasi dan berita yang terjadi di Kota Dumai ini hanya dengan memantau website ini.

Tabel 2.3.1.77
Website Milik Pemerintah Daerah di Kota Dumai
Tahun 2007 - 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Web site milik pemerintah daerah	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada	Ada

Sumber : Bagian Teknologi Informasi dan Telematika (TIT), Setda Kota Dumai

V. Perpustakaan

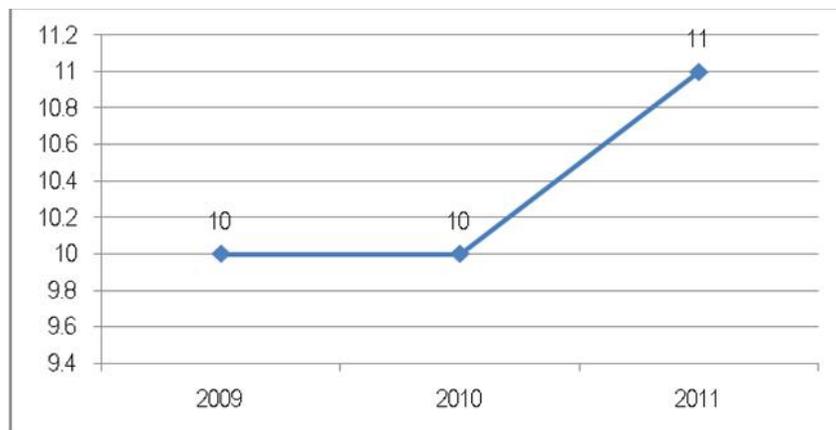
1. Jumlah Perpustakaan (TBM)

Jumlah perpustakaan yang ada di Kota Dumai dalam rentang waktu 2009 hingga tahun 2012 relatif mengalami pertambahan. Pada tahun 2009 jumlah perpustakaan adalah 10 unit, dan pada tahun 2012 jumlah perpustakaan naik menjadi 13.

Tabel 2.3.1.78
Jumlah Perpustakaan Kota Dumai
Tahun 2009 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah perpustakaan (TBM)			10	10	11	13

Sumber : Kantor PADE Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.46
Grafik Jumlah Perpustakaan Kota Dumai
Tahun 2009 – 2012

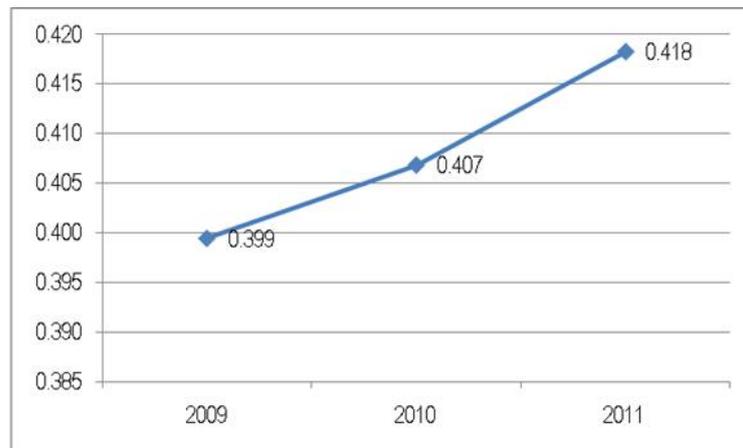
2. Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk di Kota Dumai dari tahun 2009 hingga tahun 2011 menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2009 rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk adalah sebesar 0,399%, dan pada tahun 2011 sedikit mengalami kenaikan menjadi 0,418%.

Tabel 2.3.1.79
Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2009 – 2012

Indikator	Tahun			
	2009	2010	2011	2012
Jumlah Perpustakaan	10	10	11	13
Jumlah Penduduk per 10.000*	25,04	24,58	26,30	
Rasio jumlah perpustakaan terhadap jumlah penduduk	0,399	0,407	0,418	

Sumber : Kantor PADE Kota Dumai, 2013
Jumlah Penduduk Versi BPS, Hasil Olahan



Gambar 2.3.1.47
Grafik Rasio Jumlah Perpustakaan Terhadap Jumlah Penduduk
Tahun 2009 – 2012

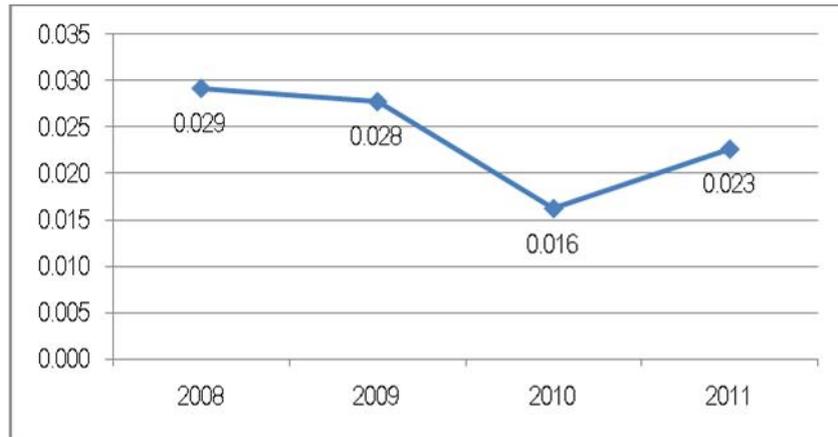
3. Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun

Perbandingan jumlah perpustakaan pertahun dengan jumlah penduduk per 10.000 di Kota Dumai dari rentang waktu 2008 hingga 2012 menunjukkan tren perkembangan yang fluktuatif namun memiliki kecenderungan yang menurun. Pada tahun 2008 rasio jumlah pengunjung perpustakaan pertahun sebesar 0,029, dan pada tahun 2012 turun menjadi 0,023.

Tabel 2.3.1.80
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Tahun 2008 – 2011

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah Kunjungan ke Perpustakaan		6.921	6.961	4.121	5.964	3.591
Jumlah Penduduk*	231.121	236.778	250.367	253.178	262.976	
Jumlah Pengunjung Perpustakaan per tahun		0,029	0,028	0,016	0,023	

Sumber : Kantor PADE Kota Dumai, 2013
Jumlah Penduduk Versi BPS, Hasil Olahan



Gambar 2.3.1.48
Grafik Jumlah Pengunjung Perpustakaan per Tahun
Tahun 2008 – 2011

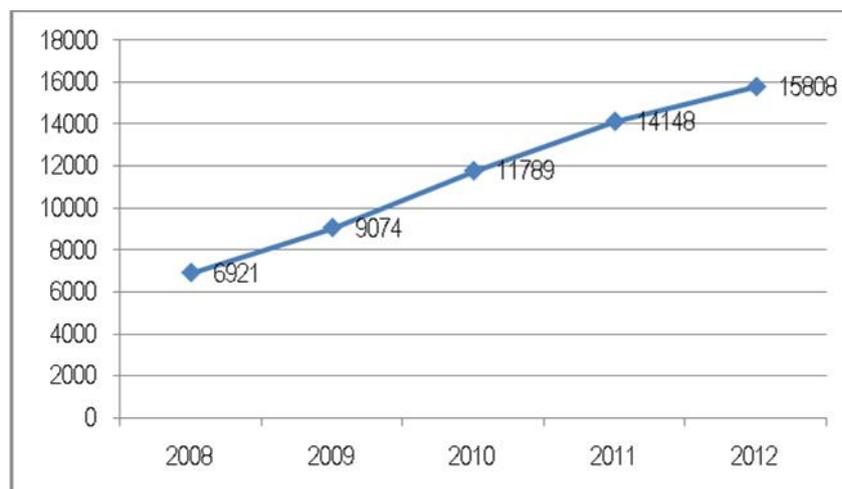
4. Koleksi Buku yang Tersedia di Perpustakaan Daerah

Jumlah koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah di Kota Dumai dari rentang waktu tahun 2008 hingga tahun 2012 memiliki tren perkembangan yang semakin meningkat. Pada tahun 2008 jumlah koleksi buku adalah sebanyak 6.921 eksemplar, dan pada tahun 2012 meningkat menjadi 15.808 eksemplar.

Tabel 2.3.1.81
Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Tahun 2008 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Koleksi buku yang tersedia di perpustakaan daerah	NA	6.921	9.074	11.789	14.148	15.808

Sumber : Kantor PADE Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.1.49
Grafik Koleksi Buku Yang Tersedia Di Perpustakaan Daerah
Tahun 2008 – 2012

2.3.2. FOKUS LAYANAN URUSAN PILIHAN

A. Pertanian

1. Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya Per Hektar

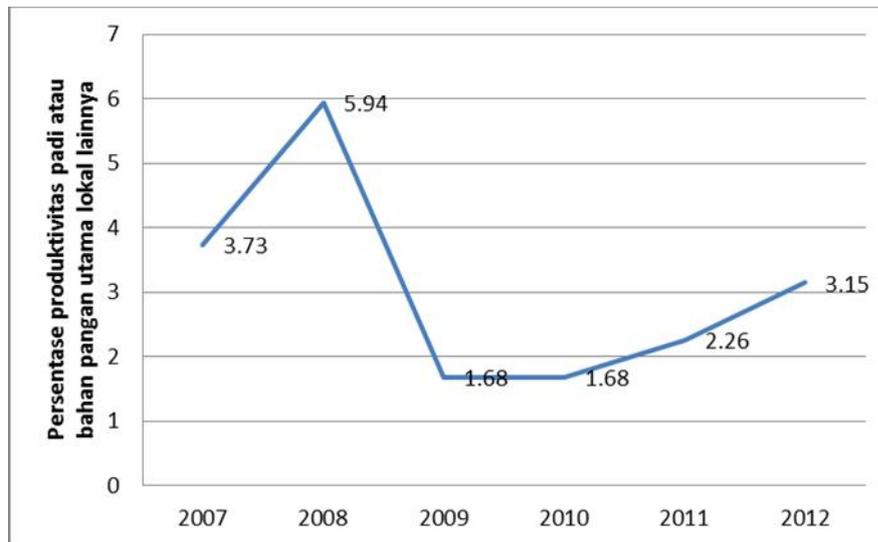
Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai di pengaruhi oleh besarnya luas panen dan produktivitas. Luas panen yang berhasil dilakukan tergantung tersedianya lahan sawah maupun lahan bukan sawah serta indeks pertanaman, sedangkan produktivitas padi dan palawija tergantung cara tanam atau paket teknologi yang dilakukan oleh petani di Kota Dumai. Peningkatan produktivitas padi dan palawija cenderung mengalami naik-turun pada tahun 2007-2012. Data selengkapnya mengenai persentase produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.3.2.1
 Persentase Produktivitas Padi Atau Bahan Pangan Utama Lokal Lainnya di Kota Dumai
 Tahun 2007 – 2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya	3,73	5,94	1,68	1,68	2,26	3,15

Sumber: Dinas Pertanian, Perkebunan, dan Kehutanan Kota Dumai

Produksi padi dan bahan pangan utama lokal lainnya di Kota Dumai mengalami perkembangan yang naik-turun dari waktu ke waktu. Produktivitas tertinggi terdapat pada tahun 2008 yaitu sebesar 5,94% tetapi tahun 2009 mengalami penurunan drastis hingga mencapai 1,68%. Penurunan tersebut tidak terus menerus terjadi karena pada tahun 2010-2012 mengalami kenaikan hingga 3,15 %.



Gambar 2.3.2.1
 Persentase produktivitas padi atau bahan pangan utama lokal lainnya Tahun 2007-2012

2. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Sektor pertanian memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Kontribusi sektor pertanian di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Hal tersebut dapat dilihat pada tahun 2007 kontribusi sektor pertanian di Kota Dumai sebesar 8,01 dan terus menurun hingga 7,02 pada tahun 2010. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.2
Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Pertumbuhan Sektor Pertanian terhadap PDRB	8,01	7,67	7,36	7,02		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

3. Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) dalam PDRB Sektor Pertanian

Sub Sektor pertanian (tanaman bahan makanan) dalam PDRB Kota Dumai memberikan kontribusi yang terhadap sektor pertanian Kota Dumai. Dalam perhitungan kontribusi sub sektor tanaman bahan makanan terhadap PDR sektor pertanian, persentase pertumbuhan sub sektor pertanian (palawija) semakin menurun dari tahun ke tahun hingga 17,76 % pada tahun 2010. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.3
Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) dalam PDRB Sektor Pertanian

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kontribusi Sub Sektor Pertanian (Tanaman Bahan Makanan) dalam PDRB Sektor Pertanian	19.53	18.93	18.36	17.76		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

4. Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) dalam PDRB Sektor Pertanian

Sub Sektor perkebunan (tanaman keras) dalam PDRB Kota Dumai memberikan kontribusi yang terhadap sektor pertanian Kota Dumai. Komoditi perkebunan cukup potensial di Kota Dumai. Persentase pertumbuhan sub sektor perkebunan semakin berkembang dan naik dari tahun ke tahun hingga 8,83 % pada tahun 2010 namun tetap memiliki persentase yang tinggi dibandingkan dengan sub sektor pertanian.

Tabel 2.3.2.4
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) dalam PDRB Sektor Pertanian

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kontribusi Sub Sektor Perkebunan (Tanaman Perkebunan) dalam PDRB Sektor Pertanian	7,65	8	8,38	8,83		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

B. Kehutanan

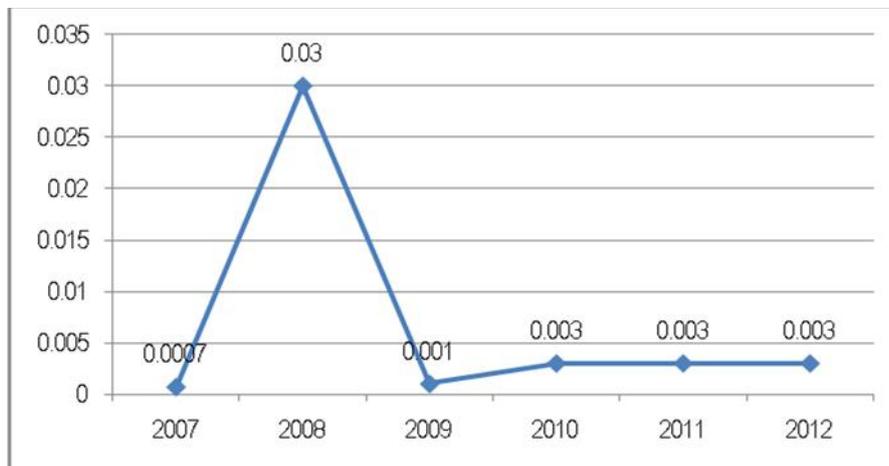
1. Rehabilitasi Hutan dan Lahan Kritis

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, perkembangan rehabilitasi lahan kritis di Kota Dumai sejak tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Namun dari tahun 2007 hingga tahun 2012, persentase rehabilitasi hutan dan lahan kritis cenderung meningkat, dari 0,0007% pada tahun 2007 menjadi 0,003% pada tahun 2012.

Tabel 2.3.2.5
 Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Rehabilitasi hutan dan lahan kritis	0,0007	0,03	0,001	0,003	0,003	0,003

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.2.2
 Grafik Persentase Rehabilitasi hutan dan lahan kritis
 Kota Dumai Tahun 2007-2012

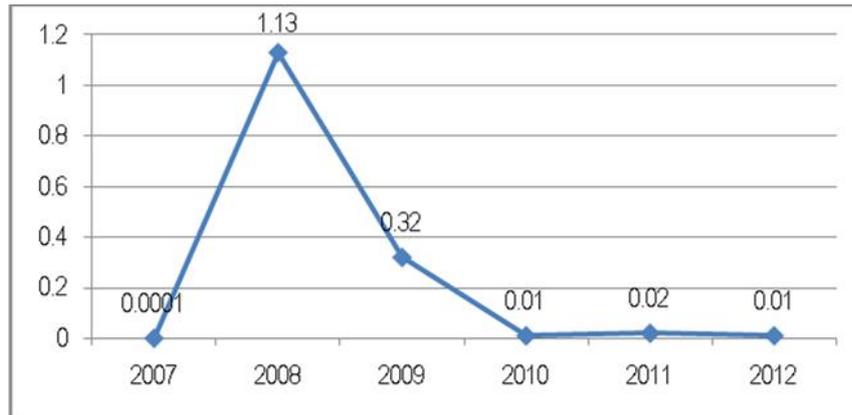
2. Kerusakan Kawasan Hutan

Berdasarkan data dari Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, persentase perkembangan kerusakan kawasan hutan di Kota Dumai dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami perkembangan yang fluktuatif. Namun dari tahun 2007 hingga tahun 2012 mengalami peningkatan kerusakan hutan. Pada tahun 2007 persentase kerusakan kawasan hutan adalah sebesar 0,0001%, maka pada tahun 2012 naik menjadi 0,01%.

Tabel 2.3.2.6
 Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
 Kota Dumai Tahun 2007-2012

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kerusakan Kawasan Hutan	0,0001	1,13	0,32	0,01	0,02	0,01

Sumber : Dinas Pertanian, Perkebunan dan Kehutanan Kota Dumai, 2013



Gambar 2.3.2.3
Grafik Persentase Kerusakan Kawasan Hutan
Kota Dumai Tahun 2007-2012

C. Energi dan Sumber Daya Mineral

1. Pertumbuhan Sektor Pengalihan Dalam PDRB

Kontribusi sektor pertambangan dan pengalihan di Kota Dumai hanya terdapat pada sub sektor pengalihan. Sektor pengalihan relatif mengalami peningkatan dari tahun 2007-2010 dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 0,01 %/tahun. Sektor pengalihan di Kota Dumai adalah hasil kegiatan pengalihan pasir di sungai yang berada di Kota Dumai. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.7
Pertumbuhan Sektor Pengalihan dalam PDRB

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Pertumbuhan Pengalihan terhadap PDRB	0,57	0,57	0,58	0,58		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

D. Pariwisata

1. Kunjungan wisata

Pariwisata merupakan salah satu sektor pendukung perekonomian Kota Dumai. Sektor ini memiliki relasi yang kuat dengan sektor-sektor lainnya dan memiliki kontribusi cukup besar bagi perekonomian daerah, sehingga sektor pariwisata dikembangkan menjadi salah satu potensi daerah. Jumlah kunjungan wisata dari tahun ke tahun mengalami perkembangan yang fluktuatif. Jumlah kunjungan wisata tertinggi terjadi pada tahun 2007 yaitu sebesar 103.067 orang.

Tabel 2.3.2.8
Jumlah Kunjungan Wisata di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kunjungan Wisata (orang)	103.067	48.678	48.829	69.377	54.497	50.571

Sumber: Kantor Imigrasi Kota Dumai

E. Kelautan dan Perikanan
 1. Produksi Perikanan Laut

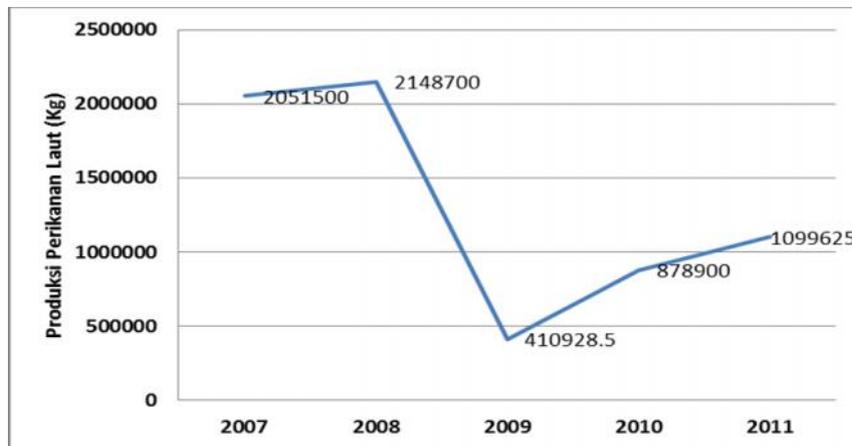
Kota Dumai memiliki laut yang cukup berpotensi sebagai wadah produksi perikanan laut. Perikanan laut di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki produksi perikanan laut yang memiliki banyak jenis ikan dan produksi perikanan laut yang tinggi setiap tahunnya. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.9
 Produksi Perikanan Laut (Kg) di Kota Dumai
 Tahun 2007-2012

Jenis Ikan	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Tenggiri	63.600	80.700	33.834	36.100	11.097	
Parang-parang	67.100	105.500	15.108	40.600	8.946	
Senangin	103.200	90.500	37.548,5	50.600	9.332	
Kakap	64.300	81.100	1.256,5	36.000	8.692	
Gulama	80.000	91.700	5.554	46.800	13.538	
Lomek	80.300	118.000	7.577,5	73.600	12.681	
Biang	141.100	146.000	45.705,5	81.200	12.404	
Pari	64.700	54.500	4.601	33.800	8.458	
Bawal Hitam	57.000	95.400	754	40.700	9.332	
Selar	63.700	43.100	6.239,5	-	-	
Mayung	36.700	77.600	4.057	4.600	-	
Belanak	14.600	14.600	159	-	-	
Cencaru	-	-	1.664	-	-	
Ikan lainnya	551.000	446.000	89.333,5	238.400	191.922	
Udang lainnya	664.200	704.000	157.534,5	196.500	813.223	
Jumlah	2.051.500	2.148.700	410.928,5	878.900	1.099.625	

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2007-2012
 Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

Kota Dumai memiliki 15 jenis perikanan laut yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut mengalami naik-turun, hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2007-2008 produksi perikanan laut meningkat hingga mencapai 2.148.700 Kg/tahun tetapi tahun berikutnya produksi perikanan laut di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 410.928 Kg/tahun pada tahun 2009.



Gambar 2.3.2.4
 Perkembangan Produksi Perikanan Laut di Kota Dumai

2. Produksi Perikanan Budidaya

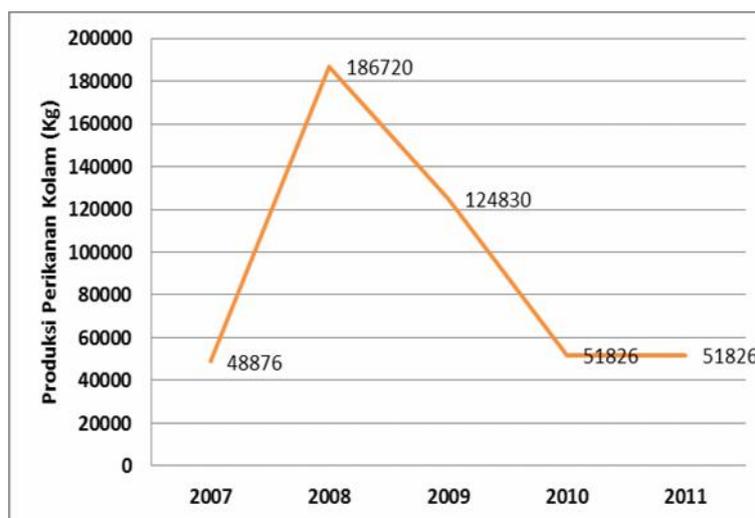
Kota Dumai memiliki potensi perikanan lain seperti perikanan darat dalam bentuk perikanan kolam dan tambak tetapi perikanan darat Kota Dumai lebih didominasi oleh budidaya kolam. Perikanan budidaya kolam di Kota Dumai memiliki potensi untuk dikembangkan karena memiliki banyak jenis ikan yang dapat dikembangkan. Walaupun produksi tidak sebanyak perikanan laut, perikanan budidaya kolam memiliki nilai produksi yang cukup besar di Kota Dumai. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.10
Produksi Perikanan Kolam (Kg) di Kota Dumai
Tahun 2007-2012

Jenis Ikan	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Ikan Mas	880	26.560	6.241	400	400	
Ikan Nila	27.130	74.510	18.725	2,723	2,723	
Gurami	2.590	30.590	6.242	1,240	1,240	
Lele	16.620	53.260	74.898	33,920	33,920	
Patin	-	-	18.724	13,343	13,343	
Bawal	1.660	1.800	-	200	200	
Jumlah	48.876	186.720	124.830	51.826	51.826	

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka Tahun 2007-2012
Dinas Peternakan, Perikanan dan Kelautan Kota Dumai

Perikanan darat yang ada di Kota Dumai adalah berupa budidaya dalam kolam. Produksi perikanan budidaya ini cukup beraneka ragam, antara lain ikan mas, nila, gurami, lele, patin dan bawa yang memiliki produksi yang besar setiap tahunnya. Dari tahun ke tahun, perkembangan produksi perikanan laut mengalami naik-turun, hal tersebut dapat dilihat dari tahun 2007-2008 produksi perikanan laut meningkat hingga mencapai 186.720 Kg/tahun tetapi tahun berikutnya produksi perikanan laut di Kota Dumai mengalami penurunan yang cukup tajam hingga 51.826Kg/tahun pada tahun 2011.



Gambar 2.3.2.5
Perkembangan Produksi Perikanan Budidaya di Kota Dumai

F. Perdagangan

1. Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB

Sub sektor perdagangan merupakan salah satu kegiatan ekonomi yang relatif berkembang di Kota Dumai. Perdagangan di Kota Dumai terdiri dari perdagangan besar dan eceran yang semakin berkembang setiap tahunnya sampai 28,63 % pada tahun 2010. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.11
Kontribusi Sektor Perdagangan dalam PDRB
Kota Dumai Tahun 2007-2010

Uraian	2007	2008	2009	2010
Kontribusi Pertumbuhan Sektor Perdagangan terhadap PDRB (%)	27.64	28.05	28.36	28.63

Sumber : PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha 2006-2010; PDRB Kota Dumai Menurut Lapangan Usaha 2007-2011, BPS Kota Dumai, 2012, diolah

2. Ekspor Bersih Perdagangan

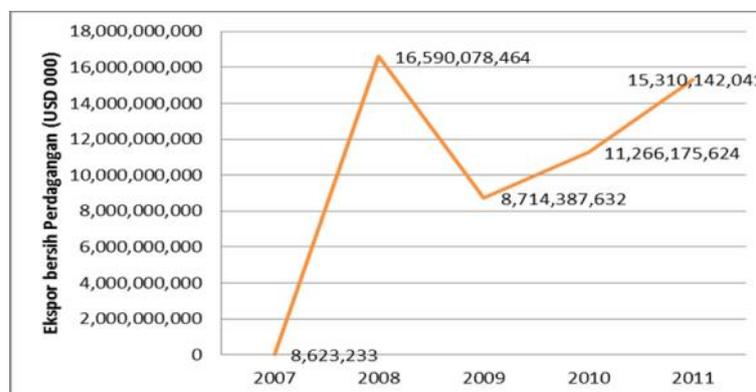
Nilai ekspor bersih Kota Dumai mengalami kenaikan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun, kenaikan tersebut mencapai 15.310.142.041 US \$ pada tahun 2012. Peningkatan tersebut membawa dampak positif bagi Kota Dumai. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.12
Ekspor Bersih Perdagangan Kota Dumai

Uraian (USD 000)	2007	2008	2009	2010	2011
Ekspor	8,974,194	17,110,775,498	8,980,334,140	11,770,875,896	16,485,319,670
Impor	350,961	520,697,034	265,946,508	504,700,272	1,175,177,629
Ekspor Bersih Perdagangan	8,623,233	16,590,078,464	8,714,387,632	11,266,175,624	15,310,142,041

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka, Hasil Olahan.

Dari tabel di atas dapat dilihat ekspor bersih perdagangan di Kota Dumai selalu bernilai positif, hal tersebut karena kegiatan ekspor di Kota Dumai memiliki nilai yang cukup tinggi dibandingkan dengan kegiatan impor. Dari tahun 2007 hingga tahun 2008, nilai ekspor perdagangan di Kota Dumai melonjak tinggi hingga 16.590.078.464 US \$ tetapi tahun berikutnya menurun hingga 8.714.387.632 US \$ pada tahun 2009.



Gambar 2.3.2.6
Perkembangan Ekspor Bersih Perdagangan di Kota Dumai

G. Perindustrian

1. Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB

Sektor industri merupakan salah satu sektor yang memberikan kontribusi terhadap PDRB Kota Dumai. Walaupun angka kontribusinya cenderung menurun tetapi masih tetap di atas 5 %. Pada tahun 2007 kontribusinya mencapai 5,05 %, namun tahun 2010 turun hingga 5,03 %. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.13
Kontribusi Sektor Perindustrian dalam PDRB di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Kontribusi perindustrian terhadap PDRB (%)	5.05	5.05	5.04	5.03		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

2. Pertumbuhan Industri

Sektor industri di Kota Dumai cenderung kurang berkembang karena memiliki kontribusi PDRB yang sama bahkan menurun. Selama tahun 2007-2010, industri tidak mengalami pertumbuhan industri karena rata-rata menurun -0,2%/tahun. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.3.2.14
Pertumbuhan Industri Terhadap PDRB di Kota Dumai

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Persentase Pertumbuhan Industri terhadap PDRB	0	0	-0.2	-0.2		

Sumber: PDRB Kota Dumai tahun 2007-2010, Data diolah.

2.4. ASPEK DAYA SAING DAERAH

2.4.1. FOKUS KEMAMPUAN EKONOMI DAERAH

A. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Pengeluaran per Kapita

Pengeluaran per kapita merupakan pendekatan untuk mengetahui pendapatan seseorang. Pendekatan ini digunakan karena data riil pendapatan perorangan sulit didapatkan. Dengan data pengeluaran per kapita ini diharapkan tingkat kesejahteraan masyarakat dapat diketahui. Berdasarkan data tahun 2009, terlihat bahwa pengeluaran rata-rata per kapita masyarakat Kota Dumai adalah sebesar Rp 495.943,- per bulan atau Rp 5.951.317,- per tahun. Besaran pengeluaran untuk makanan dan non makanan terlihat seimbang. Pengeluaran untuk makanan mencapai 50,09%, sedangkan pengeluaran untuk non makanan mencapai 49,91%.

Tabel 2.4.1.1
Rata-rata Pengeluaran per Kapita Sebulan Kota Dumai Tahun 2009

No	Jenis Pengeluaran	Pengeluaran Rata-rata Per Kapita per Bulan	
		Rupiah	%
1	Makanan	248.440,40	50,09
2	Bukan Makanan	247.502,66	49,91
	Jumlah	495.943,06	100,00

Sumber: Kota Dumai dalam Angka Tahun 2009, BPS

2.4.2. FOKUS FASILITAS WILAYAH/ INFRASTRUKTUR

A. Perhubungan

1. Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan

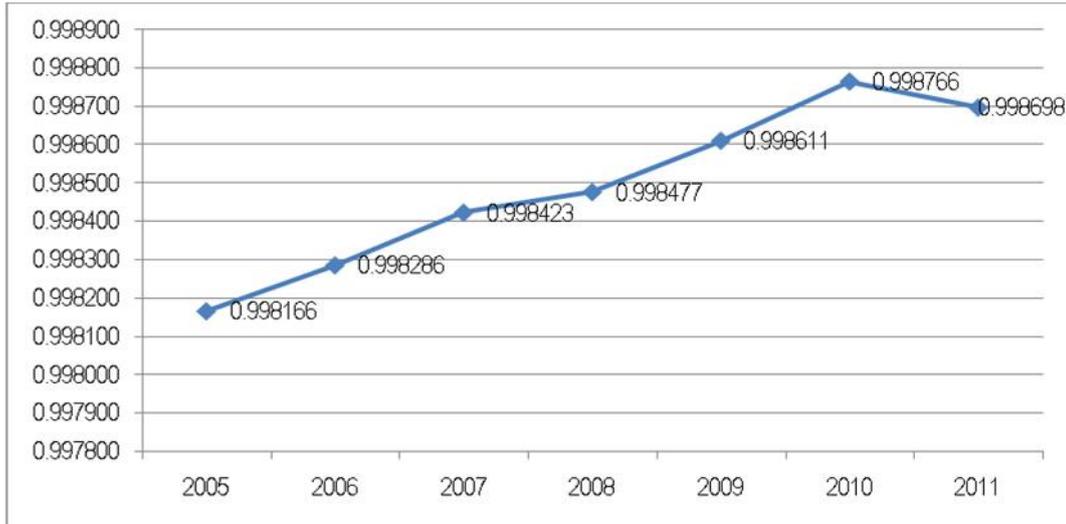
Permendagri 54/2010 menjelaskan bahwa rasio panjang jalan per jumlah kendaraan dihitung untuk mengetahui tingkat ketersediaan sarana jalan dapat memberi akses tiap kendaraan. Rasio panjang jalan per jumlah kendaraan adalah perbandingan panjang jalan terhadap jumlah kendaraan. Namun tidak ada penjelasan secara lebih mendetail yang menjelaskan mengenai tingkat ketersediaan sarana jalan terhadap akses tiap kendaraan. Berikut adalah tabel yang menyajikan mengenai rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai.

Tabel 2.4.2.1
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2011

Indikator	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Panjang jalan (m)	1091215,51	1168274,31	1270928,61	1316513,81	1444546,01	1626191,21	1542271,21
Jumlah kendaraan	1093220,5	1170280,3	1272935,61	1318521,81	1446555,01	1628201,21	1544282,21
Rasio Panjang Jalan Per Jumlah Kendaraan	0,998166	0,998286	0,998423	0,998477	0,998611	0,998766	0,998698

Sumber : Dinas Pekerjaan Umum Kota Dumai, 2013; Kota Dumai Dalam Angka

Melihat tren perkembangan rasio panjang jalan per jumlah kendaraan di Kota Dumai dalam rentang waktu tahun 2005 hingga tahun 2010 menunjukkan kecenderungan meningkat, yakni 0,998166 di tahun 2005 menjadi 0,998766 pada tahun 2010, namun terjadi penurunan pada tahun 2011 menjadi 0,998698. Hal ini disebabkan jumlah kendaran yang bertambah setiap tahunnya sangat besar, tidak sebanding dengan pertambahan panjang jalan yang tidak seberapa. Pertumbuhan jumlah kendaraan yang paling banyak adalah kendaraan pribadi, terutama roda dua yang harganya lebih terjangkau, irit bahan bakar, dan dapat melewati ruas-ruas jalan yang sempit. Jika hal ini terus dibiarkan maka akan semakin memperparah kemacetan yang sering terjadi terutama di beberapa ruas jalan utama pada saat jam-jam sibuk.



Gambar 2.4.2.1
Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan di Kota Dumai
Tahun 2005 – 2011

2. Jumlah Orang/ Barang Yang Terangkut Angkutan Umum

Jumlah orang yang terangkut angkutan umum memiliki kesamaan dengan indikator jumlah arus penumpang angkutan umum pada urusan perhubungan dalam aspek pelayanan umum. Sedangkan jumlah barang yang terangkut angkutan umum dirinci berdasarkan jumlah barang dan status barang. Berikut adalah jumlah orang dan barang yang terangkut angkutan umum di Kota Dumai.

Tabel 2.4.2.2
Jumlah Orang dan Barang yang Terangkut Angkutan Umum di Kota Dumai
Tahun 2000-2011

PRASARANA ANGKUTAN	ORANG/ BARANG	JENIS PENUMPANG	2000	2001	2002	2003	2004	2005
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	421180	NA	451315	444130	391350	NA
		DATANG	431181	NA	561214	428264	407530	NA
	BARANG	MUAT	36468620	NA	31789506	29806434	31411298	NA
		BONGKAR	2389884	NA	3123379	2722365	2556296	NA
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	23302	23548	21910	25309	39941	26422
		DATANG	21232	21891	21038	23616	29230	26629
		TRANSIT	9068	8381	6402	10215	39765	16828
	BARANG	BONGKAR	301521	352063	23030	184955	250334	180513
		MUAT	296762	329973	4852	29417	161679	7784
	BAGASI	BONGKAR	12484	26352	303984	341699	596007	378835
		MUAT	4728	2944	300984	299923	212970	332224
	POS PAKET	BONGKAR	438	575	930	2258	2693	2864
MUAT		111	405	650	1670	2566	2385	
TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	NA	NA	NA	235616	233518	566172
		DATANG	NA	NA	NA	220752	308812	462960

Bersambung

Lanjutan....

PRASARANA ANGKUTAN	ORANG/ BARANG	JENIS PENUMPANG	2006	2007	2008	2009	2010	2011
PELABUHAN	ORANG	BERANGKAT	340195	383492	334597	280165	281666	260860
		DATANG	322599	382572	361038	286677	278897	260879
	BARANG	MUAT	28545229	26941612	27299543	17230549	20752066	25714399
		BONGKAR	2369879	2771911	2811707	2537928	4322453	4147173
BANDARA	ORANG	BERANGKAT	30684	33103	32079	29456	25643	24533
		DATANG	30007	31097	31468	27725	25256	24800
		TRANSIT	14967	11498	16026	8486	10869	9442
	BARANG	BONGKAR	139067	128798	88359	199011	146389	107074
		MUAT	7337	24274	16791	17769	13420	22804
	BAGASI	BONGKAR	356199	420211	414128	396765	349552	319043
		MUAT	357599	386545	390634	343388	301785	415432
	POS PAKET	BONGKAR	2763	1805	1830	0	0	0
		MUAT	3144	1387	1267	0	0	0
	TERMINAL	ORANG	BERANGKAT	198161	37669	137907	234239	234639
DATANG			204216	136254	126695	224292	230503	NA

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Melihat dari tabel diatas, terlihat bahwa jumlah barang yang melalui pelabuhan laut dalam rentang waktu tahun 2000 hingga tahun 2011 mendominasi pengangkutan barang di Kota Dumai, hal ini dikarenakan 80% kegiatan ekspor impor dilakukan melalui pelabuhan.

B. Penataan Ruang

Dalam pokok bahasan penataan ruang dibagi menjadi enam indikator yang terdiri dari ketaatan terhadap RTRW, luas wilayah produktif, luas wilayah industri, luas wilayah banjir, luas wilayah kekeringan, dan luas wilayah perkotaan. Namun dalam laporan antara ini hanya akan dibahas lima dari enam indikator tersebut, karena indikator ketaatan terhadap RTRW tidak ditemukan datanya.

Dari data yang bersumber dari Dinas Tata Kota, Kebersihan, dan Pertamanan Kota Dumai hanya didapatkan data jadi tanpa data sub indikator yang dipergunakan untuk perhitungan formula dari indikator-indikator tersebut, juga hanya didapatkan data untuk tahun 2013.

Luas wilayah produktif di Kota Dumai adalah seluas 36,99%. Luas wilayah industri sebesar 2,63% dari luas seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai. Sedangkan luas wilayah banjir dan kekeringan di Kota Dumai memiliki luas yang sama, yakni sebesar 3,7%. Serta luas wilayah perkotaan Kota Dumai hanya sebesar 6,95% dari seluruh wilayah budidaya di Kota Dumai.

C. Otonomi Daerah, Pemerintah Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian dan Persandian

1. Jumlah Penginapan/ Hotel

Hotel merupakan sarana penting untuk mendukung kegiatan ekonomi Kota Dumai, antara lain kegiatan perdagangan dan pariwisata. Pada tahun 2011, hotel yang terdapat di Kota Dumai berjumlah 22

unit. Jumlah hotel terbanyak terdapat di Kecamatan Dumai Timur dengan 17 unit hotel. Data selengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut.

Tabel 2.4.2.3
Banyaknya Hotel di Kota Dumai
Tahun 2007-2011

No	Kecamatan	2007	2008	2009	2010	2011
1	Bukit Kapur	0	2	2	2	2
2	Medang Kampai	0	0	0	0	0
3	Sungai Sembilan	0	0	0	0	0
4	Dumai Barat	2	2	2	3	3
5	Dumai Timur	20	20	17	17	17
	Jumlah	22	24	21	22	22

Sumber: Kota Dumai dalam Angka 2007-2011, BPS

D. Lingkungan Hidup

1. Persentase Rumah Tangga (RT) yang Menggunakan Air Bersih

Persentase rumah tangga yang menggunakan air bersih memiliki kesamaan data dengan indikator rumah tangga pengguna air bersih yang terdapat pada pokok bahasan perumahan pada aspek pelayanan umum di sub bab rumah tangga pengguna air bersih. Formula yang dipergunakan untuk menghitung indikator rumah tangga pengguna air bersih dalam pokok bahasan lingkungan hidup ini pun sama dengan yang terdapat dalam pokok bahasan perumahan, yakni dengan membagi jumlah rumah tangga pengguna air bersih dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel yang menunjukkan rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai tahun 2000 – 2011.

Tabel 2.4.2.4
Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	519	643	803	997	994	
Jumlah rumah tangga	39621	39758	41212	45418	45182	48800
Rumah tangga pengguna air bersih	1,31	1,62	1,95	2,20	2,20	

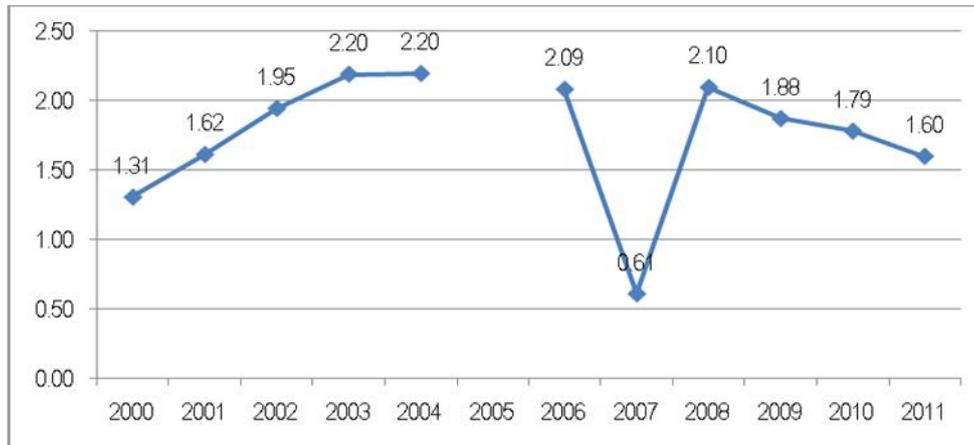
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga)	1037	319	1061	1053	1054	1054
Jumlah rumah tangga	49707	51944	50514	56127	59029	65726
Rumah tangga pengguna air bersih	2,09	0,61	2,10	1,88	1,79	1,60

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Hasil yang didapatkan dari perhitungan formula pada indikator rumah tangga pengguna air bersih di Kota Dumai adalah dengan menggunakan jumlah pelanggan PDAM (Non Niaga), dan didapatkan hasilnya menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat pada kurun waktu tahun 2000 hingga tahun 2011, yakni 1,31 pada tahun 2000 dan 1,60 pada tahun 2011.



Gambar 2.4.2.2
Grafik Indikator Rumah Tangga Pengguna Air Bersih di Kota Dumai
Tahun 2000 – 2011

Berdasarkan yang tertulis dalam Potensi Investasi Daerah Kota Dumai tahun 2012 yang dikeluarkan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal Kota Dumai, tertulis bahwa sumber air bersih di Kota Dumai bersumber dari berbagai sumber, diantaranya adalah Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM), Pertamina, PT Pelindo, dan sumur-sumur galian milik masyarakat. Dalam Potensi Investasi Daerah tersebut juga disebutkan bahwa volume air bersih yang disediakan oleh PDAM belum dapat memenuhi kebutuhan penduduk Kota Dumai secara keseluruhan, sehingga hal tersebut menuntut masyarakat untuk membuat sumur-sumur galian di lingkungan tinggalnya.

Berdasarkan rencana pengembangan sistem jaringan penyediaan air minum, yaitu melalui jaringan perpipaan dan non-perpipaan. Sistem penyediaan air minum berupa penyediaan kebutuhan air bersih atau air minum yang dilayani PDAM. Adapun untuk pengembangan jaringan non-perpipaan dilakukan melalui pengembangan pemanfaatan sumber air baku dari sumur yang tersebar di seluruh kelurahan yang memiliki kondisi air tanah baik. Selain itu, untuk masyarakat yang sulit dijangkau PDAM dan memiliki kondisi air tanah buruk, difasilitasi dengan membangun prasarana air bersih Kran Umum (KU) dan Hidran Umum (HU).

E. Komunikasi dan Informatika

1. Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik

Persentase rumah tangga yang menggunakan listrik memiliki kesamaan data dan formula dengan indikator rumah tangga pengguna listrik pada pokok bahasan perumahan dalam aspek pelayanan umum. Indikator persentase rumah tangga yang menggunakan listrik didapatkan dari perhitungan formula jumlah rumah tangga pengguna listrik dibagi dengan jumlah seluruh rumah tangga dikalikan dengan bilangan 100. Berikut adalah tabel mengenai persentase rumahtangga yang menggunakan listrik di Kota Dumai tahun 2000 – 2011.

Tabel 2.4.2.5
 Persentase Rumah Tangga yang Menggunakan Listrik di Kota Dumai
 Tahun 2000 – 2011

Indikator	2000	2001	2002	2003	2004	2005
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	8273	24925	27108	29262	30955	
Jumlah rumah tangga	39621	39758	41212	45418	45182	48800
Rumah tangga pengguna listrik	20,88	62,69	65,78	64,43	68,51	

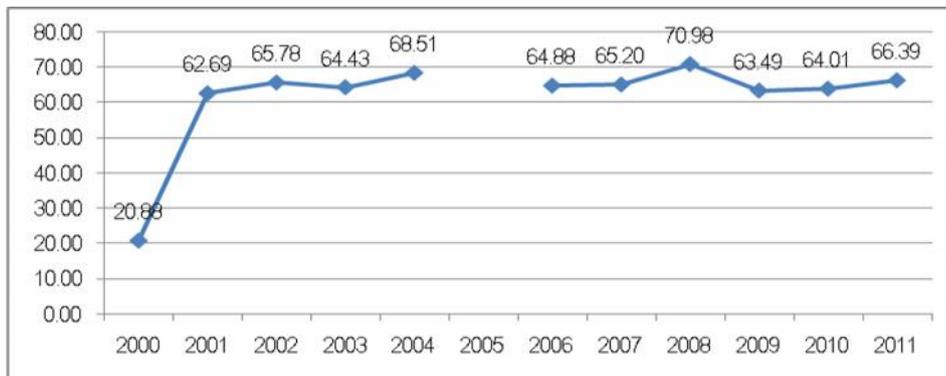
Bersambung

Lanjutan

Indikator	2006	2007	2008	2009	2010	2011
Jumlah pelanggan listrik rumah tangga	32251	33868	35857	35635	37787	43634
Jumlah rumah tangga	49707	51944	50514	56127	59029	65726
Rumah tangga pengguna listrik	64,88	65,20	70,98	63,49	64,01	66,39

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

Dari tabel diatas diketahui bahwa jumlah pelanggan listrik di Kota Dumai menunjukkan angka yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Hal ini seiring dengan pernyataan yang tertuang dalam Potensi Investasi Daerah Kota Dumai yang menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kebutuhan energi listrik di Kota Dumai untuk konsumsi sebesar 163.046.535 kWh dan memiliki beban puncak sebesar 6.954 kw, serta memiliki daya terpasang sebesar 78.770 KVA. Dengan melihat data yang telah tertulis sebelumnya maka terlihat bahwa seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik. Namun apabila melihat tabel 2.4.2.5 data rumah tangga pengguna listrik pada tahun 2011 menunjukkan angka 66,39 sehingga belum seluruh wilayah Kota Dumai teraliri aliran listrik.



Gambar 2.4.2.3
 Grafik Indikator Persentase Rumah Tangga yang menggunakan Listrik di Kota Dumai
 Tahun 2000 – 2011

2.4.3. FOKUS IKLIM BERINVESTASI

A. Otonomi Daerah, Pemerintahan Umum, Administrasi Keuangan Daerah, Perangkat Daerah, Kepegawaian, dan Persandian

1. Angka Kriminalitas

Angka kriminalitas di Kota Dumai mengalami penurunan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007, angka kriminalitas Kota Dumai mencapai 921. Kondisi tersebut semakin menurun hingga tahun 2011 menjadi 468. Hal tersebut karena tingkat penyelesaian kriminalitas di Kota Dumai semakin meningkat sehingga angka kriminalitas di Kota Dumai semakin menurun. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.3.1
Angka Kriminalitas di Kota Dumai

Indikator	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Angka kriminalitas	921	884	687	708	468	

Sumber : Kota Dumai Dalam Angka

2. Lama Proses Perijinan

Lama proses perijinan merupakan rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk memperoleh suatu perijinan (dalam hari). Badan pelayanan terpadu dan penanaman Kota Dumai melayani 76 jenis izin dengan lama proses perijinan dari 3-33 hari kerja. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.3.2
Lama Proses Perijinan di Kota Dumai

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
1	Izin mendirikan bangunan (IMB)	14
2	Izin penggunaan bangunan (IPB)	14
3	Surat izin tempat usaha (SITU)	3
4	Izin gangguan (HO)	3
5	Surat izin usaha perdagangan (SIUP)	3
6	Tanda daftar perusahaan (TDP)	3
7	Tanda daftar gudang (TDG)	3
8	Izin usaha industri (IUI)	3
9	Perizinan penanaman modal	5
10	Izin berkelompok dokter spesialis/ Dokter gigi spesialis	5
11	Izin penyelenggaraan optikal	5
12	Izin apotik	5
13	Izin toko obat	5
14	Izin balai pengobatan	5
15	Izin laboratorium	5
16	Izin rumah bersalin	5
17	Izin praktik terapi wicara	5
18	Izin praktik fisioterapis	5
19	Izin praktik bidan	5
20	Izin dokter spesialis	5
21	Izin dokter umum	5
22	Izin dokter gigi	5
23	Izin perawat	5
24	Izin perawat gigi	5
25	Izin klinik rawat inap pelayanan medik dasar	5

No.	Jenis Izin	Lama Proses Izin (dalam hari)
26	Izin refraksionis opisian	5
27	Izin pengobatan tradisional	5
28	Izin depot air isi ulang	5
29	Izin usaha perkebunan	10
30	Izin pengelolaan sarang burung wallet	10
31	Izin usaha perikanan	10
32	Izin usaha peternakan	10
33	Izin penggunaan bejana tekan	10
34	Izin penggunaan instalansi listrik	10
35	Izin penggunaan motor diesel	10
36	Izin penggunaan penyalur petir	10
37	Izin penggunaan tower crene	10
38	Izin usaha penyelenggaraan bengkel umum	10
39	Izin kendaraan tidak bermotor (becak)	10
40	Izin usaha kolam renang	10
41	Izin usaha golf	10
42	Izin usaha konveksi perjalanan dan pameran	10
43	Izin hotel	10
44	Izin restoran/ rumah makan	10
45	Izin karaoke	10
46	Izin salon	10
47	Izin pusat permainan	10
48	Izin billiard	10
49	Izin panti pijat	10
50	Izin transportasi	10
51	Izin pusat olahraga	10
52	Izin catering	10
53	Izin perawatan kecantikan	10
54	Izin usaha perdagangan minuman beralkohol	10
55	Izin reklame/ spanduk	10
56	Izin penggunaan racun api	10
57	Izin pendirian sekolah swasta (IPSS)	10
58	Izin pendirian lembaga pendidikan non formal (IPLNF)	10
59	Izin usaha jasa konstruksi (IUJK)	10
60	Izin batuan bukan mineral (Galian C)	10
61	Izin pasir cuci (Galian C)	10
62	Izin pasir laut (Galian C)	10
63	Izin tanah timbun (Galian C)	10
64	Izin pengeboran	10
65	Izin pengambilan air tanah	10
66	Izin turap	10
67	Izin pengambilan air permukaan	10
68	Izin usaha ketenagalistrikan sendiri	10
69	Izin usaha ketenagalistrikan umum	10
70	Izin lay operasi	10
71	Pendaftaran penanaman modal	10
72	Izin prinsip penanaman modal	10
73	Izin prinsip perluasan penanaman modal	10
74	Izin prinsip perubahan penanaman modal	10
75	Izin usaha, izin usaha perluasan, izin usaha penggabungan perusahaan penanaman modal (merger), izin usaha perubahan	10
76	Izin lokasi	33

Sumber: Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal, 2013

3. Jumlah dan Macam Pajak dan Retribusi Daerah

Pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan) kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang berdasarkan perundangundangan yang berlaku, yang

digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pembangunan daerah (sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku). Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (dalam hal ini perusahaan). Jumlah pajak dan retribusi daerah yang dipungut di Kota Dumai mengalami peningkatan seiring dengan adanya perubahan peraturan perpajakan. Beberapa pajak yang dahulu dipungut oleh pemerintah pusat, saat ini menjadi pajak daerah, antara lain PBB dan pajak BPHTB. Besar kecilnya hasil pajak dan retribusi daerah akan mempengaruhinya besaran Pendapatan Asli Daerah, yang nantinya akan mencerminkan kemampuan keuangan daerah dalam mencukupi kebutuhan pembangunannya.

2.4.4. SUMBER DAYA MANUSIA

A. Ketenagakerjaan

Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan pembangunan nasional dan daerah. Hal ini dapat disadari oleh karena manusia sebagai subyek dan obyek dalam pembangunan. Mengingat hal tersebut, maka pembangunan SDM diarahkan agar benar-benar mampu dan memiliki etos kerja yang produktif, terampil, kreatif, disiplin dan profesional. Disamping itu juga mampu memanfaatkan, mengembangkan dan menguasai ilmu dan teknologi yang inovatif dalam rangka memacu pelaksanaan pembangunan nasional.

Kualitas sumberdaya manusia juga memiliki peranan penting dalam meningkatkan daya saing daerah dan perkembangan investasi di daerah. Indikator kualitas sumberdaya manusia dalam rangka peningkatan daya saing daerah dapat dilihat dari kualitas tenaga kerja dan tingkat ketergantungan penduduk untuk melihat sejauh mana beban ketergantungan penduduk.

1. Rasio Lulusan S1/S2/S3

Salah satu faktor penting yang tidak dapat diabaikan dalam kerangka pembangunan daerah adalah menyangkut kualitas sumber daya manusia (SDM). Kualitas SDM ini berkaitan erat dengan kualitas tenaga kerja yang tersedia untuk mengisi kesempatan kerja di dalam negeri dan di luar negeri. Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah sangat ditentukan oleh tingkat pendidikan. Artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3. Jumlah lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai semakin meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 jumlahnya mencapai 4.090 orang, tetapi pada tahun 2010 meningkat hingga 7.454 orang. Rasio lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai pada tahun 2007 sebesar 182,49 dan pada tahun 2010 rasio lulusan S1/S2/S3 naik menjadi 303,25. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.4.1
Rasio Lulusan S1/S2/S3 di Kota Dumai
Tahun 2007-2012

Indikator	Tahun					
	2007	2008	2009	2010	2011	2012
Jumlah lulusan S1/S2/S3	4.090	4.090	4.429	7.454		
Jumlah Penduduk	224.121	236.778	250.367	245.803		
Rasio Pekerja Lulusan S1/S2/S3	182,49	172,73	176,90	303,25		

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

2. Rasio Ketergantungan

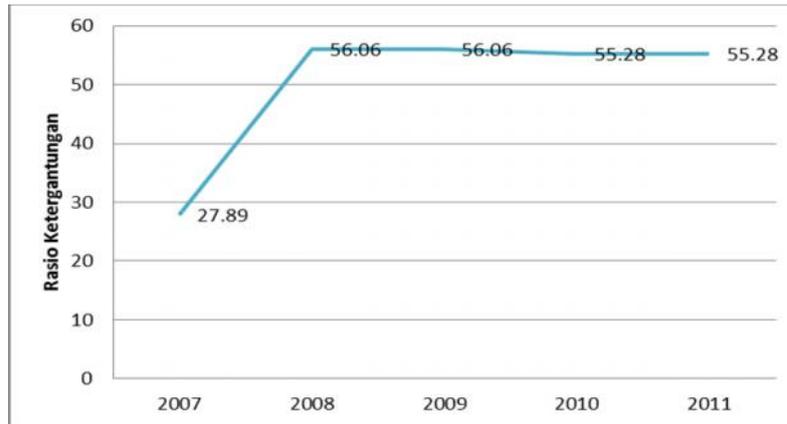
Salah satu indikator keberhasilan pembangunan di bidang kependudukan terlihat pada perubahan komposisi penduduk menurut umur yang tercermin dengan semakin rendahnya proporsi penduduk usia tidak produktif. Penduduk usia tidak produktif (usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas) merupakan beban atau tanggungan dalam pembangunan. Sedangkan usia produktif (14-64 tahun) merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan di segala bidang, dengan harapan produktivitas dan efektivitas yang terjadi ditunjang pula dengan sarana dan prasarana pembangunan. Rasio ketergantungan (dependency ratio) atau angka beban ketergantungan adalah suatu angka yang menunjukkan besar beban tanggungan kelompok usia produktif atas penduduk usia non produktif. Apabila dilihat dari komposisi usia produktif yaitu 15-65 tahun dan usia tidak produktif (0-14 tahun dan 65 tahun keatas) maka dapat diketahui bahwa angka ketergantungan (dependency ratio) Kota Dumai pada tahun 2011 adalah 55,28 %, yang artinya setiap 100 orang yang berusia kerja (dianggap produktif) mempunyai tanggungan sebanyak 55 orang yang belum produktif dan dianggap tidak produktif lagi. Rasio sebesar 55,28 % ini disumbangkan oleh rasio ketergantungan penduduk muda penduduk tua. Dari indikator ini terlihat bahwa pada tahun 2011, penduduk usia kerja di Kota Dumai masih dibebani tanggungjawab akan penduduk muda yang proporsinya lebih banyak dibandingkan tanggung jawab terhadap penduduk tua. Data selengkapnya dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 2.4.4.2
Rasio Ketergantungan di Kota Dumai Tahun 2007-2010

Indikator	Tahun				
	2007	2008	2009	2010	2011
Penduduk usia < 15 th + Usia > 64 tahun	41.301	85.053	89.942	90.355	93.619
Penduduk Usia 15-64 tahun	148.100	151.725	160.425	163.448	169.357
Rasio Ketergantungan	27,89	56,06	56,06	55,28	55,28

Sumber : Dumai Dalam Angka, Diolah

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2007 rasio ketergantungan di Kota Dumai sebesar 27,89. Dari tahun 2007, rasio ketergantungan semakin melonjak naik hingga 55,28 pada tahun 2011. Data komposisi penduduk menurut kelompok umur di Kota Dumai selama kurun waktu tahun 2007 sampai 2011 dapat dilihat grafik berikut.



Gambar 2.4.4.1
Grafik Rasio Ketergantungan

bab3

ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Pemerintah Kota Dumai untuk waktu 20 (dua puluh) tahun mendatang menghadapi permasalahan dan tantangan baik yang bersifat lokal (daerah) maupun yang bersifat global. Berdasarkan permasalahan dan tantangan ini maka selanjutnya dituangkan ke dalam isu-isu strategis untuk memberi arahan dalam perumusan visi dan misi serta arah kebijakan pembangunan Kota Dumai tahun 2005–2025.

Suatu isu strategis dirumuskan melalui identifikasi berbagai permasalahan pembangunan daerah yang bersifat strategis dan diperkirakan dapat mempengaruhi agenda pembangunan dalam 20 tahun kedepan. Berbagai permasalahan yang sangat mendesak, memiliki pengaruh yang kuat terhadap keberhasilan pembangunan, dan menentukan pencapaian tujuan pembangunan dalam waktu 20 (dua puluh) tahun kedepan harus diidentifikasi dengan jelas dan lugas.

Permasalahan pembangunan diperlukan dalam perumusan visi dan misi daerah, yang selanjutnya akan dituangkan dalam perumusan sasaran pokok RPJPD. Identifikasi permasalahan pembangunan dapat diverifikasi dari informasi pada gambaran umum kondisi daerah. Berdasarkan hasil analisis permasalahan pembangunan untuk masing-masing aspek dan urusan, maka permasalahan pembangunan jangka panjang Kota Dumai, adalah sebagai berikut:

3.1.1. Sumber Daya Alam, Lingkungan Hidup dan Bencana

A. Sumber Daya Alam

Semakin banyaknya konversi lahan pertanian dan perkebunan menjadi lahan industri maupun permukiman disebabkan antara lain karena lemahnya pelayanan ketersediaan benih/bibit komoditas unggulan dan sarana produksi dengan harga yang mahal. Hal ini merupakan penghambat bagi petani atau pelaku agribisnis baik produsen benih atau bibit (tanaman, ikan, ternak) maupun petani pemakai, karena cenderung merugi.

Terbatasnya pemilikan lahan setiap KK petani bervariasi dari 0-10 Ha (keluarga baru, buruh tani) yang masih dikelola secara tradisional bahkan banyak lahan tidur yang tidak diolah. Petani yang berada di wilayah Kecamatan Sungai Sembilan, Medang Kampai, Bukit Kapur dan sebagian Dumai Barat, tingkat kesejahteraan dan pendapatannya rata-rata rendah dan miskin (4.785 KK).

B. Pencemaran Lingkungan

Permasalahan pencemaran lingkungan dapat berdampak pada keberlanjutan pembangunan kota. Pengelolaan persampahan dihadapkan pada masalah meningkatnya produksi sampah kota, sistem

pengelolaan sampah yang belum terpadu, dan terbatasnya penyediaan tempat pembuangan akhir. Peningkatan produksi sampah kota merupakan konsekuensi logis dari penambahan penduduk serta peningkatan aktivitas perkotaan. Pengelolaan sampah kota masih dilaksanakan dengan paradigma 'membuang sampah' belum pada 'mengolah sampah'. Penyediaan tempat pembuangan akhir sampah masih belum maksimal dan masih diperlukan persiapan yang lebih komprehensif dalam penggunaan teknologi pengelolaan sampah.

Kegiatan industri dan kegiatan pelabuhan berpotensi menimbulkan masalah pencemaran tersendiri terutama untuk pencemaran tanah dan pencemaran laut. Pencemaran tanah dan laut dapat terjadi karena kebocoran limbah atau bahan kimia industri atau fasilitas komersial; kecelakaan kapal pengangkut; air limbah dari tempat penimbunan sampah; serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah dan tidak memenuhi syarat (illegal dumping).

C. Bencana

Dalam peta tata ruang Kota Dumai memperlihatkan bahwa hampir semua wilayah kota yang berada di bibir pantai bagian utara merupakan daerah yang terkena banjir setiap tahun, sedangkan sebagian kecil saja yang bersifat kadang-kadang tergenangi. Walaupun luasan daerah yang tergenangi tidak besar persentasenya, namun secara kesejahteraan masyarakat hal ini sangat mengganggu sehingga harus direncanakan secara jangka panjang untuk mengatasinya.

Selain itu potensi ledakan pipa minyak menjadi beban psikologi sebagian besar masyarakat Dumai akibat ancaman ledakan pipa sepanjang 60 Km membelah wilayah kota dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit refinery pengolahan BBM dengan radius 25 Km². Berdasarkan rencana dalam tata ruang wilayah Kota Dumai, untuk rencana jalur evakuasi bencana meliputi:

- a. Kecamatan Dumai Kota dari Jalan Sultan Syarif Kasim- Sudirman-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang;
- b. Kecamatan Dumai Timur dari Jalan Sultan Syarif Kasim-Sudirman-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang, atau Jalan Putri Tujuh-Soebrantas menuju Taman Bukit Gelanggang;
- c. Kecamatan Dumai Barat dari Jalan Batu Bintang menuju Universitas Riau di Dumai, atau Jalan Raja Ali Haji menuju Universitas Riau di Dumai;
- d. Kecamatan Dumai Selatan dari Jalan Raya Bukit Datuk menuju kompleks perumahan pertamina, atau Jalan Tuanku Tambusai-Jalan Pemroy-komplek perumahan Pertamina;
- e. Kecamatan Medang Kampai dari Jalan Dumai-Pelintung menuju Pertanian Terpadu;
- f. Kecamatan Bukit Kapur dari Jalan Sukarno-Hatta menuju kompleks Pemerintahan Kota; dan
- g. Kecamatan Sungai Sembilan dari Jalan Dumai-Lubuk Gaung menuju Universitas Riau di Dumai

3.1.2. Sumber Daya Manusia (SDM)

A. Ketenagakerjaan dan Sumber Daya Manusia (SDM)

Penyaluran tenaga kerja terutama untuk tenaga kerja lokal masih dihadapkan pada sumber daya manusia yaitu: kualifikasi pendidikan yang tidak sesuai dengan, keterampilan dan produktifitas terutama yang berhubungan dengan pemanfaatan teknologi, modal dan manajemen serta peningkatan keterampilan dan etos kerja, serta belum adanya ketegasan dari pemerintah Kota Dumai untuk mewajibkan menerima penduduk setempat dalam setiap kesempatan pembukaan lapangan kerja.

Permasalahan ketenagakerjaan juga dihadapi karena banyaknya perusahaan industri yang menerapkan padat modal dari pada padat karya. Implikasi tersebut berakibat pada terbatasnya penyerapan tenaga kerja sehingga meningkatkan angka pengangguran.

B. Pendidikan

Bidang pendidikan menghadapi tantangan untuk selalu meningkatkan kualitas pelayanan, aksesibilitas antar wilayah yang ada di Kota Dumai. Hal ini mengakibatkan pemerataan kualitas belum seluruhnya terakses diseluruh kecamatan terutama untuk pendistribusian guru. Kualifikasi guru pun masih ada yang tergolong semi layak dan tidak layak mengajar dipandang dari ijazah yang dimiliki.

C. Kesehatan

Di bidang kesehatan, secara umum permasalahan yang dihadapi adalah lebih mengefektifkan dan mengefesiensikan sistem kesehatan daerah yang merupakan tatanan yang menghimpun berbagai upaya pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta di daerah terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya kesehatan yang setinggi-tingginya

Kurangnya jumlah dan masih rendahnya mutu lembaga pelayanan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan pelayanan standar medis dan harga yang terjangkau, kurangnya ketersediaan sarana dan air bersih, belum adanya pola sistem sanitasi terpadu yang memenuhi standar kesehatan bagi lingkungan pemukiman, lingkungan industri dan tempat-tempat umum (public utilities), termasuk sistem pengelolaan sampah dan limbahnya.

D. Agama dan Budaya

Adanya krisis jatidiri (identitas), yaitu adanya nilai-nilai sosial, kekeluargaan, toleransi, dan cinta tanah air yang pernah dianggap sebagai kekuatan pemersatu dan ciri khas bangsa semakin pudar bersama dengan nilai-nilai materialisme. Hal tersebut mengakibatkan tidak berkembangnya kualitas kinerja lembaga kebudayaan, kurangnya kerjasama antar instansi kebudayaan, kurangnya minat generasi muda untuk menghayati dan melestarikan nilai-nilai budaya Melayu, terbatasnya sarana dan prasarana pendukung peletarian budaya.

Selain masalah budaya, pendalaman dan penghayatan ajaran agama dan nilai-nilai agama masih terbatas terutama di kalangan pendidik (anak sekolah) serta kondisi sosial yang kurang mendukung adanya perilaku yang bertentangan dengan norma-norma ajaran agama mengakibatkan rapuhnya keimanan generasi muda dalam menerima arus globalisasi terutama media cetak dan elektronik yang semakin kuat mempengaruhi perilaku remaja dan anak-anak cenderung kearah negatif.

E. Kesejahteraan Sosial

Adanya pertumbuhan penduduk yang mengelompokkan diri pada etnis tertentu atau kelompok ekonomi tertentu sehingga menimbulkan permasalahan ketimpangan sosial, selain itu tidak adanya konsistensi dalam penegakkan hukum akan menjadi ancaman tersendiri bagi kondisi sosial budaya masyarakat. Hal ini akan mengakibatkan timbulnya masalah sosial seperti naiknya tingkat kriminalitas, tumbuhnya pedagang kaki lima yang tidak mentaati aturan yang telah ditetapkan, meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis yang dapat mengganggu ketertiban umum dan memperburuk citra Kota Dumai.

Perkembangan Kota Dumai menjadi kawasan industri yang tidak diikuti dengan perkembangan daerah-daerah pendukungnya mengakibatkan permasalahan sosial budaya terkonsentrasi (urbanisasi) di daerah perkotaan.

3.1.3. Perekonomian

A. Industri dan Perdagangan

Sebagian besar produk Industri Rumah Tangga Kecil Menengah (IRTKM) tidak atau kurang "marketable" yang disebabkan oleh lemahnya kemampuan finansial, manajemen, dan pemasaran skala usaha kecil, sistem produksi berdasarkan permintaan dan tidak berkelanjutan, jangkauan pasar bersifat lokal serta terbatas kemampuannya untuk melakukan ekspansi usaha, dan penerapan teknologi masih rendah

Iklim usaha yang sepenuhnya belum memberikan dukungan terhadap pengembangan koperasi dan Usaha Kecil Menengah (UKM) serta keterbatasan akses koperasi dan UKM pada sumberdaya produktif yang menjadi kendala untuk mengembangkan usaha secara cepat dan berkesinambungan.

B. Kemiskinan

Keterbatasan peluang kesempatan kerja karena keterbatasan sumberdaya modal dan kualitas SDM akan menghambat penduduk untuk mendapatkan penghasilan yang layak untuk mencukupi kebutuhan hidup. Tingkat kemiskinan di Kota Dumai tahun 2010 yaitu 6,45%. Angka kemiskinan ini masih berfluktuasi dengan kecenderungan meningkat. Dengan garis kemiskinan sebesar Rp 287.975/kapita/bulan maka terdapat sekitar 16 ribu orang yang hidup dengan pendapatan di bawah angka tersebut.

3.1.4. Infrastruktur

A. Perhubungan

Masih banyaknya wilayah Kota Dumai yang belum tersentuh oleh prasarana jalan, sehingga masih banyak pula wilayah yang terisolir atau terpencil yang disebabkan kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau.

B. Sarana Perdagangan dan Jasa

Kebutuhan akan sarana perekonomian suatu wilayah antara lain meliputi kebutuhan akan warung, pertokoan, dan pusat perbelanjaan/pasar. Secara normatif terdapat standar baku kebutuhan akan sarana-sarana tersebut, yaitu berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum. Adapun standar yang digunakan secara lengkapnya dapat dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 3.1.
Standar Baku Penyediaan Sarana Perekonomian

No.	Jenis Sarana Perekonomian	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (m2)
1.	Warung	250	50
2.	Pertokoan	2.500	1.200
3.	Pusat perbelanjaan (pasar dan toko)	30.000	13.500
4.	Pusat perbelanjaan dan niaga (dilengkapi kantor, bank, dan industri)	120.000	36.000

Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum

Berdasarkan standar baku tersebut di atas dan perhitungan prediksi penduduk, kebutuhan akan warung merupakan kebutuhan yang paling banyak di Kota Dumai. Pada tahun 2012, kebutuhan akan warung adalah sebesar 1108 unit, kemudian meningkat menjadi 1783 unit pada tahun 2025.

Jenis kebutuhan yang terbanyak kedua adalah pertokoan. Pada tahun 2012 jumlah kebutuhannya sebanyak 111 unit kemudian meningkat menjadi 178 unit pada tahun 2025. Kota Dumai memiliki jumlah kebutuhan pusat perbelanjaan sebanyak 9 unit pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 15 unit pusat perbelanjaan tahun 2025. Sedangkan jenis sarana perekonomian berupa pusat perbelanjaan dan niaga yang memerlukan 2 unit pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 4 unit pada tahun 2025.

Tabel 3.2.
Prediksi Kebutuhan Fasilitas Perdagangan dan Jasa di Kota Dumai Tahun 2012 – 2025

Tahun	Prediksi Jumlah Penduduk	Prediksi Kebutuhan Pelayanan Jasa dan Perdagangan			
		Warung	Pertokoan	Pusat Perbelanjaan	Pusat Perbelanjaan dan Niaga
2012	276895	1108	111	9	2
2013	287229	1149	115	10	2

Tahun	Prediksi Jumlah Penduduk	Prediksi Kebutuhan Pelayanan Jasa dan Perdagangan			
		Warung	Pertokoan	Pusat Perbelanjaan	Pusat Perbelanjaan dan Niaga
2014	297949	1192	119	10	2
2015	309070	1236	124	10	3
2016	320605	1282	128	11	3
2017	332571	1330	133	11	3
2018	344983	1380	138	11	3
2019	357859	1431	143	12	3
2020	371215	1485	148	12	3
2021	385069	1540	154	13	3
2022	399441	1598	160	13	3
2023	414349	1657	166	14	3
2024	429814	1719	172	14	4
2025	445855	1783	178	15	4

Sumber: Hasil Analisis, 2013

C. Sarana Pendidikan

Kebutuhan akan sarana pendidikan yang pokok dan mendasar bagi masyarakat suatu wilayah adalah meliputi TK, SD, SMP, dan SMA. Pengadaan fasilitas pendidikan tersebut merupakan kebutuhan utama yang harus mampu diakses oleh seluruh lapisan masyarakat. Standar baku kebutuhan akan fasilitas tersebut berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.3.
Standar Baku Penyediaan Sarana Pendidikan

No.	Jenis Sarana Pendidikan	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (m2)
1.	TK	1.000	1.200
2.	SD	1.600	3.600
3.	SMP	4.800	2.700-5.000
4.	SMA	4.800	2.700-5.000

Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum

Berdasarkan asumsi tersebut, maka hasil analisis menunjukkan bahwa sampai akhir tahun 2025, untuk fasilitas pendidikan diperlukan tambahan unit bangunan. Namun tidak lepas dari hal tersebut, perlu juga peningkatan kualitas sumberdaya manusianya serta prasarana pendukung lainnya.

Pada tahun 2012 prediksi kebutuhan akan fasilitas Taman Kanak-kanak dimana lokasinya berada di dalam lingkungan permukiman adalah sebanyak 277 unit, kemudian bertambah menjadi 446 unit pada tahun 2025. Kebutuhan akan SD yaitu sebesar 173 unit pada tahun 2012 kemudian meningkat menjadi 279 unit pada tahun 2025. Jenis kebutuhan akan fasilitas pendidikan utama yang paling sedikit adalah SMP dan SMA, dengan besar kebutuhan yang sama untuk keduanya. Pada tahun 2012, jumlah kebutuhan kedua jenis fasilitas tersebut adalah 58 unit kemudian bertambah menjadi 93 unit pada tahun 2025. Secara keseluruhan fasilitas pendidikan yang paling banyak diperlukan adalah TK dan SD, karena hal itu bertujuan guna mensukseskan program belajar 9 tahun serta meningkatkan SDM masyarakat Kota Dumai. Prediksi kebutuhan jumlah sarana pendidikan pada tahun 2012 – 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.4
Prediksi Kebutuhan Fasilitas Sarana Pendidikan
di Kota Dumai Tahun 2012 – 2025

Tahun	Prediksi Jumlah Penduduk	Prediksi Kebutuhan Sarana Pendidikan			
		TK	SD	SMP	SMA
2012	276895	277	173	58	58
2013	287229	287	180	60	60
2014	297949	298	186	62	62
2015	309070	309	193	64	64
2016	320605	321	200	67	67
2017	332571	333	208	69	69
2018	344983	345	216	72	72
2019	357859	358	224	75	75
2020	371215	371	232	77	77
2021	385069	385	241	80	80
2022	399441	399	250	83	83
2023	414349	414	259	86	86
2024	429814	430	269	90	90
2025	445855	446	279	93	93

Sumber: Hasil Analisis, 2013

D. Sarana Kesehatan

Fasilitas kesehatan mempunyai peranan penting dalam menentukan tingkat kesehatan dan mengendalikan pertumbuhan penduduk. Sarana kesehatan secara umum terdiri dari Balai Pengobatan, BKIA (Balai Kesehatan Ibu dan Anak), Puskesmas, Rumah Sakit, tempat praktek dokter, dan apotek. Standar baku kebutuhan akan fasilitas tersebut berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.5
Standar Baku Penyediaan Sarana Kesehatan

No.	Jenis Sarana Kesehatan	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (m ²)
1.	Balai Pengobatan	3.000	300
2.	BKIA+Rumah Bersalin	10.000	1.000
3.	Puskesmas Pembantu	30.000	1.200
4.	Puskesmas	120.000	2.400
5.	Rumah Sakit Wilayah	240.000	86.400
6.	Praktek Dokter	5.000	
7.	Apotik	10.000	350

Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum

Dari hasil analisis dan prediksi penduduk yang telah dilakukan, balai pengobatan dan praktek dokter merupakan dua hal yang penting dalam memberikan layanan kepada masyarakat, selain kebutuhan akan BKIA dan Rumah Bersalin, Puskesmas Pembantu dan Apotek. Pada tahun 2012 kebutuhan balai pengobatan di Kota Dumai adalah sebanyak 92 unit dan meningkat menjadi 149 unit, sedangkan untuk praktek dokter dibutuhkan sebanyak 55 unit pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 89 unit. Kebutuhan sarana kesehatan berupa apotek di Kota Dumai pada tahun 2012 adalah sebanyak 28 unit, dan meningkat menjadi 45 unit.

Fasilitas Puskesmas yang dibutuhkan pada tahun 2012 adalah sebanyak dua unit dan meningkat menjadi empat unit pada tahun 2025. Sedangkan untuk fasilitas Puskesmas Pembantu (Pustu) kebutuhan Kota Dumai pada tahun 2012 adalah sebanyak sembilan unit dan meningkat menjadi 15 unit pada tahun 2025. Menurut prediksi kebutuhan sarana kesehatan di Kota Dumai, kebutuhan akan rumah sakit pada tahun 2012 adalah satu unit, dan pada tahun 2025 adalah sebanyak dua unit. Akan tetapi hingga tahun 2013, Kota Dumai memiliki tiga unit sarana kesehatan berupa rumah sakit, sehingga kebutuhan rumah sakit hingga tahun 2025 telah mencukupi. Adapun kebutuhan sarana kesehatan di Kota Dumai pada tahun 2012 – 2025 sebagai berikut.

Tabel 3.6
Prediksi Kebutuhan Sarana Kesehatan
di Kota Dumai Tahun 2012 – 2025

Tahun	Prediksi Jumlah Penduduk	Prediksi Kebutuhan Sarana Kesehatan						
		Balai Pengobatan	Pustu	BKIA/RS Bersalin	Puskesmas	RS	Apotek	Praktek Dokter
2012	276895	92	9	28	2	1	28	55
2013	287229	96	10	29	2	1	29	57
2014	297949	99	10	30	2	1	30	60
2015	309070	103	10	31	3	1	31	62
2016	320605	107	11	32	3	1	32	64
2017	332571	111	11	33	3	1	33	67
2018	344983	115	11	34	3	1	34	69
2019	357859	119	12	36	3	1	36	72
2020	371215	124	12	37	3	2	37	74
2021	385069	128	13	39	3	2	39	77
2022	399441	133	13	40	3	2	40	80
2023	414349	138	14	41	3	2	41	83
2024	429814	143	14	43	4	2	43	86
2025	445855	149	15	45	4	2	45	89

Sumber: Hasil Analisis, 2013

E. Sarana Rekreasi dan Olahraga

Penyediaan sarana rekreasi dan olah raga di suatu wilayah tidak hanya berfungsi sebagai alat pemenuhan kebutuhan masyarakat akan fasilitas tersebut, melainkan juga bisa menjadi ruang terbuka hijau (RTH) yang mampu memberikan manfaat bagi keberlangsungan lingkungan hidup/ekologi, sehingga keberadaan sarana tersebut harus dijaga dengan baik, secara kualitas maupun kuantitas.

Jenis fasilitas rekreasi dan olah raga yang diperlukan meliputi taman lingkungan, taman besar, lapangan olah raga, dan jalur hijau. Standar baku kebutuhan akan fasilitas tersebut berdasarkan Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota yang dikeluarkan oleh Departemen Pekerjaan Umum dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 3.7
Standar Baku Penyediaan Sarana Rekreasi dan Olah Raga

No.	Jenis Sarana Rekreasi dan Olah Raga	Jumlah Penduduk Pendukung (Jiwa)	Luas Lahan (m ²)
1.	Taman Lingkungan	250	250
2.	Taman (dapat digunakan untuk olah raga Volley/Badminton)	2.500	1.250
3.	Taman dan Lapangan Olah Raga Lingkungan (dilengkapi lapangan sepak bola)	30.000	9.000
4.	Taman dan Lapangan Olah Raga (dilengkapi lapangan olah raga yang diperkeras dan fasilitas MCK)	120.000	24.000
5.	Jalur Hijau		15 m ² /orang

Sumber: Pedoman Perencanaan Lingkungan Pemukiman Kota, Departemen Pekerjaan Umum

Kebutuhan taman lingkungan merupakan yang paling besar di Kota Dumai. Jumlah kebutuhan akan fasilitas tersebut bahkan mencapai 1108 unit pada tahun 2012 dan meningkat menjadi 1783 unit pada tahun 2025. Pada urutan terbanyak kedua adalah kebutuhan akan taman dengan luasan yang lebih besar, yaitu sebanyak 111 unit pada tahun 2012 kemudian bertambah menjadi 178 unit pada tahun 2025. Hal ini didukung oleh masih luasnya lahan terbuka yang belum dimanfaatkan. Adapun prediksi kebutuhan tempat rekreasi dan olah raga di Kota Dumai untuk tahun 2012 – 2025 adalah sebagai berikut.

Tabel 3.8
Prediksi Kebutuhan Rekreasi dan Olah Raga di Kota Dumai 2012 – 2025

Tahun	Prediksi jumlah penduduk	Prediksi Kebutuhan Sarana Rekreasi dan Olah Raga				
		Taman lingkungan	Taman	Taman dan Lap OR	Taman di Kec	Taman di Wilayah (Kota)
2012	276895	1108	111	9	2	1
2013	287229	1149	115	10	2	1
2014	297949	1192	119	10	2	1
2015	309070	1236	124	10	3	1
2016	320605	1282	128	11	3	1
2017	332571	1330	133	11	3	1
2018	344983	1380	138	11	3	1
2019	357859	1431	143	12	3	1
2020	371215	1485	148	12	3	1
2021	385069	1540	154	13	3	1
2022	399441	1598	160	13	3	1
2023	414349	1657	166	14	3	1
2024	429814	1719	172	14	4	1
2025	445855	1783	178	15	4	1

Sumber: Hasil Analisis, 2013

3.2. Isu Strategis

Identifikasi isu yang bersifat strategis diharapkan akan mempermudah menyatukan pandangan tentang prioritas pembangunan dan secara teknokratis dapat menjelaskan secara objektif serta memadai kepada semua pemangku kepentingan. Analisis terhadap isu-isu yang bernilai strategis merupakan bagian penting dan perannya sangat menentukan dalam proses penyusunan rencana pembangunan daerah disamping bersifat melengkapi tahapan proses yang telah dilakukan sebelumnya.

Merupakan keharusan bahwa suatu perencanaan pembangunan bukan hanya dibuat untuk dan dapat diterima oleh komunitas internal organisasi pembuatnya (dalam hal ini pemerintah daerah), melainkan harus dapat diterima semua pihak di luar organisasi. Oleh karena itu pencermatan dan penelaahan lingkungan eksternal haruslah mendapat bagian yang memadai dalam proses perencanaan yang bersifat strategis.

Isu strategis merupakan salah satu pengayaan analisis lingkungan eksternal terhadap proses perencanaan. Jika dinamika eksternal, khususnya selama 20 (dua puluh) tahun yang akan datang diidentifikasi dengan baik maka pemerintah daerah dapat mempertahankan kelangsungan penyelenggaraan pemerintahan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas pemerintahan daerah dan masyarakat dimasa datang¹.

Isu strategis adalah kondisi atau hal yang bersifat penting, mendasar, berjangka panjang, mendesak, bersifat kelembagaan/keorganisasian dan menentukan tujuan organisasi/institusi dimasa yang akan datang. Beberapa kriteria isu strategis menurut Permendagri 54/2010 antara lain:

1. Memiliki pengaruh yang besar/signifikan terhadap pencapaian sasaran pembangunan nasional;
2. Merupakan tugas dan tanggung jawab pemerintah daerah;
3. Memiliki dampak yang ditimbulkannya terhadap daerah dan masyarakat;
4. Memiliki daya ungkit yang signifikan pembangunan daerah; dan
5. Kemungkinan atau kemudahannya untuk ditangani.

Beberapa isu strategis yang dapat dikemukakan antara lain seperti tertuang dalam tabel berikut baik dalam skala internasional, nasional maupun propinsi Riau (atau gabungan ketiganya):

Tabel 3.9
Identifikasi Isu-Isu Strategis

No	Kelompok	Isu Strategis		
		Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Regional
1.	Fisik	a. Degradasi dan alih fungsi hutan sebagai dampak pada global warming b. Peruntukan kawasan RTH c. Kebakaran lahan gambut	a. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan (ketahanan pangan nasional)	a. Potensi banjir di dataran rendah b. Ancaman bencana lokal
2.	SDM, Sosial-Budaya	MDG's targets	a. Kemiskinan	b. Dampak Sosial c. Kualitas SDM
3.	Ekonomi	a. Penerbangan b. Pasar bebas ASIA	a. Kota Dumai yang menjadi pembuat galangan kapal baru pada dokumen MP3EI	a. Peningkatan taraf hidup masyarakat b. Pemerataan pembangunan c. Kawasan khusus untuk pengembangan industri d. Kota Dumai sebagai pusat kegiatan wilayah di Provinsi Riau
4.	Infrastruktur	a. Pembangunan Jembatan Dumai – Malaka	a. Pengembangan pembangunan pelabuhan penunjang	a. Kualitas dan cadangan air baku b. Rencana pembangunan jalan tol Pekanbaru – Duri – Dumai

¹ Dikutip dari Permendagri no.54 tahun 2010, Lampiran II, halaman 30-31

No	Kelompok	Isu Strategis		
		Dunia Internasional	Kebijakan Nasional	Regional
			kegiatan transportasi laut	c. Peningkatan kualitas maupun fungsi jalan (jaringan transportasi) d. Pembangunan jalur kereta api e. Penyediaan kapal berukuran besar (RoRo) f. Penggunaan Bandara Pinang Kampai
5.	Pemerintahan	Clean Government dan Good Governance	Clean Government dan Good Governance	Clean Government dan Good Governance

Sumber : Lampiran Permendagri 54/2010, Hasil Analisis 2013

Dari profil wilayah Kota Dumai maka dapatlah disimpulkan beberapa hal pokok yang menjadi isu strategis Wilayah Kota Dumai yang dikelompokkan ke dalam tiga tingkatan wilayah: internasional, nasional dan regional/lokal.

A. Isu Internasional

Isu strategis di wilayah Kota Dumai yang berkenaan dengan hal penting tingkat internasional antara lain adalah:

1. Degradasi dan alih fungsi hutan (dampak pada global warming)

Degradasi dan alih fungsi hutan akibat rendahnya kepedulian komunitas dunia usaha masyarakat. Catatan media cetak menyatakan hutan konservasi atau Hutan Wisata Sungai Dumai mulai memprihatinkan. Berkurangnya luas hutan tersebut akibat perambahan yang semakin tak terkendali. Awalnya, hutan ini memiliki luas sekitar 4.700 Ha, namun hanya tersisa sekitar 1.000 Ha saja. Pohon di kawasan hutan sekarang banyak yang hilang dan berganti dengan tanaman sawit serta rumah penangkaran walet. Selain itu ada rencana kawasan hutan akan dibuka untuk pemakaman umum dengan alasan tanah telah diwakafkan seseorang. Jumlah areal yang sudah dirambah saat ini sudah mencapai 3.000 Ha.²

Catatan dari profil Kota Dumai di Ditjen Cipta Karya, Kementerian PU, tahun 2003 luas wilayah Kota Dumai adalah 1.772,38 Km² (177.238 Ha) dengan rincian penggunaan lahan untuk perumahan 10 %, fasilitas kota 2 %, sawah / tegalan 12 %, hutan 24 %, penggunaan lain - lain 52 %. Dengan demikian hutan pada tahun tersebut sejumlah 24% dari 177.238 Ha, diperkirakan sekitar 25.000 Ha. Dari catatan lain di media cetak dijelaskan bahwa berdasarkan neraca kehutanan Provinsi Riau luas areal kawasan hutan di Kota Dumai mencapai 195.320,27 Ha. Kawasan hutan itu terbagi bagi lagi seperti hutan kawasan produksi yang saat ini mencapai 145.000 Ha, hutan lindung sekitar 11.000 Ha dan jenis lainnya.³

2. Kualitas udara

² Sumber <http://energitoday.com/2013/03/23/hutan-konservasi-dumai-semakin-berkurang-akibat-perambahan/>, diakses 8 Agustus 2013

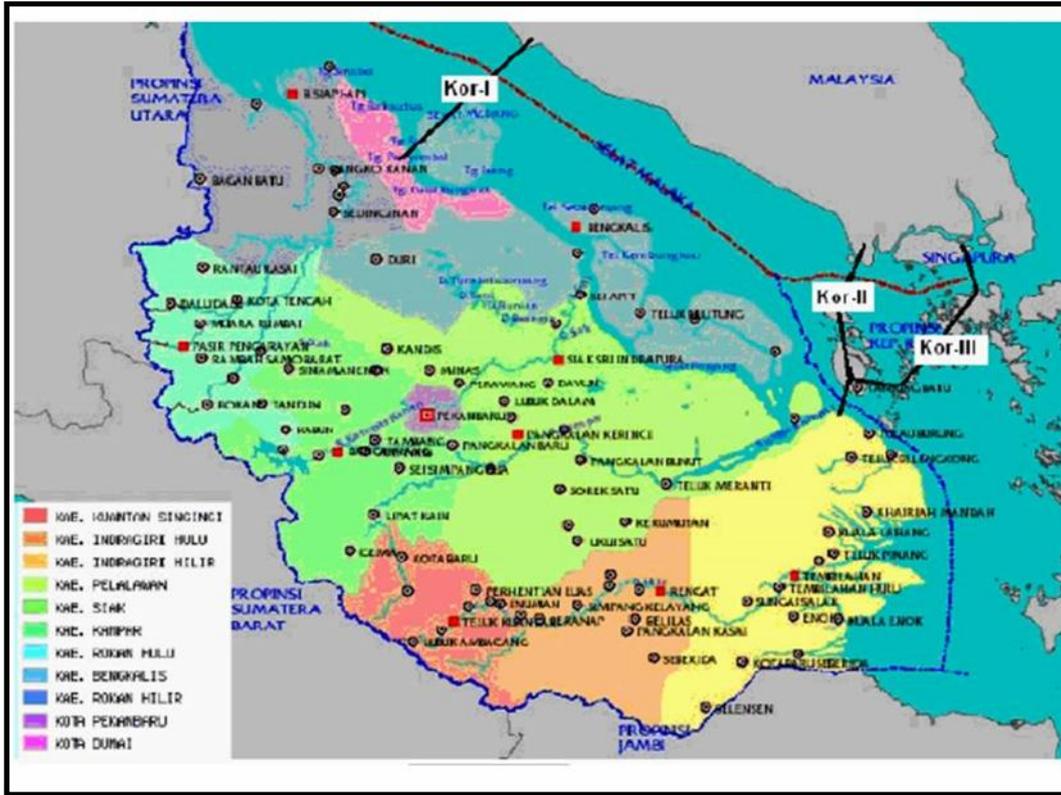
³ Sumber: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2013/04/01/73.325-hektare-hutan-dumai-dilepaskan>, diakses 8 Agustus 2013

Rencana Kawasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) masih belum menghasilkan arahan penetapan kawasan yang jelas, dikarenakan banyaknya lahan terbangun di kawasan RTH yang belum ditindak sesuai peraturan terkait, sehingga rencana pola ruang harus mencakup batasan yang jelas untuk peruntukan kawasan RTH yang sesuai dengan fungsinya. Dengan tidak sesuainya proporsi RTH akan mempengaruhi kualitas udara. Apalagi ternyata kondisi Hutan Wisata Dumai, tidak secepat seperti yang tampak dari luar yakni dari Jalan Soekarno Hatta. Pada bagian dalam hutan tersebut sudah banyak yang ditebang. Catatan Dinas Pertanian Perkebunan dan Kehutanan (Distanbunhut) Kota Dumai, Hutan Wisata Dumai awalnya memiliki luas 4.712,5 Ha. Tapi saat ini hanya tinggal 1.700 Ha saja.

Diketahui ada sebanyak 3.000 Ha areal dalam Hutan Wisata Dumai tersebut yang dirusak, sehingga pada bagian dalamnya sudah tak secepat dan hijau seperti yang tampak dari luar. Tujuan perambahan kebanyakan adalah untuk diambil kayunya. Ini merupakan kecenderungan yang memprihatinkan, apalagi dari segi luas. Hutan Wisata yang merupakan hutan kota di Dumai tersebut merupakan lokasi yang kalau dibandingkan dengan hutan wisata atau hutan kota daerah lain, Hutan Wisata yang ada di Dumai ini merupakan salah satu dari yang paling luas. Namun luasnya makin berkurang saja⁴

3. Pembangunan Jembatan Dumai–Melaka untuk menunjang aktifitas perdagangan dan jasa antar negara. Gagasan jembatan ini muncul pada analisis draft RTRW kota Dumai 2012–2032. Beberapa sumber lain juga mengemukakan gagasan tersebut, bahkan dalam pre-feasibility study di Kementerian Pekerjaan Umum (Pre-Feasibility Study of Malacca Strait Crossing, M.Sjahdanulirwan, Tatang Dahlan, Pulitbang Jalan dan Jembatan, 2010)

⁴ Sumber: <http://pekanbaru.tribunnews.com/2011/10/19/tiga-ribu-hektare-hutan-wisata-kota-dumai-rusak>, diakses 8 Agustus 2013



Gambar 3.1
 Rencana Pembangunan Jembatan Dumai–Melaka
 Source: <http://www1.pu.go.id/uploads/services/infopublik20130214142641.pdf>, diakses 10 Agustus 2013

Untuk jembatan pada Koridor I yang melalui Kota Dumai (Pulau Rupat) digambarkan seperti ilustrasi berikut ini:

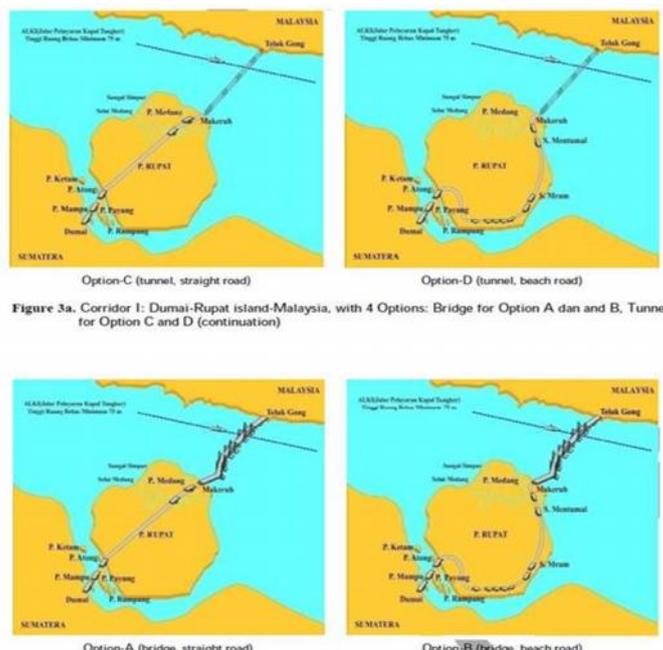


Figure 3a. Corridor I: Dumai-Rupat island-Malaysia, with 4 Options: Bridge for Option A dan B, Tunnel for Option C and D (continuation)

Figure 3a. Corridor I: Dumai-Rupat island-Malaysia, with 4 Options: Bridge for Option A dan B, Tunnel for Option C and D.

Gambar 3.2
 Rencana Pembangunan Jembatan Koridor I (Kota Dumai – Pulau Rupat)

Secara teknis, apalagi dikaitkan dengan teknologi kini dan masa depan, gagasan ini bukanlah pemikiran yang mengada-ada. Misalnya dikaitkan dengan rencana pembangunan jembatan di Selat Sunda, dapat dinilai sebagai berikut :

- Secara kasar, jarak terdekat Dumai (lebih tepatnya pulau Rupat) ke bagian terluar dari Melaka, Malaysia adalah sekitar 39 kilometer, sementara Selat Sunda mempunyai jarak/lebar sekitar 28 Km. Kalau keduanya diperbandingkan maka secara teknis teknologis bukanlah suatu perbedaan yang "musykil". Artinya dengan perbincangan yang ramai tentang pembangunan jembatan selat Sunda dengan lebar 28 Km, bahkan akan segera dibangun dan menjadi salah satu agenda kuat dalam MP3EI, maka untuk memperbincangkan "Dumai – Melaka Bridge" sebagai agenda pembangunan dalam kurun RPJP -- yakni 20 tahun mendatang sangatlah proporsional.
- Secara umum dipahami bahwa Selat Malaka lebih dangkal dibandingkan selat Sunda. Kalau hal ini menjadi gagasan yang sah maka perlu ditindaklanjuti dengan berbagai studi dan penelitian yang mendalam, termasuk pertimbangan opsi lainnya. Sebagai pembanding dapat pula jembatan tersebut dibangun tidak lewat Dumai (Pekanbaru-Karimun-Batam-Singapura)



Gambar 3.3
Rencana Pembangunan Jembatan Spektakuler Dumai - Malaka

Dengan terbangunnya jembatan spektakuler tersebut, maka transportasi penumpang dan terutama kargo tidak perlu menggunakan cara multimoda melainkan dengan cara satu moda saja yakni:

transportasi darat. Dengan cara ini bisa terhubung ke Asia Tenggara, Thailand kemudian menuju China (dengan jumlah penduduk terbesar dunia dan mulai meningkat purchasing powernya saat ini dan diperkirakan akan membaik di waktu mendatang dengan kebijakan buka tirainya)

4. Hampir setiap tahun negara tetangga selalu mengeluhkan kiriman asap yang berasal dari hutan yang dibakar di pulau Sumatera, yang sangat mungkin bisa berasal dari kota Dumai waktu-waktu mendatang. Potensi bencana yang diperkirakan terjadi setiap tahunnya di Kota Dumai adalah kebakaran hutan dan lahan. Kebakaran hutan dan lahan ini selalu terjadi pada saat datangnya musim kemarau dan pada saat yang bersamaan pada umumnya masyarakat memulai membuka lahan pertanian/perkebunan.

Pada bulan Juni 2013 kabut asap masih sering menyelimuti Kota Dumai diakibatkan oleh kebakaran lahan gambut yang terjadi di Kota Dumai. Hal yang paling dicemaskan akibat kebakaran lahan gambut ini adalah meluasnya kawasan yang terbakar hingga ke perkebunan dan pemukiman. Kobaran api menjalar dari perbatasan hutan dan di setiap musim kemarau selalu ada kebakaran hutan.⁵

Kondisi kebakaran lahan yang menyebabkan asap tebal di Kota Dumai, Riau, sering susah diatasi. Di Kota Dumai dan sekitarnya yang sering diselimuti asap tebal, terdapat dua titik api dan diperlukan upaya keras memadamkannya⁶

B. Isu Nasional

Isu strategis di wilayah Kota Dumai yang berkenaan dengan hal penting tingkat nasional antara lain:

1. Konversi dan alih fungsi lahan pertanian dan perkebunan (ketahanan pangan nasional)
2. Sering terjadi alih fungsi lahan pertanian pangan ke perkebunan kelapa sawit dan tambang
3. Pengembangan pembangunan Pelabuhan penunjang kegiatan transportasi laut

Kota Dumai direncanakan sebagai salah satu Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Indonesia yang akan berhubungan langsung dengan dunia perdagangan internasional, sedangkan prasarana dan sarana pendukungnya masih belum memadai baik kualitas maupun kuantitas

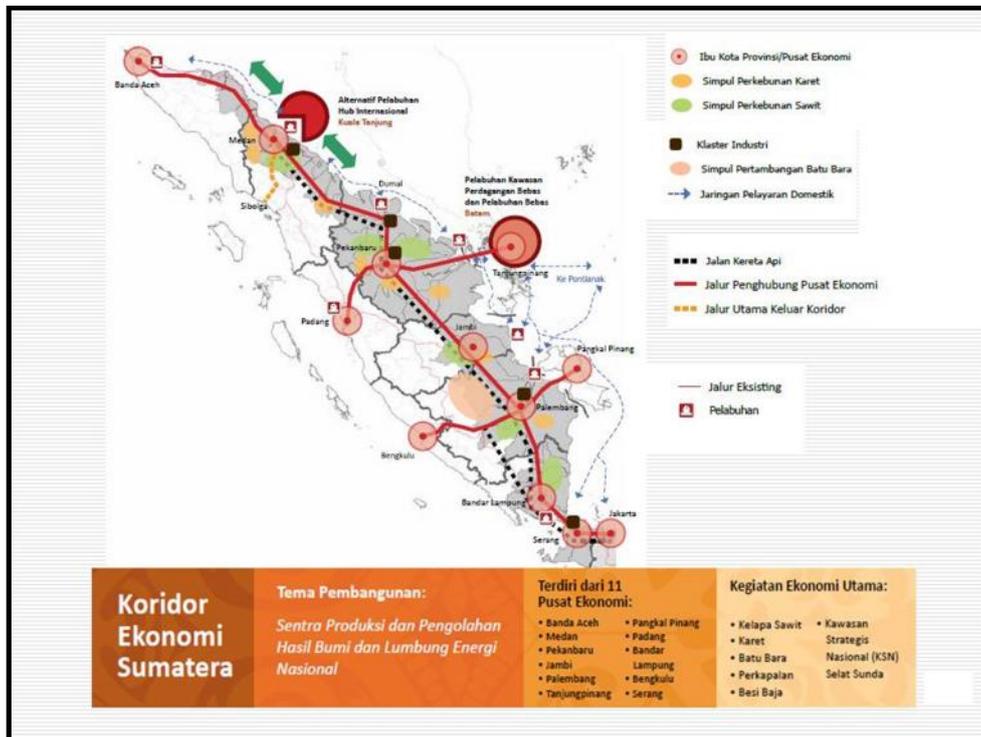
Sebagai pusat kegiatan strategis nasional kota Dumai dipersiapkan untuk mampu menjadi pusat layanan lalu lintas barang dan penumpang yang berskala nasional, dan juga berskala internasional. Sebagai pusat kegiatan nasional kota Dumai memiliki fungsi dan peran sebagai pintu gerbang perlintasan komoditas-komoditas yang dihasilkan dari wilayah pedalamannya, baik dalam bentuk komoditas berbentuk bahan mentah, bahan setengah jadi dan produk-produk industri olahan jadi, di samping gerbang perlintasan kegiatan layanan jasa dan perdagangan dari dan ke luar negeri. Dalam dokumen

⁵ sumber <http://ampuh.org/2013/06/lahan-gambut-di-kota-dumai-terbakar/> diakses 8 Agustus 2013

⁶ Sumber: <http://news.detik.com/read/2013/06/23/topnews>, diakses 8 Agustus 2013

Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Dumai tahun 2014-2034, disebutkan bahwa kawasan peruntukan pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai Kota dan Kecamatan Dumai Timur, sedangkan kawasan peruntukan pengembangan pelabuhan terletak di Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Medang Kampai. Kawasan peruntukan pengembangan pelabuhan terpadu direncanakan terletak di Kecamatan Dumai Barat. Untuk kepentingan dukungan terhadap perwujudan pusat kegiatan nasional tersebut, diperlukan infrastruktur pelabuhan laut yang dilengkapi dengan kawasan pergudangan yang mendukung fungsi bongkar muat barang, baik yang datang maupun yang keluar dari kota Dumai. Selain itu juga diperlukan kawasan yang memiliki kelengkapan sebagai pusat bursa perdagangan yang mampu menjadi kawasan layanan bagi kegiatan perekonomian pada skala internasional.

Hal ini diperkuat dalam Master Plan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia (MP3EI) 2011-2025, Kota Dumai diarahkan sebagai pelabuhan barang bagi daratan daerah belakangnya (hinterland) yang terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera yang menghubungkan berbagai Pusat Ekonomi Nasional.

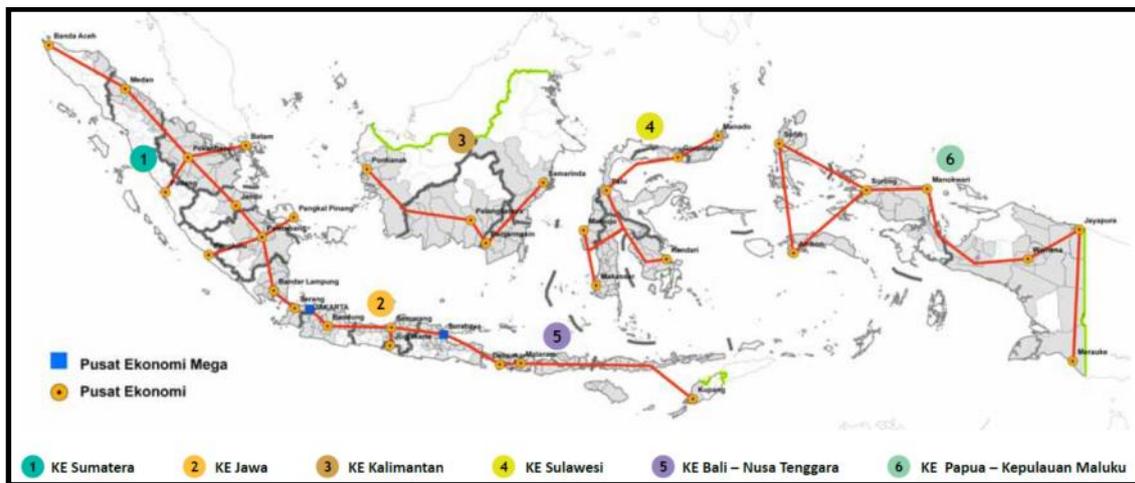


Gambar 3.4
Koridor Ekonomi Sumatera dalam MP3EI

Kota Dumai diberi peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut hinterland lainnya, termasuk Pekanbaru. Kota Dumai diberi peran sebagai pintu gerbang dari laut (pelabuhan utama) bagi salah satu kluster industri dan simpul perkebunan karet serta perkebunan sawit berikut daerah belakang (hinterland) lainnya, termasuk Pekanbaru. Kawasan-kawasan pelabuhan di Kota Dumai merupakan kawasan Pelabuhan yang terintegrasi, baik merupakan Pelabuhan penumpang umum (Domestik maupun luar

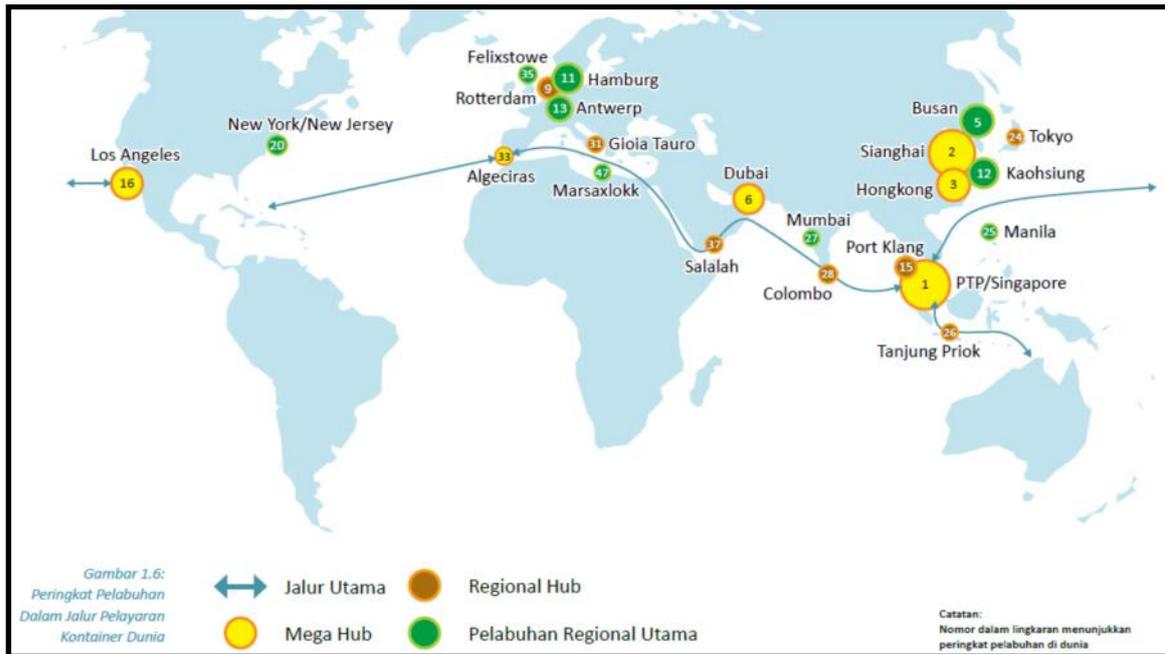
negeri), Pelabuhan bongkar muat komoditas perkebunan (CPO), Pelabuhan bongkar muat bahan bakar minyak (PT. Pertamina dan PT. Chevron Pasific Indonesia) dan Pelabuhan khusus bongkar muat untuk kepentingan perdagangan dan jasa dalam negeri maupun luar negeri.

Disamping itu juga terhubung dengan jalur utama Koridor Sumatera dari ujung dari ujung paling utara ke selatan kemudian menyambung ke koridor Jawa. Kota Dumai menjadi mudah terhubung dengan berbagai kota besar pusat kegiatan ekonomi dan perdagangan mulai dari Banda Aceh – Medan– Pekanbaru – (Padang, Tanjung Batam)– Jambi – Palembang –Bandar Lampung – (mega proyek jembatan Selat Sunda)–Banten–Jakarta–Bandung–Semarang–Yogyakarta–Surabaya – terus ke Indonesia Timur.



Gambar 3.5
Koridor Utama Dalam MP3EI

Kota Dumai sebagai pintu gerbang pelabuhan di Riau, juga mempunyai aksesibilitas laut yang sangat bagus karena terhubung dengan jalur pelayaran nasional. Bahkan kedekatan dengan Port Klang di Malaysia dan Pelabuhan nomor satu dunia, Singapura, memberi aksesibilitas laut yang mudah bagi Dumai dikaitkan dengan jalur utama internasional yang menghubungkan berbagai pelabuhan utama dunia seperti terlihat dalam gambar berikut ini.



Gambar 3.6
Pelabuhan Dalam Jalur Pelayaran Kontainer Dunia

4. Good Governance

Isu yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintah daerah atas dasar prinsip-prinsip good governance ditandai dengan:

- Masih lemahnya manajemen dan kapasitas kelembagaan;
- Belum maksimalnya sinergitas pola hubungan kerja antar instansi;
- Masih adanya struktur organisasi yang belum efektif dan efisien;
- Masih rendahnya kualitas kebijakan publik;
- Belum terwujudnya pelayanan prima kepada masyarakat, serta
- Belum optimalnya kerja sama antar lembaga daerah.

C. Isu Regional/ Propinsi/ Lokal

Isu strategis di wilayah Kota Dumai yang berkenaan dengan hal penting tingkat regional/ propinsi/ lokal antara lain adalah:

1. Kualitas dan Cadangan Air Baku

Pada tahun 2020 diperkirakan Kota Dumai akan mengalami kekurangan ketersediaan air bersih. Pada saat ini sumber air bersih Kota Dumai berasal dari air tanah dangkal maupun air tanah dalam yang kondisinya kurang baik (payau). Satu-satunya sumber air bersih di utara Kota Dumai juga dipakai oleh PT. Pertamina.

Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai dan Sungai Sembilan saat ini belum mendapatkan pelayanan air bersih. Perumahan-Perumahan baru akan dibangun di pusat-pusat kawasan pertumbuhan baru yaitu di kawasan industri Lubuk Gaung, Pelintung dan Bukit Kapur. Dengan melihat kondisi tersebut,

pengembangan jaringan prasarana air bersih perlu melibatkan pihak-pihak swasta, mengingat Pertamina dan Chevron/Caltex memiliki jaringan distribusi air bersih tersendiri.

Berdasarkan parameter kelayakan air minum, air yang berasal dari sungai Masjid di Kota Dumai tidak layak dikonsumsi oleh masyarakat dan jika tetap diolah sebagai air minum membutuhkan biaya yang mahal dalam operasional dan maintenance-nya. Berdasarkan hasil pengamatan, kondisi air Sungai Rokan secara kualitas jauh lebih baik dari Sungai Masjid, hal ini dinilai dari warna yang agak jernih, tidak berbau, tidak berasa dan PH antara 6-6,5. (sumber RTRW Kota Dumai, draft laporan)

Walaupun Kota Dumai tidak memiliki mata air secara khusus tetapi terdapat pada setiap alur-alur sungai yang kemudian membentuk sungai besar. Pengelolaan mata air ini terutama diarahkan untuk bagian hulu dari alur-alur sungai tersebut yang akan sangat berpengaruh untuk bagian hilir dimanapun bagian ini terdapat pemukiman yang memanfaatkan sungai tersebut. Upaya yang bisa dilakukan untuk pengelolaan kawasan sekitar mata air adalah menghentikan pemberian ijin investasi industri yang berada dikawasan mata air dan hulu-hulu sungai yang bertujuan untuk menurunkan pencemaran sungai dari sektor industri dan rumah tangga. Mata air di wilayah Kota Dumai berada pada hulu-hulu sungainya yang berjumlah 60 (enam puluh) sungai dengan 9 (sembilan) buah sungai besar.

Tabel 3.10
Sungai yang Mengalir di Wilayah Kota Dumai

Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Lebar Sungai (m)
Sungai Bunian	Sungai Sembilan	5	5
Sungai Sepi	Sungai Sembilan	2	5
Sungai Prapat	Sungai Sembilan	11	5
Sungai Parit	Sungai Sembilan	1	5
Sungai Bakau Tua	Sungai Sembilan	1	5
Sungai Tiram	Sungai Sembilan	7	5
Sungai Teluk Dalam	Sungai Sembilan	19	25
Sungai Bancin	Sungai Sembilan	1	5
Sungai Saliyo	Sungai Sembilan	3	5
Sungai Tengah Kecil	Sungai Sembilan	3	5
Sungai Tengah Besar	Sungai Sembilan	7	5
Sungai Tawar Besar	Sungai Sembilan	5	5
Sungai Tawar Kecil	Sungai Sembilan	3	5
Sungai Teritip	Sungai Sembilan	2	5
Sungai Senepis	Sungai Sembilan	14	25
Sungai Tianjung	Sungai Sembilan	2	5
Sungai Sentau Hulu	Sungai Sembilan	9	5
Sungai Geniot	Sungai Sembilan	7	5
Sungai Buluhala	Sungai Sembilan	30	25
Sungai Teras	Sungai Sembilan	15	5
Sungai Sembilan	Sungai Sembilan	15	5
Sungai Mampu	Sungai Sembilan	7	5
Sungai Nerbit	Sungai Sembilan		
Sungai Mesjid	Dumai Barat	28	25
Sungai Tambuan	Sungai Sembilan	5	5
Sungai Dumai	Dumai Barat	18	5
Sungai Dumai	Dumai Timur	13	5
Sungai Kembeli Besar	Medang Kampai	15	5
Sungai Pelintung	Medang Kampai	18	5
Sungai Kapalabiruang	Medang Kampai	2	5
Sungai Selingsing	Medang Kampai	3	5
Alur Sungai Batu Teritip	Sungai Sembilan	4,07	5

Nama Sungai	Kecamatan	Panjang Sungai (Km)	Lebar Sungai (m)
Alur Sungai Basilam	Sungai Sembilan	0,95	5
Alur Sungai Bangsal Aceh Satu	Dumai Barat	1,71	5
Alur Sungai Bangsal Aceh Dua	Dumai Barat	0,97	5
Alur Sungai Bangsal Aceh Tiga	Dumai Timur	0,4	5
Alur Sungai Bangsal Aceh Empat	Dumai Barat	0,47	5
Alur Sungai Bangsal Aceh Lima	Dumai Timur	0,40	5
Alur Sungai Pematang Hibul	Dumai Timur	1,85	5
Alur Sungai Simpang Cempedak	Dumai Timur	1,90	5
Alur Sungai Batang Melawan	Dumai Timur	1,88	5
Alur Sungai Parit Sadak	Dumai Barat	3,27	5
Alur Sungai Pasar Batu Bintang	Dumai Timur	1,82	5
Alur Sungai Parit Purnama	Dumai Timur	0,80	5
Alur Sungai Parit Kelakap Tujuh	Dumai Timur	3,10	5
Alur Sungai Pangkalan Sesai Satu	Dumai Timur	0,76	5
Alur Sungai Parit Penghulu	Dumai Timur	4,17	5
Sungai Dumai	Dumai Timur	10,75	5
Alur Sungai Parit Buluh Kasap	Dumai Timur	2,50	5
Alur Sungai Parit Tanjung Palas	Dumai Timur	0,67	5
Alur Sungai Parit Panam Dua	Dumai Timur	2,50	5
Alur Sungai Parit Panam Satu	Dumai Timur	2,52	5
Alur Sungai Parit Bungkok Satu	Dumai Timur	1,55	5
Alur Sungai Parit Bungkok Dua	Dumai Timur	1,50	5
Alur Sungai Mundam Satu	Dumai Timur	1,64	5
Alur Sungai Mundam Dua	Dumai Timur	0,64	5
Alur Pulai Bungkok Satu	Medang Kampai	0,98	5
Alur Sungai Pulai Bungkok Dua	Medang Kampai	1,05	5

Sumber: Laporan Akhir Draft RTRW Kota Dumai 2012-2032

Berikut adalah prediksi kebutuhan air bersih di Kota Dumai, baik kebutuhan air domestik maupun non domestik, kebocoran penggunaan air, serta kebutuhan air total di Kota Dumai pada tahun 2011 hingga tahun 2025.

Tabel 3.11
Kebutuhan Air Domestik Kota Dumai Tahun 2011 – 2025

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (liter/ orang/ hari)			
		2011	2015	2020	2025
1	Bukit Kapur	5.881.200	6.629.631	7.700.494	8.944.331
2	Medang Kampai	1.576.950	1.780.392	2.071.990	2.411.347
3	Sungai Sembilan	4.246.650	4.794.509	5.579.768	6.493.640
4	Dumai Barat	4.523.550	4.705.360	4.942.933	5.192.501
5	Dumai Selatan	6.592.950	6.822.690	7.121.155	7.432.677
6	Dumai Timur	8.792.400	8.909.035	9.057.008	9.207.438
7	Dumai Kota	7.273.950	7.447.140	7.669.439	7.898.373
Kota Dumai		38.887.650	41.088.757	44.142.787	47.580.307

Sumber : Draft Raperda RTRW Kota Dumai 2012 - 2032

Tabel 3.12
Kebutuhan Air Non Domestik Kota Dumai Tahun 2011 – 2025

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (liter/ orang/ hari)			
		2011	2015	2020	2025
1	Bukit Kapur	882.180	994.445	1.155.074	1.341.650
2	Medang Kampai	236.543	267.059	310.798	361.702
3	Sungai Sembilan	636.998	719.176	836.965	974.046
4	Dumai Barat	678.533	705.804	741.440	778.875
5	Dumai Selatan	988.943	1.023.403	1.068.173	1.114.902

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (liter/ orang/ hari)			
		2011	2015	2020	2025
6	Dumai Timur	1.318.860	1.336.355	1.358.551	1.381.116
7	Dumai Kota	1.091.093	1.117.071	1.150.416	1.184.756
Kota Dumai		5.833.148	6.163.314	6.621.418	7.137.046

Sumber : Draft Raperda RTRW Kota Dumai 2012 - 2032

Tabel 3.13
Kebocoran Penggunaan Air Kota Dumai Tahun 2011 – 2025

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (liter/ orang/ hari)			
		2011	2015	2020	2025
1	Bukit Kapur	1.176.240	1.324.926	1.540.099	1.788.886
2	Medang Kampai	315.390	356.078	414.398	482.269
3	Sungai Sembilan	849.330	958.902	1.115.954	1.298.728
4	Dumai Barat	904.710	941.072	988.587	1.038.500
5	Dumai Selatan	1.318.590	1.364.538	1.424.231	1.486.535
6	Dumai Timur	1.758.480	1.781.807	1.811.402	1.841.488
7	Dumai Kota	1.454.790	1.489.428	1.533.888	1.579.675
Kota Dumai		7.777.530	8.217.751	8.828.557	9.516.061

Sumber : Draft Raperda RTRW Kota Dumai 2012 - 2032

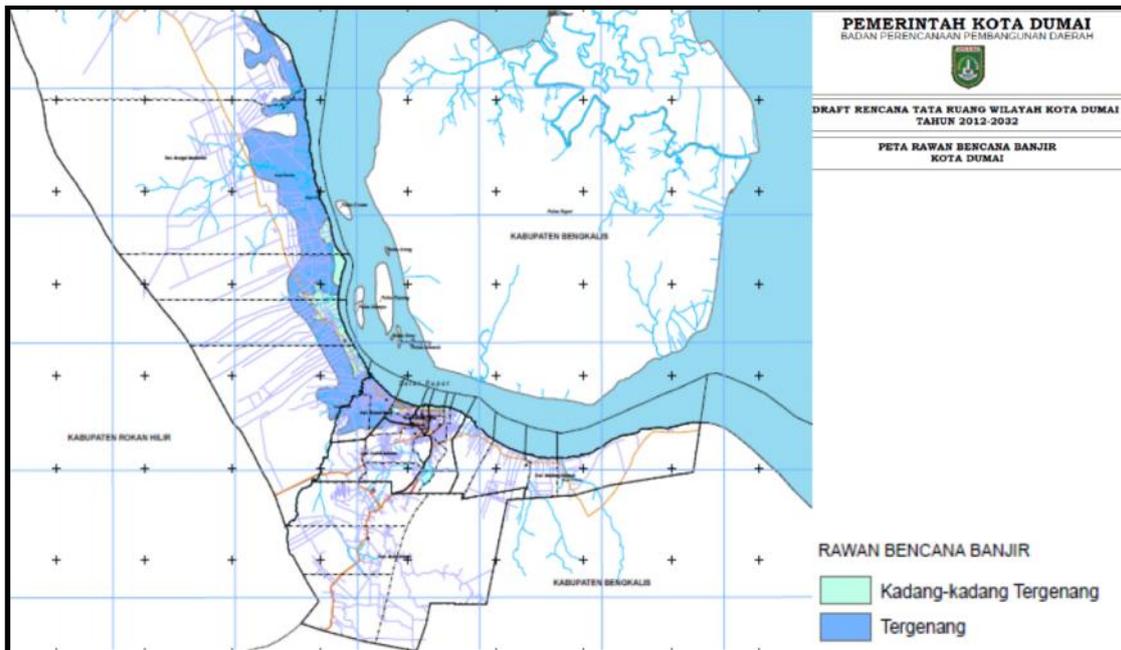
Tabel 3.14
Kebutuhan Air Total Kota Dumai Tahun 2011 – 2025

No.	Kecamatan	Kebutuhan Air (liter/ orang/ hari)			
		2011	2015	2020	2025
1	Bukit Kapur	6.763.380	7.624.076	8.855.568	10.285.980
2	Medang Kampai	1.813.493	2.047.450	2.382.788	2.773.049
3	Sungai Sembilan	4.883.648	5.513.685	6.416.733	7.467.686
4	Dumai Barat	5.202.083	5.411.164	5.684.373	5.971.376
5	Dumai Selatan	7.581.893	7.846.093	8.189.329	8.547.579
6	Dumai Timur	10.111.260	10.245.391	10.415.559	10.588.554
7	Dumai Kota	8.365.043	8.564.212	8.819.855	9.083.129
Kota Dumai		44.720.798	47.252.071	50.764.206	54.717.353

Sumber : Draft Raperda RTRW Kota Dumai 2012 – 2032

2. Potensi Banjir di Dataran Rendah

Ancaman limpasan air pasang laut terhadap wilayah permukiman penduduk. Berikut adalah gambar mengenai peta rawan bencana banjir di Kota Dumai.



Gambar 3.7
Peta Rawan Bencana Banjir Kota Dumai
Sumber : Draft Raperda RTRW Kota Dumai 2012 - 2032

Data dalam peta tata ruang Kota Dumai memperlihatkan bahwa hampir semua wilayah kota yang merupakan bibir pantai bagian utara merupakan daerah yang terkena banjir setiap tahun, sedangkan sebagian kecil saja yang bersifat kadang-kadang tergenangi. Walaupun luasan daerah yang tergenangi tidak besar persentasenya, namun secara kesejahteraan masyarakat merupakan hal yang sangat mengganggu sehingga harus direncanakan secara jangka panjang untuk mengatasinya.

3. Dampak Sosial

Tingginya arus migrasi dari berbagai wilayah hinterland dan provinsi tetangga sebagai konsekuensi wilayah bandar dan pusat kegiatan industri dan perdagangan. Belum optimal pengelolaan keragaman etnis sehingga menimbulkan kerentanan terhadap letupan konflik horisontal antar etnis dengan keragaman berjumlah 16 suku.

4. Ancaman Bencana Lokal

Beban psikologi sebagian besar masyarakat Dumai akibat ancaman ledakan pipa sepanjang 60 Km membelah wilayah kota dan kemungkinan terjadi ledakan pada unit refinery pengolahan BBM dengan radius 25 Km².

5. Peningkatan Taraf Hidup Masyarakat

- a. Pembangunan Kawasan Industri dan Pelabuhan Terpadu Lubuk Gaung dan Pelintung. Dan pengembangan industri lainnya.
- b. Masih rendahnya kualitas tenaga kerja di Kota Dumai saat ini, sedangkan untuk saat mendatang dibutuhkan tenaga kerja yang berkualitas tinggi untuk mampu mendukung perkembangan Kota Dumai yang sangat pesat yang salah satunya akan direncanakan sebagai pusat jasa dan perdagangan, sehingga mampu bersaing dengan daerah lainnya.

6. Pemerataan Pembangunan

- a. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN) yang berkaitan langsung dengan Malaysia, Thailand dan Singapura. Oleh karena itu, Kota Dumai menjadi tempat penyeberangan atau pengiriman tenaga kerja Indonesia (TKI) ke luar negeri. Sebagai kota yang berhubungan langsung dengan luar negeri, maka kapal-kapal luar negeri pada saatnya nanti akan hilir-mudik di perairan Kota Dumai.
- b. Kota Dumai ditetapkan sebagai Pusat Kegiatan Strategis Nasional (PKSN) sebagai pusat koleksi distribusi produksi antardaerah. Barang-barang produksi pertanian industri hulu harus dikirim dalam bentuk bahan mentah dan/atau terolah, sedangkan Kota Dumai masih belum mempunyai terminal khusus untuk menampungnya. Untuk mendukung hal tersebut direncanakan pengembangan terminal barang utama yang terdapat di Bukit Jun Kelurahan Bagan Besar, Kecamatan Bukit Kapur dan terminal barang pembantu yang terdapat di simpang rencana jalan lingkar yang menghubungkan jalan Arteri Primer Dumai Barat – Bukit Timah – Simpang Batang dengan jalan Kolektor Primer Dumai Barat – Sei. Sembilan – Bagan Siapiapi dan simpang rencana jalan lingkar yang menghubungkan jalan Arteri Primer Dumai Kota – Bukit Kapur – Mandau dengan jalan Kolektor Primer Dumai Timur – Medang Kampai – Bukit Batu.

7. Pada tahun 2020 diperkirakan kawasan tengah Kota Dumai akan menjadi kawasan padat sehingga dirasakan perlu mencari kawasan khusus untuk pengembangan industri karena salah satu potensi pengembangan ekonomi yang dimiliki Kota Dumai adalah di bidang industri. Selain penyediaan lahan juga perlu disediakan prasarana dan sarana pendukung lainnya untuk mempermudah proses produksi sampai distribusi hasil industri nantinya.
8. Rencana pembangunan Jalan Tol yang menghubungkan Pekanbaru – Duri – Dumai untuk mempercepat pergerakan penumpang dan barang dari dan ke Dumai melalui sistem transportasi darat bebas hambatan.
9. Jaringan transportasi darat Kota Dumai sudah tidak memadai. Jaringan jalan yang menghubungkan Kota Dumai dengan kota-kota lainnya di tingkat regional masih tergolong rendah dan perlu ditingkatkan lagi baik kualitas maupun fungsi jalannya, daya tampung dan daya dukungnya, yang nantinya akan sangat berguna dalam mendorong laju pertumbuhan ekonomi daerahnya sendiri serta pertumbuhan ekonomi daerah sekitarnya.
10. Jalur Kereta Api
Pada akhir-akhir ini volume kendaraan sudah dirasakan cukup padat pada jam-jam sibuk hingga mendekati batas jenuh daya tampung (kapasitas) jalan. Jaringan rel kereta api yang menghubungkan Rantau Parapat – Duri – Dumai dan rencana jaringan rel kereta api yang menghubungkan Pekanbaru – Duri – Dumai, serta dengan membangun sarana perkeretaapian yang meliputi stasiun kereta api penumpang yang terletak di Kecamatan Bukit Kapur, Medang Kampai, dan Sungai Sembilan; juga stasiun kereta api barang yang terletak di Kecamatan Medang Kampai dan Sungai Sembilan.
11. Terjadinya penumpukan barang di pelabuhan Kota Dumai karena kapal yang tersedia hanya kapal biasa yang tidak dapat mengangkut dalam jumlah besar. Oleh karena itu dibutuhkan kapal berukuran besar (RoRo) yang mampu membawa kontainer sekaligus juga menyesuaikan kapasitas dermaganya.
12. Bandara Pinang Kampai sebagai pusat penyebaran tersier yang merupakan satu-satunya bandara di Kota Dumai adalah milik PT. Pertamina yang tidak dapat dipakai umum sehingga dapat menghambat kelancaran dalam berhubungan dengan dunia internasional. Bandara internasional yang terdekat adalah Hang Nadim di Batam dan Sultan Syarif Kasim II di Pekanbaru.

13. Di dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi, pemaknaan dari fungsi dan peran Kota Dumai sebagai pusat kegiatan wilayah, merupakan pusat layanan yang berfungsi melayani pusat – pusat lokal yang berada di sekitarnya seperti kota Bagan Siapi-api, Siak Sri Indra Pura, kota Bengkalis. Pusat kegiatan wilayah ini berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi kegiatan lokal (PKL). Selain berfungsi sebagai pusat koleksi dan distribusi barang-barang, komoditas, dan jasa tersebut juga memiliki fungsi sebagai pusat untuk pemrosesan dan pemberian nilai tambah (value added) barang setengah jadi, barang jadi, dan barang dengan nilai tambah yang tinggi untuk diperdagangkan ke wilayah luar kota Dumai baik yang berada Indonesia maupun yang berada di luar negeri.

14. Sebagai pelabuhan utama TKI dan gerbang perdagangan bagi hinterlandnya dikaitkan dengan pelayaran perdagangan di Selat Malaka. Aspek pengamanan baik secara ketahanan nasional maupun dari aspek ekonomi dan sosial budaya perlu ditelaah secara mendalam.

Berdasarkan analisis terhadap permasalahan pembangunan dan tantangan pembangunan sebagaimana dijabarkan pada isu internasional, isu nasional (RPJPN), isu regional (RPJP Provinsi Riau), maka dapat disimpulkan bahwa terdapat 7 (tujuh) isu strategis pembangunan jangka panjang Kota Dumai, yaitu sebagai berikut:

1. Perubahan Alih Fungsi Lahan

Perubahan fungsi lahan merupakan salah satu penyebab terjadinya kerusakan lingkungan di wilayah Kota Dumai. Alih fungsi lahan hutan antara lain dipergunakan untuk kegiatan perkebunan, pertanian, industri perikanan, pemukiman, perladangan, dan perambahan hutan yang terjadi di bagian hulu, tengah, dan hilir DAS yang sebagian diantaranya tidak mengindahkan upaya konservasi. Perubahan fungsi lahan secara tidak terkendali selain berpotensi menyebabkan bencana banjir dan genangan di wilayah hilir oleh berkurangnya daerah resapan air dan perubahan tutupan lahan di daerah tangkapan air, juga menimbulkan kerusakan badan sungai secara fisik berupa longsor dan abrasi tebing dan tanggul sungai oleh aktifitas bongkar muat bahan dan produk industri; pendangkalan sungai yang menimbulkan dampak berkurangnya panjang alur sungai efektif yang dapat dilayani; pencemaran badan sungai oleh limbah industri dan domestik yang dibuang ke sungai; dan penurunan keanekaragaman hayati. Terjadinya alih fungsi lahan diindikasikan oleh semakin luasnya lahan terlantar yang tidak dikelola, sebagaimana diindikasikan oleh meningkatnya luas lahan yang tidak diusahakan.

2. Dinamika Demokrasi Lokal

Dengan berlangsungnya proses demokrasi melalui pemulihan umum peluang sebagai moment radikalisasi suatu kelompok kekuatan politik ataupun gabungan antara kelompok politik dengan kekuatan

ekonomi dan primordial, yang mengalami kekalahan dalam pemilu. Adanya kekuatan/kelompok masyarakat yang tidak puas pada hasil-hasil pembangunan dan berusaha untuk memprovokasi kelompok masyarakat sehingga memunculkan kondisi yang tidak harmonis dan saling mencurigai sesama masyarakat. Kondisi ini dapat mengancam investasi di Kota Dumai.

3. Kemiskinan Penduduk

Pada tahun 2005 tingkat kemiskinan Kota Dumai mencapai 8,64% menurun menjadi 6,45% tahun 2010. Tingkat kemiskinan ini lebih rendah dibandingkan dengan Provinsi Riau (9,48%) dan nasional (13,33%). Kondisi ini memberikan gambaran adanya peningkatan kesejahteraan penduduk Kota Dumai seiring dengan peningkatan laju pertumbuhan ekonomi dan pendapatan per kapita. Dengan kata lain disparitas pendapatan antar penduduk di Kota Dumai relatif rendah dan cenderung menurun selama 2000-2010.

4. Perbaikan Infastuktur Ekonomi

Terbatasnya infastuktur dan sarana dan prasarana yang kurang mendukung menjadi salah satu penyebab terganggunya perekonomian di Kota Dumai, salah satunya adalah kondisi jalan dan ketersediaan layanan listrik.

- Jalan

Perkembangan prasarana dan sarana Kota Dumai dalam meningkatkan kualitas dan kuantitas infastuktur yang bertujuan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat maupun mendorong perkembangan Kota Dumai yang dapat memperlancar arus lalu lintas hasil olahan kelapa sawit.

Kondisi jalan pada tahun 2012 yang mengalami kerusakan adalah jalan Provinsi sepanjang 11.152 m²sedangkan untuk jalan Kota mengalami kerusakan sepanjang 298.191,90 m²

Tabel 3.15
Inventasrisasi Kondisi Jalan Kota Dumai 2012

Status Jalan	Panjang Jalan	Kondisi Saat Ini		
		Baik	Sedang	Rusak
Jalan Kota	1.803.778,91	955.530,96	550.056,05	298.191,90
Jalan Propinsi	146.292,00	72.855,00	62.285,00	11.152,00
Jalan Nasional	61.225,00	38.725,00	22.500,00	

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2013

- Listrik

Potensi Investasi Daerah Kota Dumai yang menyebutkan bahwa pada tahun 2011 kebutuhan energi listrik di Kota Dumai untuk konsumsi sebesar 163.046.535 kWh dan memiliki beban puncak sebesar 6.954 kw, serta memiliki daya terpasang sebesar 78.770 KVA. Dengan melihat data yang telah tertulis sebelumnya maka terlihat bahwa seluruh wilayah Kota Dumai telah teraliri aliran listrik, dengan dominasi pengguna terbesar adalah rumah tangga, yakni sebesar 66,39%. Pengembangan sistem

jaringan prasarana energi kelistrikan meliputi pengembangan jaringan transmisi tenaga listrik yaitu Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) Bagan Besar di Kecamatan Bukit Kapur dengan kapasitas 10 MW, dan Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan kapasitas 2x150 MW di Kecamatan Medang Kampai.

5. Aksesibilitas Wilayah

Kota Dumai yang memiliki panjang sungai keseluruhan ± 222 Km yang bermuara di Pantai Timur, Kota Dumai memerlukan jaringan transportasi laut yang cukup memadai untuk memudahkan aksesibilitas antar kecamatan lebih mudah. Saat ini alat transportasi laut antar wilayah hanya dilayani oleh kapal pompong, sampan, dan perahu. Dengan semakin berkembangnya pertumbuhan wilayah diharapkan adanya pembangunan atau upaya dari SKPD terkait untuk melaksanakan pembangunan yang dapat mengurangi kesenjangan antar wilayah.

Aksesibilitas yang belum merata menyebabkan belum meratanya sistem pelayanan dasar gratis pada pelayanan dasar kesehatan, pendidikan, dan dokumen pencatatan sipil untuk seluruh keluarga.

6. Kapasitas Birokrasi

Meningkatnya kemampuan aparatur yang profesional, bertanggung jawab, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi serta menjunjung tinggi etika dan KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) dengan wadah struktur kelembagaan daerah yang memiliki ukuran yang tepat guna mewujudkan birokrasi yang efisien.

Personel aparatur pemerintah Kota Dumai yang terdiri dari 6.689 orang yang terdiri dari PNS sejumlah 4.396 orang (73,79%) dan TKS sejumlah 1.752 (26,21%). Jumlah aparatur yang berjumlah tersebut apabila dimanfaatkan menjadi asset yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat tetapi sebaliknya akan menjadi beban anggaran pemerintah Kota Dumai.

7. Kemandirian Ekonomi dan Pembangunan

Posisi strategis Kota Dumai yang berdekatan dengan Malaysia dan di Singapura menjadikan kawasan ini memiliki nilai tambah menjadikan Kota Dumai ditetapkan menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Selain terdapat perusahaan minyak, Kota Dumai juga mempunyai industri dalam jumlah besar, industri yang ada saat ini terdiri dari 2.049 industri skala kecil, 392 industri skala menengah dan 146 industri skala besar.

Disektor perdagangan, Dumai memainkan peranan penting sebagai pintu gerbang aktivitas ekspor-impor di Provinsi Riau. Tercatat bahwa nilai ekspor dari pelabuhan Dumai berjumlah US\$ 884.239.454 juta dan nilai impor sebanyak US\$ 56.496.458 juta. Angka tersebut menyatakan bahwa lebih dari separuh nilai ekspor-impor masuk melalui pelabuhan Dumai. Potensi yang besar di Kota Dumai

dapat menjadikan kemandirian pembangunan ekonomi dengan memanfaatkan dari sisi penerimaan yang bersumber dari pajak, baik pajak penghasilan, dan pajak pertambahan nilai. .

3.3. SKENARIO PENGEMBANGAN JANGKA PANJANG KOTA DUMAI

3.3.1. Pengantar

Skenario pengembangan wilayah Kota Dumai didasarkan pada asumsi masa kerja sektor pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, perdagangan, industri dan pariwisata yang diperkirakan akan mengalami fluktuasi dalam jangka waktu 30 tahun mendatang. Beberapa pemikiran pengembangan Kota Dumai paska fluktuatif antara lain pengembangan agro-bisnis dan agro-industri di luar kegiatan pertanian pada umumnya (perkebunan khususnya) di sekitar wilayah Provinsi Riau, memerlukan peningkatan pelayanan jasa dan potensi jaringan kerja lintas wilayah yang selama ini belum optimal dimanfaatkan.

Periode pertama merupakan periode inisiasi dimana komitmen pembangunan Kota Dumai telah dituangkan dalam RPJMD Kota Dumai 2006-2011. Sebagai langkah kelanjutan dalam periode pembekalan dasar dari tahun 2011-2015 adalah penyiapan sumberdaya manusia (SDM) dengan dukungan infrastruktur dimana pembangunan SDM menjadi prioritas pembangunan sebagai kerangka dasar Kota Dumai dalam memiliki pelaku-pelaku pembangunan andal yang ditujukan bagi generasi yang akan datang dan juga generasi muda saat ini.

Periode selanjutnya adalah periode pematangan. Dalam periode tahun 2021-2030, diharapkan masyarakat atau SDM yang telah dibina akan dapat mengembangkan kegiatan ekonomi, dimana produksi keluarga dapat menjadi produksi wilayah kemudian produksi menyeluruh.

Tahap berikutnya lagi dari pasca skenario jangka panjang adalah periode pemantapan (tahun 2031 dan ke depan lagi) dimana masyarakat dan wilayah Kota Dumai telah menjadi tegar dan maju dalam artian siap dalam melakukan pembaharuan menangkap visi wilayah pertanian, perkebunan, perikanan, kelautan, perdagangan, industri dan pariwisata yang andal untuk berupaya lebih maju lagi dengan memanfaatkan ruang darat, laut dan udara.

3.3.2. Dasar Pemikiran Teknis-Substantif

Dasar pemikiran secara Teknis-Substantif skenario jangka panjang sebagai berikut:

- (1) Tumpuan pada konteks 'pengembangan manusia' dari yang belum 'bisa' sampai dengan 'berproduksi untuk keluarga' ke arah 'berproduksi untuk wilayah'.
- (2) Bahwa seseorang (manusia) yang belum mengerti sesuatu perlu mendapat 'penalaran' dan ketrampilan' untuk bisa memahami dan mengerjakan sesuatu. Diharapkan orang tersebut akan memanfaatkan 'kemampuan mengerjakan sesuatu' kemudian dapat 'bekerja demi kehidupannya dan keluarga'.

Melalui upaya bekerja, orang memperoleh 'pendapatan' untuk kehidupan dan penghidupannya, dan karena itu bisa melakukan kegiatan 'ekonomi keluarga'. Apabila sejumlah besar penduduk suatu wilayah dapat melakukan kegiatan ekonomi, maka akan terbentuk kegiatan ekonomi wilayah. Artinya, wilayah ini akan bergiat dalam memproduksi secara nyata, kemudian berinteraksi antar wilayah dalam mencukupi

kebutuhan wilayah, dan menciptakan kehidupan ekonomi wilayah lebih luas (regional). Dalam kondisi interaktif antar wilayah, suatu wilayah (region) akan tangguh berproses dalam kehidupan dan penghidupannya. Lama-kelamaan proses kehidupan dan penghidupan berlangsung secara stabil dan tangguh (mampu menghadapi berbagai kemungkinan) sehingga wilayah ini akan menjadi maju dan terus berkembang secara kuantitas dan kualitas.

- (3) Keseluruhan konteks proses kehidupan dan penghidupan region ini akan berlangsung dalam kurun waktu panjang. Secara logika, perjalanan panjang (perkembangan) ini dapat digambarkan dalam tahap-tahap proses perkembangan. Seperti halnya manusia memiliki tahap proses perkembangan anak-dewasa-tua-lanjut usia, wilayah juga mengenal tahap proses perkembangan: awal-muda-kembang matang dan lanjut.

3.3.3. Penafsiran Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kota Dumai

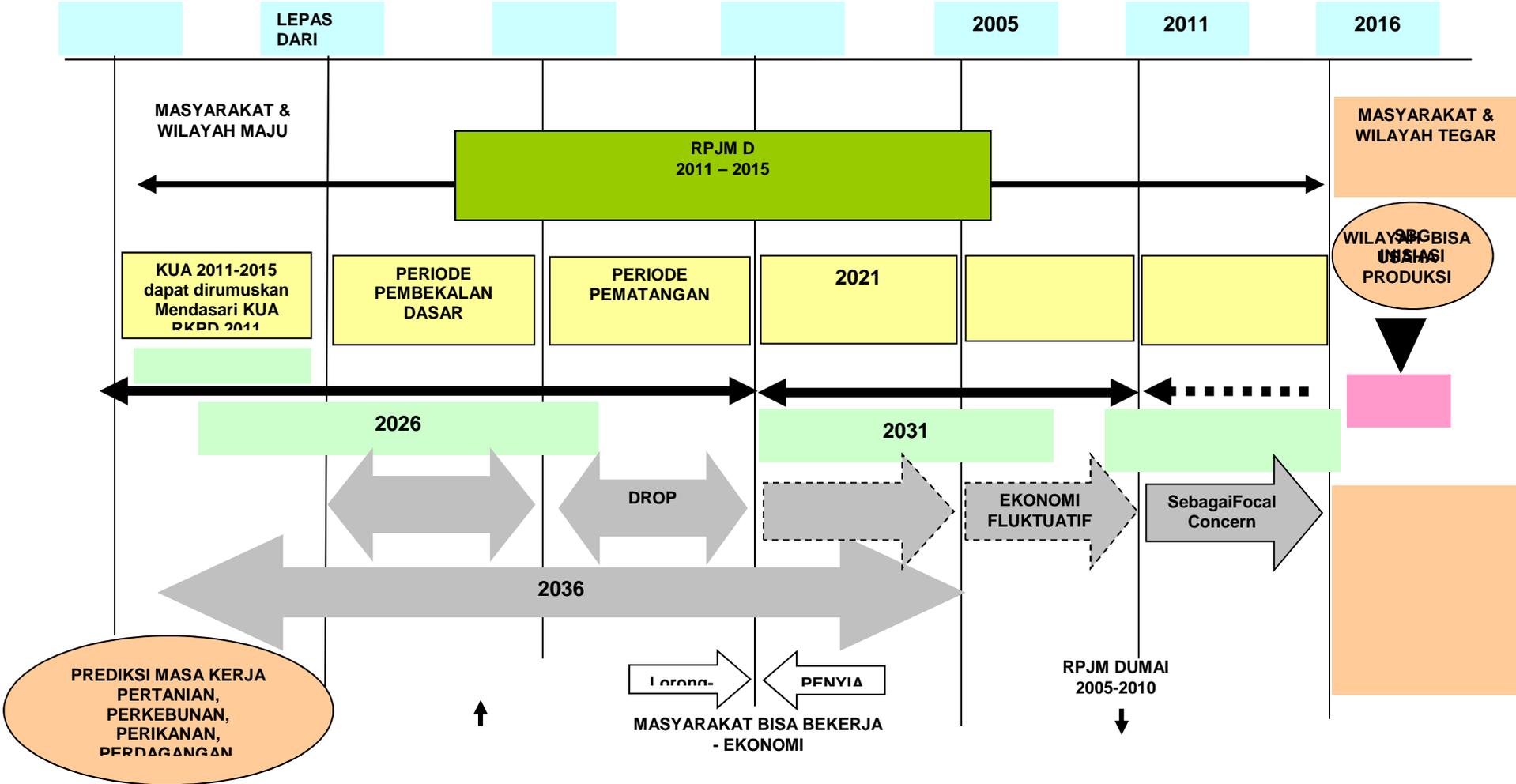
- (1) Sebagai 'Focal Concern' Pasca Fluktuatif (masa krisis), apabila kondisi ekonomi menurun (drop), tumpuan ekonomi Kota Dumai bisa menghilang (skenario dramatika), maka pemerintah Kota Dumai dan masyarakatnya harus berbuat sesuatu saat lepas dari krisis ekonomi (sebagai rangsangan kritis). Sebagai tumpuan harapan: mengembangkan kegiatan agrobisnis dan agroindustri kecil dan menengah, mengembangkan kegiatan jasa pelayanan perkebunan (yang harus direkayasa dengan meminta kepedulian industri perdagangan besar di dekatnya untuk peduli mengembangkan agroindustri kecil dan menengah sejak dini). Hal ini dipandang sebagai visi jangka panjang.
- (2) Situasi kondisi masyarakat wilayah Kota Dumai yang berkembang dari status bagian dari wilayah Kabupaten Bengkalis, menjadi status Kota yang bersifat maju otonom, dipandang sebagai wilayah awal dengan memiliki modal dasar pernyataan pembentukannya (dengan Naskah Akademiknya), disambung RPJMD Kota Dumai 2006-2011, sebagai upaya inisiasi membangun 'generasi muda' melalui kegiatan pembangunan yang telah dilakukan selama kecamatan-kecamatan dalam kabupaten induknya, dan sebagai Kota otonom 2000-2010. Secara normatif, harapan dari sifat posisi geografis wilayah Kota Dumai berada pada 'ujung Utara Provinsi Riau dan simpul jasa regional Kawasan Pantai Timur Sumatera' (secara realita), berbatasan dengan wilayah Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI)/Selat Malaka.
- (3) Dalam upaya memprediksi masa depan wilayah Kota Dumai jangka panjang dapat dilakukan dengan mengaplikasikan pemikiran 'pembelajaran anak manusia'. Pembelajaran ini merupakan proses 'pengembangan penalaran dan ketrampilannya'

melalui lorong-lorong pilihan jalan hidup untuk pematangan dan pendewasaan manusia. Masa 10 tahun (2011-2021) merupakan proses pembelajaran setingkat SD-SLTP, yaitu pembekalan dasar untuk memilih 'jurusan minat'. Asumsi masa inisiasi 5 tahun pertama, perlu ditambahkan upaya penyiapan SDM sebagai dasar pembangunan generasi muda. Fokus penyiapan SDM ini perlu dilengkapi dengan pemilikan infrastruktur sebagai persyaratan dimana prasarana diperlukan dalam upaya membangun wilayah.

- (4) Sebagai kelanjutan mengembangkan generasi muda menjadi generasi dewasa, masa 10 tahun ke depan diasumsikan sebagai masa belajar tingkat SLTA dan tingkat pendidikan tinggi sebagai upaya atau tahap pematangan diri. Dengan masyarakat yang sudah dipersiapkan SDM dan infrastrukturnya selama 2011-2015 (untuk masukan RPJMD Kota Dumai 2011-2015) pada periode 2016-2020 diharapkan 'Masyarakat Kota Dumai' dalam konteks Kota Dumai cerdas bisa bekerja dan mengembangkan ekonomi kotanya. Untuk hal tersebut, tentu dipersyaratkan bahwa sesudah memiliki kecerdasan tertentu, masyarakat harus sehat jasmani dan rohani, dapat mengantisipasi serta menghilangkan jeratan kemiskinan dengan memanfaatkan interaksi antar kelompok masyarakat, antar bagian wilayah kotadan jaringan kerjasama ekonomi wilayah secara nasional dan internasional (waskita).
- (5) Apabila masyarakatnya dan bagian wilayah kota sudah sama-sama melakukan kegiatan 'ekonomi wilayah' diharapkan Kota Dumai secara sinergis wilayahnya berusaha hidup dengan aktif berproduksi (menjalin interaksi internal dan eksternal) dalam memposisikan diri sebagai 'simpul jasa koleksi-distribusi' dalam konteks regional Provinsi Riau dan pantai Timur Sumatera, nasional dan ASEAN. Wilayah Kota Dumai diibaratkan sudah "berstatus sarjana" tentu memiliki identitas dan karakter tertentu pilihannya yaitu 'simpul yang proaktif' dalam konteks kehidupan wilayah lebih luas, dalam masa 2021-2025.
- (6) Setelah selesai dari pendidikan tingginya, perlu memasuki 'periode pematangan 2026-2030 dan periode pemantapan 2030-2035' dan seterusnya. Diasumsikan pada masa 2026-2030, masyarakat dan wilayah Kota Dumai dengan berbagai upaya melaksanakan pembangunan yang lebih berbobot kualitas manusia dan lingkungannya diharapkan dapat memasuki suasana "Kota Dumai Berbudidaya Mantap" dan 'Kota Dumai Bebas Kemiskinan' untuk bisa 'bertegar diri' (mampu mengantisipasi suasana ekonomi apapun) untuk tetap tegak berdiri menciptakan Kota Dumai mandiri (secara ekonomi/politis/sosial budaya/pemerintahan) menikmati sifat wilayah kota otonom dan desentralisasi nyata kehidupannya. Pada masa selanjutnya, 2029-2035 dan seterusnya dengan upaya pemantapan berbagai bidang dianggarkan masyarakat dan wilayah Kota Dumai menjadi maju secara keseluruhannya (kuantitatif dan kualitatif).

- (7) Dari skenario dramatika 2030-2035 dan seterusnya itu, kehidupan masyarakat dan wilayah Kota Dumaidigambarkan dalam'impian atau cita-cita' diatas. Cita-cita tersebut diharapkan dapat disinkronkan,seperti apakebijakan umum anggaran (KUA)dari arah bawah RPKD 2011 (tahun kedua dari RPJMD) dikembangkan jadi KUA RPJMD 2011-2015 dan diproyeksikan ke arah KUA RPJPD 2011-2030. Disisi lain, secara bersamaan juga harus dibawa mendarat rumusan KUA RPJMD 2011-2030 dan juga dibumikan untuk KUA RPJMD 2011-2015 (arah atas turun ke bawah). Upaya mempertemukan upaya bottom-up dan upaya top-down ini merupakan suatu 'seni menciptakan nasib anak bangsa' (meramalkan kehidupan anak bangsa pada satuan waktu dan satuan tempat tertentu).

Upaya menciptakan lorong-lorong waktu yang menawarkan berbagai pilihan untuk skenario pengembangan jangka panjang Kota Dumai dapat dicermati pada gambar 3.8 berikut:



Gambar 3.8
Skenario Pengembangan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

3.3.4. Posisi Strategis (yang Dinamis) Kota Dumai dalam Kerangka Skenario Pengembangan Jangka Panjang

- a. Dari Visi Walikota dan RPJMD Kota Dumai saat ini diharapkan dapat bertumpu pada SDM diungkapkan dalam posisi geografis wilayah Kota Dumai dalam konteks wilayah Provinsi Riau bagian utara, sebagai "Hinterland–dengan kegiatan pertanian-perkebunan, perikanan/kelautan, perdagangan, industri, pariwisata" – Pulau Sumatera sampai dengan Indonesia dan ASEAN. Hal ini dipakai TUJUAN pembangunan/VISI membangun Kota Dumaisaat ini dan jangka panjang (waskita).Posisi geografis saat ini memang sebagai hinterland jasa pelayanan pekebunan, perdagangan, industri, dan pariwisata yang dinamisdengan investasi besar.
- b. Untuk mencapai tujuan/visi ke depan tersebut diprediksikan ada lorong waktu yang perlu dipilih dilaluinya. Pemilihan itu atas dasar kekuatan konteks posisi hinterland dalam wilayah yang lebih luas yang disandang wilayah Kota Dumai sebagai jalur pendorong garis kritikaltercermin dalam 7 langkah sub-skenario logis-strategis. Sifat kritikal-logis-strategis karena merupakan penentu dan sesuailogika perkembangan wilayah dan strategis dalam menggapai cita-cita masa depan.
- c. Dapat digambarkan pada situasi saat ini posisi wilayah Kota Dumai sebagai titik awal dan sekaligus sebagai titik tujuan dengan kuantitas dan kualitas yang berbeda (cerminan generasi muda ke arah manusia dewasa/matang/lanjut). Yaitu: langkah (1) hinterland jasa regional Provinsi Riau/Pulau Sumatera/Indonesia/ASEAN, sebagai situasi kondisi awal dan situasi kondisi tujuan/akhir skenario. Untuk mencapai tujuan itu diperlukan persyaratan kerja sungguh-sungguh (diprogramkan dan direalisasikan perwujudannya) dengan 7 langkah berikut ini:
 - Langkah (1): hinterland jasa/pelayanan → memiliki syarat sebagai "a resource hinterland of activities' berbagai sektor yang mungkin, memerlukan simpul interaksi komoditas di Kuala Tanjung dan Batam serta Pekanbaru masa kini dan masa datang perlu penggarapan secara memadai.
 - Langkah (2): diperlukan pembentukan/penjalinan kerjasama lintas kota-kabupaten secara regional Provinsi Riau/Pulau Sumatera/Indonesia/ ASEAN, akan mempersyaratkan kelembagaan – mekanisme kerja – SDM – perangkat dan sumberdaya lain guna mengoperasikan 'kerjasama pembangunan' tersebut.
 - Langkah (3): tumpuan harapan di ruang darat dan udara "Agropolitan" sebagai arena kehidupan baru harus digarap. Aset darat, laut dan udara dengan keseluruhan isi dan konteks (Wawasan Bahari Kedaulatan Negara di Ruang Laut dan Udara, 2003) perlu diupayakan dan dikembangkan sebagai ladang penghidupanmelalui korporasi produksi darat, laut, dan udara. Banyak kemungkinan yang dapat dijadikan langkah

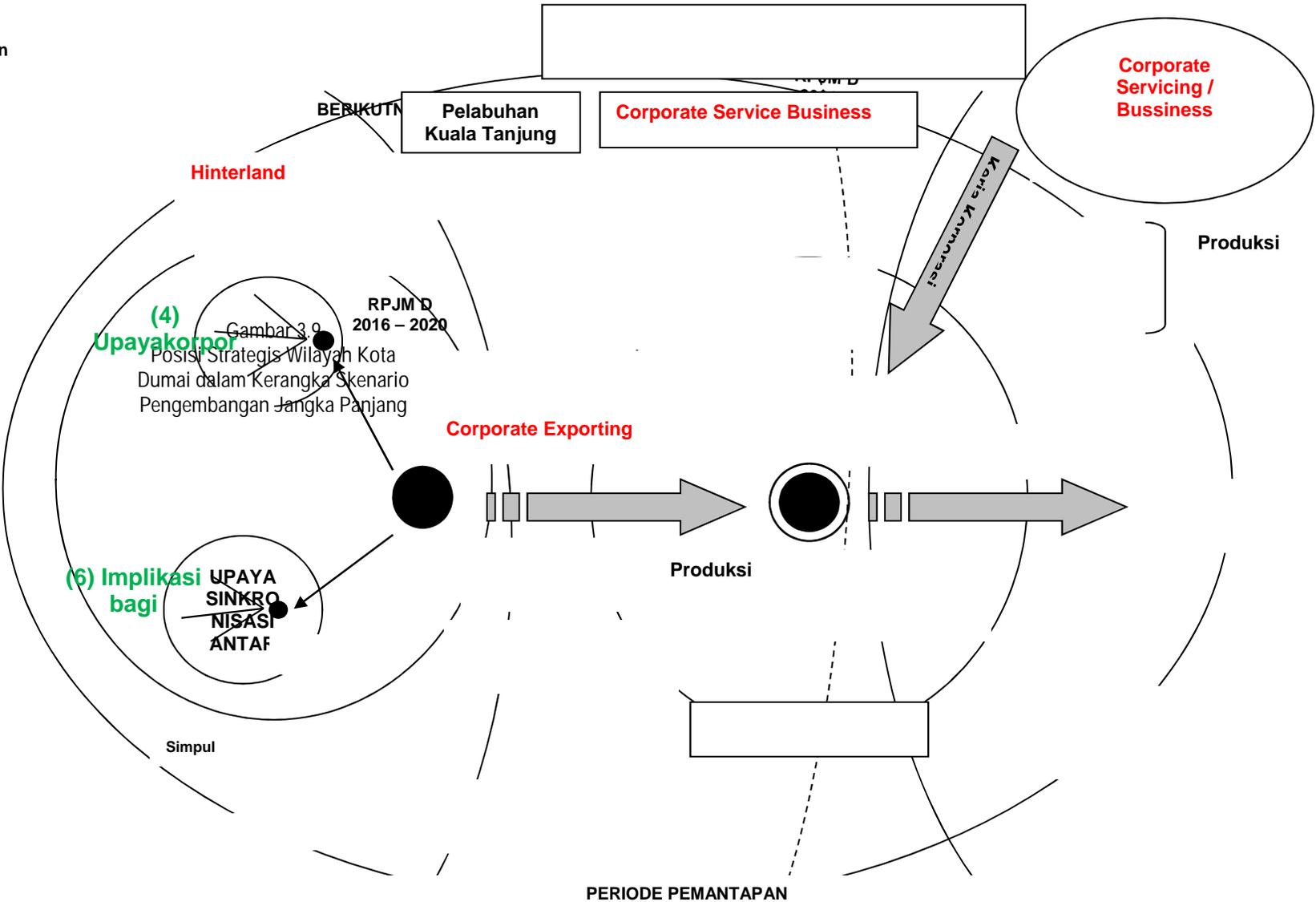
aksi sebagai penjelajah daratan, laut dan angkasa (dengan hasil ladang darat, laut, dan udara dimanapun). Hal itu perlu diproses di wilayah Kota Dumaisebagai simpul proses tertentu, dengan melalui hubungan simpul koleksi distribusi hasil 'agropolitan' (agribusiness and agriindustrial region) di SIMPUL INTI DUMAI dan kota-kota kecamatannya.

- Langkah (4): dengan semua hinterland dan simpul utara selatayang dapat dijangkau, menciptakan alur sistemhubungan hinterlanddan simpul, diperlukan menjalin upaya korporasi kegiatan Agribisnis – Agroindustri di wilayah hinterland dan simpul-simpul pemrosesan, tentu dengan pusat simpul di Kota Pekanbaru/Ibukota Kabupaten lainnya. Berbagai upaya dapat di-'kerja-korporasi'-kan dalam kegiatan pelayanan jasa umum (corporate servicing) produksi – perdagangan lintas wilayah (corporate business) dengan menciptakan secara berjenjang sub simpul – koleksi – distribusi. Akan dapat tercipta "multi aksi – sektor – lintas wilayah."
- Langkah (5): meski perlahan tapi pasti dari upaya interaksi di wilayah hinterland-simpul (sejauh upaya dan tebaran jangkauan) perlu diupayakan penjalinan kerjasama hulu – hilir – simpul – konsumen – pasar dengan berbagai kegiatan bisnis yang mungkin (misal: corporate agribusiness, corporate market networking) menciptakan jaringan kerja pemasaran: transportasi – depo transit/terminal agribisnis dan lain-lain sehingga selalu ada arus barang/jasa/manusia antara hinterland – simpul (hubungan desa-kota). Diharapkan di wilayah darat, laut, dan udara Kota Dumaidan Provinsi Riau keseluruhan dapat terciptakan jejaring dan pusat jaringan yang kompleks oleh inovasi/improvisasi masyarakat – wilayah Kota Dumaidan Provinsi Riau sebagai "agropolitan region".
- Langkah (6): Implikasi bagi masyarakat dan wilayah Kota Dumai secara internal akan terbiasa menjadi pelaku proaktif dalam tata laku ekonomi regional dengan dukungan budaya – infrastruktur dan sumberdaya-sumberdaya yang diupayakan berkembang (harapan meningkat kuantitas-kualitas). Dari generasi muda menjadi dewasa dan matang dalam berproduksi untuk keluarga-berproduksi untuk wilayah kota/kabupaten/provinsi dan wilayah lebih luas.
- Langkah (7): terwujudnya visi-misi Kota Dumai jangka panjang. Secara integratif-sinergis langkah-langkah sebelumnya yang selalu diupayakan meningkat kuantitas dan kualitas – diasumsikan akan menggapai cita-cita masa depan secara tertahap pula/berjenjang namun pasti, ke arah 'hinterland investasi/jasa regional" itu. Secara nyata diharapkan Kota Dumaisebagai Kawasan outlet wilayah betul-betul merupakan hinterland produksidistribusi barang/jasa/manusia dalam Konteks Regional Provinsi Riau/Pulau Sumatera bahkan nasional dan internasional, dengan pelayanan

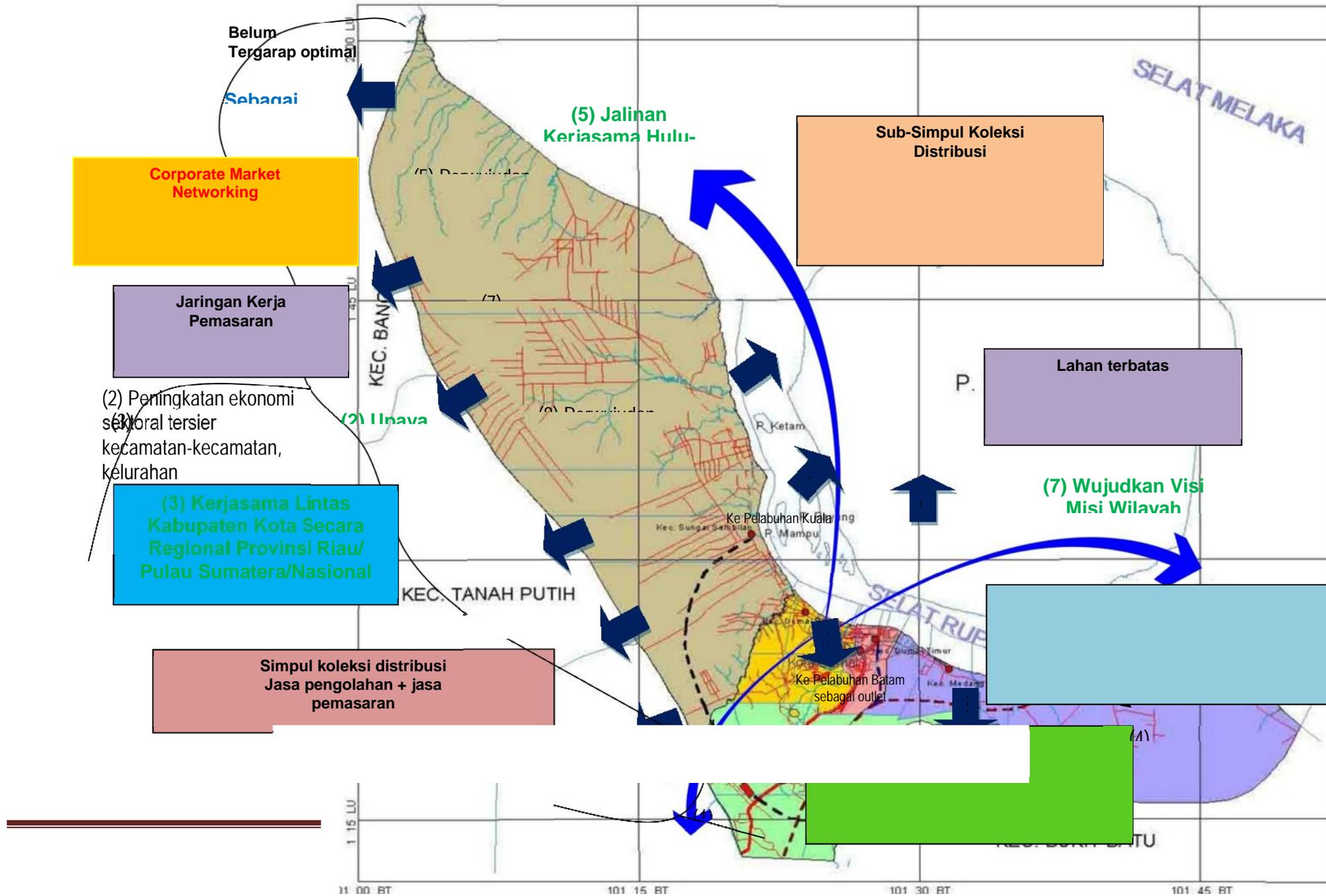
jasa pengolahan dan upaya corporate exporting yang memiliki jaringan kerja besar ekspor/impor dalam negeri dan luar negeri.

Ketujuh (7) langkah upaya pengembangan dari posisi hinterland jasa produksi pertanian umum/perdagangan/industri/pariwisata awal ke arah tercapainya posisi dinamis hinterland produksi – distribusi bisnis industrial di masa depan yang perlu dioperasionalkan secara sungguh-sungguh oleh semua pemangku kepentingan pembangunan (stakeholders) wilayah Kota Dumai, dapat dicermati pada gambar 3.9 berikut ini.

Aset:
-Sungai
-Perbukitan
Laut



Kemudian jabaran secara meruang – wilayah hubungan antara Kota Dumai dengan wilayah lebih luas, dapat diungkapkan urutan upaya pengembangan kegiatan ekonomi wilayah dalam konteks skenario jangka panjang – dicermati dalam gambar 3.10.



bab 4 VISI DAN MISI KOTA DUMAI

4.1. VISI KOTA DUMAI

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan jangka panjang 20 (dua puluh) tahun. Visi harus dapat menunjukkan gambaran masa depan yang ideal bagi masyarakat/daerah dan merupakan suatu pernyataan umum yang menjadi dasar/basis bagi semua elemen atau semua pelaku (stakeholders) dalam operasionalisasi perencanaan pembangunan daerah.

Visi menjelaskan arah atau suatu kondisi ideal dimasa depan yang ingin dicapai (clarity of direction) berdasarkan kondisi dan situasi yang terjadi saat ini yang menciptakan kesenjangan (gap) antara kondisi saat ini dan masa depan yang ingin dicapai. Visi bukan hanya mimpi atau serangkaian harapan, tetapi suatu komitmen dan upaya merancang dan mengelola perubahan untuk mencapai tujuan. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Visi daerah dituangkan dalam RPJPD, dirumuskan, dibahas dan disepakati secara bersama-sama oleh seluruh pemangku kepentingan pembangunan daerah secara partisipatif. Visi pembangunan jangka panjang daerah yang telah diterjemahkan dalam sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD menjadi acuan bagi (calon) kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam merumuskan visinya pada periode lima tahun berkenaan dan bagaimana RPJMD dikembangkan.

Berdasarkan kondisi serta aspek-aspek potensial yang berkembang selama ini serta mempertimbangkan tantangan yang akan dihadapi karena perkembangan nasional yang pesat maka sebagai rangkuman penggambaran Visi Kota Dumai di masa depan, dapat diajukan beberapa pendekatan.

- a. Dari segi ruang tampungan fisik wilayah kota:

TERWUJUDNYA KOTA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN
DAN INDUSTRI YANG KOKOH

- b. Dari segi masyarakatnya:

TERWUJUDNYA MASYARAKAT DUMAI YANG BERBUDAYA MELAYU

- c. Dari segi lingkungan hidup tempat tinggalnya:

TERWUJUDNYA LINGKUNGAN HIDUP KOTA DUMAI YANG HIJAU

Dengan demikian visi pembangunan Kota Dumai yang ingin dicapai pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH,
DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU
DUMAI MADANI YANG HIJAU

Tabel 4.1.
Perumusan Visi

No	Perwujudan Visi	Pokok-pokok Visi	Pernyataan Visi
1.	Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh	Kota Pelabuhan dan industri = Kota memiliki perkembangan kehidupan fungsi industri dan pelabuhan yang kemudian menjadi fungsi dominan kota, dengan kegiatan perdagangan dan jasa ikutannya	Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau
2.	Terwujudnya Masyarakat Dumai yang Berbudaya Melayu	Berbudaya Melayu = pemilikan nilai budaya Melayu yang tinggi sebagai jati diri masyarakat yang menjadi kekhasan kehidupan masyarakat yang bercorak agamis/religius Islami	
3.	Terwujudnya Dumai Madani dan Lingkungan Kota Dumai yang Hijau	Masyarakat Madani = masyarakat yang memiliki kehidupan sosial yang terorganisasikan dan bercirikan kesukarelaan, keswasembadaan, keswadayaan, dan kemandirian yang tinggi, serta keterikatan dengan norma-norma dan nilai-nilai hukum yang diikuti warganya. Lingkungan yang Hijau = lingkungan yang memiliki tatanan yang serba didominasi oleh suasana alam kehijauan, memiliki daya dukung dan daya tampung memenuhi persyaratan ramah lingkungan dan menjadikannya bersifat memenuhi standar pembangunan berkelanjutan	

Sumber: Hasil Analisis, 2013

Secara filosofi, visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

- Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
- Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan

nilai-nilai budayanya sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan telah meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

- Dumai yang madani adalah sebuah kondisi masyarakat Dumai yang memiliki kemandirian aktivitas warga masyarakatnya yang berkembang sesuai dengan potensi sosial, budaya, adat istiadat dan agama. Dalam mewujudkan kemandirian aktivitas tersebut didasarkan pada nilai-nilai keadilan, prinsip kesetaraan (persamaan), penegakan hukum, jaminan kesejahteraan, kebebasan, kemajemukan (pluralisme) dan perlindungan terhadap kaum minoritas.
- Dumai yang hijau merupakan perwujudan kondisi kehidupan yang ditandai oleh keseimbangan antara pemanfaatan, keberlanjutan, keberadaan serta kegunaan sumberdaya alam dan lingkungan hidup yang terjaga fungsi, daya dukung dan kenyamanan sebagai pendukung kualitas kehidupan masa kini dan masa depan.

4.2. MISI KOTA DUMAI

Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Misi juga dapat dipandang sebagai pilihan jalan (the chosen track) bagi pemerintahan daerah dalam menyediakan dan menyelenggarakan layanan bagi masyarakat dan aktivitas pembangunan pada umumnya bagi stakeholder pembangunan secara keseluruhan. Rumusan misi yang baik, membantu lebih jelas penggambaran visi yang ingin dicapai dan menguraikan upaya-upaya apa yang harus dilakukan. Dalam suatu dokumen perencanaan, rumusan misi menjadi penting untuk memberikan kerangka bagi tujuan dan sasaran serta arah kebijakan yang ingin dicapai dan menentukan jalan yang akan ditempuh untuk mencapai visi.

Upaya mewujudkan visi pembangunan jangka panjang Kota Dumai akan dicapai melalui misi pembangunan daerah sebagai berikut :

1. Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri;
2. Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu;
3. Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang;
4. Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik;
5. Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Makna dari misi tersebut di atas adalah:

1. Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri

Misi ini akan ditempuh dengan mendorong terciptanya Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri yang produktif melalui penciptaan iklim investasi yang kondusif dan peluang usaha yang lebih besar dengan prinsip cooperative (persaingan menggapai tujuan dengan kebersamaan), perluasan lapangan kerja dan peningkatan ketersediaan tenaga profesional. Kemudian, secara eksternal penguatan simpul dan peningkatan produktivitas dan daya saing akan dipacu dengan menjalin hubungan kerjasama antar wilayah dalam rangka percepatan pembangunan ekonomi lokal dan regional.

Koperasi, usaha kecil dan menengah diarahkan untuk meningkatkan peranannya dalam berbagai kegiatan ekonomi rakyat sehingga dapat menjadi roda penggerak ekonomi yang efisien dan berdaya saing tinggi. Pengembangan usaha skala kecil dan menengah yang berbasis lokal diharapkan menjadi tulang punggung daerah, baik dalam menjaga pertumbuhan ekonomi, penyediaan lapangan kerja maupun peningkatan pemerataan pendapatan masyarakat.

2. Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu
Misi ini ditempuh melalui upaya perwujudan sumberdaya manusia yang memiliki kualitas iman dan taqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, sehat, menguasai ilmu pengetahuan dan teknologi, dan profesional sesuai dengan tuntutan dan dinamika perkembangan global. Hal ini mencakup pematapan aspek pendidikan umum, kesehatan, kesejahteraan sosial, pemberdayaan perempuan, dan pendidikan keagamaan.

Misi kedua ini mengandung makna bahwa peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi sektor prioritas yang akan dilakukan Pemerintah Kota Dumai untuk mewujudkan masyarakat yang memiliki pengetahuan dan keterampilan khusus maupun agama, serta penguasaan teknologi yang dihasilkan melalui pendidikan kejuruan dan politeknik serta melalui Balai Latihan Kerja (BLK) guna mengisi peluang kerja. Disisi lain pemerintah juga mempersiapkan kader pemimpin masyarakat/birokrat dan guru-guru yang tangguh dan berilmu melalui pengiriman putra-putra terbaik untuk menambah ilmu pengetahuan dibidang umum/kejuruan maupun agama ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi lagi baik di dalam maupun luar negeri dalam rangka mempersiapkan diri pulang ke kampung untuk membangun negeri sendiri.

Budaya Melayu juga menjadi ruh bagi perilaku masyarakat dan pemerintahan dalam karsa dan karya pembangunan di Kota Dumai. Sebagai sebuah payung kebudayaan daerah, yakni kelangsungan budaya Melayu secara komunitas dalam kerangka pemberdayaannya sebagai alat pemersatu dari berbagai etnis yang ada. Kota Dumai merupakan salah satu gerbang masuk dan keluarnya wisatawan yang berdampak masuknya budaya asing di tanah Melayu ini, sehingga hal ini dapat diantisipasi dengan mengembangkan tatanan budaya Melayu melalui lembaga seni dan

sanggar-sanggar sehingga budaya Melayu tetap eksis, dan tetap menghargai serta menjunjung keragaman budaya suku-suku daerah lainnya.

3. Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang

Misi ini mengandung makna bahwa kondisi infrastruktur yang baik merupakan faktor pendukung yang sangat penting bagi Kota Dumai dalam rangka menciptakan ketertiban dan keamanan yang menjamin kelancaran mobilitas orang maupun barang khususnya bagi mengundang investor untuk berinvestasi di Kota Dumai sehingga dapat mendorong pertumbuhan perekonomian daerah khususnya bagi masyarakat guna mendukung perkembangan dan kesuksesan pembangunan sektor pelabuhan dan industri.

Infrastruktur yang perlu ditingkatkan meliputi: penyediaan air bersih; penyediaan sumber pembangkit listrik; perluasan jaringan telekomunikasi; penambahan dan peningkatan kualitas jalan/jembatan; serta fasilitas umum perkotaan lainnya. Kondisi lainnya yang harus menjadi perhatian khusus adalah upaya meminimalisir kejadian bencana banjir dan kebakaran lahan/hutan.

Peningkatan sarana dan prasarana dasar perkotaan adalah untuk memenuhi kebutuhan pelayanan bagi masyarakat dan secara khusus mengembangkan identitas diri Kota Dumai dengan dukungan kawasan pelabuhan dan infrastruktur yang memadai guna menjamin kelancaran perdagangan lokal, regional, nasional, dan internasional. Disamping itu misi ini juga ditempuh melalui peningkatan ketersediaan dan kualitas public space yang lebih nyaman dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat. Misi ini diharapkan dapat meningkatkan citra kota dari aspek liveability (menjadi tempat tinggal yang nyaman), investability (konduif sehingga atraktif bagi kalangan pelaku bisnis), dan visitability (kota yang selalu dikunjungi karena kesan dan daya jangkauannya).

4. Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik

Misi ini ditempuh dengan mengedepankan aspek kualitas dan profesionalitas. Pelayanan publik yang sekarang ada akan diperbaiki secara sistematis dengan meningkatkan kapasitas aparatur pemerintah (peningkatan profesionalitas) serta mengembangkan sistem pelayanan publik yang efektif, transparan, terbuka, akuntabel, partisipatif, fleksibel dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

5. Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau.

Misi kelima ini mengandung makna bahwa kondisi lingkungan Dumai sangat mempengaruhi peran Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri. Lingkungan yang hijau ini ditandai dengan:

- a. Terwujudnya pengelolaan sumberdaya air secara terpadu, efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan untuk menciptakan sinergi dan menjamin keberlanjutan daya dukung.
- b. Terwujudnya pengelolaan SDA dan lingkungan hidup secara seimbang untuk menjamin keberlanjutan pembangunan sebagai pendukung kualitas kehidupan.
- c. Terwujudnya pemanfaatan ruang yang serasi antara kegiatan ekonomi, permukiman dan upaya konservasi dengan berbasis pada pemanfaatan sumberdaya air dan lahan secara efisien dan lestari.
- d. Meningkatnya kesadaran untuk mencintai lingkungan hidup.
- e. Meningkatnya pengelolaan kawasan rawan bencana.

bab 5

SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN
PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

5.1. KONSEP MAKRO PEMBANGUNAN KOTA TERSINERGI

Arah pembangunan daerah Kota Dumai dalam mencapai tujuan pembangunan jangka panjang daerah diwujudkan dalam strategi yang diperlukan untuk mencapai visi Kota Dumai di tahun 2025. Sebagaimana diungkapkan dalam skenario pembangunan jangka panjang Kota Dumai yang menyatakan ingin menuju dan mencapai:

TERWUJUDNYA DUMAI SEBAGAI KOTA PELABUHAN DAN INDUSTRI YANG KOKOH, DENGAN MASYARAKAT YANG BERTUMPU PADA BUDAYA MELAYU, MENUJU DUMAI MADANI YANG HIJAU

Secara dinamika kehidupan wilayah Kota Dumai sudah giat berfungsi secara aktif baik masyarakat maupun kelembagaan untuk menjalankan mekanisme produksi kewilayahan dan mekanisme simpul koleksi distribusi barang dan jasa yang dilakukan oleh warga masyarakat Kota Dumai. Untuk itu diperlukan 6 langkah strategis aktivitas wilayah tersinergi.

Enam langkah strategi sinergitas tersebut dapat diungkapkan sebagai berikut:

- (1) Pengaktifan komponen kehidupan wilayah sebagai pelabuhan dan industri
Strategi ini menuntut dukungan semua pemangku kepentingan pembangunan untuk bisa menggerakkan roda kehidupan sehari-hari setiap pelaku dalam skala kecil-sedang-besar yang hendaknya membentuk jaringan kerja hulu-hilir dan lintas pelaku, lintas wilayah dan lintas kegiatan produksi-olah-pemasaran sehingga kegiatan wilayah menjadi tergerak-sinergis-sistematis, yang menarik kegiatan ekonomi lokal menjangkau ke arah kegiatan ekonomi global.
- (2) Kerjasama sungguh-sungguh lintas wilayah (Kabupaten/Kota) di tingkat regional
Untuk menggerakkan langkah butir pertama di atas akan dipersyaratkan adanya upaya kerjasama yang nyata dan sungguh-sungguh dengan beberapa Kabupaten/Kota di sekitarnya, dalam rangka menjalani proses produksi yang berkesinambungan, baik oleh produksi hulu-hilir komoditas potensial/ unggulan, hubungan jalinan kerja olah lanjut dan pemasaran/penyebaran inovasi pasca produksi sampai ke arah terbentuknya kelembagaan formal lintas Kabupaten/Kota dengan dukungan

perangkat dan SDM memadai disamping aturan legal formal. Hal ini dalam upaya membinakembangkan kegiatan agrobisnis/agroindustri yang bertumpu pada kondisi lokalitas.

- (3) Perlu dukungan hinterland dengan upaya menjalin korporasi agrobisnis/ agroindustri
Dengan konsep corporate farming dan corporate bussiness yang perlu dioperasionalkan dalam rangka mewujudkan jalinan kerjasama produksi-olah-pemasaran dengan Kabupaten/Kota hinterlandnya. Kemudian Kota Dumai perlu menggalakkan masyarakatnya (yang mungkin-yang bisa) untuk membinakembangkan upaya agribisnis-agroindustri di masyarakat wilayah hinterland tersebut. Selanjutnya mengupayakan gerak sinergitas antara hinterland Kota Dumai yang saling mendukung dalam proses koleksi-distribusi-produksi wilayah dalam mata rantai gerak industri perdagangan regional.
- (4) Mengoperasionalkan kerjasama bisnis huluhilir-simpul-pasar
Kegiatan korporasi usaha bisnis lintas pelaku-lintas wilayah-lintas sektor ini perlu secara nyata dan sungguh-sungguh perlu disinergiskan dengan upaya produksi-olah-pasar dan jalur distribusi-koleksi-distribusi-jasa perdagangan yang bersimpul diri di Kota Dumai. Dengan demikian jalinan mata rantai kehidupan wilayah antara Kota Dumai sebagai simpul regional dengan titik-titik kegiatan koleksi distribusi di tingkat bawahnya yang ada di wilayah hinterland dapat sungguh-sungguh menciptakan jejaring produksi lintas wilayah regional.
- (5) Menciptakan implikasi gerak bagi masyarakat dan Kota Dumai secara internal menjadi dinamika kehidupan nyata
Masyarakat dan Kota Dumai sebagai subyek dan obyek pembangunan secara integral harus merupakan pusat kepedulian pembangunan wilayah – yang menjadikan mereka sebagai pelaku aktif di kawasannya sendiri. Budaya lokal Dumai menjadi nuansa citra kehidupan wilayah disamping pola-pola perilaku hidup wilayah keseluruhan warga Dumai perlu dibina agar SDM pelaku (masyarakat) dan kelembagaan wilayah menjadi kondusif melaksanakan program kegiatan masing-masing dan yang untuk kepentingan pembentukan fungsi simpul jasa distribusi-koleksi tingkat regional.
- (6) Mewujudkan Visi dan Misi Kota Dumai tahun 2025
Dengan 5 langkah sebelumnya Kota Dumai diharapkan dapat menjalankan beberapa fungsi: jaringan kerja pemasaran (corporate market networking) di tingkat regional, corporate agribusiness dengan wilayah-wilayah hinterland lalu memantapkan diri menjadi simpul koleksi distribusi industri pengolahan dan jasa perdagangan disamping corporate exporting dengan jaringan kerja ekspor impor dengan pasar dalam negeri dan luar negeri. Harapannya secara konseptual normatif Kota Dumai akan memenuhi visi dan misi wilayah sebagaimana telah diungkapkan terdahulu.

5.2. SASARAN POKOK DAN ARAH KEBIJAKAN PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Sasaran pembangunan jangka panjang pada dasarnya adalah pencapaian akhir dari visi dan misi pada akhir periode ke-20 (dua puluh). Sasaran 20 (duapuluh) tahunan dalam misi pembangunan jangka panjang daerah dapat diterjemahkan prioritasnya masing-masing pada setiap tahapan pembangunan lima tahunan melalui penetapan sasaran pokok 5 (lima) tahunan. Sasaran pokok merupakan instrumen pengukuran kinerja untuk memahami dengan baik bagaimana tema atau arah kebijakan pembangunan daerah dapat dipahami target kinerjanya. Sasaran pokok dikelompokkan berdasarkan tahapan-tahapan pembangunan jangka panjang dalam empat periode pembangunan Kota Dumai 2005-2025, yang selanjutnya harus menjadi acuan dalam penyusunan visi, misi dan program calon kepala daerah serta pedoman dalam penyusunan RPJMD periode berkenaan.

Perumusan sasaran pokok 5 (lima) berdasarkan arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan pembangunan pada dasarnya merupakan arahan fokus kebijakan lima tahunan yang memberi panduan kapan suatu indikator kinerja sasaran harus dicapai. Pencapaian sasaran pokok dilakukan secara bertahap dalam empat periode lima tahunan pembangunan sesuai arah kebijakan pembangunan. Arah kebijakan adalah instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada pemerintah daerah agar lebih terarah dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang daerah merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan selama 20 (dua puluh) tahun guna mencapai sasaran pokok RPJPD bertahap. Arah kebijakan pembangunan jangka panjang Kota Dumai 2005-2025 disusun dalam tahapan pembangunan yang mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan berkaitan dengan pengaturan waktu. Berikut ini adalah sasaran pokok dan arah kebijakan RPJPD Kota Dumai 2005-2025.

Tabel 5.1.
Sasaran Pokok dan Arah Kebijakan Pembangunan
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005 -2025

Visi: Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri	Berkembangnya Kawasan Industri	Adanya KEK	Belum ada KEK	Adanya KEK Dumai yang sudah berjalan secara efektif	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem pengelolaan Kawasan Industri yang andal. 2. Mengoptimalkan pemanfaatan ruang Kawasan Industri. 3. Menjadikan kawasan industri secara terpadu sebagai Kawasan Ekonomi Khusus (KEK)
	Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh	Pertumbuhan ekonomi	Pertumbuhan ekonomi sebesar 8,6% (tahun 2010)	Pertumbuhan ekonomi sebesar 9%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri yang berdaya saing 2. Mengembangkan perdagangan 3. Mengembangkan kegiatan jasa dan jasa kepelabuhanan 4. Mengembangkan koperasi dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang tangguh dan berdaya saing sebagai pilar ekonomi kerakyatan 5. Mengembangkan pertanian untuk kegiatan IKM dan ketahanan pangan kota
	Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah	Pertumbuhan nilai investasi di seluruh sektor	Pertumbuhan investasi seluruhnya (rata-rata 5 tahun terakhir) = 1,99%	Pertumbuhan investasi meningkat berdasarkan data dr BPTPM : perkiraan nilai investasi th 2025 13.808.599.000.000	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebijakan yang mendorong investasi untuk pertumbuhan perekonomian daerah. 2. Meningkatkan kerjasama pemerintah, swasta, serta masyarakat umum dalam investasi dan pengembangan perekonomian daerah.
	Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas	Jumlah tenaga kerja yang terserap	TPAK = 65% (kondisi tahun 2012)	Peningkatan TPAK = 75%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kebijakan yang mendorong penyerapan tenaga kerja setempat dalam perkembangan ekonomi. 2. Meningkatkan kualitas SDM setempat yang memenuhi kualifikasi pasar

Visi: Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	<ul style="list-style-type: none"> - Siswa dan guru berprestasi - Rasio Ketersediaan Sekolah/Penduduk Usia Sekolah - Rasio murid/guru 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih sedikitnya sekolah, siswa, dan guru yang berkualitas - Masih terjadinya konsentrasi fasilitas pendidikan dan masih rendahnya kemampuan masyarakat untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi 	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya jumlah sekolah, siswa, dan guru yang berkualitas dan berdaya saing tinggi (berprestasi) - Meningkatnya fasilitas pendidikan yang dapat dijangkau oleh masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dan pihak lainnya dalam upaya peningkatan kualitas pendidikan dan pelatihan 3. Meningkatkan pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan dan pelatihan
	Terwujudnya masyarakat Dumai Sehat	<ul style="list-style-type: none"> - Derajat kesehatan masyarakat Dumai - Pelayanan kesehatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Masih kurangnya pemahaman masyarakat terhadap PHBS (perilaku hidup bersih dan sehat) - Masih rendahnya kualitas pelayanan kesehatan yang sesuai dengan Standar Pelayanan Minimum (SPM) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya kualitas kesehatan masyarakat Dumai yang semakin baik - Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan kepada masyarakat 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk berperilaku hidup bersih dan sehat di lingkungan keluarga dan masyarakat. 2. Meningkatkan kepedulian, kebersamaan dan kemitraan dalam menanggulangi masalah kesehatan 3. Meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan 4. Mengembangkan manajemen dan regulasi bidang kesehatan 5. Meningkatkan kualitas dan kuantitas SDM di bidang kesehatan guna mendukung pelayanan kesehatan 6. Meningkatkan akses pelayanan kesehatan yang berkualitas 7. Mengembangkan penerapan dan pembiayaan kesehatan dengan sistem jaminan pemeliharaan kesehatan masyarakat 8. Meningkatkan peran swasta dalam upaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan 9. Pelaksanaan pelayanan kesehatan berkualitas dan berwawasan gender
	Terwujudnya jati diri masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur	Masyarakat yang berbudi pekerti luhur	<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya toleransi antar masyarakat - Berkurangnya angka kriminalitas (sebesar 0,15%) 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya masyarakat Dumai yang berkarakter - Minimalnya konflik dan angka kriminalitas di Kota Dumai 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan fungsi dan peran agama sebagai landasan moral dan etika yang berbudi pekerti luhur 2. Meningkatkan kerukunan hidup antar umat beragama
	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu	Cerminan nilai dan budaya Melayu dalam setiap kegiatan	Performansi seni budaya Melayu telah melekat pada kehidupan masyarakat	Nilai budaya Melayu yang tinggi sudah menjadi bagian dari hidup masyarakat Dumai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menginternalisasikan filosofi Budaya Melayu menjadi roh pembangunan masyarakat. 2. Meningkatkan cipta, rasa, dan karsa budaya Melayu

Visi: Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	Jalan kondisi baik	Persentase jalan kondisi baik 53%	Persentase jalan kondisi baik 80%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sarana prasarana infrastruktur transportasi darat, laut dan udara 2. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi darat, laut dan udara 3. Meningkatkan dan mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan sarana prasarana transportasi darat, laut dan udara 4. Memantapkan kebijakan terpadu pengembangan jaringan transportasi darat, udara dan laut
	Terpenuhinya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	Ketersediaan sumber air baku	Sumber air baku berasal dari Sungai Masjid	Meningkatnya pemenuhan kebutuhan air bersih dengan adanya sumber air baku lain selain dari Sungai Masjid	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama antar wilayah dalam penyediaan sumber air bersih 2. Meningkatkan dan mendorong kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan dan distribusi air bersih secara merata seluruh wilayah
	Terpenuhinya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	Ketersediaan sumber energi dan listrik	Persentase rumah tangga pengguna listrik 66%	Persentase rumah tangga pengguna listrik 100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan pasokan sumber energi listrik 2. Meningkatkan cakupan pelayanan energi dan ketenagalistrikan yang dapat menjangkau seluruh wilayah 3. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam pengembangan infrastruktur energi dan ketenagalistrikan
	Terwujudnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	Ketersediaan infrastruktur telekomunikasi	Belum meratanya jangkauan jaringan pelayanan telekomunikasi	Semua wilayah terlayani jaringan telekomunikasi (100%)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pembangunan jaringan telekomunikasi dan informatika yang menjangkau seluruh wilayah 2. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan fasilitas IT (Information Technology)
	Terwujudnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	Ketersediaan sarana dan prasarana dasar permukiman	Sebagian belum memiliki sarana prasarana dasar permukiman secara memadai	Seluruh permukiman memiliki sarana prasarana dasar permukiman dengan lengkap	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan penataan kawasan permukiman untuk menciptakan kualitas lingkungan yang bersih, tertib dan sehat 2. Meningkatkan akses masyarakat terhadap sarana dan prasarana dasar permukiman (air bersih, persampahan, sanitasi) 3. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan fasilitas perumahan

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	Ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi	Belum terpenuhinya jumlah fasilitas sosial dan ekonomi yang sesuai dengan standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (Departemen Pekerjaan Umum)	Meningkatnya jumlah fasilitas sosial dan ekonomi yang sesuai dengan standar Pedoman Perencanaan Lingkungan Permukiman Kota (Departemen Pekerjaan Umum)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang menjangkau permukiman penduduk 2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan 3. Mengembangkan kerjasama antara pemerintah dan swasta (Public Private Partnership/PPP) dalam penyediaan fasilitas sosial dan ekonomi

Visi: Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	Profesionalisme: - Keahlian - Kemandirian - Kewenangan - Integritas - Moralitas	Masih rendahnya penyelenggaraan cara kerja apartur pemerintah (baru sebagian syarat profesionalisme dipenuhi)	Terciptanya akuntabilitas (memenuhi 5 syarat: keahlian, kemandirian, kewenangan, integritas, dan moralitas) aparatur pemerintah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sumberdaya aparatur pemerintah daerah 2. Meningkatkan kualitas kinerja pemerintah daerah 3. Meningkatkan sistem dan budaya kerja yang berorientasi pada good governance dan clean government
	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Tercapainya kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum optimalnya pelayanan publik 2. Belum berkembangnya sistem informasi manajemen daerah 	Tersedianya pelayanan publik yang prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan sistem informasi manajemen dan pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi. 2. Meningkatkan kualitas penyelenggaraan administrasi pemerintahan

Visi: Terwujudnya Dumai sebagai Kota Pelabuhan dan Industri yang Kokoh, dengan Masyarakat yang Bertumpu pada Budaya Melayu, menuju Dumai Madani yang Hijau

Misi	Sasaran Pokok	Indikator Kinerja Daerah	Target Capaian Sasaran Pokok		Arah Kebijakan Pembangunan
			Kondisi Awal	Kondisi Akhir	
Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari	<ul style="list-style-type: none"> - Proses rehabilitasi dan konservasi SDA, Status Lingkungan Hidup - Tingkat keswadayaan dalam menjaga lingkungan hidup yang lestari 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum optimalnya pengelolaan lingkungan hidup - Masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Terwujudnya pemanfaatan dan pengelolaan SDA yang berwawasan lingkungan dan berkelanjutan - Meningkatnya peran masyarakat dalam pelestarian lingkungan hidup 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ruang secara bijaksana 2. Memanfaatkan sumberdaya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari 4. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 5. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan
	Meningkatnya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan	Jumlah perangkat pengelolaan/ kelembagaan lingkungan hidup yang memadai	Belum optimalnya kelembagaan dan sistem penegakan hukum terkait pengelolaan lingkungan hidup dan berkelanjutan	Menguatnya sistem penegakan hukum terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup dan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan. 2. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan 3. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan 5. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pembinaan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan aturan RTRW	Masih banyak terjadi penyimpangan pemanfaatan ruang	Pemanfaatan ruang yang sesuai dengan RTRW	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Mengembangkan pranata pembangunan yang lebih rinci 3. Meningkatkan perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk mengelola lingkungan pembangunan berkelanjutan 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup

5.3. TAHAPAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN JANGKA PANJANG

Tahapan pembangunan jangka panjang merupakan penjabaran dari misi dan sasaran pembangunan. Tahapan ini menunjukkan langkah-langkah per lima tahunan yang hendak dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Dumai. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan merupakan cerminan dari tingkat urgensi penyelesaian masalah yang berkaitan dengan pengaturan waktu dan pengadaaan dana. Penekanan prioritas dalam setiap tahapan berbeda-beda, namun tetap harus berkesinambungan dari satu periode ke periode berikutnya dalam rangka mencapai sasaran pokok dan perwujudan visi pembangunan jangka panjang daerah. Pentahapan pelaksanaan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Dumai untuk jangka waktu 20 tahun, terbagi dalam 4 (empat) tahapan atau periode dan tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Dumai dengan waktu pelaksanaan untuk setiap periode atau tahapan RPJMD selama lima tahun yaitu RPJMD pertama (tahun 2005-2010); RPJMD kedua (tahun 2011-2015); RPJMD ketiga (tahun 2016-2020) dan RPJMD keempat (tahun 2021-2025).

Berdasarkan arah kebijakan pembangunan sebagaimana telah disebutkan di atas, maka dalam pembangunan jangka panjang diperlukan tahapan dan skala prioritas yang akan menjadi agenda dalam rencana pembangunan jangka menengah. Tahapan dan skala prioritas yang ditetapkan mencerminkan urgensi permasalahan yang hendak diselesaikan tanpa mengabaikan permasalahan yang lain. Dalam rangka mewujudkan sasaran pembangunan jangka panjang Kota Dumai maka skala prioritas masing-masing tahapan pembangunan jangka menengah akan memiliki tekanan yang berbeda, akan tetapi skala prioritas tersebut harus tetap memiliki kesinambungan dari periode ke periode berikutnya. Tahapan pembangunan jangka menengah tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

Tabel 5.2.
Tahapan Kebijakan Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (2005-2010)	Penetapan zona kawasan industri	1. Meningkatkan posisi zona industri menjadi kawasan industri Dumai dengan sarana dan prasarana pendukung dalam pelayanan pada investor
	Terbangunnya kegiatan industri dan perdagangan	1. Mengembangkan industri rumah tangga, kecil dan menengah yang memiliki daya tahan dan andal terhadap gejolak ekonomi 2. Meningkatkan kemampuan usaha kecil dan menengah melalui perluasan lembaga-lembaga pendukung pengembangan usaha 3. Mengembangkan kewirausahaan serta mendorong partisipasi aktif dalam memanfaatkan kesempatan berusaha dalam rangka peningkatan aktifitas perdagangan dalam dan luar negeri 4. Mengembangkan komoditas pertanian masyarakat yang diarahkan untuk pengembangan agrobisnis
	Berkembangnya iklim investasi yang kondusif	1. Peningkatan kemampuan kelembagaan pelayanan investasi 2. Penyediaan Regulasi dan sarana/prasarana pelayanan perizinan investasi
	Penyiapan tenaga kerja untuk pembangunan	1. Mengembangkan dan mewujudkan tenaga kerja sebagai landasan pembangunan (Human Resources Based)
Tahapan lima tahun ke-2 (2011-2015)	Penataan kawasan industri	1. Mengembangkan kawasan industri 2. Penataan kawasan industri hilir hasil pertanian
	Meningkatnya kegiatan industri, perdagangan, dan jasa yang berdaya saing	1. Mengembangkan dan memperkuat struktur industri 2. Menciptakan daya saing produk industri 3. Mengembangkan sistem ketahanan pangan daerah 4. Meningkatkan sumber daya pelaku kegiatan ekonomi 5. Pegelolaan teknologi pertanian tepat guna yang diarahkan untuk pengembangan agrobisnis 6. Meningkatkan /memperluas pasar ekspor 7. Memperkuat kelembagaan koperasi dan lembaga keuangan sebagai pendukung dunia usaha
	Berkembangnya iklim investasi yang kondusif	1. Penyediaan Regulasi dan sarana/prasarana pelayanan perizinan investasi 2. Peningkatan nilai investasi PMA/PMDN
	Pengembangan sistem ketenagakerjaan	1. Tercapainya Standar Pelayanan Pelatihan Kerja 2. Peningkatan kualitas informasi ketenagakerjaan

Misi 1: Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Pengelolaan kawasan industri dan penyiapan perwujudan KEK	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan terlaksananya kerjasama dalam pengembangan kawasan industri 2. Meningkatkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus
	Semakin berkembangnya kegiatan industri, perdagangan, dan jasa	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah yang ramah lingkungan 2. Mengembangkan kemitraan antara usaha kecil menengah dengan usaha besar 3. Mengembangkan agrobisnis 4. Mengembangkan kegiatan jasa kepelabuhanan 5. Mengembangkan kegiatan perdagangan yang melayani pasar lokal dan regional 6. Mengembangkan kerjasama dunia usaha dengan koperasi dan lembaga keuangan
	Meningkatnya investasi dari investor dalam maupun luar negeri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kualitas pelayanan perizinan 2. Meningkatkan promosi dan kerjasama lintas regional 3. Mendorong terciptanya hubungan yang baik antara pemerintah dan masyarakat terhadap investor
	Meningkatnya tenaga kerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengintegrasikan hubungan harmonis antara sektor tenaga kerja, sektor penyedia lapangan kerja dan pemerintah 2. Meningkatkan kualitas tenaga kerja yang mampu bersaing di era global
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	Berkembangnya Kawasan Industri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memantapkan kawasan industri menjadi kawasan ekonomi khusus 2. Memantapkan kelembagaan yang diikuti dengan meningkatnya daya saing produk-produk unggulan
	Terwujudnya sektor industri dan perdagangan, serta jasa yang kokoh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan promosi dan pemasaran hasil-hasil industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah pada tingkat nasional dan internasional 2. Memperkuat daya saing produk industri dan usaha mikro, kecil, dan menengah 3. Mengoptimalkan kegiatan jasa kepelabuhanan 4. Pemantapan pembangunan pertanian yang bertumpu pada sistem agrobisnis guna menjamin ketahanan serta peningkatan nilai tambah produk 5. Memperkuat koperasi dan lembaga keuangan sebagai mitra dunia usaha
	Terwujudnya investasi yang mendorong berkembangnya perekonomian daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan kelembagaan yang tanggap dan tangguh untuk kemajuan investasi Dumai 2. Peningkatan kualitas pelayanan investasi 3. Terpeliharanya kondisi pembangunan yang kondusif di Kota Dumai yang mampu bersaing dengan wilayah lainnya
	Terciptanya kesempatan kerja yang didukung oleh tenaga kerja yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan penyaluran tenaga kerja pada pasar lapangan kerja industrial yang memadai 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program yang mengembangkan investasi dan kegiatan industri di daerah yang menyerap tenaga kerja lokal

Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (2005-2010)	Meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang	Meningkatkan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang pendidikan
	Meningkatnya pola hidup sehat masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kesadaran dan kemauan masyarakat untuk berperilaku hidup sehat 2. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran obat-obatan terlarang 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengawasan peredaran obat-obatan terlarang
	Terlaksananya kerukunan antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbangunnya toleransi antar umat beragama 2. Terbentuknya fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama
	Pengembangan dan pelestarian nilai-nilai Budaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan budaya Melayu sebagai acuan nilai luhur dan seni budaya masyarakat Dumai 2. Mengenalkan seni budaya Melayu semenjak tingkat sekolah dasar
Tahapan lima tahun ke-2 (2011-2015)	Terlaksananya pendidikan dan pelatihan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kualitas pendidikan dan pelatihan 2. Meningkatkan sistem proses belajar mengajar dan penilaian yang berkualitas bagi sekolah, guru, dan siswa 3. Meningkatkan peran orang tua, masyarakat dan lembaga pendidikan dalam proses belajar mengajar 4. Meningkatkan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua jenjang 5. Meningkatkan partisipasi pendidikan pras sekolah, pendidikan dasar dan pendidikan menengah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kesehatan untuk mewujudkan lingkungan dan masyarakat sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sarana dan pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh wilayah 2. Menyediakan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 3. Meningkatkan kualitas dan pendayagunaan tenaga kesehatan 4. Meningkatkan kualitas pelayanan pada setiap strata pelayanan dan fasilitas kesehatan dasar 5. Meningkatkan aksesibilitas dan layanan kesehatan bagi masyarakat 6. Meningkatkan pelaksanaan Standar Pelayanan Minimum (SPM) sebagai acuan kerja peningkatan pelayanan kesehatan 7. Mengembangkan regulasi tentang fasilitas dan pelayanan kesehatan yang berkualitas 8. Melaksanakan pelayanan kesehatan berkualitas dan berwawasan gender
	Meningkatnya kerukunan antar umat beragama	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sikap toleransi antar umat beragama 2. Meningkatkan fungsi dan peran forum kerukunan umat beragama
	Meningkatnya promosi, inovasi dan kreativitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan pusat kegiatan pengembangan budaya Melayu Kota Dumai

Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	pengembangan seni dan budaya yang berkarakter Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 2. Mengembangkan kegiatan seni budaya dan olahraga yang berkarakter Melayu 3. Meningkatkan pembinaan seni budaya Melayu semenjak tingkat sekolah dasar
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya mutu dan kreatifitas masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merevitalisasi kebijakan pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 2. Mengembangkan pendidikan kewirausahaan bagi masyarakat 3. Meningkatkan relevansi pendidikan dengan kebutuhan pasar kerja 4. Meningkatkan kompetensi tenaga pendidik dan tenaga kependidikan 5. Mewujudkan kemudahan akses, pemerataan dan perluasan kesempatan memperoleh pendidikan berkualitas dan terjangkau di semua jenjang
	Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan profesionalitas tenaga pelayanan kesehatan untuk dapat bersaing dengan tenaga asing 2. Meningkatkan kuantitas dan kualitas ibu hamil dan bayi lahir sehat 3. Meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengakses pelayanan fasilitas kesehatan 4. Meningkatkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 5. Mengoptimalkan perilaku hidup sehat di berbagai lapisan masyarakat 6. Mengembangkan kebijakan dan pelaksana pembangunan berwawasan kesehatan 7. Meningkatkan efisiensi dan efektivitas pencapaian tujuan pembangunan kesehatan 8. Terciptanya kualitas hidup perempuan dan anak
	Berkembangnya karakter masyarakat yang mandiri dan berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan peran masyarakat dan lembaga keagamaan dalam melaksanakan pendidikan keagamaan sebagai dasar pembentukan karakter bangsa yang luhur 2. Merevitalisasi kebijakan pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung pembentukan perilaku yang berbudi pekerti luhur
	Pengelolaan kerjasama yang mendorong berkembangnya nilai dan budaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerjasama ASEAN dan "SIJORI" (Singapura-Johor-Riau) untuk bidang kebudayaan Melayu 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait seni budaya Melayu 3. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program- program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu

Misi 2: Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjati diri Melayu		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	Terwujudnya pendidikan yang berkualitas	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperluas akses, pemerataan dan kesempatan memperoleh pendidikan yang berkualitas dan terjangkau di semua jenjang 2. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pendidikan yang bertumpu pada potensi dan daya saing daerah 3. Mewujudkan tenaga pendidik dan tenaga kependidikan yang berkompetensi sesuai potensi dan daya saing daerah 4. Mengoptimalkan pelaksanaan pendidikan masyarakat yang berkualitas 5. Mewujudkan masyarakat yang mampu dan dapat memanfaatkan akses pendidikan di semua jenjang
	Terwujudnya masyarakat Dumai Sehat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan pemberdayaan masyarakat dalam rangka penguatan kemandirian dalam penjagaan kesehatan dan pemeliharaan gizi keluarga dan pola hidup sehat 2. Meningkatkan sistem pelayanan kesehatan yang menjangkau seluruh lapisan masyarakat 3. Memantapkan fasilitas pendukung dan pelayanan tenaga medis 4. Terciptanya keluarga yang sehat dan sejahtera
	Terwujudnya jati diri masyarakat yang agamis dan berbudi pekerti luhur	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi, dan program-program pendidikan keagamaan dan karakter bangsa yang mendukung perilaku yang berbudi pekerti luhur 2. Meningkatkan etos kerja pembangunan daerah yang berlandaskan nilai agama
	Terwujudnya masyarakat yang berbudaya Melayu	<ol style="list-style-type: none"> 3. Menginternalisasikan filosofi Budaya Melayu menjadi roh pembangunan masyarakat. 4. Meningkatkan cipta, rasa, dan karsa budaya Melayu 5. Mengoptimalkan implementasi kebijakan, strategi dan program-program pengembangan dan aktualisasi seni budaya Melayu

Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (2005 – 2010)	Tersedianya sumber air baku untuk air bersih	1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
	Tersedianya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Tersedianya jaringan prasarana transportasi yang mendukung arus kelancaran lalu lintas jalan 2. Meningkatkan kondisi jaringan jalan dalam kondisi baik 3. Mengembangkan peran serta masyarakat dan investasi swasta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur transportasi
	Tersedianya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Meningkatkan pengelolaan utilitas umum ketenagalistrikan yang merata dan efisien
	Tersedianya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman melalui peran serta masyarakat 2. Tersedianya lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 4. Mewujudkan pembangunan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan
Tahapan lima tahun ke-2 (2011 – 2015)	Meningkatnya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Meningkatkan kondisi jalan dalam kondisi baik 2. Meningkatkan kualitas infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan peran serta masyarakat dan investor swasta untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas ketersediaan infrastruktur transportasi 4. Meningkatkan pelayanan angkutan udara dan penerbangan perintis
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Meningkatkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Meningkatkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Menyediakan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	1. Meningkatkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Meningkatkan lingkungan perumahan dan permukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 4. Meningkatkan pembangunan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan
	Terbangunnya infrastruktur telekomunikasi	1. Meningkatkan pembangunan infrastruktur bidang komunikasi dan informatika 2. Mengintensifkan jaringan telekomunikasi yang telah terbangun
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	1. Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai

Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016 – 2020)	Meningkatnya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	1. Meningkatkan penyediaan air baku melalui pengembangan dan pengelolaan sumber daya air
	Meningkatnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Mengembangkan kualitas dan kuantitas jalan 2. Mengembangkan dan menjaga kualitas infrastruktur transportasi 3. Meningkatkan pembangunan, pemeliharaan, dan perbaikan infrastruktur transportasi 4. Meningkatkan jalan akses lokal antara pusat-pusat
	Meningkatnya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Mengembangkan pemenuhan infrastruktur ketenagalistrikan 2. Mengembangkan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Meningkatkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Meningkatnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	1. Mengembangkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Meningkatkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas 3. Meningkatkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 4. Mengembangkan sarana prasarana penunjang untuk mewujudkan kebersihan lingkungan 5. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman
	Meningkatnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	1. Mengembangkan dan memanfaatkan jaringan telekomunikasi dan informatika sesuai dengan fungsi dan keunggulannya
	Meningkatnya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	1. Meningkatkan perluasan pelayanan pendidikan dan kesehatan melalui pembangunan sarana prasarana pendidikan dan kesehatan yang memadai
Tahapan lima tahun ke-4 (2021 – 2025)	Terwujudnya aksesibilitas dan mobilitas antar wilayah	1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Terpenuhinya ketersediaan sumber air baku untuk air bersih	1. Mengoptimalkan distribusi air bersih secara merata
	Terpenuhinya cakupan pelayanan dan kualitas infrastruktur energi dan ketenagalistrikan	1. Mengoptimalkan cakupan energi dan ketenagalistrikan di seluruh wilayah Kota Dumai 2. Mewujudkan ketersediaan energi dan mengembangkan sumber energi alternatif terbarukan 3. Mengoptimalkan sarana penerangan jalan umum (Saluran Kabel Udara Tegangan Menengah/SKUTM dan Saluran Kabel Udara Tegangan Rendah/SKUTR) pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN
	Terwujudnya dukungan pemanfaatan infrastruktur telekomunikasi	1. Mengoptimalkan jaringan transportasi guna mendukung pelayanan pergerakan orang, barang, dan jasa
	Terwujudnya pengelolaan kawasan perumahan dan permukiman	1. Mengoptimalkan kualitas sarana prasarana dasar perumahan dan permukiman 2. Mengoptimalkan cakupan pelayanan persampahan, air bersih, dan air limbah domestik 3. Mengoptimalkan lingkungan perumahan dan pemukiman yang berkualitas 4. Meningkatkan sistem jaringan drainase secara bertahap pada daerah rawan banjir dan mengurangi daerah genangan air pada kawasan permukiman

Misi 3: Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
	Terpenuhinya kualitas dan kuantitas fasilitas sosial dan ekonomi	1. Mengoptimalkan ketersediaan fasilitas sosial dan ekonomi yang menjangkau permukiman penduduk

Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik

Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (2005-2010)	Tersedianya sumberdaya aparatur menuju profesionalisme dan karir fungsional sesuai kompetensi dibidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan jiwa profesionalisme pada setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah 2. Menyediakan acuan kerja dan pedoman teknis dalam sistem kerja profesional untuk setiap jenis dan jenjang aparatur pemerintah daerah 3. Meningkatkan disiplin dan kesejahteraan pegawai dalam rangka mewujudkan pelayanan prima 4. Membentuk sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mendorong terbentuknya jabatan fungsional sesuai kompetensinya 6. Mewujudkan sistem karir berbasis kompetensi dan kinerja 7. Meningkatkan sistem administrasi pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel
	Terbangunnya akses pelayanan publik secara terpadu, cepat dan sederhana	<ol style="list-style-type: none"> 4. Menyelenggarakan PPTSP (Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu) secara online 5. Membangun UPTD terpadu (secara bertahap) 6. Memperbaiki sistem pelayanan publik kearah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastianwaktu dan biaya.
Tahapan lima tahun ke-2 (2011.-2015)	Terselenggaranya pengembangan sumberdaya aparatur yang professional dan berkompotensi dibidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyelenggarakan diklat penjenjangan yang berdasar pada syarat profesionalisme 2. Melaksanakan tata kerja aparatur pemerintah daerah yang berdasar pada syarat profesionalisme 3. Mengembangkan kapasitas SDM pemerintahan daerah dalam rangka penguatan daya saing daerah 4. Mengembangkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mengembangkan sistem tata laksana jabatan fungsional yang sesuai standar kompetensi 6. Meningkatkan kualitas pengawasan dan pengendalian tata pengelolaan kepegawaian secaraakomodatif, kompetitif dan transparan 7. Meningkatkan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai good governance dan clean government
	Terlaksananya pelayanan publik secara terpadu, cepat, sederhana dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem pelayanan publik ke arah sistem pelayanan yang lebih sederhana, transparan, dan lebih memiliki kepastian waktu dan biaya. 2. Mewujudkan pengembangan outlet-outlet pelayanan publik yang terjangkau seluruh lapisan masyarakat
Tahapan lima tahun ke-3 (2016.-2020)	Meningkatnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Melaksanakan upaya pengendalian pelaksanaan lima syarat profesionalisme 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait profesionalisme pegawai di kota Dumai 3. Meningkatkan kinerja pegawai melalui pembenahan sistem dan prosedur serta standarisasi kualitas pelayanan 4. Memantapkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 5. Mewujudkan penyempurnaan SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) pemerintahan daerah yang efektif dan efisien 6. Memantapkan pembinaan kompetensi, kinerja, serta kehandalan aparatur pemerintahan daerah secara bertahap dan berkelanjutan 7. Pemantapan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai good governance dan clean government
	Meningkatnya akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kuantitas dan kualitas sistem pelayanan publik 2. Memantapkan pelayanan publik yang prima.

	pelayanan prima	3. Menyalurkan aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik melalui forum formal
--	-----------------	--

Misi 4: Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	Terwujudnya sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mewujudkan tata laksana aparatur daerah yang penuh lima syarat profesionalisme 2. Memantapkan implementasi kebijakan, strategi dan program program recruitment, pembekalan, pendidikan, pelatihan dan pengembangan yang mendorong motivasi dan dedikasi pegawai di semua jenjang 3. Mewujudkan sistem organisasi dan tata kerja yang efektif dan efisien 4. Mewujudkan SDM aparatur pemerintahan daerah yang berkualitas 5. Mewujudkan kapasitas kepemimpinan dalam mencapai good governance dan clean government
	Terwujudnya pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan kondisi pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima 2. Melaksanakan akses masyarakat pada sistem informasi manajemen daerah 3. Mewujudkan saluran akses formal aspirasi kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik

Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-1 (2005-2010)	Terciptanya kota yang bersih, indah dan ramah lingkungan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan pengelolaan SDA dan lingkungan hidup yang seimbang 2. Meningkatkan dan menambah pedoman pelaksanaan penjagaan dan rehabilitasi lingkungan 3. Mengembangkan perilaku yang bijaksana untuk lingkungan Meningkatkan kualitas Sarana dan Prasarana Lingkungan pemukiman perkotaan
	Terciptanya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 2. Memperkuat sistem penegakan hukum dan pemerintahan terkait pengelolaan lingkungan hidup 3. Meningkatkan kualitas lingkungan sehat dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat serta mendorong pemberdayaan masyarakat 4. Memanfaatkan penggunaan teknologi ramah lingkungan
	Tersusunnya regulasi Penataan Ruang yang aman dan konsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sosialisasi RTRW kepada masyarakat 2. Menyediakan pedoman teknis pelaksanaan pembangunan yang sesuai RTRW 3. Menyediakan dokumen RTBL untuk IMB pembangunan Kota Dumai yang berkualitas
Tahapan lima tahun ke-2 (2011-2015)	Terlaksananya pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan prasarana dan sarana pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Melaksanakan pelatihan SDM untuk pengelolaan dan monitoring lingkungan hidup 3. Meningkatkan Pengawasan Pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup
	Terlaksananya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan bantuan CSR untuk pengelolaan dan penjagaan lingkungan 2. Mengembangkan sistem informasi lingkungan 3. Mengoptimalkan penggunaan teknologi ramah lingkungan 4. Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup 5. Mengoptimalkan daya dukung lingkungan serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan 6. Meningkatkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	Terlaksananya regulasi Penataan Ruang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penyusunan Kebijakan Pengendalian Pemanfaatan ruang (RDTRK), Regulasi perizinan pemanfaatan ruang 2. Menyediakan sarana penerangan jalan Umum SKUTM, SKUTR pada wilayah yang belum terjangkau jaringan PLN 3. Penyusunan dokumen UKL/UPL bagi kelengkapan perizinan 4. Meningkatkan penegakan hukum terhadap pelanggaran tata ruang untuk mengendalikan pembangunan kota 5. Mengembangkan sistem pengendalian pembangunan yang sesuai RTRW

Misi 5: Mewujudkan Dumai sebagai lingkungan yang hijau		
Tahapan	Sasaran Pokok	Arah Kebijakan Pembangunan
Tahapan lima tahun ke-3 (2016-2020)	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup yang bijaksana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan penelitian tentang pengelolaan dan pengawasan lingkungan hidup yang berkelanjutan 2. Meningkatkan pembangunan Kota Dumai yang memenuhi syarat lingkungan hidup berkelanjutan 3. Merevitalisasi kebijakan yang terkait dengan peningkatan kondisi lingkungan hidup di Dumai menuju lingkungan lestari
	Meningkatnya peran perangkat pengelolaan/kelembagaan dalam pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan peran pelaku usaha dan masyarakat dalam pencapaian pembangunan kota yang lestari 2. Merevitalisasi kebijakan yang terkait partisipasi masyarakat dalam peningkatan kondisi lingkungan hidup 3. Memperkuat kelembagaan pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan hidup, terutama pengelolaan sumber daya air di kawasan hutan lindung 4. Mengendalikan pencemaran dan kerusakan lingkungan dengan menerapkan teknologi ramah lingkungan 5. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam dan pelestarian lingkungan hidup
	Meningkatnya peraturan Penataan Ruang yang tegas dan konsisten	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan sistem peradilan lapangan untuk pembangunan yang sesuai RTRW 2. Meningkatkan ketaatan pemerintah, pelaku usaha dan masyarakat tentang aturan RTRW 3. Meningkatkan upaya pelaksanaan pengendalian yang tertib sesuai RTRW 4. Merevitalisasi kebijakan yang terkait sistem implementasi dan pengendalian tata ruang bagi birokrasi dan masyarakat pelaku tata ruang
Tahapan lima tahun ke-4 (2021-2025)	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup yang lestari (Pemanfaatan Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Memanfaatkan ruang secara bijaksana 2. Memanfaatkan sumberdaya alam dengan prinsip pembangunan berkelanjutan 3. Meningkatkan kesadaran masyarakat dan pelaku usaha untuk menjaga lingkungan yang lestari 4. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 5. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan
	Terwujudnya perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk menjaga lingkungan pembangunan berkelanjutan (Kelembagaan)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mengedepankan perilaku masyarakat yang berwawasan lingkungan dalam pengelolaan lingkungan. 2. Mengoptimalkan peran serta swasta dalam pengelolaan lingkungan 3. Mengembangkan pengendalian lingkungan yang efektif 4. Mengembangkan kelembagaan pengelolaan lingkungan dan pengendalian dampak kerusakan lingkungan 5. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pembinaan dan penyuluhan pengelolaan lingkungan hidup
	Terwujudnya tata ruang yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan (Tata Ruang)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menjaga konsistensi pola penataan ruang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah 2. Mengembangkan pranata pembangunan yang lebih rinci 3. Meningkatkan perangkat pengelolaan/kelembagaan daerah yang tangguh untuk mengelola lingkungan pembangunan berkelanjutan 4. Mengoptimalkan peran masyarakat dan LSM dalam pengelolaan lingkungan hidup

Tabel 5.3.
Tahapan Prioritas Pembangunan Jangka Panjang Kota Dumai 2005-2025

Misi	Prioritas Pembangunan			
	Tahap I	Tahap II	Tahap III	Tahap IV
	2005 - 2010	2010 - 2015	2015 - 2020	2020 - 2025
Mengembangkan perekonomian kota yang berdaya saing	Terbangunnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Meningkatnya perekonomian untuk mencapai peningkatan dan pemerataan kesejahteraan ekonomi masyarakat Kota Dumai agar memiliki kemandirian, kemampuan dan daya saing	Terwujudnya perekonomian daerah yang mandiri dan masyarakat yang sejahtera dengan menekankan pada terbangunnya perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang didukung oleh sumberdaya manusia yang berkualitas dan berdaya saing
Mewujudkan sumberdaya manusia yang berkualitas, agamis dan berjiwa Melayu	Terbangunnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Meningkatnya kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai	Mengoptimalkan kualitas dan produktivitas sumber daya manusia melalui upaya peningkatan pendidikan, kesehatan, dan peningkatan produktivitas masyarakat Kota Dumai
Mewujudkan infrastruktur wilayah yang berkualitas sesuai daya dukung dan fungsi ruang	Terlaksananya pembangunan di berbagai bidang yang penyediaan infrastruktur	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	Meningkatnya kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang	Mengoptimalkan kuantitas dan kualitas infrastruktur dalam rangka pemenuhan akses kebutuhan dasar masyarakat serta kebutuhan penunjang lain di berbagai bidang
Meningkatkan kapasitas dan profesionalitas aparatur pemerintah daerah dalam rangka mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	Mendorong pemerintahan yang memiliki sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompentensi sesuai keahlian dibidang masing-masing, serta mendorong pelayanan publik yang terpadu, cepat dan sederhana sehingga tercipta pemerintahan yang baik	Terselenggaranya pemerintahan yang mengembangkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompentensi dibidangnya, dan pelayanan publik yang secara terpadu, cepat, sederhana dan terjangkau seluruh lapisan masyarakat dalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik	Meningkatnya pemerintahan dalam mewujudkan sumberdaya aparatur yang profesional dan berkompentensi dibidangnya, dan akses pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan primadalam mewujudkan kinerja pemerintahan yang baik dalam mewujudkan pemerintahan daerah yang baik	Terwujudnya pemerintahan daerah yang baik melalui sumberdaya aparatur yang profesional dan memiliki kompetensi di bidangnya dan pelayanan publik yang sesuai dengan standar pelayanan prima
Mewujudkan lingkungan kota yang hijau	Terbangunnya pegelolaan kota yang sesuai dengan daya dukung lingkungan dan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pengelolaan kota yang ramah lingkungan, sesuai daya dukung lingkungan dan mengendalikan pembangunan kota yang sesuai dengan Rencana Tata Ruang Wilayah	Meningkatnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.	Terwujudnya pengelolaan lingkungan hidup berkelanjutan yang sesuai dengan RTRW, dengan mengoptimalkan peran stakeholder.

bab 6

KAIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kota Dumai Tahun 2005–2025 adalah dokumen perencanaan jangka panjang yang memuat visi, misi dan arah pembangunan pada sektor pembangunan prioritas dalam 20 (dua puluh) tahun ke depan. Di satu sisi, RPJPD Kota Dumai merupakan instrumen bagi keselarasan agenda pembangunan nasional dengan provinsi dan Kota Dumai itu sendiri. RPJPD Kota Dumai 2005–2025 merupakan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan untuk melaksanakan pembangunan yang mengacu pada RPJP Nasional dan RPJPD Provinsi Riau. Di sisi lain, RPJP Kota Dumai 2005-2025 digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan RTRW dan RPJMD Kota Dumai serta dokumen perencanaan lainnya dan penyelenggaraan pembangunan daerah di Kota Dumai pada umumnya bagi seluruh stakeholder terkait.

RPJPD Kota Dumai ini merupakan pedoman bagi pemerintah dan masyarakat di dalam penyelenggaraan pembangunan Dumai 20 tahun mendatang, menjadi acuan di dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dan Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD). Dokumen perencanaan tersebut juga menjadi pedoman bagi calon Walikota dan calon Wakil Walikota Dumai periode tahun 2015 sampai dengan 2025 dalam menyusun visi, misi dan program prioritas yang akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) lima tahunan dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam kaitannya tersebut, maka perlu ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan dalam mengawal implementasi RPJPD Kota Dumai 2005-2025 sebagai berikut:

- 1) Kepala daerah terpilih (Walikota Dumai) berkewajiban melaksanakan Peraturan Daerah tentang RPJPD ini dengan menjabarkannya dalam RPJMD sesuai tahapannya. Menyesuaikan dengan urusan dan kewenangan pemerintah kota, dalam penjabarannya pada semua dokumen perencanaan daerah. Oleh karena itu harus disosialisasikan secara luas kepada seluruh instansi pemerintah daerah dan segenap pemangku kepentingan (stakeholder), untuk dapat memahaminya secara mendalam dan dapat menjabarkannya sesuai kewenangan, tugas pokok dan fungsi masing-masing.
- 2) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Dumai dan seluruh jajaran Pemerintah Kota Dumai, masyarakat dan dunia usaha secara bersama-sama mendukung konsistensi implementasi RPJPD Kota Dumai tahun 2005-2025. Selain itu juga melaksanakan pengawasan

dan evaluasi terhadap konsistensi penjabaran dalam dokumen selanjutnya, terutama kaitannya dengan Tata Ruang Wilayah Kota Dumai.

- 3) Pemerintah Kota Dumai, masyarakat dan dunia usaha serta para pemangku kepentingan lainnya berkewajiban untuk mewujudkan visi dan misi pembangunan yang ditetapkan melalui pelaksanaan berbagai program dan kegiatan pembangunan dengan sebaik-baiknya.
- 4) Pemerintah Kota Dumai dalam menyusun RPJP Daerahnya mengacu pada RPJP Nasional dan RPJP Daerah Provinsi Riau, serta melakukan penyerasian dalam RPJMD dan menjadi acuan dalam proses perencanaan anggaran yang dituangkan dalam APBD.
- 5) RPJPD Kota Dumai 2005-2025 menjadi pedoman dalam menyusun RPJMD yang menjabarkan lebih lanjut visi, misi dan agenda kepala daerah serta berbagai strategi, kebijakan, program dan kegiatan secara terukur, terarah dan dapat dilaksanakan pada tahapan rencana pembangunan jangka menengah lima tahunan, termasuk secara kreatif dan inovatif mendesain program-program terobosan dan prioritas sebagai upaya percepatan mengejar ketertinggalan pembangunan di Kota Dumai.
- 6) Unit satuan kerja vertikal setingkat, maupun lembaga-lembaga lokal non pemerintah atau lembaga internasional pemerintah dan non pemerintah yang melakukan kegiatan di Kota Dumai, serta berbagai komponen masyarakat dalam berbagai bentuk partisipasinya berkewajiban berkoordinasi dengan pemerintah kota untuk menyeraskan dan menjamin konsistensi terhadap RPJPD Kota Dumai 2005-2025.

Keberhasilan pembangunan Kota Dumai dalam mewujudkan "Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri" perlu didukung oleh (1) komitmen dari kepemimpinan Dumai yang kuat dan demokratis; (2) ketersediaan pendanaan yang mendukung implementasi kebijakan (3) konsistensi kebijakan pemerintah; (4) keberpihakan kepada rakyat; dan (5) peran serta partisipasi masyarakat dan dunia usaha secara aktif.

Keberhasilan RPJP Kota Dumai 2005-2025 sangat tergantung pada komitmen, konsistensi dan partisipasi dari penyelenggaraan pemerintah Kota Dumai. Pengendalian dan evaluasi secara berkala harus dilakukan dan dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan, sehingga arah pembangunan dalam jangka panjang tetap dalam jalur sebagaimana telah ditentukan dalam arah kebijakan dan sasaran pokok yang sekurang-kurangnya harus dicapai tiap lima tahun.